

**IDEOLOGI PERLAWANAN DALAM BAHASA HUMOR POLITIK PADA
BUKU REPUBLIK BADUT KARYA DARMINTO M. SUDARMO**



**Oleh:
RIZQI AMELIYA
NIM 13706251067**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk medapatkan gelar Magister Pendidikan**

**PROGRAM STUDI LINGUISTIK TERAPAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

**IDEOLOGI PERLAWANAN DALAM BAHASA HUMOR POLITIK PADA
BUKU *REPUBLIK BADUT* KARYA DARMINTO M. SUDARMO**



**Oleh:
RIZQI AMELIYA
NIM 13706251067**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk medapatkan gelar Magister Pendidikan**

**PROGRAM STUDI LINGUISTIK TERAPAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

RIZQI AMELIYA: Ideologi Perlawanan dalam Bahasa Humor Politik pada Buku *Republik Badut* Karya Darminto M. Sudarmo. **Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1) konstruksi teks humor; (2) konstruksi wacana perlawanan; (3) ideologi yang tersembunyi dalam wacana humor politik pada buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Subjek penelitian ini adalah buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough, yakni: (1) metode analisis naskah, (2) *secondary data* tentang pembuatan naskah, (3) *secondary data* yang relevan dengan tema penelitian, dan (4) penelusuran literatur yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tiga dimensi Norman Fairclough: (1) analisis teks, didapatkan dengan mengamati dan menginterpretasi teks, (2) analisis *discourse practice*, didapatkan dari data primer melalui pengamatan produksi dan konsumsi teks, serta data sekunder melalui literatur dan sumber, (3) analisis *sociocultural discourse*, didapatkan melalui analisis secara makro meliputi situasi yang memengaruhi lahirnya buku. Penelitian dilakukan mulai Maret 2015 sampai dengan Agustus 2016.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) konstruksi teks humor dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo sejalan dengan tiga teori humor Meyer (teori bantuan, teori keganjilan, dan teori superioritas) dan terdiri dari lima jenis humor (pelesetan, guyon parikenan, ironi, satir, dan sinisme) yang cenderung menggambarkan Republik Badut sebagai analogi dari Republik Indonesia, (2) konstruksi wacana perlawanan disampaikan dalam bentuk kritik dan humor yang menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan, ketimpangan, dan kecurangan yang dilakukan para elit penguasa terhadap rakyat, dan (3) Ideologi perlawanan yang disuarakan Darminto M. Sudarmo dalam buku *Republik Badut*, yakni: a) perlawanan terhadap kejahatan atau kecurangan (korupsi), b) perlawanan terhadap elit penguasa, c) perlawanan terhadap tindak represif, d) perlawanan terhadap retorika para politisi, e) perlawanan terhadap pencitraan presiden, f) dan penyatuan gagasan senasib sepenanggungan dari kaum proletar. Perlawanan yang dilakukan dengan humor dapat menjadi sebuah anjuran untuk menyeimbangkan ketimpangan sosial, karena bangsa Indonesia terbiasa dengan kepribadian tradisionalnya yang tidak suka dikritik secara langsung.

Kata Kunci: bahasa humor, humor politik, wacana perlawanan, ideologi perlawanan, analisis wacana kritis.

ABSTRACT

RIZQI AMELIYA: *Rebellion Ideology of Political Humor Language in Darminto M. Sudarmo's Republik Badut. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2016.*

The research aims to reveal: (1) the constructed text humor, (2) the constructed rebellion discourse, (3) the hidden ideology in political humor discourse in Darminto M. Sudarmo's *Republik Badut*.

This research was qualitative with critical paradigm. This research subject was the book of Darminto M. Sudarmo's *Republik Badut*. The technique of collecting data used Norman Fairclough critical discourse analysis approach based, as follow: (1) a method of analysis script, (2) secondary data on the manufacture of the manuscript, (3) secondary data relevant to the theme of research, and (4) finding of the relevant literature with a research theme. The data were collected through Norman Fairclough three-dimensional analysis: (1) text analysis, obtained by observing and interpreting the text, (2) the analysis of discourse practices, derived from primary data through observation of the production and consumption of text, as well as through the literature and secondary data sources, and (3) sosiocultural discourse analysis, obtained through the analysis of the macro including the situation affecting the birth of the book. The research was conducted from March 2015 to August 2016.

The research results show that: (1) the construction of the text humor in Darminto M. Sudarmos's *Republik Badut* with the three theories of Meyer humor theory (theory assistance, singularity theory, and theories of superiority) and consists of five types of humor (plesetan, guyon parikenan, irony, satire and cynicism) tend to depict Republik Badut as an analogy of the Republic of Indonesia, (2) the construction rebellion discourse delivered in the criticism and humor were submit rebellion to injustice, inequality, and the fraud by the government to the people, (3) the rebellion ideology of Darminto M. Sudarmo's *Republik Badut* convey: a) rebellion against crime and corruption, b) rebellion against government, c) rebellion against repressive acts, d) rebellion against the rhetoric of politicians, e) rebellion against president's self-image, f) and ideas-unity among ordinary people to live in the same boat. Rebellion which was done with humor can be an encouragement to balance social inequality, because the Indonesian people who were familiar with traditional personality did not like being criticized directly.

Keywords: humor language, political humor, rebellion discourse, rebellion ideology, critical discourse analysis.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Ameliya

NIM : 13706251067

Program Studi : Linguistik Terapan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan saya, dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 November 2016

Yang membuat pernyataan

Rizqi Ameliya
NIM. 137062251067

LEMBAR PENGESAHAN

IDEOLOGI PERLAWANAN DALAM BAHASA HUMOR POLITIK PADA BUKU *REPUBLIK BADUT* KARYA DARMINTO M. SUDARMO

RIZQI AMELIYA
NIM 13706251067

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Tanggal: 18 November 2016

TIM PENGUJI

Prof. Dr. Pratomo Widodo
(Ketua/Penguji)

Ashadi, Ed. D.
(Sekretaris/Penguji)

Prof. Dr. Suminto A. Sayuti
(Pembimbing/Penguji)

Dr. Suroso
(Penguji Utama)

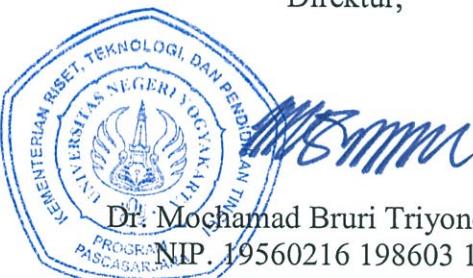
24.01.2017

24 Jan 2017

23 Jan 2017

23 Jan 2017

Yogyakarta, 24 FEB 2017
Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
Direktur,



Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd.
NIP. 19560216 198603 1 003

KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan syukur *Alhamdulillah* ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat, kasih sayang, karunia, pertolongan, serta anugerahNya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth. Prof. Dr. Suminto A. Sayuti selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, kepercayaan, arahan dan motivasinya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada,

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan Direktur Program Pascasarjana beserta staf.
2. Kaprodi Linguistik Terapan dan para dosen yang telah mencerahkan ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis.
3. Darminto M. Sudarmo, penulis artikel humor politik *Republik Badut*.
4. Ayahanda Arif Supardi, Ibunda Us Zaenab, Ayah H. Moh. Yahya dan Ibu Hj. Ana Setyaningsih (mertua), syukur bakti kepada kalian atas segala cinta, ketulusan, kasih sayang, jerih payah, dan doa yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Novan Bagus Firmansyah (suami), yang begitu sabar mendoakan dan mendukung, yang mengajarkan nikmatnya syukur dan pantang menyerah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena membuat menunggu.
6. Adik-adikku Arif Firmansyah dan Rika Nur Fadlilah yang kusayangi sepenuh hati karena Allah.
7. SnS pascasarjana UNY: Mbak Mimin, Uni Rona, Uni Linda, Uni Wid, Kak Asih, Bu Era, Mbak Eni, Rouza, Ayu, Mbak Githa, Mbak Mahmudah, Isma, Kak Fatma, Kak Viktres yang rutin melingkar untuk berdiskusi bersama dan saling memberikan semangat satu sama lain dalam penyelesaian studi.
8. Teman-teman ODOJ 1223 yang telah beberapa tahun bersama, memberikan dukungan pada penyelesaian tesis, memahami, serta pelecut agar tidak pernah meninggalkan membaca Alquran setiap hari, apapun kesibukannya.

9. Semua nama yang ada di hati yang tak sampai ke tinta ini. Semata karena keterbatasan diri sehingga tak dapat menyebut satu per satu. Semoga itu tak mengurangi ikatan ukhuwah kita. Akhi, Ukhti, ada hati yang selalu mengingat segala kesalehan yang telah kalianjadikan pelajaran berharga dalam hidup ini. Hanyalah doa agar Allah sendiri yang memberi balas, dan kita dipertemukan dalam keridhoan.

Teriring harapan dan doa semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalaas amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut. Tentunya masih banyak kekurangan yang ada dalam penulisan tesis ini. "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S. Al Baqarah: 32). Penulis sangat mengharapkan masukan dan koreksi dari pembaca yang budiman. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Bergerak memahami wacana kritis untuk dimaknai lebih dalam. Bergerak sebagai langkah awal untuk memaksudkan mengubah tatanan yang tidak adil menuju sebuah tatanan baru yang lebih baik dalam keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Fastabiqul Khairat. Aamiin.

Yogyakarta, 18 November 2016

Rizqi Ameliya
NIM. 13706251067

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Fokus dan Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori	13
1. Analisis Wacana.....	13
2. Jenis dan Bahasa Humor Politik	20
3. Nilai Sebuah Humor	27
4. Wacana dan Ideologi.....	31
5. Ideologi Perlawanan dan Kekuasaan Michael Foucoul	39
6. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough	44
B. Kajian Penelitian yang Relevan	54
C. Pertanyaan Penelitian.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Jenis Penelitian.....	60
B. <i>Setting</i> Penelitian	62
C. Unit Analisis	64
D. Sumber Data.....	64
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	64
1. Teknik Pengumpulan Data.....	64
2. Instrumen Penelitian	68
F. Keabsahan Data.....	69
G. Analisis Data.....	71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Deskripsi Hasil Penelitian	76
B. Pembahasan.....	85
1. Konstruksi Teks Humor dalam Buku <i>Republik Badut</i>	85
2. Konstruksi Wacana Perlawanan dalam Buku <i>Republik Badut</i>	89
a. Analisis Teks dalam Esai Humor Politik	89
b. Analisis Intertekstualitas	183
c. Analisis <i>Discourse Practice</i>	189
d. Analisis <i>Sociocultural Practice</i>	198
3. Ideologi Perlawanan dalam Buku <i>Republik Badut</i>	215
a. Perlawanan terhadap Kejahatan atau Kecurangan (Korupsi)	216
b. Perlawanan terhadap Elit Penguasa	224
c. Perlawanan terhadap Tindak Represif	229
d. Perlawanan terhadap Retorika Para Politisi	230
e. Perlawanan terhadap Pencitraan Presiden.....	238
f. Penyatuan Gagasan Senasib Sepenanggungan dari Kaum Proletar.....	246
C. Keterbatasan Penelitian.....	253
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	254
A. Simpulan	254
B. Implikasi	259
C. Saran	262
 DAFTAR PUSTAKA	264
LAMPIRAN	270

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tiga Elemen Dasar dalam Analisis Teks, Fairclough.....	53
Tabel 2. Kriteria-kriteria dalam Paradigma Kritis	61
Tabel 3. Teknik Pengumpulan Data AWK Norman Fairclough.....	67
Tabel 4. Contoh Korpus Data	74
Tabel 5. Konstruksi Teks Humor	88
Tabel 6. Personalitas Yudhoyono sebagai Capres	209
Tabel 7. Ideologi Perlawanan dalam buku <i>Republik Badut</i>	252

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Tiga Dimensi CDA Fairclough.....	50
Gambar 2. Arah Perubahan.....	206

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	270
Lampiran 2. Kemiripan Keadaan Republik Badut dengan Republik Indonesia .	274
Lampiran 3. Konstruksi Wacana Perlawanan	277
Lampiran 4. Korpus Data.....	280
Lampiran 5. Skema Analisis	349

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Humor tidak bisa dilewatkan begitu saja. Ada unsur komunikasi politik dan ideologi yang kuat menyertai sebuah humor. Ada pesan yang merupakan titik temu antara penulis, pembaca dengan situasi dan kondisi sosial politik yang tengah berlangsung. Humor yang secara umum masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak serius, olok-olok atau canda gurau untuk sekedar memancing gelak tawa saja, sebenarnya bukan sesuatu yang tidak serius atau sekedar lucu-lucuan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Perret (2016: 261-263) bahwa sebenarnya humor merupakan strategi yang keterlibatannya seringkali digunakan di dalam kelas. Namun, karena humor masih dianggap relatif dan mungkin dianggap tidak profesional maka humor mendapatkan sedikit perhatian ilmiah. Padahal berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa humor dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih santai dan meredakan kegelisahan, menyenangkan dan rileks, sehingga informasi dapat lebih menyenangkan untuk diterima. Begitu juga humor yang akan diteliti dalam penelitian ini, merupakan sesuatu yang sengaja dibuat santai dan meredam kegelisahan untuk menyuarakan ideologi tertentu sehingga lebih mudah sampai dan diterima oleh khalayak pembaca.

Secara tidak langsung, ia semacam jalan tengah untuk melakukan sebuah aksi yang ada di antara aksi radikalisme masyarakat dan aksi deradikalisme dari

pemerintah. Hal tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh I Dewa Putu Wijana dalam disertasinya (1995) bahwa wacana humor dilahirkan selain sebagai wacana kritik sosial juga sebagai hiburan. Humor merupakan salah satu sarana efektif di saat saluran kritik lainnya tidak dapat menjalankan fungsinya.

Selain itu, humor politik dapat tumbuh subur di dalam iklim politik yang tertutup dan represif. Semakin merebak humor politik yang penuh dengan rumor, maka kondisi sumber daya manusianya menjadi layak untuk dipertanyakan. Di Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir humor telah menjadi subjek pembahasan interdisipliner. Fenomena wacana yang mengandung humor-humor politik banyak bermunculan sejak era reformasi.

Humor terdapat dalam karya sastra, surat kabar, majalah dan ada buku yang justru khusus menyajikan wacana humor di dalamnya. Humor merupakan fenomena bahasa, meski belum banyak diteliti dalam kajian linguistik. Di Amerika Serikat, sebelum 1982, humor tidak pernah diajarkan sebagai mata kuliah berkredit. Baru pada 1984 buku teks mengenai struktur humor diterbitkan. Kini humor dikaji bukan sebagai lelucon semata. Ada tipe-tipe humor yang dianggap sebagai kritik terselubung dalam bentuk hiburan dan ditujukan pada target khusus.

Banyaknya produk humor politik yang muncul di Indonesia selaras dengan semakin maraknya kehidupan berpolitik di tanah air pada saat ini. Begitu banyak jargon-jargon politik, sindiran-sindiran politik, ejekan-ejekan politik yang timbul karena banyaknya masalah dan peristiwa yang mengandung unsur politik yang muncul, seperti kasus pemilu, retorika kampanye, janji palsu para elit politik,

pencitraan, korupsi, ketidakberpihakan para penguasa kepada rakyat, dan sebagainya.

Pada saat yang bersamaan sesungguhnya bacaan akademis di Indonesia tentang humor terhitung langka, sehingga menggunakan sedikit teori humor klasik dalam latar belakang penelitian ini akan dapat membantu menjawab betapa pentingnya sebuah humor. Bergson (dalam Seno Gumira Ajidarma, 2012: 13) memahami tawa sebagai sesuatu yang harus diletakkan kembali pada lingkungan asalnya, yakni suatu masyarakat, dan di atas semuanya haruslah ditentukan kegunaan dan fungsinya, agar humor dapat kembali berfungsi sosial. Tawa ialah sesuatu yang memiliki kebermaknaan sosial. Karakter lucu akan berbicara sejurnya dan cenderung tegas.

Nilai lebih yang dimiliki humor tersebut yang kemudian menjadikan humor memiliki peranan yang sentral dalam kehidupan manusia. Ia juga sebagai hiburan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia. Hal tersebut agaknya tidak berbeda seperti yang dikatakan James Danandjaja (1989: 498) bahwa di dalam masyarakat, humor baik yang bersifat erotis maupun protes sosial berfungsi sebagai pelipur lara. Hal ini disebabkan humor dapat menyalurkan ketegangan batin yang menyangkut ketimpangan norma masyarakat yang dapat dikendurkan melalui tawa.

Penelitian ini ingin menjelaskan mengenai ideologi yang dibawa oleh humor tersebut, yakni artikel humor politik Darminto M. Sudarmo yang berjudul *Republik Badut*. Wacana humor dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis. Analisis ini tidak hanya sekedar analisis bahasa kritis (*critical linguistics*)

yang melihat bagaimana struktur kalimat membawa posisi dan makna ideologi tertentu. Dengan kata lain, aspek ideologi itu diamati dengan melihat pilihan bahasa dan struktur tata bahasa yang dipakai. Bahasa, baik pilihan kata maupun struktur kalimatnya, dipahami sebagai pilihan, mana yang dipilih oleh seseorang untuk diungkapkan membawa makna ideologi tertentu.

Melalui humor seolah lebih bebas mengeluarkan segala hal tanpa harus berhadapan dengan objek secara serius, artinya dengan humor juga memungkinkan dilontarkannya kritik yang membangun, dengan humor pula mampu mengembangkan kepribadian yang seimbang. Oleh karena itu, humor tetap dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Ada yang menarik dari Darminto M. Sudarmo. Ia dikenal secara luas melalui karya-karyanya berupa artikel, cerita pendek, puisi, dan kartun yang dipublikasikan di berbagai media massa di Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri Komunitas Kartun Kaliwungu (Kokkang) bersama Itos Boedi Santoso pada tahun 1981. Sejak usia muda ia mengakrabi dunia kesenian, utamanya tulis-menulis dan menggambar. Debutnya sebagai kartunis dimulainya sejak masih duduk di kelas dua SMP. Karya pertamanya yang dimuat di Majalah *Penjebar Semangat*, Surabaya (1973). Setelah itu ia semakin aktif mengirim kartun ke berbagai media massa daerah maupun ibukota. Selain kartun, Darminto juga aktif menulis artikel humor. Ada tiga inisial nama yang digunakan dalam karya tulisnya yaitu Odios, Mas Dar, dan Dar MS. Ia merupakan penulis artikel atau kolom masalah sosial-budaya di antaranya lawak dan humor di *Kompas*, *Kontan*,

Surabaya Post, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Vista TV, Panji Masjarakat, Gatra, Horison, Multyi 2000, Tokoh, HumOr pada tahun 1982 sampai saat ini. Darminto cukup punya nama di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Ia sering diundang oleh berbagai komunitas sebagai pembicara mengenai humor, kartun, lawak yang seringnya bersinggungan kasus politik yang terjadi di Indonesia atau carut marut yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia.

Ketika ingin mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh rakyat maka lihatlah bahasanya, karena bahasa merupakan cerminan ideologi yang dibawanya. Salah satunya ialah melihat humor yang ditulis oleh Darminto M. Sudarmo sebagai bagian dari rakyat yakni berupa satir, sindiran dalam artikel humor politiknya. Apa yang dekat oleh rakyat akan menjadi bahan perbendaharaan budaya dan faktor yang menentukan proses kreatif Darminto dalam tulisannya. Dalam hal ini yang dimaskud ialah tulisannya yang berbentuk artikel humor politik *Republik Badut*.

Pemakaian bahasa membawa nilai ideologis tertentu. Terdapat ideasional yang merujuk pada representasi tertentu yang ingin disampaikan dalam wacana. Untuk melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologis tertentu dibutuhkan analisis yang menyeluruh, melihat bahasa dalam perspektif ini membawa konsekuensi tertentu. Bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan, dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu.

Dalam berbahasa, pengguna bahasa tidak pernah terlepas dari tendensi yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Bahasa memang tidak pernah objektif. Bahasa selalu mengandung ideologi yang dibawa oleh pemakai bahasa. Penyampaian ide-ide yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat dapat pula dilakukan melalui media-media budaya. Khususnya humor, penyampaian ide-ide dengan humor juga memiliki potensi menggiring masyarakat ke arah ideologi tertentu karena tawa juga berpihak.

Bahasa cukup penting untuk dimanfaatkan bagi semua masyarakat. Bahasa sudah tumbuh dengan sendirinya dalam masyarakat (Fairclough, 2003: 3). Bahasa tidak boleh diremehkan, termasuk bahasa yang digunakan dalam sebuah humor. Ideologi telah meresap dalam bahasa dan tidak dapat dipungkiri bahwa ideologi bahasa yang alami harus menjadi satu tema dengan fungsi-fungsi sosial bagi masyarakat pengguna.

Fairclough mengemukakan teori analisis wacana kritis pada tahun 1995. Teori tersebut dimuat dalam bukunya yang berjudul *Critical Discourse Analysis*. Fairclough (1995: 2) menggunakan praktik wacana sebagai perantara untuk menghubungkan antara teks dan konteks.

Perbedaan penting antara Fairclough (analisis wacana kritis secara umum) dan teori wacana postrukturalis adalah bahwa pada analisis wacana kritis, wacana tidak hanya dipandang bersifat konstitutif, Namun, juga tersusun. Pendekatan Fairclough intinya menyatakan bahwa wacana merupakan bentuk penting praktik sosial yang mereproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas dan hubungan sosial yang mencakup hubungan kekuasaan dan sekaligus dibentuk oleh struktur

dan praktik sosial yang lain sehingga wacana akan memiliki hubungan dialektik dengan dimensi-dimensi sosial yang lain. Oleh karena itu, Republik Badut akan lebih tepat jika dianalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis Fairclough.

Struktur sosial dipahami sebagai hubungan sosial di masyarakat secara keseluruhan dan di lembaga-lembaga khusus dan yang terdiri atas unsur-unsur kewacanaan dan non kewacanaan (Fairclough 1995: 64). Praktik non kewacanaan primer misalnya adalah praktik fisik yang terlibat dalam pembangunan jembatan, sebaliknya praktik-praktik seperti jurnalisme dan hubungan masyarakat terutama bersifat kewacanaan.

Sekaligus, Fairclough membuat jarak dengan strukturalisme dan lebih condong ke posisi yang lebih bersifat poststrukturalis saat menyatakan bahwa praktik kewacanaan tidak hanya mereproduksi struktur kewacanaan yang telah ada tapi juga menantang struktur dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan apa yang terdapat di luar struktur itu.

Pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough mengklasifikasikan tiga dimensi wacana yang terdiri atas teks, praktik wacana dan praktik sosiokultural. Dimensi teks secara bersamaan memiliki tiga fungsi, yakni representasi, relasi, dan identitas. Dengan demikian analisis ini tidak dilakukan secara tradisional yang hanya memiliki bidang kajian struktur kalimat dan bentuk-bentuk bahasanya saja.

Secara khusus pembahasan ini dilatarbelakangi keinginan peneliti untuk memberikan kontribusi terhadap pendidikan bahasa untuk lebih mengenal wacana humor yang selama ini terlepas dari dunia sosial politik yang ada di luar ruang kuliah. Pembahasan ini ingin memberikan sebuah kontribusi ilmu terhadap

pentingnya berpikir kritis karena kenyataan yang menunjukkan bahwa pendidikan bahasa selama ini masih melatih kemampuan berbahasa sebagai proses berkomunikasi dengan kadar kekritisan yang masih rendah.

Hubungannya dengan wacana ialah bahwa wacana sebagai ideologi mengeksplorasi simbol-simbol linguistik dan wacana humor berisi segala bentuk rangsangan verbal yang berpotensi memancing respon tawa bagi penikmatnya. Mahasiswa harus mampu mempelajari struktur eksternal bahasa yang berkaitan dengan praktik wacana dan praktik sosial budaya. Oleh sebab itu pembahasan ini diharapkan memberi kontribusi dalam menerapkan informasi mengenai humor politik dan mendapatkan penjelasan secara jelas serta menyeluruh mengenai aspek humor yang disatukan dalam artikel politik.

Keangkuhan merupakan produk kehidupan sosial yang alamiah. Namun, hal tersebut merupakan sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Bergson (dalam Seno Gumira Ajidarma, 2012: 12-14) membahasakan keangkuhan seolah racun yang berada dalam tubuh organisme, dan harus dibuat tawar oleh sesuatu yang lain yang dikeluarkan pula oleh organisme tersebut. Kalau Racun tersebut tidak dijadikan tawar maka organisme tersebut bisa mati. Begitu juga dengan humor dan tawa, ia tak terhentikan untuk melakukan kerja seperti itu. Obat khusus bagi keangkuhan ialah humor dan kekurangan yang dapat ditertawakan pada hakikatnya adalah keangkuhan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul *Ideologi Perlawan dalam Bahasa Humor Politik Pada Buku Republik Badut karya Darminto M. Sudarmo.*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, berikut permasalahan yang dapat diidentifikasi.

1. Buku humor politik *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo lahir dari kumpulan artikel humor politik yang sebelumnya telah muncul di blog dan sebagian diterbitkan dalam surat kabar, sehingga perlu dicermati mengapa *Republik Badut* dipilih oleh penerbit untuk dibukukan.
2. Pengguna bahasa tidak pernah terlepas dari tendensi yang ingin disampaikan kepada lawan bicara, sehingga perlu dicermati tendensi apa yang ingin disampaikan Darminto M. Sudarmo kepada khalayak pembaca.
3. Setiap wacana membawa ideologi yang tidak netral, sehingga perlu dicermati ideologi semacam apa yang diusung oleh Darminto M. Sudarmo dalam *Republik Badut*.
4. Adanya unsur komunikasi politik yang menyertai sebuah humor, sehingga perlu dicermati komunikasi politik semacam apa yang disampaikan oleh Darminto M. Sudarmo.
5. Humor berpotensi untuk melontarkan kritik kepada pihak tertentu, sehingga perlu dicermati kritik sosial semacam apa yang disampaikan oleh Darminto M. Sudarmo.
6. Analisis ideologi tidak dapat dilakukan pada analisis permukaan teks saja, sehingga perlu dilakukan analisis menyeluruh.

7. Antara Negara Republik Badut dan Negara Republik Indonesia digambarkan memiliki kesamaan nama, tokoh, karakter, peristiwa, waktu, dan tempat, sehingga perlu dicermati maksud yang tersembunyi di sana.

C. Fokus dan Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sebuah fokus yang berfungsi untuk membatasi studi dan membantu peneliti menyeleksi data-data yang dibutuhkan (Moleong, 2007: 93-94). Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang disampaikan sebelumnya, masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana wacana ideologi yang dikonstruksi melalui bahasa humor politik dalam Buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah penelitian, tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut.

1. Mengungkap konstruksi teks humor dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo.
2. Mengungkap konstruksi wacana perlawanan dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo.
3. Mengungkap ideologi yang tersembunyi dalam wacana humor politik pada buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi teori kebahasaan dalam arti khusus pengetahuan tentang struktur yang membangun wacana *Republik Badut* dan analisis wacana kritis. Dimensi lain yang ditawarkan oleh penelitian ini diharapkan dapat memberi sudut pandang baru dalam kajian analisis wacana kritis. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pelengkap atas kekurangan penelitian-penelitian terdahulu dan memberi sumbangsih terhadap penelitian-penelitian lanjutan yang menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough sebagai pisau bedah analisisnya.

2. Manfaat Praktis

a. *Stakeholder*

Pendidikan bahasa selama ini masih melatih kemampuan berbahasa sebagai proses berkomunikasi dengan kadar kekritisan yang masih rendah. Penelitian ini dapat membantu memberikan sumbangsih saran mengenai wacana kritis yang dapat digunakan sebagai objek analisis baik di tingkat SMA maupun setingkat mahasiswa dalam mata kuliah analisis wacana kritis.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi peluang bagi stakeholders untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan perlawanan tersembunyi atas ideologi-ideologi dalam wacana yang dibawa dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial.

b. Pakar Bahasa

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai kajian analisis wacana yang mengupas penggunaan bahasa humor dalam merepresentasikan ideologi perlawanan yang tersembunyi di dalamnya. Penelitian ini juga memperkuat kajian mengenai bahasa, bahwa wacana tidak akan terlepas dari unsur ideologi si pemakai bahasa. Dalam bahasa, ideologi dapat dikaji secara komprehensif dan direpresentasikan melalui bahasa humor yang berupa pelesetan, guyon parikenan, ironi, satir dan sinisme yang kesemuanya tidak akan lepas keseluruhan konteks yang membangunnya.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam usaha menyadarkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap wacana yang disajikan oleh para praktisi politik dengan tidak langsung menerima begitu saja wacana yang telah disajikan, melainkan menggali dahulu informasi dengan lebih mendalam. Dalam keterkaitannya terhadap ideologi perlawanan atas representasi, praktik wacana, dan praktik sosial budayanya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat tentang bagaimana seorang penulis mengonstruksi peristiwa-peristiwa politik dan para pelaku politik serta tingkah lakunya dalam sebuah wacana

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Analisis Wacana

Ibnu Hamad (2005: 325) menjelaskan bahwa untuk memahami dan menerapkan analisis wacana, sebaiknya diresapi dulu hubungan antara teori dan analisis wacana. Sebagai sebuah pendekatan penelitian, analisis wacana memiliki sejumlah metode analisis wacana yang pada awalnya metode-metode analisis wacana itu adalah teori wacana, bahkan adalah teori sosial. Teori wacana sendiri adalah bidang kajian linguistik, sehingga untuk mendapatkan hasil analisis wacana sebaiknya diperlukan dalam teori wacana yang relevan dengan metode yang dipergunakan. Sebagai teori murni, teori wacana berkenaan dengan pandangan tentang wacana, yakni struktur cerita yang bermakna atau sebuah bentuk sajian yang memuat satu atau lebih gagasan dengan menggunakan bahasa (verbal dan nonverbal).

Analisis wacana adalah istilah umum yang banyak dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Meskipun ada gradasi yang besar dari berbagai definisi, titik sesungguhnya dalam analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa. Pada bahasa terdapat tiga pandangan penting dalam analisis wacana, yaitu positivism-empiris, konstruktivisme, dan pandangan kritis. Namun, dalam penelitian ini analisis

wacana akan dibahas dengan menggunakan pandangan kritis, yang menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna.

Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan yang ada dalam masyarakat. Namun, saat ini akan dibahasa terlebih dahulu analisis wacana secara garis besar, mengenai analisis wacana dalam pandangan kritis akan dibicarakan setelah ini pada bagian analisis wacana kritis dan wacana kritis Norman Fairclough.

Program penelitian empiris, analisis proses diskursif dapat dipandang sebagai sebuah reformulasi dan pengembangan metode distribusi Zellig Harris, yang memiliki tulisan berpengaruh dengan judul '*Discourse Analysis*'. Salah satu perhatian utama Haris adalah untuk memperluas linguistik deskriptif melampaui batas-batas kalimat. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar memfokuskan pada runtutan kalimat atau sebuah wacana serta untuk melakukan analisis formal dengan mengulang pola-pola yang menjadi elemen pembentuknya.

Seluruh asumsi tentang makna elemen yang pre-given demikian juga acuan-acuan runtutan diskursif yang melampaui wacana dalam pertanyaan – harus dihilangkan. Bagaimana pun, dalam membatasi analisis hanya pada sebuah teks, metode Harressian ternyata tidak dapat diterapkan terhadap runtutan diskursif yang secara intrinsik tidak berulang. Ini merupakan kritik pokok yang dilontarkan oleh Pêcheux dkk (melalui Thompson, 1984: 376-377) yang mengusulkan untuk mengambil, sebagai objek analisis alternatif. Sebuah ‘Korpus diskursif’ yang terdiri dari keseluruhan teks yang berkaitan dengan kondisi produksi.

Terdapat tiga pendekatan yang berbeda pada analisis wacana konstruktionalis sosial, yakni teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, analisis wacana kritis, dan psikologi kewacanaan. Jorgensen & Phillips (2007: 11) menjelaskan perbedaan ketiganya sebagai berikut.

1. Teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe

Teori ini merupakan teori titik pangkal dari gagasan poststrukturalis yang menyatakan bahwa wacana mengonstruksikan makna dalam dunia sosial dan karena secara mendasar bahasa itu tidak stabil, makna tidak pernah bisa tetap secara permanen. Tidak ada wacana yang merupakan entitas tertutup: Namun, wacana senantiasa mengalami transformasi-transformasi karena adanya kontak dengan wacana-wacana lain. Oleh sebab itu kata kunci yang diberikan Jorgensen pada teori ini adalah “perjuangan kewacanaan (*discursive struggle*)”.

2. Analisis wacana kritis

Fokus pembahasan analisis wacana pada penelitian ini ialah analisis wacana kritis pada pendekatan Norman Fairclough. Berlawanan dengan pendapat Laclau dan Mouffe, Fairclough menyatakan bahwa wacana hanyalah merupakan salah satu di antara banyak aspek praktik sosial. Bidang utama yang menarik dalam analisis wacana kritis yang dikemukakan Fairclough adalah penyelidikannya terhadap perubahan. Penggunaan bahasa konkret selalu berdasarkan struktur kewacanaan awal karena pengguna bahasa membangunnya berdasarkan makna yang telah mapan. Fairclough juga memperhatikan aspek intertekstualitas, yang mana teks individu akan bergantung pada unsur-unsur dan wacana teks-teks lain. Dengan jalan menggabungkan unsur-unsur yang berasal dari wacana-wacana yang

berbeda itulah penggunaan bahasa konkret dapat mengubah wacana individu tersebut yang juga akan berimbas pada pengubahan dunia sosial dan kulturnya.

3. Psikologi Kewacanaan

Psikologi kewacanaan merupakan suatu pendekatan pada psikologi sosial yang telah mengembangkan jenis analisis wacana untuk mengeksplorasi cara-cara terbentuknya dan berubahnya emosi-emosi, pikiran-pikiran, dan dari diri orang-orang melalui interaksi sosial dan untuk menjelaskan peran proses-proses tersebut dalam perubahan dan reproduksi sosial dan kultural. Banyak ahli psikologi kewacanaan dengan jelas menggunakan teori postrukturalisme tetapi dengan hasil yang berbeda misalnya dengan Lauclau dan Mouffe. Dalam psikologi kewacanaan lebih memfokuskan pada konteks-konteks khusus interaksi, sedangkan teori wacananya Lauclau dan Mouffe cenderung memandang individu-individu hanya sebagai subjek wacana.

Analisis wacana adalah analisis isi yang lebih bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti. Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab “apa” dari pesan atau wacana komunikasi, pada analisis wacana lebih difokuskan untuk melihat pada “bagaimana”, yaitu bagaimana isi wacana berita dan juga bagaimana pesan itu disampaikan.

Stubbs (dalam Arifin, 2000: 8) analisis wacana merupakan suatu kajian yang digunakan secara ilmiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Penggunaan bahasa secara alamiah ini berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi

sehari-hari. Stubbs menjelaskan bahwa analisis wacana menekankan kajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar penutur. Senada dengan itu, cocok dalam hal ini menyatakan bahwa analisis wacana itu merupakan kajian yang membahas tentang wacana, sedangkan wacana itu adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi.

Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan pada dalam komunikasi. Lebih tepatnya lagi, telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Kajian tentang pembahasan realitas dalam sebuah pesan tidak hanya apa yang tampak dalam wacana atau tulisan, situasi dan kondisi (konteks) seperti apa bahasa tersebut diujarkan akan membedakan makna subyektif atau makna dalam perspektif mereka.

Crigler (dalam Alex Sobur, 2012: 72) mengemukakan bahwa analisis wacana termasuk dalam pendekatan konstruktivis. Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruktivis yaitu sebagai berikut.

Pertama, pendekatan konstruktivis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas politik. Kedua, pendekatan konstruktivis memandang kegiatan komunikasi sebagai suatu proses yang terus menerus dan dinamis. Dari sisi sumber (komunikator), pendekatan konstruktivis memeriksa pembentukan bagaimana pesan ditampilkan, dan dari sisi penerima ia memeriksa bagaimana konstruksi individu ketika menerima pesan.

Kembali pada analisis wacana yang sesungguhnya berusaha memahami bagaimana realitas dibingkai, direproduksi dan didistribusikan ke khalayak.

Analisis ini bekerja menggali praktik-praktik bahasa di balik wacana untuk menemukan posisi ideologis dari narasi dan menghubungkannya dengan struktur yang lebih luas. Dengan demikian analisis wacana merupakan salah satu model analisis kritis yang memperkaya pandangan khalayak bahwa ada keterkaitan antara produk media, ekonomi dan politik. Keterkaitan ini dapat dimunculkan pada saat analisis wacana bergerak menuju pertanyaan bagaimana bahasa bekerja dalam sebuah konteks dan mengapa bahasa digunakan dalam sebuah konteks dan bukan untuk konteks yang lain.

Pada dasarnya ada beberapa perbedaan mendasar antara analisis wacana dengan analisis isi yang bersifat kuantitatif adalah sebagai berikut. Analisis wacana lebih bersifat kualitatif daripada yang umum dilakukan dalam analisis isi kuantitatif karena analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan wacana dari pada penjumlahan unit kategori, seperti dalam analisis isi. Analisis isi kuantitatif digunakan untuk membedah muatan wacana komunikasi yang bersifat manifest (nyata), sedangkan analisis wacana justru memfokuskan pada pesan yang bersifat latent (tersembunyi).

Analisis isi kuantitatif hanya dapat mempertimbangkan “apa yang dikatakan” (*what*), tetapi tidak dapat menyelidiki bagaimana ia dikatakan (*how*). Analisis wacana tidak berpretensi melakukan generalisasi, sedangkan analisis isi kuantitatif memang diarahkan untuk membuat generalisasi.

Michael Foucault seorang poststructuralist Perancis mengingatkan dalam hubungan ini bahwa pengguliran wacana dibatasi dan bahkan ditentukan atau dikontrol oleh kekuatan-kekuatan pranata sosial (*social institutions*) yang

kompleks yang ada dalam masyarakat, dan bukan semata merupakan persoalan bahasa. Beberapa pranata termasuk, misalnya, para pemilik modal, kalangan agama, elite penguasa, dan para aktivis pergerakan.

Senada dengan hal tersebut, (Johnson & Milani, 2010: 6) media ialah salah satu alat yang dapat mereka gunakan untuk mengendalikan wacana. Tindakan media dalam memilih, mengutip serta menggunakan gaya bahasa tertentu dengan cara tertentu dilakukan untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pemahaman strategi media perlu dilakukan untuk memahami hubungan antara ideologi bahasa dan media informasi karena media berpotensi juga untuk membangun serta mengaburkan realitas tertentu.

Biasanya, penganalisis wacana akan tertarik kepada fungsi dan tujuan sebuah data bahasa dan juga kepada cara data itu diproses, baik oleh pembuat maupun oleh penerimanya. Selain Michael Foucault, Brown (1983: 26) juga menyatakan bahwa seorang penganalisis wacana (*discourse analyst*) akan memperlakukan datanya sebagai rekaman teks dari suatu proses yang dinamis, bahasa akan digunakan sebagai alat komunikasi dalam sebuah konteks oleh penulis untuk mengekspresikan berbagai makna dan mencapai maksud atau inti wacana tersebut. Berdasarkan data tersebut, penganalisis berusaha menjelaskan keteraturan dalam realisasi bahasa yang digunakan orang untuk mengomunikasikan maksud dan keinginan tersebut.

2. Jenis dan Bahasa Humor Politik

Billig (2002: 452) menyatakan bahwa “*Jokes, like dreams and slips of the tongue, bear the traces of repressed desires*”. Hasrat, pendapat, pemikiran dan keinginan tertentu dapat disampaikan dalam bentuk lelucon humor dengan bebas, *like a dream*, sehingga tidak membutuhkan pertanggungjawaban serius karena suara tersebut memaksa orang untuk menganggapnya hanya sekadar sebagai humor. Namun, (Tsakona & Diana Elena, 2011: 5) humor politik menunjukkan koherensinya terhadap politik wacana, tanpa pengetahuan kontekstual tentang isu-isu politik, maka humor politik tersebut menjadi tidak dapat ditafsirkan. (Liu 2012: 21-25) Humor sangat berguna sebagai media intervensi terhadap seseorang. Oleh karena itu, untuk dapat mengintervensi seseorang atau pihak tertentu, maka tingkat kekreatifan merupakan syarat yang paling penting untuk menyukseskan tujuan tersebut.

Humor diterapkan dengan menggunakan metafora misalnya. (Hart, 2010: 129) Pada tingkat kognitif, metafora merupakan ekspresi linguistik dalam konteks aslinya yang direferensikan dengan ekspresi linguistik dalam konteks yang lain. Di Syiria, (Camps, 2012: 42-44) penggunaan metafora atau humor terkait politik dianggap memiliki peran dalam mengkonfrontasi rezim. Hal itu semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya humor politik adalah sesuatu yang memiliki makna di baliknya, bukan hanya sekadar tulisan yang mengandung hal lucu.

Humor merupakan hal yang cukup sosial, tetapi pada saat yang sama juga menjadi hal yang sangat individual karena kebanyakan disebabkan oleh selera dan

preferensi pribadi. Humor satir misalnya, yang berfungsi sebagai kritikan dan sindiran. Menjadi lucu bukanlah tujuan utamanya.

Tiga teori humor yang disebutkan oleh Meyer (2000: 310-331) ialah sebagai berikut.

1. Teori bantuan. Manifestasi fisiologis atau “gejala” humor yang penting bagi pandangan ini menyatakan bahwa humor berasal dari bantuan yang digunakan ketika ketegangan ditimbulkan dan dihilangkan dari seseorang. Humor ini kemudian melepaskan energi tegang. Penurunan ketegangan inilah yang kemudian menimbulkan sebuah humor.
2. Teori keganjilan. Apabila teori bantuan berfokus pada fisiologis atau emosional humor, maka teori keganjilan menekankan kognisi. Pada pandangan ini orang-orang akan menertawakan apa yang mengejutkan mereka, yakni sesuatu yang tak terduga atau sesuatu yang berada di luar nalar mereka.
3. Teori superioritas. Teori ini melibatkan rasa kemenangan dan kejayaan. Orang menertawakan orang lain dalam hati karena mereka merasa semacam berada lebih tinggi atau lebih superior dari pada orang yang ditertawakan. Mereka akan mengerdilkan pihak lain untuk memperoleh efek tawa. Seperti orang dewasa yang menertawakan ucapan atau polah anak-anak.

Dalam KBBI (Departemen Pendidikan Nasional, 2013:12 5) kata /humor/ memiliki arti ‘sesuatu yang lucu’; ‘keadaan yang menggelikan hati; kejenakaan; kelucuan’. Bardon (2005: 20) menyatakan bahwa terkadang humor menjadi sesuatu yang terikat pada teori tertentu, yakni menggabungkan berbagai fenomena

di bawah satu teori. Sedangkan di luar itu masih ada sejumlah situasi yang melibatkan tawa yang tidak ditangkap oleh teori, seperti tawa saat digelitik atau tertawa tanpa sasaran tertentu. Namun, beberapa teori dianggap akan sangat membantu untuk memberikan gambaran umum mengenai perilaku manusia yang penting. Beberapa teori humor, secara umum menjelaskan bahwa teori humor adalah respon manusia terhadap keadaan atau situasi yang biasa disebut lucu.

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari humor, begitu juga dengan kehidupan dan perpolitikannya. Keduanya adalah sesuatu yang seolah fitrah yang melekat pada diri manusia. Sisi politik dan sisi humor. Kemudian terangkailah sebuah humor yang menjadikan permasalahan politik sebagai objeknya. Humor menjadi sangat ramai dan diminati oleh masyarakat Indonesia, terlebih setelah pemunculan *stand up comedy* di salah satu stasiun televisi swasta. Humor politik pun tak kalah ramai memenuhi koran, media dan penerbitan seiring semakin peliknya kehidupan perpolitikkan negeri yang mengalami komunikasi tidak ideal.

Yoce Aliah Darma (2009: 97) menyatakan bahwa komunikasi yang tidak ideal dalam persoalan politik negeri ialah dikarenakan oleh ketidaksejajaran kekuasaan antara politisi dan masyarakat awam. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, para politisi selalu mendayagunakan bahasa untuk kepentingan politik tertentu. Akhirnya, muncul banyak fenomena dari masayarakat awam dalam berbuat kekeliruan, kesalahan, ketidakmampuan, dan ketidaktepatan dalam menafsirkan bahasa politik yang dihasilkan oleh para politisi tersebut. Komunikasi tidak ideal tersebut diistilahkan Mueller (1980: 105) melalui Yoce Aliah Darma dengan bahasa komunikasi terkendala (*constrained communication*),

fenomena yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan politik di Indonesia.

Humor politik memang seringkali dijumpai dalam bentuk gambar, kartun, atau karikatur. Namun, humor politik juga muncul dalam bentuk lelucon yang dibahasakan dengan wacana teks yang panjang, serupa artikel. Yang kemudian disebut sebagai artikel humor politik, seperti yang ditulis oleh Darminto M. Sudarmo dengan judul “*Republik Badut*”.

Lelucon adalah salah satu bentuk komunikasi politik non-konvensional. Karya lelucon atau humor hasil kreasi dari segala ekspresi yang dilakukan oleh para kreator lewat medium komunikasi dapat menggunakan beberapa cara yang menjadi pilihan sebagai alat pengungkapan ekspresi. Ketika humor dimasukkan ke dalam esensinya, dikatakan oleh Lynch (via McIlheran, 2006: 268) bahwa humor ialah upaya untuk berkomunikasi dengan orang lain dan pesan yang disampaikan ditafsirkan sebagai sesuatu yang lucu. Hal tersebut menjadikan humor sebagai sesuatu yang tidak sederhana karena pastilah ada beberapa variabel yang menentukan apakah komentar lucu yang ditafsirkan oleh pendengar/pembaca berada dalam konteks yang sama dengan yang ditransmisikan.

Wanzer (via McIlheran, 2006: 268) menyebut humor dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, belajar, dan pergeseran sikap dan kenikmatan bila digunakan dengan tepat. Fry (via McIlheran, 2006: 268) menyebut humor memiliki pengaruh fisiologis bagi penerimanya, karena tertawa dapat mengangkat cardio seseorang dan fungsi pernapasan sehingga menciptakan fase relaksasi. Hal

tersebut didukung oleh salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh McIlheran bahwa humor terbukti memberikan kontribusi pada kenaikan kepatuhan, belajar, pergeseran sikap dan kenikmatan sehingga pengirim pesan dapat menargetkan pesan dengan lebih efektif. Oleh sebab itu, humor dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pemahaman pesan.

Humor yang terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari dibagi menjadi tiga kategori: (1) lelucon, yang dikemas betapa anekdot lucu yang dihapalkan oleh orang-orang dan telah diketahui oleh satu sama lainnya; (2) humor spontan dalam percakapan yang diciptakan dengan sengaja oleh individu selama interaksi sosial, dapat berupa verbal atau nonverbal; (3) humor yang tidak disengaja, yang mereka bagi ke dalam bentuk fisik dan linguistik. Fisik, misalnya kecelakaan kecil: orang tergelincir pada kulit pisang atau menumpahkan minuman di baju seseorang. Hal ini semacam peristiwa lucu, mengejutkan dan aneh kejadiannya. Namun asal tidak menyebabkan yang melakukan mengalami luka parah atau sesuatu hal yang benar-benar memalukan dan tidak layak ditertawakan. Ketidaksengajaan pada humor linguistik dapat terjadi ketika seseorang melakukan salah ejaan, salah ucapan, maupun salah paham yang menciptakan makna baru yang tidak diinginkan dan lucu (Martin, 2007: 1).

Neal Norrick (dalam Martin: 2007: 2) seorang ahli bahasa yang telah melakukan penelitian tentang humor yang terjadi dalam percakapan sehari-hari, menyarankan bahwa, selain menceritakan lelucon kaleng, humor percakapan dapat diklasifikasikan menjadi (1) anekdot (berkaitan cerita lucu tentang diri sendiri atau orang lain); (2) permainan kata (menciptakan permainan kata-kata,

tanggapan cerdas, atau *wisecracks* yang bermain di arti kata-kata); dan (3) ironi (pernyataan di mana makna harfiah berbeda dengan makna yang dimaksudkan).

Berikut beberapa jenis humor yang disadur dari Neal Norick (Martin, 2007: 2) dan Darminto M. Sudarmo (2013: xiv).

a. Pelesetan (*imitation and parody*)

Isinya memelesetkan segala sesuatu yang telah mapan atau populer. Dalam makna politis ia menjadi semacam alat eskapisme dari kesumpekan keadaan. Terobosannya lewat pintu tak terduga dan ini cukup megundang surprise (Darminto M. Sudarmo, 2004: xii).

b. Guyon Parikenan

Isi leluconya bersifat nakal, agak menyindir, tetapi tidak tajam, bahkan cenderung sopan. Dilakukan oleh bawahan kepada atasan atau orang yang lebih dihormati atau kepada pihak lain yang belum akrab benar. Ada juga yang menjuluki lelucon ini sebagai model lelucon persuasif dan berbau feodalisme (Darminto M. Sudarmo, 2004: xii).

c. Ironi

Ironi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa apa yang dikatakan sebetulnya bukan apa yang ingin diungkapkan. Ironi hanya dimaksudkan untuk menyindir, atau untuk tujuan humor, dan sebagainya (Eriyanto, 2001: 321).

d. Satir

Satir adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu. Bentuk ini tidak harus bersifat ironis. Satir mengandung kritik tentang kelemahan

manusia. Tujuan utamanya adalah agar diadakan perbaikan secara etis (Keraf, 2004: 144). Satir merupakan sebuah sindiran, akan tetapi sindiran tersebut tidak perlu harus menjadi lucu karena kepentingan utamanya ialah membaca kritik (Qassim, 2006: 81).

e. Sinisme

Kecenderungan memandang rendah pihak lain. Umpama kata tidak ada yang benar atau kebaikan apa pun dari pihak lain, dan meragukan sifat-sifat baik yang ada pada manusia. Lelucon ini lebih banyak digunakan pada situasi konfrontatif. Targetnya membuat lawan atau pihak lain mati kutu bahkan cemar.

Dilihat dari tujuan politik, hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu di dalam rangka menguasai dan atau memeroleh kekuasaan, dengan kekuasaan mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan. Salah satu jenis komunikasi humor politik yang pedas ialah satir misalnya. Lebih jauh mengenai satir politik, Holbert (2013: 305) menyatakan bahwa pada tingkat sistem, satir politik mungkin menghasilkan efek normatif positif yang signifikan, dalam republik dan kerangka elitis demokratis. Qassim (2006: 81) menambahkan bahwa sindiran dan humor politik menjadi lebih relevan dalam masyarakat yang sarat dengan konflik dibandingkan negara-negara yang memiliki sejarah negara baik-baik saja atau damai.

Humor dianggap menjadi wacana yang berbahaya dalam kontrol sebuah rezim. Komedi dan humor dapat digunakan sebagai resisten tantangan, dan subversi, sehingga humor dapat dikerahkan sebagai bentuk oposisi atau tantangan

terhadap status quo (Westwood & Rhodes, 2007: 4). Politik pada dasarnya juga seperti komunikasi, merupakan suatu tindakan yang melibatkan pembicaraan. Dengan komunikasi, proses politik berjalan. Komunikasi politik merupakan aliran darah yang mengalir dalam tubuh sehingga sistem politik itu hidup dan berfungsi. Komunikasi politik juga dapat terwujud melalui humor. Jenis guyongan yang sarat dengan sindiran atau protes akan sangat berguna sebagai kontrol dari sistem politik yang telah ada.

Di Nigeria (Sani, Abdullah, & Ali, 2012: 148), kartunis sengaja menggerakkan agresif dan kelucuan gaya untuk membangun kritik runcing yang ditujukan pada pemimpin politik dan komentar sosial saat itu. Isu-isu politik saat itu digunakan untuk memulai reformasi sosial dan politik. Genre humor berfungsi sebagai media pelaporan politik yang menyampaikan pesan tertentu dari sudut pandang tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat utamanya. Sedangkan kritik runcing di Indonesia seolah lebih banyak disampaikan dengan bahasa yang lebih halus sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia, lebih memiliki pemakluman yang besar pada penindasan dan perbedaan meskipun itu hal yang menyakitkan bagi pihaknya.

3. Nilai Sebuah Humor

Humor merupakan sesuatu yang pada dasarnya dimiliki oleh semua makhluk berbahasa, khusunya manusia. (Sutton & Jo Napoli, 2012: 335) Humor juga dinikmati dan dilakukan oleh para tuna rungu. Humor yang mereka lakukan dikembangkan dengan menggunakan sensibilitas visual yang berkorelasi dengan

modalitas bahasa dan juga pada kognitif yang tidak terbatas pada bahasa. Artinya humor memang dimiliki dan dinikmati oleh semua manusia.

Humor memiliki banyak definisi. Humor adalah setiap komunikasi yang dianggap lucu (Martineau dalam Romero & Cruthirds, 2006: 59). Humor adalah komunikasi verbal dan nonverbal yang menghasilkan respon kognitif atau aspek positif dari para pendengar (Crawford dalam Romero & Cruthirds, 2006: 59). Humor adalah komunikasi lucu yang menghasilkan meski dan kognisi positif pada individu, kelompok, atau organisasi (Romero & Cruthirds, 2006: 59). Humor seperti mimpi dan slip lidah, menanggung jejak keinginan yang terpendam (Billig, 2002: 452).

Humor merupakan istilah yang luas dan digunakan untuk sesuatu yang dianggap lucu atas apa yang orang katakan atau lakukan serta hal tersebut cenderung membuat orang tertawa (Martin, 2007: 4). Humor juga merupakan proses mental dari yang dikatakan dan dilakukan seseorang tersebut dalam menciptakan dan memahami stimulus yang lucu serta menikmati humor tersebut dengan respon tertentu. Tapley (2007: 421) menyatakan bahwa "*Humor is a human character trait and a biquitous human practice, but is it a good practice*". Sifat karakter manusia yang ditemukan di mana-mana, sehingga manusia dan humor sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Humor bagi Tapley ialah sebuah praktik dalam kehidupan sosial yang baik. Forester (2004: 235-236) Humor bekerja dengan cara sengaja tetapi tidak langsung, sengaja tetapi *nonargumentatively*. Seringkali humor menyampaikan pengakuan kompleksitas dan legitimasi berbagai perspektif. Sesungguhnya apa yang disampaikan di dalam

humor itu menyampaikan lebih jauh dari kebenaran deskriptif suatu masalah. Humor selain sebagai sesuatu yang lucu ia juga sesuatu yang serius, sumber kepuasan, sumber wawasan, sumber pengakuan, jawaban dan harapan.

Darminto M. Sudarmo (2013) juga mendukung pernyataan Forester bahwa “humor bekerja dengan cara sengaja tetapi tidak langsung, sengaja tetapi *nonargumentatively*”. Artikel humornya yang berjudul *Republik Badut*, menyatakan bahwa tidak ada kata benar atau salah di sana, yang ada adalah lucu atau tidak lucu. Judul *Republik Badut* (Darminto M. Sudarmo pula 2013: xiv) ialah sesuatu yang diniati dengan semangat edan. Namanya edan, jangan kaget, kalau sehabis *ngritik* sana-*ngritik* sini, diam-diam lalu menyelinap pergi.

Harvey (via Tapley, 2007: 421-424) mengklaim bahwa humor adalah senjata sosial yang berbahaya. John Morreal juga berpendapat bahwa humor memberikan perspektif tertentu kepada diri seseorang, atas prestasi, kegagalan, dan kehidupan. Perspektif ini memungkinkan untuk memberikan harapan yang seimbang yang pada gilirannya memungkinkan untuk sehat, tetapi dengan ego yang tidak berlebihan, pandangan yang bahagia, dan kesejahteraan sosial. Ia tidak berpendapat bahwa humor adalah satu-satunya yang dapat memberikan itu semua, tetapi dengan humor dapat melihat sikap dan situasi tertentu dengan lebih ringan. Humor mengurangi kesetresan dan kepenatan menghadapi rutinitas hari-hari dan kecarutmarutan yang muram dan suram.

Humor merupakan senjata untuk melawan penindas. Seperti kata Harvey bahwa korban tirani mungkin akan meniru dan membuat lelucon tentang tirani untuk menghilangkan stres atau sebagai bentuk ikatan perjuangan mereka. Korban

penindasan dan kemiskinan, mungkin akan meniru dan membuat lelucon tentang penindasan dan kemiskinan, karena bahan humor politik ialah sesuatu yang timpang dalam kehidupan perpolitikan berbangsa dan bernegara, serta sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Humor adalah senjata. Senjata kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan.

Ideologi politik akan memengaruhi bias ambigu politik pesan dan sumber dalam komedi. Sesuatu yang dianggap satir sesungguhnya digunakan untuk memperkuat keyakinan diri sendiri dan keyakinan lawan dijadikan sebagai sesuatu yang menggelikan. Satir terkadang menjadi sesuatu yang ditakuti dan dipandang memiliki kekuatan yang besar. Banyak dari satir politik yang ditertawaan oleh komedian, yang juga termasuk isyarat kontekstual untuk memengaruhi khalayak dan membentuk penafsiran mereka (LaMarre, 2009: 212-231).

Pada sebuah makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Internasional Kedua tentang humor, Drs. Douglas Lindsay dan James Benjamin (via Tapley, 2007: 425-426) menjelaskan bagaimana humor sangat diperlukan di ruang gawat darurat. Menjauhkan diri dari situasi hidup mati mereka melalui humor yang menarik menjadikan mereka berada pada kesehatan jiwa dan keadaan puncak terbaik. Hal tersebut menjadikan humor bernilai tinggi, sesuatu yang cenderung membuat orang rileks dan berpikir lebih objektif.

Humor mungkin sudah ada sejak manusia mengenal bahasa atau bahkan lebih tua. Humor dianggap sebagai media protes sosial yang paling sesuai dengan kepribadian tradisional bangsa Indonesia yang tidak suka dikritik secara langsung. Dengan adanya sikap tersebut, di Negara Indonesia, protes tidak langsung

diangap memiliki pengaruh yang lebih ampuh dibandingkan dengan protes secara langsung. Kritik yang disampaikan secara tertulis sering menimbulkan bencana, menjadi berbeda jika kritik disajikan dalam bentuk humor. Protes sosial dalam humor tidak mungkin ditanggapi secara serius karena yang menyuarakan sama sekali tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam protes sosial berupa humor sudah diambil secara kolektif, sehingga kekolektifanlah yang bertanggung jawab (Rahmanadji (2007: 215-220).

Kekuatan humor juga disampaikan lebih lanjut (Lovorn, 2008), bahwa pembangunan sosial dan intelektual dapat ditingkatkan dan diperkaya dengan penggunaan humor yang tepat dan terstruktur sehingga kepekaan dan penyampaian pesan serta makna dapat disampaikan secara lebih efektif. (Tsakona & Diana Elena , 2011: 7) Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran humor menjadikan wacana politik media menjadi lebih menarik dan mengesankan. Jurnalis pun sering memilih menggunakan humor dalam mereproduksi artikel berita mereka untuk menarik minat pembaca selain sebagai media kritik.

4. Wacana dan Ideologi

Wacana merupakan media dominasi dan sosial kekuasaan. Ia berfungsi untuk melegitimasi hubungan kekuasaan yang terorganisir. Wacana yang berbeda akan membangun realitas yang berbeda dan ideologi yang berbeda (Teubert, 2010: 123).

Ideologi adalah seperangkat makna dari kelompok tertentu untuk membentuk dan mempertahankan dirinya sendiri. Oleh karena itu ia berfungsi

untuk membuat dan memperkuat identitas kelompok. Mengkomunikasikannya dengan kelompok lain bertujuan untuk meligitimasi dirinya sendiri. Ideologi mengklaim bahwa kepentingan kelompok adlah kepentingan semua. Sebagian kebenaran akan direpresentasikan sebagai kebenaran untuk semua. Seperangkat makna ini berhubungan dengan politik ata agama serta segala kegitana sosial. Metafora merupakan sumber bahasa, kognitif serta simbolik untuk mengomunikasikan ideologi. Dengan membangun pandangan bersama oleh keputusan sewenang-wenang tentang apa yang benar atau salah, baik dan buruk. Ideologi pemimpin diintegrasikan dalam retorika politik (Musolff & Jörg , 2009: 99-100).

Studi kritis terhadap wacana akan menyoroti bagaimana hubungan kekuasaan dan proses ideologis yang sering tidak disadari oleh masyarakat. Eriyanto (2001: 11-13) menyatakan bahwa analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan (*power*) dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan suatu pertaruangan kekuasaan. Teks, percakapan, dan lainnya itulah yang merupakan bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan ideologi tertentu.

Istilah ideologi tidak hanya dimiliki oleh kelompok dominan, tetapi juga dapat dimiliki oleh kelompok yang tidak dominan sebagai bentuk penentangannya terhadap dominasi kelompok dominan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Penentangan ideologi dari kelompok tidak dominan kepada kelompok dominan, penentangan menggunakan bahasa humor dari kelompok yang tidak dominan

sebagai bentuk perlawanan atas bahasa politik kelompok dominan. Bahasa humor adalah medium untuk menyampaikan maksud dan untuk membangun kesadaran politik kelompok yang tidak dominan.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (2013: 512) kata *humor* diartikan sebagai (1) ‘sesuatu yang lucu’, (2) keadaan (dalam sebuah cerita dan sebagainya) yang menggelikan hati, kejenakaan, kelucuan. Di dalam humor pun mengandung banyak metafora dan gaya bahasa untuk menyembunyikan maksud tertentu yang mungkin akan dianggap berbahaya apabila harus disampaikan dengan cara yang lugas dan frontal. Komunikasi humor verbal yang menjadi obyek analisis penelitian ini pastilah juga memiliki maksud. Selanjutnya masih dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (2013: 865) kata *maksud* diartikan sebagai (1) ‘yang dikehendaki atau tujuan’, (2) ‘niat’ atau ‘kehendak’, (3) ‘arti atau makna (dari suatu perbuatan, perkataan, peristiwa, dsb). Maka *maksud* ialah sesuatu yang dikehendaki, niat atau tujuan seorang penutur dalam tulisannya untuk diharapkan sampai kepada khalayak pembaca sebagai salah satu proses komunikasi, jika tuturan yang dimaksud berbentuk teks tertulis (bukan verba).

Praptomo Baryadi (2012: 17) meminjam istilah dari van Peursen (1988) bahwa tuturan itu ibarat manusia, yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh tuturan adalah bentuk, yang mungkin bersifat verbal maupun nonverbal. Jiwa tuturan adalah makna dan informasi. Sedangkan roh tuturan adalah maksud. Kemudian maksud inilah yang akan besar dipengaruhi oleh sebuah ideologi tertentu.

Istilah ideologi pasca revolusi Perancis memiliki makna yang negatif. Semisal Ludwig Feurbach dan Max Stirner sangat terjebak pada ide-ide dan kritik ide-ide sehingga cenderung melihat bahwa ide-ide dan produk produk keadaran yang lain hanya bertumpu pada kondisi material kehidupan sosial. Pada tahun tahun belakangan ini istilah ideologi diperkaya dan dielaborasi melalui sebuah refleksi bahasa. Oleh karena itu, segera disadari bahwa ide ide tidak hanya beredar di dunia sosial secara abstrak, melainkan lebih dari itu. Ide-ide berputar dalam dunia sosial sebagai ucapan-ucapan, ekspresi, sebagai kata-kata yang berbicara dan mengesankan (Thompson, 2003: 13-14).

Hal yang disampaikan Thompon mengenai ideologi mengarahkan persepsi bahwa mempelajari ideologi dalam beberapa hal dan cara berarti mempelajari bahasa dalam kehidupan sosial. Mempelajari cara-cara dimana bahasa digunakan dalam realitas kehidupan nyata, seperti penelitian ideologi dalam artikel politik yang berbalut humor yang hendak dipaparkan dalam penelitian ini. Hal tersebut berarti mempelajari cara-cara pengguna bahasa politik dan humor membaurkan bahasa dengan kekuasaan dan memfungsikan bahasa sebagai bahasa.

Teori ideologi mengajak untuk melihat bahwa bahasa bukan sekadar struktur yang dapat digunakan untuk komunikasi dan pertunjukkan tetapi sebagai sebuah fenomena sejarah sosial yang melibatkan konflik manusia (Thompson, 1984: 15). Pembentukan ideologi muncul bersamaan dengan munculnya wacana dalam masyarakat.

Bagaimana ideologi-ideologi yang dibentuk oleh berbagai interpretasi harus dilakukan? Mempelajari ideologi berarti mempelajari cara-cara dimana

pemaknaan membenarkan relasi-relasi dominasi. Dalam menginterpretasikan ideologi, tidak ada pemisahan yang dapat dibuat antara tindakan dan teks. Maka untuk menganalisis ideologi seseorang harus menganalisis kondisi soial-historis yang di sana ekspresi ideologi dihasilkan dan diterima, kondisi yang memasukkan relasi dominasi dengan ekspresinya untuk dibenarkan. Ideologi dapat diekspresikan dengan bentuk-bentuk wacana yang bermacam-macam salah satunya ialah humor.

Thompson (1984: 14) menyatakan bahwa ideologi adalah berpikir tentang yang lain, berpikir tentang orang lain selain dirinya. Untuk menilai satu pandangan bersifat ‘ideologis’ berarti seseorang harus siap mengkritisinya, karena ‘ideologi’ bukan istilah yang netral. Menurut Karl Marx, Ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Dalam beberapa tulisan, ideologi secara mendasar berhubungan dengan proses pemberian hubungan kekuasaan yang tidak simetris, berhubungan dengan proses pemberian dominasi. Marx mengartikan ideologi sebagai sistem dan berbagai representasi yang mendominasi benak manusia atau kelompok sosial. Setiap kelompok teridentifikasi menganut ideologi-ideologi tertentu. Disadari atau tidak, ideologi tersebut merupakan gagasan yang mendominasi pemikiran setiap manusia. Secara tegas, Marx pada hakikatnya memandang ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat (Althusser, 2006: 34-35).

Widjojo (2004: 201) menjelaskan bahwa bahasa memainkan peran yang penting dalam kehidupan sosial manusia. Selain digunakan sebagai alat komunikasi

antar manusia, bahasa juga berfungsi untuk menyampaikan ide/gagasan manusia. Beragam pikiran manusia diformulasikan ke dalam bentuk bahasa yang tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan atas pikirannya sesuai dengan tujuan-tujuan praktisnya. Bahasa juga merupakan tempat (arena/locus/field) bertemunya berbagai kepentingan kelompok manusia. Pada keyakinan ini, bahasa dapat dipandang sebagai ‘arena politik’: yaitu tempat bertemunya berbagai kepentingan, sebagai arena bertarung, yang saling tarik-menarik, yang tujuan akhirnya adalah untuk saling memengaruhi, saling mendominasi, hegemoni atau hegemoni tandingan, menguasai atau melawan satu kelompok/orang yang satu terhadap kelompok/orang yang lain.

Mulyana (2005: 9) menyebut teks adalah esensi wujud bahasa. Dengan kata lain teks direalisasikan dalam bentuk ‘wacana’. (Brown & Yule, 1996: 189) menyebut teks adalah rekaman suatu peristiwa komunikatif. (Thompson, 2003: 19) menambahkan bahwa dalam kegiatan komunikasi yang disampaikan lewat bahasa tulis atau di sini disebut dengan “teks”, ideologi bekerja melalui bahasa dan bahasa adalah medium dari tindakan sosial. Jadi, dalam kondisi sosial, bahasa memiliki fungsi sebagai legitimasi ideologi kelompok dominan yang di dalamnya terdapat kekuasaan tersembunyi, termasuk yang tersembunyi di dalam bahasa.

Thompson (2003: 13-15) menjelaskan bahwa ide-ide berputar dalam dunia sosial sebagai ucapan-ucapan, ekspresi, sebagai kata-kata yang berbicara dan mengesankan. Karena itu mempelajari ideologi, dalam beberapa hal dan cara, berarti mempelajari bahasa dalam kehidupan sosial. Hal ini berarti mempelajari cara-cara dimana bahasa digunakan dalam kehidupan sosial sehari-hari, dari

pertemuan sahabat dengan anggota keluarga sampai forum-forum tertentu dalam debat politik. Hal ini berarti mempelajari cara-cara dimana beragam pengguna bahasa membaur dengan kekuasaan, memberi energi, menopang, dan bertindak dengan bahasa. Dengan demikian, teori ideologi, yang telah diperkaya dan dielaborasi melalui refleksi bahasa, akan semakin diperkaya dengan memutar pandangan pada bahasa. Oleh karena itu, hal tersebut akan terfokus pada aspek-aspek penggunaan bahasa yang selama ini diabaikan dan ditinggalkan oleh beberapa perspektif linguistik dan filsafat bahasa.

Dalam mengeksplorasi antara bahasa dan ideologi, direkomendasikan satu bagian penelitian yang selama ini luput dari perhatian para ahli filsafat dan bahasa. Kealpaan ini mungkin akan tampak sebagai sesuatu yang aneh ketika melihat penekanan Wittgenstein, Austin dan yang lainnya pada karakter sosial bahasa dan pada kharakter aktif penggunaan bahasa. Wittgenstein menekankan bahwa fungsi ekspresi haya terdapat dalam konteks permainan bahasa yang dimainkan (dan harus dapat dimainkan) oleh lebih dari satu orang, dan karena itu dalam beberapa hal merupakan bentukan kehidupan sosial.

Austin mengingatkan bahwa, berbicara bukanlah salah satu cara dalam bertindak atau cara sederhana dalam melaporkan atau menggambarkan apa yang dilakukan. Jadi pandangan yang sederhana tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan jenis yang bervariasi dari sesuatu yang dilakukan dan kondisi-kondisi yang bervariasi itulah yang membuat segala perbuatan menjadi mungkin dan pantas, kapan harus mengucapkan kata-kata.

Memperkenalkan konsep wacana, menurut Thompson (1984: 8) berarti membuka kesempatan melakukan investigasi terhadap relasi antara bahasa dan ideologi. Tiga karakter umum yang menjadi kerja analisis wacana adalah sebagai berikut. Pertama, mempelajari wacana berarti mempelajari contoh ekspresi secara aktual. Objek analisisnya bukanlah hal-hal yang dirancang untuk menguji intuisi bahasa yang dimiliki tapi lebih pada contoh-contoh aktual yang terdapat dalam komunikasi sehari-hari: seperti percakapan antar teman, interaksi teman-teman kelas, atau editorial sebuah surat kabar. Kedua, perhatian difokuskan pada unit-unit bahasa yang melampaui batas-batas sebuah kalimat tunggal; karena itu fokus diarahkan pada urutan ekspresi yang diperluas baik yang terdapat dalam sebuah percakapan maupun sebuah wacana tulis. Ketiga, kebanyakan bentuk-bentuk analisis wacana cenderung meminimati hubungan antara bahasa dan non-bahasa. Seperti upaya untuk mengeksplorasi hubungan antara bahasa dan ideologi.

Ideologi dan bahasa merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan terutama dalam kaitannya dengan bahasa humor yang ada dalam penelitian ini. Ideologi yang ingin disampaikan penulis kepada masyarakat dikemas dalam bentuk humor politik. Melalui bahasa humor, ideologi mengenai politik Indonesia ini disebarluaskan kepada masyarakat pembaca. Kemudian pembaca menerima ide-ide yang disampaikan tersebut ketika membaca humor politik yang disajikan penulis. Humor diharapkan dapat menjadikan wacana perlawanan menjadi lebih diterima.

Ideologi memiliki banyak definisi. Salah satu definisi yang dikemukakan oleh Van Dijk (2000: 7) mengenai ideologi ialah keyakinan mendasar dari suatu kelompok juga anggotanya. Ideologi (Van Dijk, 2000: 11) sesungguhnya

bukanlah milik individu. Ideologi terdiri dari berbagai keyakinan sosial, bukan dari pendapat pribadi. Ideologi sering berputar pada isu-isu sosial dan politik, yakni isu-isu yang relevan untuk kelompok dan keberadaannya, bukan tentang hal-hal sehari-hari yang sepele seperti warna mobil kami atau merek komputer kita. Ideologi (Van Dijk, 2000: 42) dapat dinyatakan secara eksplisit sehingga mudah untuk dideteksi, tetapi ada juga yang disampaikan secara implisit, disembunyikan dalam suatu struktur yang kurang jelas dalam wacana.

5. Ideologi Perlawanan dan Kekuasaan Michael Foucault

Ideologi tertanam kuat dalam materialitas praktik-praktik sosial dan institusional, misalnya, orang bertindak seolah-olah relasi sosial dan budaya tertentu adalah benar, bahkan ketika mereka tahu bahwa relasi sosial budaya tersebut sesungguhnya salah. Dengan kata lain, mereka secara canggih memilih untuk menyalahartikan relasi-relasi kekuasaan ini. Hal tersebut dicontohkan pada kekuasaan negara yang ada hanya karena masyarakatnya yang patuh terhadap aturan-aturan (Denzin & Lincoln, 2009: 174).

Dalam hal ini ideologi perlawanan disampaikan melalui bahasa humor. Perlawanan ini tidak serta merta melawan dengan menggunakan bahasa yang langsung, tetapi menggunakan bahasa yang halus sehingga dapat lebih mudah diterima atau bahkan menjadi sebuah perenungan.

Eriyanto (2001: 108) menekankan bahwa dalam teori ideologi semua wacana dan semua makna mempunyai dimensi sosial politik serta tidak dapat dimengerti kalau tidak menyertakan dimensi konteks sosialnya. Bagi Fiske, semua

teori ideologi sepakat bahwa ideologi bekerja untuk dominasi kelas, perbedaannya hanya pada cara bagaimana cara dominasi itu bekerja, dan tingkat efektifitasnya.

Fairclough (1989: 25-26) menjelaskan bahwa pada suatu tatanan diskursus suatu institusi sosial, yang membangun diskursus-diskursus subjek dalam suatu cara, dapat mengacu pada tatanan diskursus masyarakat sebagai suatu keseluruhan, yang membangun tatanan-tatanan diskursus dari berbagai institusi-institusi sosial dalam suatu cara. Bagaimana diskursus-diskursus ini terbentuk dalam suatu tatanan diskursus yang telah ada, dan bagaimana bentuk-bentuk tersebut berubah setiap waktu, ditentukan oleh perubahan hubungan kekuasaan pada level institusi sosial atau level masyarakat.

Ilmu pengetahuan proletarian bersifat revolusioner, tidak hanya karena ia menentang masyarakat borjuis menggunakan ide-ide revolusioner, yang lebih penting lagi adalah karena metodenya. Kategori totalitas adalah pengembangan prinsip revolusi di dalam ilmu pengetahuan. Marx melihat persoalan keseluruhan masyarakat kapitalis, sebagai persoalan kelas-kelas yang membentuknya, kelas-kelas yang diperlakukan sebagai totalitas-totalitas.

Sikap terhadap bahasa merupakan sesuatu yang penting, persepsi terhadap sifat seseorang atau kehidupan sosialnya berkemungkinan akan memengaruhi sikapnya. Kesadaran sikap berbahasa tidak hanya dapat membantu seseorang dalam memahami diri dan kemampuannya dengan lebih baik dalam kehidupan sosial, tetapi dapat digunakan untuk menilai hal lain dan segala pengaruhnya dengan lebih tepat (Bayram, 2010 37-38). Ada beberapa praktik pemakaian bahasa, dalam hal ini, buku *Republik Badut* Karya Darminto M. Sudarmo

Subjek perlawanan yang diangkat dalam penelitian ini merupakan strategi wacana dari kaum margin untuk melawan ideologi dominan, salah satunya melalui penyebaran buku humor politik sebagai proses penyampaian informasi dari masyarakat kepada pemerintah yang menjadikan pimpinan politik, politikus, lembaga, kelompok, partai, dan gagasan-gagasan politik sebagai sasarannya. Humor politik menggunakan bentuk bahasa yang halus dan ada pula yang bersifat agresif-terbuka.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kaum proletarian menentang kaum borjuis menggunakan ide-ide revolusionernya. Ide merupakan awal dari suatu gerakan, sedangkan gerakan tidak lain ialah suatu upaya untuk mendorong perubahan. Banyak kasus yang menunjukkan adanya perlawanan dari massarakyat, khususnya rakyat kecil atas situasi yang dipandang merugikan atau merampas kehidupan mereka. Perlawanan terhadap korupsi misalnya. Amundsen (1999: 3) menyatakan bahwa korupsi memiliki kecenderungan kuat untuk “*collectivisation*”. Sebuah konspirasi antara individu dengan mudah diperpanjang menjadi praktik yang lebih besar dan melibatkan rekan-rekan, mitra, asisten, pelanggan, dan atasan. Korupsi dalam lingkup kecil dapat berkembang menjadi jaringan yang lebih besar. Dalam skala itu korupsi akan semakin mendapat ruang untuk melakukan manuvernya. Korupsi itu akan selalu merugikan pihak masyarakat kecil yang lemah. Dengan demikian, ketika datang suatu serangan yang merampas apa yang dimiliki atau apa yang menjadi kepentingan pokok rakyat kecil, maka suatu perlawanan pasti akan muncul, apa pun bentuknya.

Humor pun dapat menjadi salah satu media dalam menyampaikan ideologi perlawanan dari suatu kelompok yang merasa tertindas haknya.

Lebih lanjut, Amundsen (1999: 15-19) menjelaskan dua sebab korupsi, (1) penjelasan ekonomi, bahwa semakin rendah pendapatan negara-semakin tinggi tingkat korupsi; (2) penjelasan politik, bahwa semakin tinggi demokrasi suatu negara-semakin kecil tingkat korupsi. Langkah-langkah antikorupsi yang paling penting ialah pemeriksaan kelembagaan dan saldo, aturan hukum, akses gratis untuk mendapatkan suatu informasi dan hak untuk mengkritik, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, dengan konsolidasi demokrasi, negara dalam transisi dapat meningkatkan kecanggihan lembaga-lembaga dan prosedur, dan mengatasi penyakit korupsi yang telah merajalela. Pertempuran melawan korupsi merupakan bagian dari perjuangan demokrasi yang lebih luas dan bersih. Pemerintah bertanggung jawab utuh atas warga yang bertanggung jawab.

Kemunculan korupsi yang merajalela misalnya, akan memunculkan protes sebagai respon atau reaksi masyarakat terhadap tindak pecurian uang rakyat. Bila respon tersebut berlanjut dari tahap yang sederhana menjadi tahap yang lebih kompleks, dari tanpa organisasi menjadi terorganisasi, dari tanpa tujuan, menjadi memiliki tujuan yang lebih jelas, maka respon masyarakat tersebut sesungguhnya sedang bertransformasi menjadi gerakan rakyat (Timur Mahardika, 2000: 149).

Protes bahkan gerakan rakyat tersebut bisa muncul mengingat efek yang ditimbulkan dari korupsi. (Amundsen, 1999: 20) Di negara-negara dengan kasus korupsi akan meningkatkan biaya operasi dari pemerintah, pendapatan akan bocor keluar dan sumber daya yang tersedia untuk pelayanan publik akan berkurang.

Pengambilan keputusan pemerintah akan terdistorsi dan pemerintah akan gagal memberikan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan. Dilema lain ialah pemenuhan kepentingan elit penguasa yang meningkatkan efisiensi negara dan merugikan pembangunan nasional. Hal tersebut mungkin menyiratkan ekstraksi sumber daya yang lebih efisien untuk kepentingan elit penguasa. Dari segi politik, korupsi dapat menyebabkan legitimasi negara berkurang dengan berkurangnya layanan terhadap masyarakat. Korupsi juga memiliki efek umum, merusak lembaga negara dan legitimasi politik.

Bagaimana ideologi dapat menjadi instrumen legitimasi? (Van Dijk, 1998: 257) Legitimasi mengandalkan alasan moral atau hukum untuk penghakiman tindakan seperti norma-norma, nilai-nilai atau hukum formal. Sedangkan ideologi, sebagai dasar sosial representasi dari kelompok dan anggotanya juga menggunakan norma dan nilai-nilai. Untuk kelompok tertentu, ideologi memberikan dasar penghakiman dan tindakan yang juga merupakan dasar bagi legitimasi yang berhubungan dengan kelompok. Dengan demikian, ideologi demokrasi menjadi dasar untuk memberikan penilaian tentang legitimasi tindakan demokratis.

Secara prinsip setiap usaha mengubah keadaan, tentu saja pertama-tama akan berhadapan dengan pihak-pihak yang menghalangi kemungkinan terjadinya perubahan. Bukan saja penguasa yang resisten terhadap gerakan, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana diketahui, setiap penguasa senantiasa menggariskan sikap bahwa gerakan merupakan usaha ilegal, mengacau (pengacau keamanan), menganggu ketertiban umum, melawan undang-undang, dll. Salah satu pekerjaan

utama alat-alat penguasa adalah membangun citra buruk pada setiap kritik atau langkah-langkah penolakan dari mereka yang dikuasai (Timur Mahardika, 2000 :45-46). Kritik tersebut dapat berupa munculnya wacana berjenis humor politik terhadap pemerintah dan elit penguasa, misalnya.

Melawan penguasa belum tentu melawan hukum, sebab bisa jadi yang melawan hukum itu ialah penguasa itu sendiri. Dengan demikian para pelaku gerakan perubahan atau kritik sosial dalam koridor ini ialah mereka yang justru sangat menghormati hukum sebagai landasan dalam menata kehidupan.

Bagi penguasa, banyak cara dapat dilakukan untuk mendeligitimasi pembangkang atau lawan wacananya, mungkin dapat dilakukan secara terang-terangan maupun halus. Hal ini pada dasarnya terjadi dengan mencegah dan merusah akses bagi munculnya wacana lawan ke media publik. Pada saat yang sama tentu saja, wacana kelompok dominan akan disukai dan lebih memiliki akses yang optimal dalam konteks, teks, dan penerimaan bagi khalayak masyarakat (Van Dijk, 1998: 261-262).

6. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Critical Discourse Analysis (CDA) merupakan sebuah metodologi kritis. Analisis wacana kritis ialah salah satu pendekatan dalam menganalisis bahasa yang menitikberatkan pada kalimat atau level klausa sebagai representasi fenomena sosial. Bahasa dimaksud merupakan ekspresi tertulis (*text*) ataupun terucap (*talk*). Analisis wacana diperkenalkan pertama kali oleh Zellig Haris pada

tahun 1952. Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi pendekatan baru dalam kebahasaan.

Dalam perkembangannya, beberapa jenis pendekatan wacana memeroleh penguatan dari disiplin keilmuan, seperti linguistik, antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Tiap disiplin ilmu memiliki bobot analisis dan cara pandang yang berbeda, salah satunya adalah analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*). Pendekatan ini merupakan pendekatan interdisipliner terhadap wacana, yang memandang “Wacana adalah bentuk dari gejala sosial”.

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Pada akhirnya, analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, Namun, bahasa yang dianalisis bukan semata menggambarkan aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Eriyanto (2001: 7) menjelaskan bahwa analisis wacana kritis itu melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat. Karakteristik penting dari analisis wacana kritis dapat dilihat sebagai berikut.

a. Tindakan

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (*action*). Wacana adalah bentuk interaksi. Seseorang berbicara, menulis, menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, maka hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana

dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk memengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis pasti mempunyai maksud tertentu. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

b. Konteks

Prinsip kedua, analisis wacana kritis harus mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Analisis wacana juga memeriksa konteks dari komunikasi: siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa, melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk setiap masing-masing pihak. Bahasa di sini dipahami dari konteks secara keseluruhan dan lagi wacana harus dipahami serta ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan sosial yang mendasarinya.

c. Historis

Prinsip ketiga, menempatkan wacana dalam konteks historis tertentu untuk bisa mengerti wacana. Misalnya, analisis wacana selebaran mahasiswa menentang Abu Rizal Bakri dalam lumpur Lapindo. Pemahaman mengenai wacana ini hanya akan diperoleh kalau penafsir bisa memberikan konteks historis di mana wacana itu diciptakan. Bagaimana situasi politik dan suasana pada saat itu.

d. Kekuasaan

Prinsip keempat, analisis wacana kritis mempertimbangkan elemen kekuasaan (*power*) dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul dalam bentuk

wacana tulis, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan.

e. Ideologi

Prinsip kelima, menempatkan ideologi sebagai konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini karena wacana tulis, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Analisis wacana tidak bisa menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus melihat konteks terutama bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada berperan dalam membentuk wacana (Eriyanto, 2001: 13-14).

Kelima karakteristik tersebut merupakan acuan yang penting dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal itu disebabkan untuk mengetahui lebih dalam ideologi perlawanan bahasa humor yang disampaikan oleh penulis buku *Republik Badut*, Darminto M. Sudarmo, tidak dapat dipisahkan dari kelima aspek tersebut.

Fairclough (2003: 98) melihat wacana sebagai hal yang memiliki konteks baik berdasarkan “*Process of production*” atau “*Text production*”; “*Process of interpretation*” atau “*Text consumption*” maupun berdasarkan praktik sosio-kultural. Dengan demikian, untuk memahami wacana, teks tak dapat melepaskan diri dari konteksnya. Untuk menemukan ”realitas” di balik wacana, teks memerlukan penelusuran atas konteks produksi wacana, konsumsi wacana, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan wacana. Di sisi lain, Van Dijk (2009: 249) menyatakan bahwa konteks sebagai definisi situasi, kadang dianggap tidak obyektif karena setiap orang memiliki pengalaman hidupnya

sendiri yang secara individual berbeda, jenis kelamin, usia atau kelas yang menentukan penafsiran dari wacana itu sendiri.

Fairclough merupakan pakar linguistik yang memberikan sumbangan pemikirannya dalam kajian bahasa. Pandangannya terhadap linguistik pada dasarnya terdapat dalam kajian analisis wacana kritis. Titik perhatian besar Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Untuk melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologis tertentu dibutuhkan analisis yang menyeluruh. Melihat bahasa dalam perspektif ini membawa konsekuensi tertentu. Bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan, dalam hubungan dialektik dengan struktur sosial. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu.

Untuk mengetahui hubungan antara bahasa dan ideologi atau praktik politik dalam sebuah wacana humor politik, model analisis wacana yang dikemukakan Fairclough ialah analisis tiga dimensi: teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya. Uraian ketiga aspek tersebut dapat dicermati sebagai berikut.

a. Teks

Dalam model Fairclough, wacana dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Di dalamnya juga dimasukkan koherensi dan kohesifitas, bagaiman antar kata atau kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian. Analisis dalam wacana ini digunakan untuk mengetahui tiga masalah berikut.

- 1) Ideasional yang merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam wacana humor yang umumnya membawa muatan ideologis tertentu.
- 2) Relasi, merujuk pada seperti apakah wacana humor disampaikan secara informal atau formal, terbuka atau tertutup.
- 3) Identitas, merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas wartawan dan pembaca, serta bagaimana personal dan identitas ini hendak ditampilkan.

b. Praktik wacana

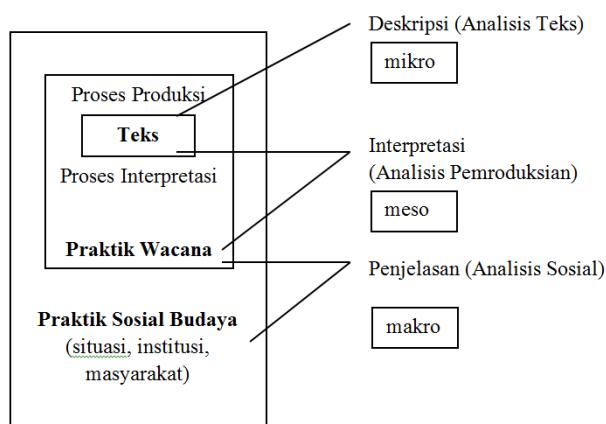
Praktik wacana merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi wacana. Pada tataran praktik wacana, analisis dilakukan berdasarkan kaitan antara produksi wacana dan konsumsi wacana. Wacana diproduksi dengan cara yang spesifik sesuai dengan pola kerja atau aturan yang telah ditetapkan oleh penerbit.

Sebuah wacana akan menghasilkan jenis wacana yang berbeda jika dihasilkan lewat proses produksi wacana yang berbeda pula. Proses konsumsi wacana bisa jadi juga berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula. Konsumsi juga bisa dihasilkan secara personal ketika seseorang mengkonsumsi wacana (seperti ketika menikmati puisi) atau secara kolektif (seperti peraturan perundangan). Pada dimensi ini, harus diketahui bagaimana produksi dan konsumsi wacana dalam hubungannya dengan bahasa humor politik sebagai objek analisis yang berhubungan erat dengan kondisi sosial di masyarakat.

c. Praktik Sosial Budaya

Praktik sosial budaya adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar wacana. Wacana dipandang berdasarkan konteks yang berkembang di

masyarakat. Kejadian di luar wacana yang mungkin meliputi politik, ekonomi, budaya yang dihubungkan dengan wacana dan masyarakat. Hakikat dari konteks di luar wacana merupakan apa yang diungkap dalam wacana mengenai kejadian di masyarakat. Ketiga dimensi tersebut dapat dibagakan sebagai berikut.



Gambar 1. Model Tiga Dimensi CDA Fairclough
Sumber: Fairclough (1995: 98); Fairclough (1989: 21)

Pada level teks (mikro) dilakukan analisis linguistik terhadap teks dengan melakukan analisis fonologi, grammar, kosa kata, dan semantik. Analisis linguistik terhadap teks juga dapat dilakukan dengan memahami aspek suprasentensial organisasi textual, seperti kohesi dan pengambilan giliran dalam bercakap-cakap (Fairclough, 1989: 27-28).

Pada level kedua (meso) adalah tataran praktik diskursif, yaitu hubungan antara teks dan praktik sosial (interpretasi). Praktik diskursif berkaitan dengan aspek sosiokognitif produksi dan interpretasi teks. Di satu sisi, aspek tersebut dibentuk oleh praktik sosial dan membantu pembentukannya. Di sisi lain, erat kaitannya dengan tataran textual, produksi teks meninggalkan sesuatu yang disebut isyarat (clue) dalam suatu teks dan penginterpretasian terjadi berdasarkan

unsur-unsur textual. Analisis diskursif tidak hanya mencakup penjelasan tentang cara partisipan yang terlibat dalam menginterpretasikan dan menghasilkan teks dalam suatu interaksi tetapi juga hubungan peristiwa-peristiwa diskursif dengan tatanan wacana yang merupakan masalah interdiskursivitas (Fairclough, 1992: 136).

Analisis intertekstualis menyelidiki bagaimana landasan historis dan sosial digabungkan atau dimodifikasi oleh teks dan bagaimana wacana dan genre bercampur bersama. Sementara itu, fungsi interdiskursivitas dalam teks memiliki fungsi mediasi antara teks dan konteks. Hal ini berhubungan dengan penjelasan tentang tata cara repertoar genre dan wacana itu dieksploitasi dalam tatanan wacana untuk memproduksi dan menginterpretasi teks. Bagaimana wacana dan genre dikombinasikan atau bagaimana teks akhirnya diproduksi dan diinterpretasikan, bergantung pada konteks sosialnya (Titscher, dkk, 2009: 246).

Tataran level ketiga (makro) merupakan peristiwa diskursif dengan dimensi praktik sosiokultural. Hal ini berhubungan dengan berbagai tataran organisasi sosial yang berbeda-beda, baik situasi, konteks institusional, konteks sosial atau kelompok yang lebih luas. Permasalahan kekuasaan dan ideologi bisa memberikan pengaruh terhadap masing-masing tataran kontekstual (Fairclough, 2003: 4). Fairclough mengacu pada konsep hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci yang melihat hubungan utama antara wacana dengan hegemoni dan memandang penguasaan atas praktik diskursif sebagai suatu perjuangan bagi hegemoni dan tataran wacana.

Berdasarkan skema pada gambar di atas, penelusuran teks dalam sebuah wacana tidak dapat dilepaskan dari konteks. Pendek kata penelitian tetap dilakukan dalam tiga tahap yang saling berhubungan. Wacana dianalisis berdasarkan struktur wacananya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, pengkajian analisis teks dapat berupa kata, frasa, klausa, kalimat dan struktur bahasa lainnya yang terdapat dalam wacana humor, fragmen humor.

Selanjutnya, analisis difokuskan pada praktik wacana yang merupakan pembahasan produksi dan konsumsi wacana. Dalam hal ini aspek historis terbentuknya wacana merupakan kunci utama, bagaimana sejarahnya wacana tersebut terbentuk. Sedangkan pembahasan konsumsi wacana, memaknai wacana dari sudut pandang posisi pembaca tersebut sebagai siapa, karena proses konsumsi wacana bisa jadi juga berbeda dalam konteks sosial yang berbeda pula.

Tahap praktik sosial-budaya dalam memahami wacana akan dikaitkan dengan unsur di luar wacana, yakni kondisi masyarakat saat itu. Apa yang terkandung dalam wacana dihubungkan dengan persoalan politik yang terdapat dalam masyarakat.

Ketiga dimensi itu tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut disebabkan ketiga dimensi Fairclough akan menjembatani pemahaman wacana dengan konteks yang ada. Ketika wacana didekatkan dengan konteks, baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan wacana, pemahaman mendalam dan menyeluruh akan dapat ditafsirkan oleh peneliti.

Berkaitan dengan aspek ideologi dalam wacana, ketiga dimensi tersebut sangat erat hubungannya dengan pembongkaran ideologi yang terkandung dalam

sebuah wacana yang dikaitkan dengan praktik sosial. Dalam teori yang dikemukakan oleh Fairclough, antara wacana dan konteks tidak dapat begitu saja dipisahkan.

Sebuah wacana bukan hanya menampilkan bagaimana suatu objek digambarkan tetapi juga bagaimana hubungan antar objek didefinisikan. Ada tiga elemen dasar dalam model Fairclough, yang dapat digambarkan dalam tabel berikut. Setiap wacana pada dasarnya dapat diuraikan dan dianalisis dari ketiga unsur tersebut (Eriyanto, 2001: 289). Berikut tiga elemen dasar dalam analisis teks.

Tabel 1. Tiga Elemen Dasar dalam Analisis Teks, Fairclough

Unsur	Yang Ingin Dilihat
Representasi	Bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa pun yang ditampilkan dan digambarkan dalam wacana.
Relasi	Bagaimana hubungan antar wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam wacana.
Identitas	Bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam wacana.

Eriyanto (2001: 318) menjelaskan bahwa individu dan profesi penulis merupakan faktor pembentuk wacana itu sendiri. Faktor ini melingkupi latar belakang pendidikan, perkembangan profesional jurnalis, orientasi politik dan ekonomi para pengelolanya, dan keterampilan penulis dalam menyampaikan tulisannya. Penting juga untuk diamati perilaku, pemahaman terhadap nilai dan kepercayaan dari para penulis tersebut juga orientasi dari para penulis atau juga para profesional jurnalis, paling tidak dalam proses sosialisasi terhadap bidang

pekerjaannya. Apakah mereka meletakkan dirinya sebagai pihak yang netral atau partisipan aktif dalam mengembangkan suatu berita.

Faktor individual ini secara teoretis berpengaruh terhadap bagaimana suatu realitas dipahami. Aspek individu penulis menentukan bagaimana peristiwa tersebut ditulis atau disampaikan. Latar belakang penulis, jenis kelamin, tingkat pendidikan, latar belakang budaya dan demografis, orientasi keagamaan, preferensi partai politik adalah faktor-faktor yang sedikit banyak menentukan pertimbangan ketika peristiwa disampaikan, termasuk bagaimana penyampaian penulis mengenai keadaan sekitar melalui bahasa humor.

Tujuan analisis teks, analisis wacana, dan analisis sosial-budaya adalah memberikan kerangka yang jelas bagi analisis wacana. Kajian analisis yang dikemukakan Fairclough merupakan analisis yang dapat dikatakan sangat rinci. Hal itu disebabkan wacana cenderung bersifat pratekstual hingga pascatekstual. Wacana didekati berdasarkan produksi wacana, konsumsi wacana, dan praktik wacana sosial. Menurut Mills, Fairclough adalah salah satu dari sedikit analis yang telah berhasil memetakan hubungan analisis tekstual yang teliti dengan struktur diskursus yang lebih luas.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan ideologi tersembunyi pernah dilakukan oleh Xianzhong He (2015) dengan judul “*Contrastive Analysis of Lexical Choice and Ideologies in News Reporting the Same Accident between Chinese and American Newspaper*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

dengan perspektik Critical Discourse Analysis yang mengkontraskan enam sampel berita kecelakaan dari *China Daily* dan *The Washington Post* dari segi klasifikasi leksikal. Berita yang dijadikan sampel merupakan berita kecelakaan dari dua surat kabar yang berbeda dengan topik dan kabar kecelakaan yang sama. Penelitian ini memberikan bukti bahwa wartawan sengaja menanamkan dan menginvestasikan ideologi dalam laporan berita mereka dengan memilih kata-kata menurut kepentingan mereka yang berdampak pada persepsi pembaca tentang kecelakaan yang dilaporkan. Penelitian ini disimpulkan dalam dua hal. Pertama, penelitian ini membuktikan bahwa pilihan kata dapat digunakan oleh wartawan untuk menyampaikan ideologi mereka. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa laporan berita kecelakaan sosial yang terlihat netral, sebenarnya tidak bebas nilai.

Penelitian kedua dilakukan oleh Islam M. Al Sawi (2015) dengan judul “*A Multimodal Analysis of The Representation of The Egyptian President Al Ahram Egyptian Newspaper in 2012*”. Penelitian ini berfokus pada analisis textual dan representasi visual dari Ikhwanul Muslimin Presiden Muhammad Morsi selama seminggu pertama di kantornya pada tahun 2012 di bagian depan halaman surat kabar Al Ahram. Penelitian ini meneruskan penelitian Pasha (2011) dengan fokus yang sama yakni pada surat kabar Mesir. Hanya saja pada Pasha (2011) berfokus hanya pada representasi linguistik ikhwanul muslimin dari perspektif CDA, surat kabar *Al Ahram* pada tahun 2002 dan 2005. Sedangkan penelitian Islam M. Al Sawi menambahkan dengan analisis visual dari gambar. Dalam penelitiannya, Pasha dan Sawi setuju bahwa surat kabar *Al Ahram* akan condong pada kelompok yang lebih kuat. Namun, Pasha menyatakan bahwa Ikhwanul Muslimin dalam *Al*

Ahram akan selalu berada di bawah serangan, sedangkan Sawi menyatakan bahwa ketika Ikhwanul Muslimin berkuasa, mereka positif direpresentasikan dengan posisi yang kuat dan mereka disebut dengan gelar kehormatan oleh surat kabar *Al Ahram*. Hal tersebut memberikan simpulan bahwa surat kabar akan mendukung pihak mana saja yang lebih kuat, tidak peduli siapa dia dan surat kabar akan mewakili mereka secara positif dan mengadopsi ideologi mereka.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ridanpää (2014) dengan judul *Politics of Literary Humour and Contested Narrative Identity (Of A Region With No Identity)*. Penelitian ini menyangkut pembacaan humor, imajinasi sastra, struktur sosial, identitas lokal serta emansipasi mereka dan sifat saling mereka. Humor didekati sebagai alat bagi penulis untuk pembaca agar sadar diri naik di atas wacana sosial dan budaya di mana teks tersebut ditulis. Fokus khusus pada humor novelis Mikael Niemi yang berasal dari daerah dan novel popular musik, Från Vittula. Hasil penelitian menyatakan bahwa humor adalah praktik kreatif yang relevan secara sosial serta merupakan sesuatu yang harus ditanggapi secara serius. Dalam rangka untuk memahami bagaimana tata ruang masyarakat, identitas, masyarakat, dan lembaga kebudayaan, mungkin humor bukan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi, tetapi humor mungkin masih menjadi rute untuk mengakses inti dari masalah tersebut.

Penelitian keempat dilakukan oleh Rahmatan Idul (2014) dengan judul “*Representasi Tekstual Praktik-praktik Sosial dalam Pidato Internasional Hasan Rouhani*”. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hasan Rouhani merepresentasikan sikapnya terhadap berbagai isu melalui penggunaan modalitas dan pemanfaatan

negasi. Selain itu untuk merepresentasikan aksi-aksi sosial dalam pidatonya, Hasan Rouhani memanfaatkan fitur-fitur linguistik mulai dari pemilihan kata, transitifitas, konjungsi, anak kalimat, hingga preseuposisi. Sedangkan untuk menampilkan aktor-aktor sosial yang terlibat dalam aksi sosial yang termuat dalam pidatonya, Hasan Rouhani menggunakan strategi inklusi yang meliputi pasivasi, nominalisasi, dan klausa infinitive, dan strategi eksklusi yang meliputi determinasi – indeterminasi, abstraksi – objektivasi, duferensiasi, kategorisasi, individualisasi, dan sirkumstansialisasi.

Penelitian kelima dilakukan oleh Heri Budianto (2013) dengan judul “*Pertarungan Politik Kasus Bank Century di Media Massa (Critical Discourse Analysis Pemberitaan Kasus Bank Century di Harian Umum Kompas, Republika, dan rakyat Merdeka)*”. Penelitian tersebut menganalisis mengenai kasus Bank Century yang ditampilkan dalam media massa: Harian Umum Kompas, Republika, dan Rakyat Merdeka. Penelitian tersebut menggunakan CDA model Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan isu-isu pertarungan wacana politik yang muncul melalui media massa.

Penelitian keenam dilakukan oleh Dwi Cahyono Aji (2008) dengan judul “*Ideologi Gender dalam Rubrik Oh Mama, Oh Papa di Majalah Kartini Kajian Analisis Wacana Kritis*”. Penelitian tersebut mengambil data dari wacana yang terdapat pada rubrik Oh Mama, Oh Papa dalam majalah Kartini. Wacana pada dasarnya merupakan representasi dari praktik sosial. Dalam hal ini praktik sosial salah satunya dimaknai sebagai praktik ideologi sehingga melalui analisis wacana

akan terungkap adanya praktik ideologi yang tersembunyi dalam wacana rubrik Oh Mama, Oh Papa.

Selain itu, penelitian tentang humor pernah dilakukan oleh I Dewa Putu Wijana (1995) dengan judul “*Wacana Kartun dalam Bahasa Indonesia*” memaparkan mengenai humor dalam bentuk kartun. Humor merupakan salah satu wujud aktivitas yang melekat dalam kehidupan manusia. Selain sebagai wahana hiburan, humor juga bermanfaat sebagai sarana pendidikan dan kritik sosial bagi ketimpangan yang akan, sedang, atau telah terjadi di tengah masyarakat penciptanya. Humor disimpulkan sebagai salah satu cara manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Manifestasi humor bermacam-macam wujudnya. Kartun salah satu diantaranya.

Penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya memiliki satu kesamaan tujuan yakni ingin melakukan pengungkapan makna di balik sebuah wacana yang mengharapkan munculnya suatu perubahan. Sementara itu penelitian yang dilakukan pada buku *Republik Badut* sebagai salah satu media yang memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan atau sebagai kritik, diharapkan dapat ditemukan relasi antara teks dan konteks ril yang meliputinya serta ideologi yang tersembunyi dalam wacana humornya.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konstruksi teks humor dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo?
2. Bagaimana konstruksi wacana perlawanan dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo?
3. Sejauh mana ideologi perlawanan disampaikan Darminto M. Sudarmo dalam buku *Republik Badut*?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma kritis. Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana humor dapat dipahami dan dijelaskan dengan melihat mekanisme linguistik yang memungkinkan, sehingga didapatkan pemahaman yang lebih dalam bahwa humor merupakan fenomena sosial. Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif karena akan berpotensi untuk mengurangi kualitas analisis linguistik. Kuantitaif juga menarik untuk melihat seberapa besar jumlah data dan kecenderungan bahasa humor perlawanan yang ada. Namun hal tersebut tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

Sulit mendefinisikan penelitian kualitatif secara tegas. Namun, kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Di mana para penelitiannya lebih menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Para peneliti yang mementingkan sifat penyelidikan yang sarat nilai (Lincoln & Guba, 1985: 6).

Kepustakaan yang ditemukan pada Bogdan & Biklen (1982: 27-30) terdapat lima ciri penelitian kualitatif sedangkan pada Lincoln & Guba (1985: 30-44)

menyebutkan sepuluh ciri. Keduanya dapat dirangkum dalam beberapa ciri penelitian kualitatif: (1) latar alamiah, (2) periset sebagai instrumen kunci, (3) menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, pengamatan, atau penelaahan dokumen, (4) analisis data secara induktif, (5) teori dari dasar (*Grounded theory*), (6) data penelitian berupa data deskriptif, berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (7) lebih mengutamakan proses daripada hasil, (8) adanya batas yang ditentukan oleh fokus, (9) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) fleksibilitas desain. (11) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Jenis penelitian kualitatif digunakan peneliti untuk mengungkap ideologi perlawanan yang tersembunyi dalam teks humor politik pada buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo. Penelitian kualitatif juga ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi serta pemikiran manusia baik secara individu ataupun kelompok dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada.

Dedy Mulyana (2003: 8-12) menyamakan paradigma dengan perspektif. Agus Salim (2006: 6) mengadopsi Poerwandari, menyampaikan beberapa karakter yang terdapat dalam paradigma kritis, sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria-kriteria dalam Paradigma Kritis

Kriteria	Paradigma Kritis
Realitas	<ol style="list-style-type: none"> Berada di antara subjektivitas dan objektivitas Merupakan satu hal yang kompleks Diciptakan manusia, bukan ada dengan sendirinya. Berada dalam ketegangan, penuh kontradiksi. Didasarkan pada mekanisme opresi dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah.
Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Dinamis pencipta nasib Mengalami brain-washing Dihalangi dari realisasi potensinya secara penuh

Ilmu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di antara positivism dan interpretif, kondisi-kondisi sosial membentuk kehidupan tetapi hal tersebut dapat diubah 2. Mendasarkan diri pada upaya pemampuan 3. Menjelaskan dinamika-dinamika sistem yang tercipta 4. Tidak bebas nilai
Tujuan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkap yang di balik permukaan 2. Mengungkap mitos dan ilusi 3. Menekankan terbukanya keyakinan keliru 4. Menekankan pembebasan dan pemampuan

Penelitian ini mengkritisi wacana humor politik dan mencari ideologi yang tersembunyi di balik wacana tersebut. Ditambahkan oleh Jorgensen & Phillips, (2007: 120) bahwa menggunakan paradigma kritis bertujuan untuk mengungkap peran praktik kewacanaan dalam upaya melestarikan dunia sosial, termasuk hubungan-hubungan sosial yang melibatkan hubungan kekuasaan yang tak sepadan. Oleh sebab itu, tujuannya adalah agar bisa memberi kontribusi kepada perubahan sosial di sepanjang garis hubungan kekuasaan dalam proses komunikasi dan masyarakat secara umum. Penelitian dengan paradigma kritis diungkapkan oleh Baxter & Babbie (2004: 64) bertujuan mengungkap nilai-nilai implisit yang ada di dalam praktik-praktik sosial, yang terbentuk dari ideologi dan kekuasaan yang mengontrol masyarakat.

B. *Setting Penelitian*

Setting penelitian ini menggunakan buku humor politik berjudul *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo. Republik Badut merupakan negara yang ditampilkan dan digambarkan sejajar dan serupa dengan negara Republik Indonesia dengan carut marut politik yang ada di dalamnya. Buku *Republik Badut* diterbitkan pada tahun 2013. Latar waktu dan tempat, kejadian, dan perpolitikan

di Republik Indonesia dipilih secara representatif dengan fokus penelitian, yang sesuai dengan tema-tema perpolitikan yang telah dikupas Darminto dalam buku *Republik Badut*.

Pemilihan sampel teks humor dipilih menggunakan jenis sampling *purposeful sampling* atau *criteriaon-based selection*. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat memilih manusia, latar dan kejadian tertentu yang unik, khusus, tersendiri, aneh, nyeleneh untuk memberikan informasi penting yang tidak mungkin diperoleh dengan cara lain (A. Chaedar Alwasilah, 2002: 146-148).

Seleksi tersebut bersifat dinamis, mengikuti perkembangan berita perpolitikan Republik Indonesia dari fase ke fase yang didapat melalui internet atau surat kabar online, berurut (*sequential*), berkembang (*developmental*), dan kontekstual. Dari sanalah hasil analisis teks mulai dihubungkan dengan analisis praktik wacana dan analisis praktik sosial budaya yang ditemukan secara nyata.

Selanjutnya waktu penelitian akan dilakukan mulai Maret 2015 sampai Agustus 2016. Pemilihan Bulan Maret dilakukan karena persiapan materi dan pengetahuan perpolitikan Indonesia secara umum harus terlebih dulu dikuasai peneliti, sehingga membutuhkan waktu beberapa bulan terlebih dahulu sebelum memulai analisis teks dan menghubungkannya dengan analisis praktik wacana serta analisis praktik sosial budaya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan peneliti akan terus membekali diri dalam mengenal keadaan perpolitikan Indonesia ketika proses analisis tengah dilakukan. Hal tersebut untuk

memudahkan peneliti dalam merepresentasikan ideologi Darminto M. Sudarmo yang disembunyikan dalam bahasa humornya.

C. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan kebahasaan yang berbentuk kata, frasa, klausa, kalimat, maupun teks yang terdapat pada wacana humor politik dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo (2013) yang dipandang representatif dan mengandung data penelitian. Selanjutnya, unit ini diteliti secara keseluruhan untuk menemukan ideologi di balik teks yang telah dideskripsikan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo. Buku ini diterbitkan oleh Beranda, 2013. Tebal buku ini 210 halaman. Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan judul humor pada *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data berjumlah 15 judul humor politik. Seluruh data kebahasaan humor tersebut dipusatkan pada bentuk pelesetan, ejekan atau guyongan, ironi, satir, dan sinisme yang bersifat menyindir, dan mengkritik.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentatif, karena data yang digunakan untuk penelitian terdapat di dalam buku yang sudah disebutkan pada

sumber data. Sugiyono (2013: 329) juga menambahkan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Data primer pada level teks dalam penelitian ini didapatkan dengan mengamati dan menginterpretasikan teks yang terdapat dalam buku *Republik Badut*. Bagian ini merupakan bagian untuk menganalisis konstruksi wacana perlawanan yang terdapat dalam buku Republik Badut. Selain itu juga dilakukan analisis intertekstualitas yang mencoba menghubungkan antara teks satu dengan lainnya.

Kemudian pada level kedua (meso) data primer didapatkan melalui pengamatan terhadap konsumsi dan produksi teks. Pada proses produksi akan dilakukan pengamatan terhadap data dan data sekunder didapatkan melalui berbagai literatur dan sumber mengenai mengenai produksi buku. Pada tataran konsumsi, dilakukan pada pembaca sebagai konsumen. Pengambilan opini ini diambil melalui pernyataan-pernyataan yang telah tercantum pada *Republik Badut*. Pernyataan tersebut berasal dari beberapa tokoh dan rekan penulis yang telah membaca buku tersebut: Butet Kertaredjasa (aktor), Prie G.S (Penyuka humor), Efix Mulyadi (wartawan senior harian Kompas), Winarto (jurnalis, trainer, dosen komunikasi), Kemala Atmojo (pecinta humor, mantan pemred majalah MATRA), Ahmadun Yosi Herfanda (pengajar dan pelayan sastra), Toni Masdiono (seniman), Rini Clara (aktivis budaya), Heru S. Sudjarwo, M. Djoko Yuwono (jurnalis, penggiat seni dan budaya), Adji Subela (pemerhati budaya), Eko Tunas (sastrawan domisili Semarang), Agus Sulistiyo, Tiyok (kartunis,

illustrator Harian Media Indonesia), Prasetyohadi Prayitno (sastrawan, staf pengajar interstudi, pemimpin redaksi majalah Kicau Bintaro), Ardus M. Sawega (wartawan harian Kompas), Bambang Haryanto (penulis buku Komedikus Erektus), Wisnu T. Hanggoro (bekerja pada Southeast Asian Press Alliance, SEAPA, Bangkok), Iwel Sastra (comedian, penulis buku), Bre Redana (wartawan harian Kompas), Triyanto, Triwikomo (jurnalis dan sastrawan), Tri Agus Susanto Siswowiharjo (dosen di Prodi Ilmu Komunikasi STMPD “APMD” Yogyakarta), dan Muhammad Subarkah (wartawan harian Republika).

Pada level ketiga dilakukan analisis pada level sosiokultur. Pada tahap ini dilakukan analisis secara makro yang meliputi situasi yang memengaruhi lahirnya buku *Republik Badut*. Analisis sosial adalah proses untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi soisal, hubungan-hubungan struktural, kultural, dan historis, sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi. Analisis ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam membaca suasana dan konteks yang melingkupi teks pada saat itu (Timur Mahardika, 2000: 121).

Untuk menemukan realitas di balik wacana diperlukan penelusuran atas konteks produksi wacana, konsumsi wacana, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan wacana. Ibnu Hamad (2005) juga menegaskan proses pengumpulan data yang multilevel dalam analisis wacana kritis Fairlough ini secara sederhana ditunjukkan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Teknik Pengumpulan Data AWK Norman Fairclough

No.	Level Masalah	Level Analisis	Teknik Pengumpulan Data
1.	Praktik Sosiolultural	Makro	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Depth interview</i> dengan pembuat naskah dan ahli paham dengan tema penelitian - <i>Secondary data</i> yang relevan dengan tema penelitian - Penelusuran Literatur yang relevan dengan tema penelitian
2	Praktik Wacana	Meso	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan Terlibat pada Produksi Naskah, atau - <i>Depth interview</i> dengan pembuat naskah, atau - <i>Secondary data</i> tentang pembuatan naskah
3	Teks	Mikro	<ul style="list-style-type: none"> - Satu/lebih metode Analisis Naskah (sintagmatis atau paradigmatis)

Tabel 3 tersebut memperlihatkan bahwa untuk memahami wacana, sebelum atau ketika analisis perlu mengumpulkan data pada level makro, meso, hingga mikro. Posisi teknik pengumpulan data pada level mikro, meso dan makro menunjukkan prioritas. Jika urutan pertama tidak dapat dilakukan, maka dilakukan urutan selanjutnya. Penelitian ini menggunakan *secondary data* berupa berita atau informasi dari internet mengenai siapa Darminto di mata publik dan kasus politik yang dibicarakan Darminto dalam artikel humornya yang kemudian akan dihubungkan dengan realitas politik yang ada berdasarkan data atau berita cetak dan televisi. Penelusuran literatur yang relevan juga dilakukan guna mendapatkan data secara empiris dan sumber yang relevan untuk mengamati data sesuai dengan tema penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan pada level meso dan mikro menggunakan *secondary data* dan beberapa metode analisis teks.

2. Instrumen Penelitian

Manusia sebagai instrumen (A. Chaedar Alwasilah, 2002: 104) merupakan karakteristik dalam penelitian kualitatif. Hanya manusialah yang sanggup menyesuaikan diri dan berinteraksi secara tuntas dengan fenomena yang sedang dipelajari. Peniliti di sini merupakan instrumen itu sendiri dalam penelitian. Peneliti menggunakan akal sehat (*common sense*), intuisi, perasaan, firasat, dan pengetahuan lainnya yang tak terbahasakan (*tacit knowledge*) selain pengetahuan proposisional (*propositional knowledge*). Pengetahuan tersebut banyak digunakan peneliti dalam mengintip nilai-nilai, ideologi, dan sikap tersembunyi (tak terbahasakan) dari Darminto M. Sudarmo sebagai penulis buku *Republik Badut*. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menyimak bentuk bahasa dan wacana humor yang kemudian menjadi korpus data. Hal tersebut dilakukan dengan prosedur berikut ini.

- a. Membaca semua humor yang ada di dalam sumber data dengan cermat. Dengan demikian diperoleh contoh-contoh humor politik yang terdapat di dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo sebagai teks humor mana saja yang akan dianalisis. Teks humor tersebut meliputi, *Dunia Batin republik Badut (DBRB)*; *Kinerja rasa Kosmetika (KRK)*; *Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG)*; *Hiburan Korupsi rasa Perempuan (HKRP)*; *Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL)*; *Tahun-tahun Sport Kantong dan Jantung (TSKdJ)*; *Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan (UKdLJ)*; *Awas Janji-jani Gombal Mukiyoo (AJGM)*; *Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB)*; *Anomali Komunikasi Rakyat-Aparat (AKRA)*;

Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK); Bukan Lawak Senayan (BLS); Karantina Generasi Republik Badut (KGRB); Andai Gue Jadi Gubernur DKI (AGJGDKI); Menunggu Godot yang Datang Codot (MGyDC).

- b. Mengidentifikasi wacana humor berdasarkan jenisnya (pelesetan, guyon parikenan, ironi, satir, atau sinisme) yang disadur dari Neal Norick (Martin, 2007) dan Darminto M. Sudarmo (2013: xiv). Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa kesemua jenis humor tersebut tersebar secara merata kurang lebih pada setiap teks artikel humor Darminto M. Sudarmo yang disajikan dalam *Republik Badut*.

Langkah-langkah kegiatan ini dapat dilakukan secara bersamaan dan tidak selalu berurutan. Pengulangan kegiatan terjadi setiap saat untuk menyempurnakan pengumpulan data.

F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian diperlukan pemeriksaan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Triangulasi Data

Triangulasi data berikut merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 1989: 330). Pemeriksaan keabsahan penelitian ini menggunakan kombinasi metodologi untuk memahami

satu fenomena ideologi yang terkandung dalam bahasa humor politik *Republik Badut*. Triangulasi ini merujuk pada pengumpulan informasi (data) sebanyak mungkin dari berbagai sumber melalui berbagai metode analisis.

2. Ketekunan Pengamatan

Kecermatan dalam melakukan pengamatan merupakan salah satu usaha untuk mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan (Moleong, 1989: 329) bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan peneliti akan melahirkan kedalaman dalam melakukan analisis, baik analisis teks, analisis praktik kewacanaan, maupun analisis praktik sosial budaya pada teks artikel humor politik *Republik Badut*. Untuk mendapatkan kedalaman penelitian, maka peneliti mengumpulkan berbagai data yang menunjukkan ideologi perlawanan dan unsur-unsur dalam situasi yang melingkupi teks artikel *Republik Badut* tersebut dari berbagai wacana di luar teks artikel, serta terus melakukan pengecekan kembali guna memastika apakah data yang ditemukan salah atau tidak, sesuai atau tidak. Sebagai bekal lain dalam meningkatkan kedalaman, maka peneliti membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian terkait guna meluaskan dan menajamkan cakrawala berpikir terkait membaca ideologi tersembunyi dalam teks artikel humor politik yang disuarakan Darminto M. Sudarmo.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat simpulan. Analisis data merupakan hal yang bersifat kritis. Untuk dapat memahami hubungan dan konsep dalam data, sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi, penelitian ini menggunakan kerangka analisis tiga dimensi Norman Fairclough: analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosial budaya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian *Ideologi Perlawanan Dalam Bahasa Humor Politik Pada Buku Republik Badut karya Darminto M. Sudarmo (Kajian Analisis Wacana Kritis)* menggunakan tiga teknik, yakni teknik pengklasifikasian, teknik analisis isi, dan teknik pegodean. Ketiga teknik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Teknik Pengklasifikasian

Teknik pengklasifikasian data dalam penelitian ini digunakan untuk megklasifikasikan humor politik sesuai dengan fokus penelitian, yakni berdasarkan teori humor, jenis humor, dan bentuk perlawanan teks terhadap apa atau siapa. Pengklasifikasian ini akan dibantu dengan menggunakan teknik pengodean.

Kelima belas wacana humor politik yang dianalisisi akan menghasilkan bentuk pengklasifikasian dengan teknik pengodean, sebagai berikut.

- *Dunia Batin Republik Badut* - Teori keganjilan; ironi (Korupsi/*DBRB/I/1*)
- *Hiburan Politik Kemasan Gosip* - Teori bantuan; satir (Korupsi/*HPKG/II/17*)
- *Kinerja Rasa Kosmetika* - Teori Keganjilan; satir (Aparatus/*HPKG/VII/18*)
- *Hiburan Politik Kemasan Gosip* – Teori bantuan; pelesetan dan ironi (Pencitraan/*HPKG/VI/17*)
- *Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat* – Teori superioritas; ironi (Korupsi/*MRCdB/II/89*)

Hal tersebut juga akan mempermudah proses penganalisisan. Penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengodean akan dijabarkan pada penjelasan selanjutnya di bawah.

2. Teknik Analisis Isi

Analisis isi dalam penelitian ini menggunakan kerangka tiga dimensi Norman Fairclough: teks, praktik kewacanaan, praktik sosial-budaya dengan prosedur analisis isi memakai metode analisis deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi untuk mengaji bentuk-bentuk bahasa atau wacana humor politik dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo. Namun, wacana tersebut tetap dianalisis berdasarkan makna yang mewakili bentuk-bentuk perlawanan yang merepresentasikan ideologi perlawanan terhadap ideologi dominan, dengan penjelasan analisis tiga dimensi (Fairclough, 2003: 29) sebagai berikut.

- a. Deskripsi: merupakan tingkatan yang berhubungan dengan sifat formal wacana. Menguraikan isi dan analisis secara deskriptif atas wacana. Unit analisis teks yang digunakan adalah representasi, relasi, dan identitas.

Analisis yang dilakukan terhadap data diarahkan untuk menemukan unsur-unsur representasi, relasi, dan identitas tersebut. Analisis akan menghasilkan suatu deskripsi mengenai isi wacana.

- b. Interpretasi: menafsirkan wacana dalam hubungannya dengan praktik wacana yang dilakukan. Analisis dilakukan pada tingkat proses dibuatnya wacana yang berguna untuk melakukan penafsiran wacana.
- c. Eksplanasi: mencari penjelasan atas hasil penafsiran pada tahap kedua dengan menghubungkan dengan praktik sosiokultural.

Setelah bahasa humor politik dianalisis berdasarkan analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial-budaya, hasil analisis digunakan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana wacana perlawanan dalam wacana humor politik. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah mengenai wacana ideologi perlawanan akan dianalisis setelah wacana perlawanan bahasa humor politik dianalisis secara mendalam. Dari wacana perlawanan, wacana ideologi perlawanan baru dideskripsikan. Semua pendeskripsian wacana ideologi perlawanan secara tidak langsung tetap merujuk pada analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial-budaya.

3. Teknik Pengodean

Teknik pengodean digunakan untuk memberikan kode tertentu pada data agar mudah diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diajukan. Dalam wacana humor politik, pengodean digunakan untuk memberikan kode berdasarkan teori humor, jenis humor, dan bentuk perlawanan teks terhadap apa atau siapa sekaligus penyingkatan judul teks humor. Pengodean terhadap bentuk perlawanan

teks terhadap apa atau siapa ditetapkan berdasarkan kata utama dari bentuk perlawanan terhadap apa atau siapa tersebut. Pengodean judul teks artikel humor menggunakan huruf depan dari tiap kata, jika dalam judul kata berhuruf kapital maka ditulis menggunakan huruf kapital, jika kata dalam judul teks menggunakan huruf kecil, maka kode ditulis pula dalam huruf kecil, misal pada kata hubung “dan”, “yang”, dan sejenisnya. Pengodean teori humor juga menggunakan huruf depan dari tiap kata. Pengodean jenis humor ditulis secara lengkap. Pengodean paragraf menggunakan angka romawi, seperti (I); (II); (III), dan seterusnya. Pengodean terhadap nomor halaman menggunakan angka, seperti (1), (11), (22-23), dan seterusnya. Sehingga secara keseluruhan akan membentuk koding seperti misalnya, (Politisi/HKRP/I/25). Berikut contoh tabel yang dapat dicermati untuk memudahkan pengamatan.

Tabel 4. Contoh Korpus Data

No	Judul Teks	Teori dan Jenis Humor	Kode Data
1	<i>Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)</i>	- Teori bantuan - Pelesetan	<p>Politisi/HKRP/I/25</p> <p>Inilah hiburan dalam bentuk humor-humor yang AF to date (bisa dibaca: up to date), dapat pula dibaca af to date). Popularitas dan kontroversi AF (Ahmad Fathanah) terkait dengan kasus korupsi kuota impor daging sapi memang tiada duanya. Bukan saja keterkaitannya dengan sosok yang ...</p> <p><i>HKRP/II/25</i></p> <p>Humor pertama, “Ada tiga orang berinisial AF yang akhir-akhir ini menjadi terkenal, yaitu Aceng Fikri, Ahmad Fathanah dan Alek Ferguson. Yang terakhir bergelar ‘Sir’, dua sebelumnya bergelar ‘Syur...’.</p>

Contoh singkatan ideologi perlawanan teks.

- a. Korupsi : perlawanan terhadap kejahanan & kecurangan (korupsi)
- b. Elit penguasa : perlawanan terhadap elit penguasa
- c. Represif : perlawanan terhadap aparatus negara dan tindak represif
- d. Politisi : perlawanan terhadap para politisi
- e. Pencitraan presiden : perlawanan terhadap pencitraan presiden
- f. Pembelaan proletar : pembelaan terhadap kaum proletar

Singkatan pada tabel 4, menjelaskan sebagai berikut.

- 1 : menunjukkan nomor urut korpus
- TB : menunjukkan karakteristik teori humor, yakni “Teori bantuan”.
- Pelesetan : menunjukkan jenis humor
- Politisi : menunjukkan arah perlawanan teks terhadap para politisi
- HKRP : menunjukkan judul wacana humor politik (Hiburan Korupsi Rasa Perempuan)
- I : menunjukkan urutan paragraf pada tiap judul wacana humor politik
- 25 : menunjukkan halaman data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah satuan kebahasaan yang berbentuk kata, frasa, klausa, kalimat, maupun teks yang terdapat dalam wacana artikel humor politik pada buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo. Pembahasan berfokus pada pengonstruksian wacana humor, wacana perlawanan, dan ideologi yang tersembunyi dalam wacana humor politik dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo.

Ada 15 teks yang dianalisis, *DBRB (Dunia Batin Republik Badut)*, *KRK (Kinerja Rasa Kosmetika)*, *HPKG (Hiburan Politik Kemasan Gosip)*, *HKRP (Hiburan Korupsi Rasa Perempuan)*, *PPPL (Panik-Paranoid Parpol Linglung)*, *TSKdJ (Tahun-tahun Sport Kantong dan Jantung)*, *UKdLJ (Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan)*, *AJGM (Awas Janji-janji Gombal Mukiyoo)*, *MRCdB (Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat)*, *AKRA (Anomali Komunikasi Rakyat-Aparat)*, *MkNBK (Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi)*, *BKS (Bukan Lawak Senayan)*, *KGRB (Karantina Generasi Republik Badut)*, *AGJDKI (Andai Gue Jadi Gubernur DKI)*, dan *MGyDC (Menunggu Godot yang Datang Codot)*. Wacana perlawanan yang disembunyikan dalam humor *DBRB* ditujukkan kepada para pemangku negeri. Melalui deskripsi dan cerita yang disajikan mengenai dunia batin Republik Badut, *DBRB* dengan bahasa satirnya mengatakan bahwa

para pemangku negeri adalah para pelawak yang mahir menciptakan lelucon segar, bernyanyi dan bermain kata.

Para pemangku negeri yang gemar korupsi, kolusi, nepotisme, bergaji tinggi, dan mendapat tunjangan mencengangkan, fasilitas hidup yang berlimpah, kendaraan yang mewah dan elegan, tidak peduli pada sindiran dan protes dari masyarakat. Namun kondisi masyarakat pada saat itu bertolak belakang sekali, yakni melarat, tidak sejahtera, protes dan demo seolah dianggap sebagai penyebab macet dan perusak pemandangan, nasib yang tidak berubah juga karena para pemangku negeri sibuk berebut kursi.

Teks artikel humor *KRK* menggambarkan perlawanan Darminto terhadap pencitraan presiden terkait penerimaan penghargaan World Statesmen Award dari Appeal of Conscience Foundation; suatu yayasan antar agama bergengsi di Amerika Serikat. Sindiran terhadap presiden digambarkan melalui andai itu terjadi di Republik Badut maka presiden dibuat *shock* bukan kepalang karena setelah pulang ke republik dengan bangga pada prestasi dan kinerja, justru rakyatnya senyap tak merespon apa pun, tidak mendukung juga tidak melarang seolah tidak terjadi apa-apa, tidak ada pers yang meliput, karena kurang ada yang tertarik mewacanakan penghargaan internasional yang dianggap bergengsi oleh presiden. Perlawanan terhadap pencitraan presiden digambarkan dengan sikap presiden yang jengkel karena kurang mendapat sambutan dari rakyatnya.

Teks artikel humor *HPKG* juga menyuarakan perlawanan terhadap pencitraan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sindiran dimulai dari penyampaian kasus preseiden yang mencecar menteri yang merangkap jabatan

tetapi ternyata presiden justru memilih dua menteri dari pihaknya agar merangkap jabatan. Kemudian kasus pengerdilan rupiah dari 1000 perak menjadi satu perak. Kemudian terakhir terkait kasus penyebutan “satria” kepada belasan orang pelaku pembunuhan balas dendam kopassus TNI AD. Kesemua kasus tersebut digambarkan Darminto hanya semacam pencitraan belaka tanpa memberikan efek yang mensejahterakan bagi rakyat.

Teks artikel humor *HKRP* menyuarakan perlawanan terhadap kejahanan dan kecurangan (korupsi) para elit penguasa. Kasus pertama, *HKRP* menyampaikan kasus korupsi impor daging sapi oleh Ahmad Fathanah dan keterkaitannya dengan sejumlah wanita cantik, sehingga memunculkan sarkasme “syur” terhadap Ahmad Fathanah. Kasus kedua, adalah berbagai isme yang dibuat oleh Darminto untuk menyindir para elit penguasa negeri. Misalkan saja gambaran yang dibuat Darminto untuk paham pragmatisme, maka sistem yang akan berlaku adalah Anda memiliki dua ekor sapi, dibeli makelar dengan harga kompromi. Pasar langka daging sapi. Harga langsung naik tinggi sekali. Makelar, oknum “pemerintah” dan perusahaan pengimpor daging sapi tersenyum berseri-seri. Kasus ketiga, Darminto menyindir pelaku korupsi yang namanya disingkat LHI. Sikap korupstif bagaimana pun bentuknya adalah cara untuk menghancurkan rakyat.

Teks artikel humor *PPPL* sesungguhnya mengandung perlawanan terhadap sistem demokrasi yang pada kenyataannya kurang berpihak kepada rakyat. Demokrasi dalam *PPPL* dikaitkan dengan keterlibatan sejumlah parpol dan politisi. Perlawanan menyuarakan dengan eksplisit bahwa *event* politik dan pesta demokrasi sesungguhnya justru menjadi beban bagi masyarakat khususnya buruh

lepas. Sikap skeptis masyarakat terhadap parpol dan para politisi lahir karena selama ini nasib mereka dirasa tidak berubah, meski pemimpin mereka berulang kali berubah. Setelah parpol tertentu terpilih maka kemudian semua tetap sama dan dirasa tidak ada perubahan kesejahteraan. Hal tersebutlah yang menjadi pokok perlawanan *PPPL* terhadap para politisi.

Teks artikel humor *TSKdJ* mengandung perlawanan terhadap kejahatan dan kecurangan (korupsi) sekaligus juga menyuarakan perlawanan terhadap para politisi. Perlawanan itu diarahkan kepada para politisi yang gemar sekali bertindak koruptif. Hiruk pikuk kasus korupsi dan prahara di partai politik seolah menjadi satu kesatuan yang seringkali mewarnai riuhnya opini di media dan menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat. Perlawanan Darminto menentang sikap para politisi yang dilabeli “politisi buruk” tersebut dengan mengajukan sejumlah usulan, sumbangsih, dan pemikiran dalam menyongsong pemilu ke depan dan cara untuk mendapatkan pemimpin idaman demi sebuah perubahan dan kemajuan republik.

Teks artikel humor *UKdLJ* mengandung perlawanan terhadap kinerja birokrasi republik yang dijalankan oleh aparatus negara. Pemerintah dan jajarannya ialah termasuk di dalamnya. Artinya Perlawanan Darminto dalam *UKdLJ* ini sesungguhnya merupakan penentangan terhadap kinerja pemerintah yang seolah dianggap nihil hasilnya. Perlawanan ini kemudian disuarakan dengan menyampaikan keburukan-keburukan birokrasi, politik uang di dalam setiap kebijakan, program indah permai yang tidak terealisasi saat kampanye, dan sebagainya. Selain itu, sebagai bentuk perlawanannya, Darminto juga

menyampaikan soal alternatif pemilu masa depan. Hal tersebut karena pemerintah selama ini dianggap hanya mengulang kesalahan yang sama dalam pemilu, untuk mendapatkan seorang pemimpin yang diidamkan rakyat.

Teks artikel humor *AJGM* membawa perlawanan Darminto terhadap parpol dan para politisi dalam pemilu yang seringkali cenderung memisahkan antara realitas kampanye dengan realitas kinerjanya. Retorika dan persuasi dalam komunikasi politik yang digunakan politisi parpol disebut Darminto sebagai ekspresi kreativitas belaka yang hanya digunakan untuk menarik perhatian massa atau simpati publik tanpa disertai realitas kinerja kepemimpinan. Darminto dalam *AJGM* sangat menentang retorika yang seolah hanya digunakan sebagai alat untuk membohongi dan membodohi publik.

Teks artikel humor *MRCdB* berisi sekumpulan *oneliner* (lelucon opini pendek) yang kesemuanya mengandung spirit perlawanan terhadap kejahatan dan kecurangan (korupsi), serta perlawanan terhadap pemerintah, para politisi, dan pencitraan presiden. Kesemuanya dianggap tidak memiliki kecocokan paham dengan rakyat kecil. Darminto memandang mereka dalam *MRCdB* sebagai pihak yang tidak memihak rakyat. Sehingga pertentangan dan perseteruan mereka pihak tersebut dengan rakyat tak lagi dapat dihindarkan.

Teks artikel humor *AKRA* merupakan salah suara perlawanan Darminto terhadap aparatus negara represif. Dalam *AKRA*, digambarkan seorang kepala daerah yang saat kampanye bersikap santun dan memohon agar dipilih. Namun, setelah terpilih hampir mutlak dalam pemilukada. Bapak Kepala Daerah tidak merealisasikan segala janjinya kepada rakyat, dahulu. Kedatangan rakyat

berbondong-bondong untuk menanyakan janji beliau saat kampanye dulu, tetapi kedatangan mereka langsung petugas keamanan dan tiga truk polisi untuk mengamankan keadaan. Rombongan ditolak masuk sehingga mereka kesal dan kecewa kemudian berteriak-teriak di luar pagar. Bentrok rakyat polisi kemudian menewaskan beberapa orang dari romongan. Darminto menentang sikap pemerintah yang membodohi rakyat dengan janji palsu serta tindak represif polisi yang seolah hanya menjadi alat untuk melindungi penguasa. Keduanya seolah tidak berada di pihak rakyat. Kegeraman tersebut kemudian disuarakan *AKRA* dengan bahasa deskripsi untuk menjelaskan komunikasi yang buruk antara rakyat dan aparat.

Teks artikel humor *MkNBK* mengandung perlawanan terhadap tindak korupsi para pemangku, baik politisi maupun pegawai negeri dan pencitraan artifisial, yang menjadikan republik dalam kondisi yang disebut Darminto sebagai “*extra ordinary situation*”. Darminto melalui *MkNBK* juga mendambakan mekanisme pemilu yang lebih murah dan alamiah untuk menghemat APBD dan mengharapkan anggota parelemen menimba ilmu dengan merujuk pada 12 negara paling minim korupsinya, seperti Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, Swiss dan Israel, tidak perlu nyasar ke negara lain dengan menghabiskan biaya dan tanpa hasil.

Teks artikel humor *BLS* mengandung perlawanan terhadap sejumlah politisi dan pejabat publik. Perlawanan disuarakan Darminto melalui sindiran yang menyebut mereka sebagai pelawak Senayan. Selain itu *BLS* juga menyatakan

secara eksplisit mengenai seni lawak bahwa ketika kerumitan serta carut marut politik dan kekuasaan di negeri telah memenuhi kehidupan maka seni lawak perlu tampil dengan semangat dasarnya yang kritis, cerdas, visioner, dan elegan sebagai medium yang akan mengembalikan publik pada esensi kemansuaan. Oleh sebab itu *BLS* juga membawa semangat membentuk bibit pelawak yang bermutu untuk melakukan kritisik sosial yang cerdas, bernilai pendidikan, dan dapat menjadi media katarsis bagi masyarakat, sebagai bentuk perlawanan Darminto terhadap sikap politisi dan pejabat publik yang seenaknya sendiri.

Teks artikel humor *KGRB* menyuarakan perlawanan terhadap para pejabat negeri karena diaanggap tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi mudanya. Generasi tua yang dianggap sebagai generasi yang tidak sanggup menyelematkan bangsanya. *KGRB* kemudian menyampaikan saran dengan membentuk karantina bagi generasi muda agar tidak terpengaruh oleh generasi sebelumnya sehingga melahirkan generasi baru yang siap membangun bangsanya kembali. Darminto menyuarakan perlawanan terhadap para pemangku negeri dengan bahasa satir dan menyuarakan penentangannya terhadap presiden dengan bahasa eksplisit, bahwa “Salah satu cara menyelematkan bangsa ini cukup gampang dan tidak perlu melakukan pemusnahan peradaban; yaitu suruh dia mundur, secepatnya. Makin cepat makin baik”. Kalimat protes yang tajam yang diselipkan dalam sebuah cerita humor *KGRB*.

Teks artikel humor *AGJDKI* ditulis Darminto dua minggu sebelum pilgub DKI. *AGJDKI* menceritakan mengenai gagasan tokoh dalam cerita yang bernama Bang Odi, andai ia menjadi Gubernur DKI. Di dalam teks yang mengalir dan

ringan tersebut terkandung perlawanan Darminto terhadap pemerintah sebagai bagian dari aparatus negara yang dianggap jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mengutarakan pembelaan Darminto terhadap nasib kaum proletar yang dalam hal ini adalah rakyat. Mewacanakan Jakarta sebagai salah satu kota dalam republik memiliki alasan bahwa Jakarta sesungguhnya merupakan miniatur Republik Indonesia.

Teks artikel humor *MGyDC* merupakan suara perlawanan Darminto terhadap para politisi negeri yang dianggap buruk. Plesetan “Hedonesia Raya” sebagai lagu kebangsaan Republik Hedonesia merupakan suatu sindiran tajam terhadap para politisi buruk dan sekutunya yang duduk di parlemen. Mereka dianggap bekerja hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan saja, bukan untuk kepentingan rakyat. Seluruh pihak seolah mendukung gaya hidup hedonis tersebut, seperti eksekutif, yudikatif, bahkan pers, yang menyajikan berita kecil seperti mencuri cokelat, sandal jepit, kapuk, dan sebagainya menjadi berita besar dan dramatis sehingga orang akan berpaling ke sana adan melupakan kasus-kasus besar hasil perbuatan penjahat yang merugikan uang negara.

Adapun selanjutnya, hasil penelitian bagian kedua ialah konstruksi wacana perlawanan. Wacana ideologi perlawanan dalam artikel humor politik pada buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo memiliki nuansa Marxisme dalam pemaknaannya. Kelima belas artikel humor politik tersebut di atas merupakan perlawanan yang disuarakan Darminto M. Sudarmo secara tersembunyi melalui humor satirnya. Humor membawa arti komunikasi politik tertentu dan ideologi tertentu yang cukup penting. Ketika pesan tak lagi dapat disampaikan dalam

bentuk langsung maka humor sering kali menjadi lebih bermakna dalam dan justru lebih elegan karena dapat dimaknai dengan kondisi yang lebih relaks dan dapat diinterpretasikan menurut pengalaman persona khalayak pembaca. Fakta-fakta yang merupakan peristiwa pahit kadang menjadi tidak sangat meyenggung perasaan ketika dikemukakan melalui humor.

Untuk memahami tawa, sesuatu itu harus diletakkan kembali kepada lingkungan asalnya, yakni suatu masyarakat. Tawa juga merupakan implikasi dari semacam rahasia bersama atau bahkan keterlibatan dengan para penertawa lain, nyata maupun imajiner. Akan selalu ada pihak ‘yang ditertawakan’ dalam suatu humor atau setidaknya ‘yang layak ditertawakan’, yang tentu juga bisa berarti ‘yang direndahkan’ atau ‘yang dihinakan’. Kembali menukil dari penjelasan Seno Gumira Ajidarma (2012: 386) bahwa dalam teori humor akan ditemukan pengesahan terdapatnya agresi, pelepasan tak sadar maupun sadar atas sesuatu yang tabu untuk melawan rasa tertekan. Melalui politik identitas sang penulis humor akan ada pemunculan siapa yang ‘benar’ dan siapa yang ‘salah’. Dari sanalah kemudian diketahui ideologi apa yang sebenarnya tersembunyi dalam wacana humor politik *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo.

Hasil penelitian bagian ketiga dipaparkan ideologi perlawanan yang tersembunyi dalam wacana humor politik Darminto M. Sudarmo. Perlawanan yang terdapat pada kelima belas humor tersebut di atas mengandung semangat Marxis yang dapat dikelompokkan ke dalam enam aspek, sebagai berikut.

1. Perlawanan terhadap kejahatan dan kecurangan (korupsi)
2. Perlawanan terhadap para elit penguasa

3. Perlawanhan terhadap tindak represif
4. Perlawanhan terhadap retorika para politisi
5. Perlawanhan terhadap pencitraan presiden
6. Penyatuan gagasan senasib sepenanggungan dari kaum proletar

Keenam aspek tersebut sangat dominan dalam wacana artikel humor politik *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo. Semangat Marxis bersumber dari teori Marxis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang penuh dengan pertentangan antara kelas serta pertarungan ideologis dan kekuasaan (Hamad, 2004: 2).

B. Pembahasan

1. Konstruksi Teks Humor dalam Buku *Republik Badut*

Analisis konstruksi teks humor merupakan cara untuk melihat permukaan teks humor *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo berdasarkan teori humor dan jenis humornya. Konstruksi teks humor dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo cenderung menggambarkan Republik Badut sebagai analogi dari Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kesamaan nama, tokoh, karakter, waktu, tempat, dan cerita yang kesemuanya dikonstruksi dalam humor yang sejalan dengan tiga teori humor Meyer dan enam jenis humor sebagai berikut.

- a. Tiga teori humor yang sejalan dengan teori humor Meyer, antara lain:
 - 1) Teori bantuan adalah pandangan yang menyatakan bahwa humor berasal dari manifestasi fisiologis atau emosional humor yang digunakan untuk

menimbulkan dan menghilangkan ketegangan. Penurunan ketegangan inilah yang dianggap menimbulkan sebuah humor. Berikut teks humor yang termasuk dalam teori bantuan: *Kinerja Rasa Kosmetika (KRK)*, *Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)*, *Tahun-tahun Sport Kantong dan Jantung (TSKdJ)*, *Awas Janji-jani Gombal Mukiyoo (AJGM)*, *Anomali Komunikasi Rakyat Aparat (AKRA)*, *Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK)*, *Bukan Lawak Senayan (BLS)*, *Andai Gue Jadi Gubernur DKI (AGJGDKI)*.

- 2) Teori keganjilan adalah teori yang lebih menekankan kognisi. Pada pandangan ini, orang akan menertawakan apa yang tidak diduga atau berada di luar nalar mereka. Berikut teks humor yang termasuk dalam teori keganjilan: *Dunia Batin Republik Badut (DBRB)*, *Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG)*, *Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan (UKdLJ)*, *Karantina Generasi Republik Badut (KGRB)*, *Menunggu Godot yang Datang Codot (MGyDC)*.
- 3) Teori superioritas adalah teori yang melibatkan rasa kemenangan atau kejayaan. Seseorang menertawakan orang lain karena mereka merasa lebih tinggi atau superior dari pada orang yang ditertawakan. Mereka akan mengerdilkan pihak lain untuk memperoleh efek tawa. Berikut teks humor yang termasuk dalam teori superioritas: *Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL)*, *Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB)*.

b. Enam jenis humor, antara lain:

- 1) Pelesetan (*imitation and parody*). Teks humor yang termasuk dalam jenis pelesetan (*imitation and parody*), antara lain: *Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)*.
- 2) Guyunan parikenan. Teks humor yang termasuk dalam jenis guyon parikenan, antara lain: *Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL)*, *Awas Janji-jani Gombal Mukiyoo (AJGM)*, *Anomali Komunikasi Rakyat Aparat (AKRA)*.
- 3) Ironi. Teks humor yang termasuk dalam jenis ironi, antara lain: *Dunia Batin Republik Badut (DBRB)*, *Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)*, *Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan (UKdLJ)*, *Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB)*, *Bukan Lawak Senayan (BLS)*.
- 4) Satir. Teks humor yang termasuk dalam jenis satir, antara lain: *Kinerja Rasa Kosmetika (KRK)*, *Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG)*, *Tahun-tahun Sport Kantong dan Jantung (TSKdJ)*, *Karantina Generasi Republik Badut (KGRB)*, *Andai Gue Jadi Gubernur DKI (AGJGDKI)*, *Menunggu Godot yang Datang Codot (MGyDC)*.
- 5) Sinisme. Teks humor yang termasuk dalam jenis sinisme, antara lain: *Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK)*.

Konstruksi teks humor terangkum pada tabel 6 dan kemiripan keadaan *Republik Badut* dengan Republik Indonesia tercantum pada lampiran.

Tabel 5. Konstruksi Teks Humor

No	Teks	Humor	Jenis Humor
1.	<i>Dunia Batin Republik Badut (DBRB)</i>	Berfokus pada permainan kognisi yang berada di luar nalar (teori keganjilan).	ironi
2.	<i>Kinerja Rasa Kosmetika (KRK)</i>	Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan).	satir
3.	<i>Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG)</i>	Berfokus pada permainan kognisi yang berada di luar nalar (teori keganjilan).	satir
4.	<i>Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)</i>	Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan).	pelesetan dan ironi
5.	<i>Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL)</i>	Mengerdilkan pihak lain untuk memperoleh efek tawa (teori superioritas).	guyon parikenan
6.	<i>Tahun-tahun Sport Kantong dan Jantung (TSKdJ)</i>	Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan).	sair
7.	<i>Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan (UKdLJ)</i>	Berfokus pada permainan kognisi yang berada di luar nalar (teori keganjilan).	ironi
8.	<i>Awas Janji-janji Gombal Mukiyoo (AJGM)</i>	Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan).	guyon parikenan
9.	<i>Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB)</i>	Mengerdilkan pihak lain untuk memperoleh efek tawa (teori superioritas).	ironi
10.	<i>Anomali Komunikasi Rakyat Aparat (AKRA)</i>	Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan).	guyon parikenan
11.	<i>Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK)</i>	Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan).	sinisme
12.	<i>Bukan Lawak Senayan (BLS)</i>	Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan).	ironi
13.	<i>Karantina Generasi Republik Badut (KGRB)</i>	Berfokus pada permainan kognisi yang berada di luar nalar (teori keganjilan).	satir
14.	<i>Andai Gue Jadi Gubernur DKI (AGJGDKI)</i>	Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan).	satir
15.	<i>Menunggu Godot yang Datang Codot (MGyDC)</i>	Berfokus pada permainan kognisi yang berada di luar nalar (teori keganjilan).	satir

2. Konstruksi Wacana Perlawanan dalam Buku *Republik Badut*

a. Analisis Teks dalam Esai Humor Politik

Setiap teks secara bersamaan memiliki tiga aspek. Yang pertama, aspek representasi berkaitan dengan bagaimana keadaan dan tokoh digambarkan oleh penulis. Yang kedua, aspek relasi yang menggambarkan bagaimana penulis, pembaca, dan tokoh dalam esai ditampilkan. Yang ketiga, aspek identitas yang meliputi bagaimana identitas penulis, pembaca, dan tokoh digambarkan dalam teks.

1) *Dunia Batin Republik Badut (DBRB)*

Wacana yang dikembangkan dalam teks artikel humor politik *DBRB* adalah “kelucuan” sikap para penguasa negeri. *DBRB* termasuk dalam jenis humor dengan sindiran yang pedas. Dalam teks, para pemangku negeri, para elit penguasa, para pejabat Republik Badut disebut sebagai pelawak andalan karena “Mereka mahir menciptakan lelucon segar, bernyanyi dan bermain kata. Mereka tangkas beretorika, memoles citra dan tampil penuh pesona. Mereka terus membangun kharisma. Mereka sangat terlatih berbicara tentang apa saja”.

Teks artikel humor politik *DBRB* secara umum menggambarkan bagaimana kekurangajaran para penguasa negeri dan betapa menderitanya batin rakyat Republik Badut karena hal itu. Hampir keseluruhan teks menyampaikan sikap-sikap negatif para penguasa negeri yang merugikan masyarakat. Begitu besar harapan masyarakat yang dititipkan kepada para penguasa negeri tetapi mereka justru bersikap korupsi. Keadaan Republik

Badut digambarkan sebagai sebuah negeri yang berantakan karena sikap penguasanya yang seenaknya sendiri. Rakyat tidak dapat melakukan banyak hal untuk mengubah keadaan karena kritik, media, protes dan demo jalanan hanya dianggap angin lalu sehingga tidak ditangani dengan serius.

“Parlemen yang penuh anomali, eksekutif yang serba ambigu, dan yudikatif yang awut-awutan”, negara dijalankan tanpa ada visi yang jelas menjadikan Republik Badut serupa dipimpin oleh para pelawak andalan. Mereka digambarkan sebagai pelawak yang lebih lucu dari Srimulat yang terkenal di zamannya. Sebegitu banyaknya rentetan kesalahan para penguasa negeri yang dipaparkan menjadikan seolah tak satu pun kebaikan yang ada pada diri mereka. Teks juga menggunakan sindiran-sindiran halus dengan seolah tidak menyalahkan segala tingkah dan perilaku para penguasa negeri dengan alasan moralitas dasar dan ideologi yang menjadi pijakan memang tidak mengharuskan untuk mencari kebenaran, melainkan hanya menilai sekadar lucu atau tidak lucu.

Wacana kekurangajaran para penguasa negeri dapat dilihat dari bagaimana mereka ditampilkan (direpresentasikan) dalam teks. Bahasa yang disampaikan ada yang secara eksplisit juga ada yang secara implisit. Secara eksplisit mereka disebut memiliki perilaku yang “jauh dari harapan masyarakat”, “sangat koruptif”, “kolusi”, “nepotisme”, suka “bermain kata”, “tangkas beretorika”, “memoles citra”, pandai “bohong”, “cinta banget sama jabatan”, “mendapat fasilitas tak terbatas”, “mau serba enak”, dan “serba benar sendiri”. Secara implisit mereka disebut “pelawak Senayan yang

terhormat”, pelawak “Medan Merdeka Utara”, “mahir menciptakan lelucon segar”, mahir “bernyanyi”, mahir “menghibur”, “boleh korupsi sesuka hati”, “boleh kolusi sampai mati”, “boleh nepotisme asal orang sendiri”, “harus bergaji tinggi”, “mendapat tunjangan mencengangkan”, “harus tampil hebat”, “saat bicara harus tegak dan gagah”, dan “saat bepergian harus naik mobil mewah dan elegan”. Teks disusun dengan sindiran-sindiran, dari awal paragraf hingga akhir paragraf secara implisit menunjukkan bahwa betapa banyaknya kerusakan dan kesemerawutan yang terjadi di Republik Badut, betapa banyaknya kemalangan yang dirasakan oleh rakyat Republik Badut. Para pemangku negeri mendominasi dan menunjukkan hegemoninya kepada masyarakat, sehingga tidak ada ruang untuk rakyat ikut-ikutan berpolitik, menyampaikan protes dan demo karena sebenarnya para pemangku negeri Republik Badut hanya bertugas menghibur semata.

Selain sikap para penguasa negeri, suasana batin masyarakat Republik Badut juga dipengaruhi oleh keadaan negeri yang buruk. Hal tersebut disampaikan dengan keadaan “parlemen yang penuh anomali”, “eksekutif yang serba ambigu”, “yudikatif yang awut-awutan”, banyak skandal, banyak konspirasi, banyak isu politik yang timbul tenggelam, “republik tanpa visi”, “negeri main-main”, “alay”, “sublim”, “unpredictable” dan menyebut Republik Badut dengan sindiran negeri yang memiliki idealisme dan visi kinclong. Republik Badut bergerak tanpa visi, sehingga kehilangan arah dalam berjalan untuk sebuah tujuan yang tidak jelas. Pernyataan satu dengan

pernyataan lain berfungsi saling mendukung yang seolah menunjukkan bahwa republik tersebut tidak jelas arah tujuannya.

Perbuatan para penguasa negeri dan keadaan yang terjadi di Republik Badut disampaikan secara panjang lebar tanpa menyertakan pembelaan dari pihak elit politik sebagai penguasa negeri. Penjelasan dari para pejabat negeri mungkin dapat berupa sanggahan, alasan, atau paparan beberapa hal baik yang telah dilakukan. Namun, hal tersebut tidak ditemukan dalam *DBRB*. Seluruh teks menimpa kesalahan kepada para pemimpin, penguasa, elit politik, dan para pejabat negeri atas penderitaan yang dialami masyarakat Republik Badut selama ini. Mereka adalah pemimpin yang tidak becus dalam tugasnya, terlalu mementingkan kesenangan pribadi dan kebutuhan diri tanpa peduli bagaimana menderitanya rakyat saat itu, kebutuhan yang tidak terpenuhi dan kondisi negara yang merana.

Dilihat melalui tata bahasa yang tersusun dalam kalimat, yang muncul lebih banyak ialah kalimat dengan bentuk penggambaran keadaan dan proses mental. Hal itu mengartikan bahwa berbagai keadaan yang telah dipilih kemudian dikumpulkan dalam suatu teks kemudian dibungkus dengan pembentukan proses mental di dalamnya. Proses mental menampilkan sesuatu sebagai fenomena, tidak menunjuk kepada subyek/pelaku dan korban secara spesifik tetapi ia bertugas membentuk kesadaran masyarakat terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya.

Perilaku yang menyebabkan negara merana misalnya disampaikan melalui teks berikut.

Republik Badut adalah negeri main-main, bukan sungguhan. Negeri yang serba membolehkan. Boleh korupsi sesuka hati. Boleh kolusi sampai mati. Boleh nepotisme asal orang sendiri. Orang-orang penting di negeri ini harus bergaji tinggi, mendapat tunjangan mencengangkan. Mendapat fasilitas tak terbatas. Para pejabat harus tampil hebat. Saat bicara harus tegak dan gagah. Saat bepergian harus naik mobil mewah dan elegan. Jangan risaukan Negara merana. Jangan pedulikan apa saja kata media. Apalagi komentar tukang kritik yang sebenarnya sirik (*DBRB/V/2*).

Teks tersebut seolah menegaskan bahwa negara sedang dalam keadaan merana, masyarakat berada dalam keadaan kurang dan menderita. Semua itu terjadi karena korupsi, kolusi dan nepotisme di mana-mana, serta para pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa memedulikan kepentingan rakyatnya. Hal yang sama juga disampaikan pada teks-teks yang telah dipaparkan pada tabel analisis teks *DBRB* tersebut di atas. Semuanya menggasosiasikan bahwa semua penderitaan yang dialami rakyat Republik Badut disebabkan oleh perilaku para pejabat, para elit penguasa.

Wacana semacam itu juga dapat dilihat dari bagaimana relasi yang hendak dibangun dalam teks. Teks artikel humor politik DBRD ini menyertakan empat pihak yang berhubungan, yakni para elit penguasa, rakyat, Presiden Republik Badut dan para presiden dari berbagai negara di dunia. Dalam teks artikel humor politik ini Presiden Republik Badut dan para presiden dari berbagai negara di dunia hanya ditampilkan sekilas sebagai gambaran hiburan yang diproyeksi dalam batin dan bayangan masa depan Republik Badut. Praktis yang ditampilkan dalam teks secara jelas

hanya dua yakni para elit penguasa Republik Badut dan rakyat Republik Badut. Para elit penguasa digambarkan sebagai pihak yang dominan, pemimpin yang kurang ajar, karena tertawa di atas penderitaan masyarakat. Sementara masyarakat digambarkan sebagai kelompok yang tertindas, menderita, lemah sedangkan kesejahteraannya telah dititipkan kepada para pemimpin. Masyarakat sangat mengharapkan keadilan serta kesejahteraan melalui pemimpinnya. Kedua pihak tersebut tergambarkan dalam relasi siapa menguasai siapa, siapa menindas siapa. Para pemimpin menguasai rakyatnya, para pemimpin menindas rakyatnya. Rakyat sebagai pihak yang dikuasai penuh dan tertindas.

Identitas tokoh dalam teks serta penulis juga digambarkan dalam *DBRB*. Teks tersebut seolah menggambarkan khalayak pembaca berada pada posisi masyarakat dan bukan posisi para elit penguasa. Selain itu penulis juga seolah mengidentifikasi dirinya menjadi bagian dari khalayak pembaca atau masyarakat. Teks tidak mensugestikan kepada khalayak untuk memahami posisi para elit penguasa. Teks justru seolah berusaha membangunkan kesadaran khalayak pembaca sebagai masyarakat untuk bertindak dan tidak tinggal diam atas segala perilaku para pemimpin yang sesungguhnya sungguh menjadi penyebab merananya negeri Republik Badut tersebut. Ideologi perlawanannya terhadap para elit penguasa, para pemimpin negeri yang tidak berasa terhadap kinerjanya disuarakan melalui sindiran-sindiran dalam *DBRB*. Oleh karena itu, dalam teks artikel humor politik *DBRB* tersebut, dari awal hingga akhir berisi tentang keburukan dan

kekurangajaran para elit penguasa. Mereka menjadi musuh bersama bukan hanya bagi penulis karena korupsinya, kolusinya, nepotismenya dan keegoisannya sehingga menjadikan penderitaan bagi masyarakat.

2) *Kinerja Rasa Kosmetika (KRK)*

Wacana yang dikembangkan dalam teks artikel humor politik *KRK* adalah penolakan terhadap penghargaan yang ditujukan kepada sikap Presiden SBY. Hal itu mengenai pemberian penghargaan World Statesmen Award dari Appeal of Conscience Foundation, suatu yayasan antaragama bergengsi di Amerika Serikat, yang akan diberikan kepada Presiden SBY pada akhir Mei 2013. Teks merepresentasikan seolah Presiden SBY telah dinilai oleh ACF (*Appeal of Conscience Foundation*) sebagai presiden yang sukses mengatasi konflik, melindungi HAM umat beragama dan membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia. Sedangkan keadaan Indonesia tidak sedamai itu.

Penilaian yang bertolak belakang juga datang dari berbagai lapisan masyarakat. Presiden SBY seolah tidak peduli dengan berbagai komentar yang datang yang disebut dalam teks dengan istilah “mengulur keadaan dengan keheningan” Presiden SBY memang salah dengan bersikap diam saja terhadap reaksi keras yang telah banyak bermunculan. Namun, wacana yang dikembangkan oleh teks artikel humor politik *KRK* seolah menyudutkan Presiden SBY. *KRK* sama sekali tidak menyertakan tanggapan atau komentar dari Presiden SBY, mengapa ia menerimanya, mengapa ia seolah diam dan sebagainya. Seluruh uraian teks *KRK* tidak menyampaikan

keadaan dari sudut pandang Presiden SBY sendiri. Penulis memiliki wewenang untuk mengarahkan ke mana teks *KRK* akan dibawa, ke mana khalayak pembaca akan digiring. Ideologi perlawanan yang disuarakan oleh penulis disampaikan melalui sinisme.

Wacana penolakan terhadap penghargaan yang akan diberikan kepada Presiden SBY dapat dilihat dari bagaimana ia ditampilkan (direpresentasikan) dalam teks. Presiden SBY disebut dalam *KRK* telah “mencederai kehidupan bangsa”, maka seolah sangat tidak layak untuk mendapatkan penghargaan toleransi antarumat beragama. Andai penghargaan itu jadi diberikan dan Presiden SBY menerimanya, maka Presiden SBY disebut telah “menghina kelompok minoritas yang selama ini menjadi korban kekerasan”.

Sumber dari munculnya masalah mengenai penghargaan yang akan diberikan kepada Presiden SBY ialah ketidaktegasan Presiden SBY dalam menolak penghargaan yang sesungguhnya tidak layak diterima dan tidak sesuai dengan keadaan bangsanya saat itu. Presiden SBY memang hanya sebagai pihak yang pasif, yang jika penghargaan itu berencana akan diberikan padanya, maka ia pun hanya sekadar menerima, Toh bukan Presiden SBY yang meminta agar penghargaan itu diberikan padanya. Namun, Teks *KRK* seolah menimpakan segala masalah pada ketidaktegasan presiden semata dalam menolak. Kalimat dalam teks disusun sedemikian rupa sehingga membentuk pengertian tertentu terhadap sikap Presiden SBY.

Kalimat “*Kinerja Rasa Kosmetika*” yang dijadikan judul pada teks artikel humor politik ini, misalnya. Kalimat tersebut mengasosiasikan kinerja SBY dalam mengatasi konflik dan melindungi HAM antarumat beragama dianggap hanya sekadar kosmetika, untuk mendapatkan penghargaan dan pencitraan di kancah internasional semata. Khalayak pembaca bertanya-tanya akan hal itu, bagaimana mungkin hanya karena agar mendapat citra di kancah internasional seorang presiden mau menerima penghargaan yang tidak sesuai dengan kinerjanya. Bagaimana mungkin seorang presiden dapat menerima penghargaan yang justru menghina dan menyindir bangsanya sendiri. Padahal yang terjadi sebenarnya ialah masih banyaknya konflik yang dalam teks disebut, “berbagai kasus intimidasi, kekerasan, pembunuhan” di negaranya. Kalimat-kalimat yang tersusun dalam teks seolah mengarahkan persepsi bahwa jika Presiden SBY menerima penghargaan atas hasil kerjanya yang berupa kosmetika belaka artinya ia memiliki tujuan untuk sekadar mendapatkan nama dan citra yang baik atas dirinya di kancah internasional.

Relasi antar tokoh dalam teks juga berpengaruh dalam mengonstruksi sebuah wacana. Teks menyebutkan enam pihak yang saling berhubungan, yakni Presiden SBY, Dino Patti Djalal, yayasan ACF (Appeal of Conscience Foundation), Frans Magnis Suseno, masyarakat Indonesia, dan masyarakat Republik Badut. Dalam *KRK*, yayasan ACF memang disebut tetapi tidak ada keterangan atau pun argumen yang dapat ditampilkan dalam teks artikel humor *KRK*. Begitu juga keterangan dari pihak Presiden SBY,

tidak ada tanggapan atau komentar yang ditampilkan dalam *KRK*. Teks justru menampilkan komentar dari pihak Dino Patti Djalal, Jusuf kalla, dan Frans Magnis Suseno. Di dalam teks *KRK*, Dino mengutip pernyataan sikap Jusuf Kalla yang sependapat dengannya bahwa “Penghargaan ACF untuk Presiden SBY itu sebenarnya adalah kredit untuk bangsa Indonesia”. Sehingga penghargaan ACF tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa dan mengagetkan. Dino, Jusuf kalla, dan ACF seolah ditampilkan dalam relasi yang memihak kepada SBY dan mendukung diberikannya penghargaan tersebut.

Pada teks selanjutnya *KRK* menampilkan adanya reaksi keras yang datang dari berbagai lapisan masyarakat sebagai paparan yang bertolak belakang. Paparan yang berseberangan dengan Dino, Jusuf Kalla, dan ACF ditampilkan dengan detil dan dalam jumlah besar. Dengan cara seperti itu, teks menampilkan kepada khalayak pembaca, alangkah tidak bagusnya argumen dari pihak-pihak yang membela sikap tidak baik dari Presiden SBY. Dengan kata lain pendapat yang mengatakan bahwa penghargaan itu tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu dianggap luar biasa hanya ditampilkan sebagai pendapat minoritas saja dalam teks.

Kata ganti “kita” pada kalimat “Karena peristiwa itu terjadi di Republik Indonesia, kita serahkan saja bagaimana rakyat Indonesia menyikapinya”, merujuk pada penulis dan khalayak pembaca. Seolah keduanya memiliki kesepahaman dalam pemikiran menanggapi penghargaan yang akan diberikan kepada Presiden SBY tersebut. Teks *KRK*

menampilkan pihak masyarakat Indonesia dan ada juga masyarakat Republik Badut hanya untuk menyindir penyikapan terhadap keadaan yang sedang terjadi. Pembandingan penyikapan dari masyarakat yang seolah yang satu sebagai sikap yang ideal, yang satu lagi sebagai sikap yang kurang ideal. Relasi antara khalayak pembaca dan Presiden SBY yang dikonstruksi dalam teks juga ditampilkan pada paragraf akhir teks *KRK* sebagai berikut.

Begitulah. Lain ladang lain belalang. Lain lubuk lain ikannya. Masyarakat Republik Badut selalu punya cara untuk mengimbangi situasi yang bagaimana pun sublimnya. Tidak gampang kagetan, tidak gampang *gumunan*, karena mereka sudah menyadari sekian lama hidup dalam Badut! (*KRK/V/16*).

Teks menyatakan sindiran pedas terhadap para elit politik dengan mneyebutnya sebagai “Badut”. Presiden SBY digambarkan sebagai pemimpin yang bangga atas penghargaan yang akan diberikan sebagai apresiasi kinerjanya yang palsu soal HAM umat beragama di Indonesia. Sementara masyarakat digambarkan sebagai komunitas yang menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai moral. Kedua pihak ini bukan hanya digambarkan secara bertolak belakang. Namun, dengan meminjam argumen dari Frans Magnis Suseno, teks seolah mengajak masyarakat Indoensia untuk tidak menyukai sikap tidak tegasnya Presiden SBY dan pembelanya, sementara masyarakat menginginkan HAM umat beragama harus dibela dan berbagai konflik di dalam negeri harus diatasi dengan cara-cara yang bijak, bukan sekadar kosmetika di mata internasional.

Berkaitan dengan relasi, ialah identitas pihak-pihak yang terdapat dalam teks artikel humor politik *KRK*. Teks *KRK* menggambarkan

bagaimana pembaca diletakkan pada posisi masyarakat dan bukan pada posisi Presiden SBY. Teks tidak mensugestikan kepada khalayak pembaca untuk menyelami sisi baik dari permasalahan yang ada. Teks justru memposisikan khalayak pembaca agar turut menolak penghargaan yang akan diberikan kepada Presiden SBY dan diperkuat dengan pendapat dari Frans Magnis Suseno, rohaniawan dan Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara. Oleh karena itu, teks *KRK* dari awal sampai akhir berisi sindiran kepada Presiden SBY.

3) *Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG)*

Wacana yang dikembangkan dalam artikel humor politik *HPKG* ini ialah beberapa hiburan yang terjadi di Republik Badut. Terdapat tujuh hiburan yang diwacanakan di dalamnya, antara lain 1) MKRI yang rajin mengingatkan pemangku negeri menjelang akhir jabatannya dan justru dituduh akan melakukan kudeta, 2) presiden yang gencar mencencar menteri-menteri berangkap jabatan tapi justru presiden sendiri merangkap jabatan sebagai ketua umum partai, 3) rumor akan adanya penyesuaian nilai uang dari 1000 perak menjadi satu perak yang dianggap malapetaka baru bagi rakyat kecil, 4) rencana pemasukan kasus santet, ilmu gaib, kumpul kebo, pornografi, pornoaksi dalam pasal-pasal tambahan di KUHP yang dianggap memiliki daya bunuh pada salah satu warisan budaya nenek moyang, 5) Kasus Adi Bing Slamet dan Eyang Subur yang tidak jelas latar belakang sengketanya, 6) Terucapnya kata “ksatria” oleh presiden kepada belasan pelaku pembunuhan kepada empat tahanan yang dititipkan sementara di

lembaga pemasyarakatan Cebongan, Sleman, di Yogyakarta. Keenam wacana tersebut disampaikan secara singkat tetapi seolah menjadi sindiran yang dalam, dan 7) Pemandangan para pelaku penjarahan uang negara yang tampil santai penuh senyum bak selebriti.

Keenam wacana tersebut menggambarkan betapa buruknya keadaan negeri Republik Badut dan kesemuanya dikarenakan oleh betapa buruknya sikap para elit penguasanya. Kasus pertama, MKRI yang rajin mengingatkan pemangku negeri menjelang akhir jabatannya agar dimanfaatkan dengan baik untuk fokus menyelesaikan berbagai persoalan negeri yang masih menggantung. Sikap itu seolah membela kepentingan rakyat padahal sebenarnya sikap MKRI tersebut bertujuan agar presiden setelah meletakkan jabatannya dapat meninggalkan kenangan yang bersih, indah, dan memorable sehingga masyarakat dapat beramai-ramai menyambut pemimpinnya dengan turun ke jalan bersama ribuan masa lainnya.

Teks itu secara umum menggambarkan sindiran terhadap para elit penguasa, yakni MKRI dan presiden yang sikapnya selama ini seolah hanya topeng untuk mengelabuhi masyarakat awam saja. Teks ini tampak tidak menghakimi presiden secara frontal karena disampaikan dengan bahasa humor yang ringan. Namun, sesungguhnya teks ini tidak menyetujui sikap dari presiden yang seolah menyepelekan tanggung jawab yang diemban dan seolah kurang berpihak terhadap nasib rakyatnya. Hal tersebut tergambar

dari tidak ditampilkannya pembelaan atas pemojokan posisi presiden yang seolah kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban.

Wacana sindiran terhadap kinerja presiden selama masa jabatan dapat dilihat dari bagaimana presiden direpresentasikan dalam teks. Ia disindir bahwa pemberitahuan MKRI kepadanya bukanlah kudeta, tapi *good will* yang simpatik agar ia dapat dapat meninggalkan kenangan yang bersih, indah, dan *memorable* di akhir jabatannya. Hal semacam itu mengartikan bahwa kinerja presiden benar-benar tidak maksimal. Masih banyaknya persoalan negeri yang masih menggantung belum terselesaikan hingga di akhir jabatannya. Presiden justru sibuk mengurus urusan internal pribadi maupun internal partainya. Hal tersebut disampaikan pada teks sebagai berikut.

Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) – yang rajin mengingatkan pemangku negeri menjelang akhir jabatannya dimanfaatkan dengan baik untuk fokus menyelesaikan berbagai persoalan negeri yang masih menggantung. Maksudnya tentu saja supaya waktu yang tinggal sedikit itu tidak banyak terganggu oleh urusan internal pribadi maupun internal partainya seperti: fakta integritas, misalnya dan banyak lagi lainnya urusan-urusan yang tidak porsional dan proposional untuk kapasitas dirinya. Bukankah itu sebuah *good will* yang simpatik? Sangat mudah ditebak apa yang menjadi harapan MKRI, agar beliau meletakkan jabatannya sebagai presiden, dapat meninggalkan kenangan yang bersih, indah, dan *memorable*.

Kasus kedua, sang presiden yang sebelumnya tampak gencar mencecar menteri-menterinya kemudian dia sendiri memberi contoh yang bertolak belakang dari apa yang dikatakannya sendiri, ia merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Wacana perlawanan terhadap presiden yang merangkap jabatan direpresentasikan dalam kalimat “tanpa merasa risau dia

sendiri memberi contoh presiden yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai". Frasa "tanpa merasa risau" mengasosiasikan keburukan nurani seorang presiden yang tidak memiliki rasa bersalah atau gelisah ketika melakukan kesalahan yang menyakiti hati orang lain. Kemudian pengelabuhan untuk menutupi kesalahannya direpresentasikan dalam teks dengan "Agar tidak terlalu mencolok mata, dia juga memilih dua menterinya (orang sendiri) supaya merangkap jabatan tanpa mempedulikan menteri-menteri yang pernah dicecarnya". Teks seolah memberi justifikasi bahwa sikap presiden sungguh buruk dan sikap mencecar menteri yang merangkap jabatan sama sekali tidak memberi makna apapun bagi masyarakat.

Kasus ketiga mengenai penyesuaian nilai uang dari 1000 perak menjadi satu perak. Atas kasus ini Republik Badut mendapat sindiran dengan kalimat "negeri yang dikenal kreatif dan banyak kejutan". Alasan utama pengerdilan mata uang ini ialah masyarakat yang kerepotan membawa uang (fisik) banyak tapi bernilai nominal rendah, bukan karena faktor yang lebih penting dan fundamental. Usulan penyesuaian ini disebut dengan kata buruk seperti "keisengan" dan "mendatangkan malapetaka baru bagi rakyat kecil". Rencana pemerintah itu bukan disebabkan oleh sesuatu yang sangat penting dan fundamental demi kepentingan rakyat kecil tetapi hanya sebatas keisengan belaka. Seluruh teks terkait penyesuaian mata uang ini seolah menjadi wacana perlawanan terhadap para elit penguasa dan menimpa kesalahan sepenuhnya kepada para elit penguasa yang sering

mengejutkan dengan “keisengan” mereka dan faktor emosional belaka. Kasus itu mengasosiasikan kepada khalayak betapa sepeleanya alasan yang digunakan elit penguasa untuk mengubah-ubah keadaan. Seolah tanpa adanya perasaan bersalah kepada masyarakat atas usulannya yang tidak jelas.

Kasus keempat merupakan wacana yang ramai dibicarakan ketika itu, tentang rancangan KUHP yang akan memasukkan pasal-pasal tambahan mengenai kekuatan supranatural, kumpul kebo, pornografi dan pornoaksi. Wacana perlawanan disuarakan melalui kalimat eksplisit seperti “pasal-pasal itu sangat jelas memiliki daya bunuh pada salah satu warisan budaya nenek moyang”. Sebuah rencana yang bagus tetapi dalam teks ini yang lebih ditonjolkan untuk dikomentari ialah efek sampingnya. Hal tersebut seolah menjadi perhatian utama bagi penulis untuk tidak menyetujui rancangan pasal tambahan yang akan dimasukkan tersebut.

Kasus kelima mengenai hiburan yang disuguhkan dalam Republik Badut yakni perseteruan Adi Bing Slamet dan Eyang Subur. Kasus ini bukan ingin mewacanakan ideologi perlawanan penulis terhadap Adi bing Slamet atau Eyang Subur. Wacana ini hanya semacam penambah deratan hiburan di Republik Badut yang memperjelas predikat Republik Badut sebagai negeri yang kreatif dan penuh kejutan.

Kasus keenam mewacanakan pembunuhan terhadap seorang anggota Kopassus Angkatan Darat di sebuah kafe di Yogyakarta oleh sekelompok preman dan penyerbuan “balas dendam” oleh sekelompok orang bersenjata

ke lembaga pemasyarakatan Cebongan, Sleman, di Yogyakarta, yang menewaskan keempat tahanan tersangka pelaku pembunuhan yang dititipkan sementara di penjara tersebut. Penulis lebih rinci membahas kasus balas dendam tersebut dari pada kasus pembunuhan terhadap seorang anggota Kopassus Angkatan Darat.

Wacana balas dendam sekelompok orang itulah yang kemudian mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, tak terkecuali presiden yang menyampaikan apreiasinya secara terbuka dengan menyebutnya “ksatria”. Kata itu yang kemudian seolah melahirkan sebuah perlawanan dari penulis terhadap sikap presiden yang ingin disuarakan kepada khalayak pembaca. Kata “ksatria” mengasosiasikan sikap positif dan seolah menunjukkan kecondongan presiden terhadap kesebelas pelaku pembunuhan.

Dalam teks, masalah dibatasi hanya pada kata “ksatria” bukan pada keseluruhan pernyataan dari presiden, tidak dirunut. Itulah pokok permasalahan yang ingin dibahas penulis. Teks menyampaikan informasi bahwa tidak seharusnya presiden mengucap kata “ksatria” untuk seorang pembunuh berencana, seakan pelaku itu terbebas dari salah dan justru mendapat pujian atas perbuatan jahatnya. Hal tersebut disampaikan penulis secara eksplisit pada teks sebagai berikut.

Tentang terucapnya kata ksatria oleh Presiden sehubungan dengan pengakuan itu tentu saja membuat banyak kalangan bertanya-tanya bagaimana bisa belasan pasukan membunuh orang yang disebutnya preman dalam tahanan dan tanpa bisa melakukan perlawanan apa-apa disebut ksatria? Ya, andai cukup mengatakan berterima kasih karena mau jujur dan terbuka, persoalan kata ksatria jelas akan berbeda; karena ia telah mengandung muatan makna yang

telah disepakati sebagai tindakan murni positif dan membanggakan (*HPKG/XVI/23*).

Kalimat-kalimat tersebut di atas disusun sedemikian rupa sehingga membentuk pengertian baru bagi khalayak pembaca. Khalayak pembaca dapat ikut bertanya-tanya bagaimana bisa belasan pasukan membunuh orang yang disebutnya preman dalam tahanan dan tanpa bisa melakukan perlawanan apa-apa disebut ksatria? Teks ini mengasosiasikan presiden adalah seorang yang tidak bijaksana dan tidak adil dalam memandang sebuah masalah. Alangkah mudahnya menyampaikan pernyataan yang berpotensi mendatangkan perpecahan dalam masyarakat, menyakiti pihak satu dan menguntungkan pihak lainnya sedangkan kedua belah pihak berada dalam kasus yang sama pada saat itu.

Kasus ketujuh. Ekskalasi kekerasan dan agresivitas masyarakat yang semakin mencolok dan meluas dikarenakan meniru gaya para elit penguasa yang melakukan “kekerasan” penjarahan uang negara dan tampil penuh senyum bak selebriti. Tidak ada informasi secara detail mengenai kasus ini. Ideologi perlawanan penulis hanya disurakan lewat pribahasa “Buah jatuh tak pernah jauh dari pohonnya” yang sekaligus juga sebagai penutup teks artikel humor politik *HPKG*.

Ideologi perlawanan dari ketujuh kasus yang labeli sebagai hiburan Republik Badut tersebut juga dapat dilihat dari bagaimana relasi yang dibangun dalam teks. Teks artikel ini secara garis besar menyertakan tiga pihak yang paling berhubungan, yakni elit penguasa, rakyat kecil dan penulis. Dalam teks, terdapat kata “kita” yang menunjuk pada penulis dan

khalayak pembaca. Hal itu seolah menunjukkan relasi kedekatan senasib antara mereka.

Penulis dan khalayak pembaca (meliputi rakyat kecil dan masyarakat pada umunya) digambarkan sebagai pihak yang dirugikan dan ditindas secara diam-diam oleh elit penguasanya sendiri. Mereka menuntut keadilan dan kesejahteraan dalam hidupnya yang telah dititipkan dan dipercayakan kepada mereka pemegang kuasa. Sementara elit penguasa (termasuk presiden) digambarkan sebagai pihak yang seolah selalu menjajah masyarakatnya dengan kalimat semu tidak berbukti, menindas, menyakiti dan hanya mau menang sendiri. Kedua pihak itu bukan hanya digambarkan sebagai pihak yang saling bertolak belakang, tetapi penulis juga menyuarakan ideologi perlawanannya yang tersembunyi melalui kalimat-kalimat yang disusun sedemikian rupa dan sindiran-sindiran halus hingga menghujam untuk menumpas kejahanan, menuntut keadilan, dan mengharapkan kesejahteraan. Bahwa elit penguasa yang ada saat ini dengan segala sikapnya yang buruk dan semaunya bukan hanya menjadi musuh penulis melainkan juga musuh bersama.

4) *Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)*

Teks artikel humor politik *HKRP* ini mengisahkan tentang beberapa humor yang sedang ramai dibicarakan kala itu oleh masyarakat Indonesia. Salah satu di antaranya ialah mengenai kasus Ahmad Fathanah yang terjerat kasus kuota impor daging sapi dan penyucian uang yang dikaitkan dengan sejumlah wanita cantik. Wacana yang dikembangkan dalam pembicaraan

kasus Ahmad Fathanah ialah sikap koruptif Ahmad Fathanah. Ia digambarkan sebagai orang yang tidak disangka masyarakat akan melakukan hal buruk tersebut. Ketidakmendugaan masyarakat tersebut ditampilkan teks, sebagai berikut.

Di negeri serius, yang kepala negaranya jarang tersenyum dan tampak menderita, tak mungkin hal-hal yang dapat mengacau dan menyengsarakan rakyat itu dapat terjadi. Selain orang-orang yang disebutkan itu berasal dari partai bersih berbasis agamis, juga mana mungkin mereka tega melukai kepercayaan rakyat yang memilih mereka sendiri. Itulah masalahnya. Itulah seharusnya! (*HKRP*/VI/26-27)

Selain kasus korupsi, Ahmad Fathanah juga menjadi sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia atas kedekatan dan aliran dana kepada setidaknya 40 wanita cantik. Memang teks tidak menghakimi kasus tersebut sebagai upaya penyucian uang atau bagian dari gratifikasi seks. Namun, kedua kosa kata tersebut, yakni “penyucian uang” dan “gratifikasi seks” seolah memberikan predikat pilihan yang sama-sama jelek bagi Ahmad Fathanah, kosa kata yang melekatkan makna negatif dan buruk kepadanya. Predikat yang buruk juga disampaikan penulis dengan merepresentasikan Ahmad Fathanah dengan kata “Syur”. Dalam KBBI (Departemen Pendidikan Nasional, 2013: 1369) kata /syur/ memiliki arti ‘sesuatu yang sangat menarik hati’ sedangkan kata “syur” dalam teks *HKRP* ditempatkan di antara dua tanda petik. Hal tersebut seolah menjadikan makna yang dibawanya tidak hanya sekadar sesuatu yang menarik hati. Kemudian dilihat pada konteks kalimat pada paragraf sebelumnya yang membahas mengenai kedekatan dan transaksi kepada setidaknya 40 wanita cantik di berbagai titik

lokasi dan destinasi, maka “syur” memiliki makna yang condong kepada seks dan perempuan yang menggoda.

Dalam teks tidak ditemukan pembelaan terhadap Ahmad Fathanah. Sindiran-sindiran tepat dialamatkan kepadanya dengan berpanjang lebar. Yang tergambar adalah seorang elit politik dari partai bersih berbasis agamis yang tega melukai kepercayaan rakyat. Seluruh uraian teks terkait Ahmad Fathanah merepresentasikan perlawanan tersembunyi seorang penulis terhadap para elit politik yang tega melukai kepercayaan rakyatnya dan seolah mengajak khalayak pembaca untuk sadar akan keadaan politik yang sedang terjadi di negaranya dan kemudian kesadaran itu seolah diharapkan penulis untuk menjadi pendukung dalam perlawanannya secara diam-diam melawan penindasan elit politik yang dilakukan kepada rakyatnya sendiri.

Wacana mengenai kementerian juga diusung dalam teks. Kejahatan para parpol penguasa yang menjadikan kementerian sebagai “kapling mesin dana”. Kejahatan itu sesungguhnya bukanlah kejahatan parpol penguasa terhadap kementerian, melainkan kejahatan itu dilakukan bersama-sama oleh mereka semua dari parpol berkuasa, koalisi, dan kementerian demi mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan saja untuk menindas rakyat secara diam-diam dan mengkhianati kepercayaan rakyat atas amanah yang diembannya.

Kementerian direpresentasikan dalam teks dengan istilah “kapling mesin dana”, yang artinya kementerian siap memberikan dana sesuai dengan permintaan demi kepentingan golongan dan sesuai dengan jumlah yang

dibutuhkan. Istilah semacam itu mengasosiasikan wacana semata pada keburukan parpol berkuasa, koalisi dan kementerian yang seolah memiliki kesamaan tujuan yakni menindas rakyat secara diam-diam dan mengkhianatinya. Tidak ada hal baik yang disampaikan penulis dalam teks tersebut soal parpol berkuasa, koalisi maupun kementerian. Semuanya seolah buruk di mata penulis dan masyarakat Indonesia. Susunan kalimat semacam itu tidak hanya struktur belaka melainkan memiliki makna dan maksud yang ingin disampaikan penulis kepada khalayak pembaca. Ideologi perlawanan penulis terhadap elit penguasa yang selama ini sebenarnya banyak merugikan rakyat, melukai hati rakyat, dan melakukan pengkhianatan atas janji yang telah dipercayakan. Namun, kejahatan tersebut juga direpresentasikan penulis dengan istilah yang halus, “melukai kepercayaan rakyat” bukan menggunakan kata kasar dan keras seperti “menindas” atau “mengkhianati”. Melalui sindiran dan kelembutan penyampaian inilah sesungguhnya ideologi perlawanan yang tegas dan serius dari penulis disembunyikan dan itulah esensi yang seolah ingin disuarakan kepada khalayak pembaca.

Selanjutnya ada pernyataan sindiran lain yang disampaikan penulis mengenai parpol. Sebagai berikut.

Mulanya saya tidak percaya rumor itu. Mustahil parlemen yang bertugas sebagai wasit juga ikut main sepakbola, ikut memberi sanksi, bahkan ikut bertepuk tangan layaknya penonton. Tetapi aneh bin ajaib. Bukan hanya eksekutif yang main, legislatif dan yudikatif juga ada yang tergoda bermain ke sana. Itu memang faktanya (*HKRP/IX/28*).

Artinya semua para politisi dan pejabat publik di Indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki kecenderungan yang sama yakni kompak, bersama-sama melakukan korupsi. Tontonan yang mengagetkan dan kemudian menjadi biasa dilakukan oleh para pejabat publik dan seolah menjadi ideologi baginya. Hal itu disampaikan penulis pada kalimat dalam paragraf selanjutnya dengan sebuah pertanyaan, “Kalau itu bermula dari niat pribadi, mengapa terjadi nyaris serempak di semua parpol yang mendapatkan kesempatan menduduki posisi-posisi tertentu? Apakah ideologi mereka telah berubah”.

Fakta lain dari teks artikel humor politik *HKRP* ialah kontroversi mengenai penghargaan World Statement Award dari Appeal of Conscience Foundation, suatu yayasan antaragama bergengsi di Amerika Serikat, yang ternyata telah diterima presiden SBY pada akhir Mei 2013. Jika pada teks artikel humor politik sebelumnya, *KRK*, dibicarakan hal serupa. Namun, pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menerimanya. Penulis seolah menentang dan menyuarakan bentuk protesnya terhadap adanya rencana pemberian penghargaan itu dengan menjabarkan beberapa alasan yang seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhono dan Indonesia belum layak mendapatnya. Kali ini, setelah fakta telah sampai bahwa penghargaan telah diterima maka penulis menyampaikan reaksinya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Hal itu direpresentasikan dalam kalimat “Apapun sisa opini yang mengiringi keputusan Presiden

SBY, kenyataannya penghargaan itu sudah diterimanya. Klimaks atau antiklimaks, masyarakat yang menilai”.

Kesemuanya, bagaimana para elit politik dan para penguasa direpresentasikan dalam teks seolah mengasosiasikan kesalahan dan permasalahan di negeri Indonesia sesungguhnya disebabkan oleh kesewenangan para elit penguasa, khususnya para parpol politik berkuasa yang serempak melakukan korupsi, bermain dengan bekerja sama untuk menduduki posisi-posisi tertentu yang strategis sehingga dapat mengendalikan uang rakyat semaunya dan menikmatinya bersama-sama kelompok.

Partisipan humor yang disebut dalam teks dan digolongkan dalam pihak elit penguasa antara lain AF (Ahmad Fathanah), Aceng Fikri, menteri-menteri dari partai berkuasa dan koalisi, kementrian, presiden, eksekutif, legislatif, yudikatif dan para politisi. Dalam teks, kesemuanya digambarkan sebagai pihak yang selalu membuat berita heboh dengan sikapnya yang semena-mena terhadap rakyat, koruptif dan merugikan masyarakat. Hal itu yang direpresentasikan penulis dalam teks dengan hiburan berupa humor dari para elit penguasa. Sementara masyarakat digambarkan sebagai pihak yang menderita karena ulah elit penguasanya, pihak yang nurut dan tidak tahu apa-apa, pihak tidak dapat berbuat banyak, pihak yang disakiti hatinya, pihak yang dikhianati kepercayaannya. Kedua pihak tersebut ditampilkan secara bertolak belakang dalam teks.

Terdapat juga beberapa partisipan dalam teks yang disebut dalam *HKRP*, seperti Alek Ferguson, Arwah Setiawan, LHI, Presiden SBY, Soeharto, dan Ramos Horta. Dalam teks artikel, nama-nama tersebut memang disebut tetapi kesemuanya hanya dijadikan sekadar lelucon singkat tanpa penjelasan panjang lebar. Tidak adanya penjelasan ini menyebabkan dalam teks artikel humor tersebut tidak ada informasi yang memadai terkait argumen penulis yang hendak disuarakan sebagai ideologi perlawanan tersembunyi terhadap mereka.

Selanjutnya terkait identitas pihak-pihak yang diberitakan dalam teks. Teks menggambarkan pembaca sebagai bagian dari pihak masyarakat dan bukan pada posisi elit politik atau elit penguasa. Teks tidak memberikan sugesti positif kepada pembaca tentang para elit politik atau elit penguasanya. Apa alasan melakukan korupsi atau bagaimana runtutan cerita hingga bisa predikat koruptor sampai menempel padanya. Teks justru menggiring khalayak pembaca agar sadar atas kondisi politik yang telah terjadi di sekitarnya, seperti apa sebenarnya kejahatan para elit politik kepada rakyatnya sendiri, kejahatan penguasa terhadap masyarakatnya. Penulis seolah sengaja menyampaikan ideologi perlawanannya secara tersembunyi melalui humor dan terkadang sinisme kepada para penguasa negeri yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, dalam teks artikel humor politik *HKRP* berisi mengenai keburukan dan kejahatan diam-diam yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Maka penulis seolah membuka tabirnya, menguak dan berusaha menunjukkan kepada khalayak pembaca agar

mereka sadar politik, dan jangan sampai mau diinjak-injak oleh penguasanya begitu saja.

Pada umumnya wacana akan lebih menguntungkan kelompok elit atau kelompok dominan yang berkuasa. Namun, penulis teks, seolah melawan dominasi itu dan lebih memihak rakyat untuk menyuarakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para koruptor, para penjahat negeri, para elit politik berkuasa yang sewenang-wenang seolah ingin dijadikan musuh bersama masyarakat bukan hanya menjadi musuh penulis saja.

5) *Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL)*

Teks artikel humor politik *PPPL* ini mengisahkan tentang dua hal. Pertama, skeptisnya sikap rakyat terhadap kegiatan nyoblos dan kedua, maraknya kasus korupsi yang dilakukan anggota parpol politik. Wacana yang dikembangkan dalam artikel ini adalah ketidakadilan dan ketidaktahan diri para pejabat negeri. Mereka bukan hanya digambarkan sebagai pihak yang tidak memahami penderitaan rakyat miskin tetapi juga sikap mereka yang digambarkan semena-mena dan mendominasi segalanya. Semua sikap itu kemudian melahirkan sikap skeptis dan masa bodoh dari rakyat.

Teks artikel humor *PPPL* ini secara umum lebih menggambarkan sebab mengapa rakyat menjadi skeptis dan masa bodoh terhadap pencoblosan daripada membicarakan sikap skeptis itu sendiri. Sikap skeptis dan masa bodoh rakyat tersebut sebenarnya memang tidak baik. Melalui

kacamata zaman otoriter, bukan kaca mata penulis, sikap tersebut direpresentasikan dalam teks dengan kategori “warga negara yang kurang baik”. Akan tetapi wacana yang dikembangkan dalam artikel *PPPL* ini lebih pada pertentangan terhadap para parpol dan elit politik. Teks lebih berpanjang lebar dalam pembelaannya terhadap rakyat dan pencibirannya terhadap pemerintah.

Terdapat ideologi kaum borjuis yang dilekatkan melalui stigma “warga negara kurang baik” bagi mereka yang tidak mencoblos. Kaum borjuis mengantisipasi banyaknya golput sehingga mereka melalui kekuasaannya meliburkan hari pencoblosan itu sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Namun, penulis dengan membawa ideologi perlawanannya menyuarakan ketimpangan yang selama ini dianggap masyarakat sebagai sebuah pemakluman. Ideologi tersebunyi dari penulis yang menentang ideologi borjuis yang ada selama ini disampaikan dengan tata bahasa yang berbentuk proses mental. Hal ini selengkapnya dapat dilihat melalui tabel dalam korpus data pada lampiran. Dalam teks ditemukan sembilan tata bahasa dalam kalimat berbentuk proses mental dan 6 tata bahasa dalam kalimat berbentuk keadaan.

Tata bahasa yang ditampilkan dalam bentuk keadaan dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu yang telah terjadi dan tata bahasa yang ditampilkan dalam bentuk proses mental dimaksudkan untuk menampilkan sebagai fenomena dan bertujuan untuk membentuk kesadaran khalayak pembaca atau masyarakat. Sebagai contoh, kalimat “Maka respon

ekstremnya, mereka mau mencoblos kalau dapat ganti upah satu hari kalau tidak lebih baik mereka memilih untuk bekerja” (*PPPL/II/53*) ditampilkan sebagai keadaan, sedangkan kalimat “Banyaknya pemberitaan serba miring tentang parpol, akhirnya menumpuk sebagai klimaks sikap rakyat yang skeptis dan masa bodoh” (*PPPL/I/53*) ditampilkan sebagai proses mental. Keadaan maupun proses mental tersebut merupakan bentuk proses yang disampaikan penulis melalui tata bahasa dalam kalimat.

Teks seolah menampilkan parpol, pemerintahan dan negara sebagai pihak yang paling bersalah dalam penderitaan yang dialami rakyat kecil. Rakyat direpresentasikan sebagai pihak yang “skeptis”, “masa bodoh”, “warga negara yang kurang baik”. Namun, representasi tersebut tidak digunakan untuk menyudutkan rakyat tetapi justru digunakan untuk menyerang, memprotes dan menuntut para elit penguasa yang seolah tidak becus dalam memimpin. Teks menampilkan satu sisi positif elit penguasa, sebagai berikut.

Kini di zaman yang berbeda mereka telah dapat mengkalkulasi pegawai negeri atau swasta mendapatkan kesempatan untuk nyoblos dan itu tidak mengurangi hak bulanan (gaji) yang bakal mereka terima. Beberapa instansi, bahkan, meliburkan hari pencoblosan itu sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang partisipasinya sangat penting dalam menentukan warna politik pemerintahan daerah di masa mendatang (*PPPL/III/53-54*).

Negara memberikan libur saat hari pencoblosan kepada pegawai negeri dan swasta agar mereka turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tanpa mengurangi gaji. Namun, teks tersebut ditampilkan bukan digunakan sebagai pegangan positif bagi elit penguasa melainkan keadaan itu

disampaikan untuk dikomentari dan dibuat menjadi tidak *legitimate*. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana teks yang muncul tepat setelahnya, sebagai berikut.

Aturan pemilu sejak republik ini berdiri, tidak pernah menghitung warga berkategori tenaga atau buruh lepas. Warga yang hidup matinya bergantung dari waktu dan tenaganya hari itu. Tidak bekerja, tidak ada penghasilan tidak ada yang bisa dimakan. Itulah sosok-sosok nyata kemiskinan sejati. Hingga kini, bahkan Negara yang meminta-minta sumbangan kepada mereka, berupa luangan waktu untuk nyoblos atau berpartisipasi dalam *event* politik. Bukankah ini tidak adil dan tak tahu diri. Setelah ritual politik pemilihan kepala daerah, nasib para buruh lepas itu tetap sama atau bahkan makin terpuruk, siapa peduli? (*PPPL/IV/54*).

Melalui strategi wacana, menempatkan susunan wacana yang saling bertentangan, penulis seolah ingin menampilkan kepada khalayak pembaca betapa tidak bagusnya sikap elit penguasa terhadap rakyat miskin. Tekst merepresentasikan buruh lepas sebagai “sosok-sosok nyata kemiskinan sejati” yang justru lepas dari kepedulian pemerintah. Pesta demokrasi justru direpresentasikan sebagai “beban bagi masyarakat buruh lepas”. Kata-kata buruk yang dilekatkan kepada elit penguasa dan pesta demokrasinya menjadi tanda bahwa ada ideologi perlawan yang ingin disuarakan oleh penulis melalui *PPPL*. Keadaan yang digambarkan dalam teks menjelaskan bahwa setelah pemilihan pemimpin, nasib buruh tetap sama atau bahkan “semakin terpuruk”.

Justifikasi pada sistem dan pemerintahan seolah melimpahkan kesalahan kepada elit penguasa. Ini dapat dilihat dari bagaimana kalimat-kalimat disusun sehingga membentuk pengertian tertentu. Teks berikut,

Maka jangan heran kalau ada rakyat yang menggunakan kedaulatannya untuk skeptis karena mereka harus menolong dirinya sendiri. Karena tak juga ada perubahan dan perbaikan untuk nasibnya kendati ratusan peristiwa politik hilir mudik di hadapan mereka (*PPPL/V/54-55*).

mengasosiasikan sikap skeptis rakyat sebagai bentuk kedaulatan atas dirinya sendiri dan sebagai cara untuk menolong dirinya sendiri. Teks mengasosiasikan sikap tidak mencoblos adalah hal yang wajar, teks mengeksklusi tujuan baik demokrasi dalam artikel *PPPL*.

Wacana juga dilihat dari bagaimana relasi yang hendak dibangun dalam teks. Teks berita menyertakan lima pihak yang saling berhubungan, yakni parpol, masyarakat buruh lepas, masyarakat menengah dan terdidik, pejabat publik, dan penulis atau pengarang. Dalam teks *PPPL*, meskipun penulis atau pengarang disebut di dalamnya tetapi tidak terdapat keterangan yang banyak mengenai dirinya. Mereka tidak memiliki hubungan kental dalam kasus yang dibahas dalam *PPPL*. Mereka hanya disebut untuk dijadikan pembanding atas para politisi yang berada di balik institusi. Para politisi dapat memasukkan dan mencoret pasal atau ayat undang-undang yang bernilai miliaran hingga puluhan milliar, sedangkan para penulis atau pengarang meskipun menulis beratus-ratus bahkan beribu-ribu kalimat “Penghargaan terhadap kalimat itu sungguh jauh dari memadai”.

Relasi yang tergambaran dalam teks ialah relasi antara masyarakat buruh lepas dengan parpol, relasi antara masyarakat menengah dan terdidik dengan parpol. Masyarakat buruh lepas maupun masyarakat menengah terdidik diposisikan memiliki hubungan pertentangan dengan parpol.

Hubungan pertentangan tersebut dibahasakan penulis dengan sikap “skeptis” terhadap parpol. Dua pihak, masyarakat (meliputi masyarakat buruh lepas dan masyarakat menengah terdidik) dan parpol, digambarkan secara berbeda dalam teks.

Masyarakat digambarkan sebagai pihak yang menginginkan keadilan, kemajuan, kesejahteraan, kebersamaan, keindahan, keharmonisan hidup bernegara. Sementara parpol, yakni manusia-manusia yang berada di balik institusi digambarkan sebagai pemimpin yang kurang baik, yang tidak dapat mewujudkan keadilan, kemajuan, kesejahteraan, kebersamaan, keindahan, keharmonisan hidup bernegara dikarenakan keegoisan dan kekoruptifan mereka atas rakyat.

Kedua pihak digambarkan secara bertolak belakang. Kemudian seolah terciptalah relasi di mana masyarakat ingin sekali melawan dan menumpas ketidakadilan dari para politisi negeri dengan caranya sendiri, sedangkan para politisi negeri adalah pelaku koruptor berjamaah, yang senang menjadikan masyarakat objek lips service belaka, yang tidak peduli terhadap penderitaan dan suara rakyat sesungguhnya, yang kebaikannya penuh pamrih, yang tidak membawa masyarakat menuju hidup maju dan sejahtera tetapi justru “makin menuju jurang kehancuran” yang kesemuanya itu ingin sekali dihukumi dengan adil dan ditumpas oleh masyarakat.

Menurut Norman Fairclough, tiga kategori partisipan ialah penulis, tokoh dalam teks, dan khalayak pembaca. Selain relasi yang tergambar antar pihak di dalam teks, juga tergambar pola hubungan yang seolah terjalin kuat

antara penulis dengan pihak di dalam teks, serta hubungan antara penulis dengan khalayak pembaca. Oleh karena teks berbentuk artikel humor politik, sehingga kedekatan teks dengan penulis lebih personil daripada penulisan sebuah teks berita. Sindiran “parpol bodrex” dari penulis yang ditujukan kepada para parpol yang dibiarkan mencari penghasilan sendiri hanya dengan dibekali kartu identitas, menggambarkan konstruksi hubungan perlawanan yang seolah berasal dari penulis secara pribadi. Khalayak pembaca dihubungkan dengan masyarakat Republik Badut pada umumnya dan ideologi perlawanan itu disuarakan penulis kepada khalayak pembaca melalui teks yang telah dikonstruksi penulis sedemikian rupa.

Selanjutnya yang terkait dengan identitas pihak-pihak yang diberitakan dalam teks. Teks tersebut menggambarkan bagaimana khalayak pembaca diletakkan pada posisi masyarakat (masyarakat buruh lepas maupun masyarakat menengah terdidik) dan bukan pada posisi politisi atau elit penguasa. Teks tersebut tidak memberika sugesti yang baik kepada para politisi, dan para elit penguasa lainnya. Oleh karena itu, teks dari awal hingga akhir menceritakan tentang keburukan parpol dan ketimpangan yang terjadi antara masyarakat dengan parpol dan elit penguasa. Tidak bertemu, yang satu terlalu lemah tak berdaya sehingga mudah ditipu, yang satu terlalu suka bermain-main tanggung jawab dan tanggung jawab yang diberikan padanya.

6) *Tahun-tahun Sport Kantong dan Jantung (TSKdJ)*

Teks artikel humor politik ini mengisahkan mengenai politisi, sekelompok orang yang dilahirkan dari parpol, yang tega membodohi rakyat dan pandai boretorika. Wacana yang dikembangkan dalam artikel ini adalah sifat koruptif para politisi. Ia tidak hanya digambarkan sebagai koruptor tetapi juga dipandang memiliki reputasi yang buruk serta layak mendapatkan hujatan dan caci cerca. Terlebih perbuatan ini dilakukan hanya untuk memperkaya diri dan golongannya. Salah satu politisi yang diwacanakan dalam *TSKdJ* ialah sosok Anas Urbaningrum. Untuk menutupi kasus korupsi yang sedang menjeratnya, Anas berhasil membelokkan topik ke ranah lain lewat retorikanya yang penuh teka-teki dan perlawanan. Teks tersebut secara umum menggambarkan betapa munafikya seorang Anas dan betapa malangnya rakyat yang semakin dibuat bingung atas kasus politik yang sering muncul di hadapannya.

Anas memang bersalah akan tetapi wacana yang dikembangkan dalam artikel ini menunjukkan betapa lihainya Anas dalam beretorika dan membiaskan kasus. Ditambah lagi munculnya media yang dianggap mudah terpancing untuk mengikuti bagaimana kelanjutan retorika tersebut, sehingga terseret dalam permainan yang mengasyikkan. Kesemua teks tersebut tidak menyertakan sepak terjang Anas sebelum terjerat kasus korupsi atau penjelasan dari pihak Anas. Bagaimana urutan cerita hingga Anas terjerat, tega membodohi rakyat, dan tega mencuri uang rakyat? Artikel tidak menyertakan hal itu.

Susunan teks dan kalimat yang disajikan menggambarkan bahwa Anas sebagai salah satu politisi buruk, yang pandai berbohong, pandai beretorika, yang tega membodohi rakyat, yang memperkaya diri dan golongannya, yang layak mendapatkan hujatan dan caci cerca. Tidak tergambar dalam teks mengenai suasana hati Anas. Uraian teks seolah mengarah kepada kesalahan Anas pribadi yang melakukan korupsi dan jelas merugikan rakyat. Tidak disertakan penjelasan di dalamnya terkait orang-orang di sekitar Anas, keadaan yang menyertakan Anas dan kenapa ia melakukannya.

Dalam susunan kalimat yang menyertakan komentar dari Prof. JE Sahetapy di acara Indonesia Lawyesrs Club, *TV One*, 5 Maret 2013, secara implisit menunjukkan praktik yang ingin disampaikan penulis. Pengutipan komentar Prof. JE Sahetapy dalam teks digunakan untuk memperkuat pendapat penulis. Komentar yang disampaikan berupa pertanyaan terhadap Anas sendiri, “Andaikata benar dia mengetahui sejumlah kasus kejahatan besar atau skandal yang terjadi di lingkungan elit penguasa dan sekian lama mendiamkannya, baru setelah dirinya tersandung kasus lalu bertekad membuka itu lewat halaman perhalaman karena merasa dirinya dijadikan korban konspirasi mereka, di mana moralitas seorang Anas sebenarnya?”. Dengan cara seperti itu penulis seolah ingin menyampaikan kepada khalayak pembaca, alangkah tidak bagusnya sosok Anas itu. Ideologi perlwanan yang disuarakan penulis seolah didukung oleh pengamat lain, Prof. JE Sahetapy.

Wacana keburukan para politisi dapat dilihat dari bagaimana mereka direpresentasikan dalam teks. Para politisi dipandang sebagai kelompok yang tidak ada baiknya. Hal tersebut dapat dilihat dari kata-kata yang ditampilkan dalam teras artikel, sebelum masuk ke isi artikel humor *TSKdJ*, sebagai berikut.

*Politisi buruk adalah sekelompok politikus yang hanya sibuk memperkaya diri dan golongannya; sedangkan politisi baik adalah sekelompok politikus yang belum ketahuan kedok dan belangnya.
belangnya

Kalimat satir semacam itu seolah menyatakan bahwa tidak ada politisi baik. Semua politisi sama saja. Politisi buruk memang merupakan sekelompok politikus yang sibuk memperkaya diri dan golongannya, sedangkan politisi baik hanyalah politisi buruk yang belum ketahuan belang dan kedoknya saja.

Wacana ini banyak memunculkan komentar-komentar negatif tentang parpol dan luapan-luapan kebencian masyarakat terhadap para politisi. Sumber dari masalah kebencian itu ialah sikap para politisi yang menghiasi kondisi perpolitikan Indonesia yang menyebabkan “kritikan”, “sindiran tajam”, “hujatan” serta “caci cerca” dari masyarakat ditujukan deras kepada mereka. Hal tersebut direpresentasikan secara eksplisit, “Kondisi perpolitikan Indonesia saat ini sangat subur memancing munculnya bukan saja kritikan atau sindiran tajam, tetapi juga hujatan dan caci cerca”.

Setelah membahas kasus Anas Urbaningrum, wacana kemudian menggeneralisasikan kasus pada perpolitikan di Indonesia dan kepada Republik Indonesia yang disebut sebagai republik yang “bergerak tanpa

visi". Keadaan lain yang buruk dan terjadi di Republik Indonesia lainnya juga disampaikan seperti terjadi "hiruk-pikuk kasus korupsi, prahara di partai politik" dan kasus Anas Urbaningrum serta pihak yang disebutnya sengkuni dan Cikeas sekali pun, soal KPK, dan riuhnya opini media.

Dengan memberi justifikasi pada keburukan politisi negeri maka sikap rakyat yang surut kepercayaan dan skeptis terhadap partai politik pun menjadi sah-sah saja. Seluruh teks seolah menimpakan kesalahan kepada para politisi, dan jajaran elit politik lainnya yang memegang sistem pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah bagaimana penulis secara mandiri memberikan reaksinya terhadap carut marut yang terjadi di Republik Indonesia. Terdapat dua saran menurut pendapat penulis yang disampaikan dalam teks. Pertama, mencari pemimpin yang baik dengan bantuan media untuk mengawal arah dan orientasi bangsa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dengan membuat koran sendiri. Meskipun sedikit menguras kantong tetapi dianggap lebih elegan dalam menampilkan sosok pemimpin ideal.

Wacana perlawanan juga dapat dilihat dari bagaimana relasi yang hendak dibangun dalam teks. Teks berita menyertakan empat pihak yang paling berhubungan, yakni masyarakat, politisi (termasuk Anas dan elit penguasa), media, dan penulis (yang tersirat). Dalam teks artikel ini hanya Anas Urbaningrum yang disebut sedangkan sesungguhnya artikel juga menggeneralisasikan kasus korupsi kepada semua politisi negeri. Anas Urbaningrum yang seolah bersih ternyata termasuk politisi buruk yang tega

mengorupsi uang rakyat. Teks sama sekali tidak menyertakan kasus yang menjerat Anas dari sudut pandang Anas atau elit politik terkait. Tidak terdapatnya keterangan tersebut menyebabkan Anas memang layak mendapat hukuman, kritikan, sindiran tajam, hujatan juga caci cerca atas kesalahannya. Masyarakat dan politisi digambarkan sebagai dua pihak yang berlawanan dalam teks.

Masyarakat digambarkan sebagai pihak yang sedang “surut kepercayaan dan skeptis” terhadap partai politik dan para politisinya. Sedangkan politisi digambarkan sebagai pihak yang sangat membutuhkan suara rakyat untuk mendukungnya di awal. Masyarakat digambarkan sebagai pihak yang mendambakan pemimpin bersih dan bermutu. Sedangkan politisinya yang digadang sebagai calon pemimpin malah gemar melakukan korupsi, pandai menipu rakyat dengan retorikanya, skandal demi skandal yang dilakukan hilang muncul tanpa adanya kejelasan, konspirasi demi konspirasi yang dilakukan diciptakan mengalihkan perhatian, isu demi isu yang datang dan pergi seenak hati sehingga mencerminkan bahwa Indonesia merupakan “Republik tanpa visi”. Kedua pihak tersebut digambarkan secara bertolak belakang. Dalam teks seakan ada jarak yang dibuat antara masyarakat Indonesia dengan pemerintah.

Relasi selanjutnya yang dimunculkan dalam teks ialah antara media dengan masyarakat. Penulis secara mandiri mengusulkan gagasannya pada teks *TSKdJ* dalam mencari pemimpin yang baik. Media merupakan ruang sosial di mana masing-masing kelompok yang ada dalam masyarakat saling

mengajukan gagasan dan pendapat, berebut mencari pengaruh agar lebih diterima oleh publik. Maka media seharusnya memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah dan orientasi bangsa ini. Media jangan dipengaruhi oleh kekuatan pemilik modal, tetapi sebaiknya media memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang isu kepemimpinan dan kebangsaan. Disampaikan pula oleh penulis secara pribadi dalam artikelnya bahwa pemimpin yang baik memiliki ciri-ciri banyak *blusukan* ke negerinya sendiri (terutama yang sedang dirundung permasalahan) bukan *blusukan* ke negeri luar. Berikut kutipan dalam teks atas harapannya kepada media.

Upayakan agar sikap media terhindar dari kebiasaan untuk menjustifikasi, memuji-muji, mengutuk-ngutuk, atau menyeburkan diri dalam emosi kekanakan. Buatlah semua itu masuk dalam etika analisis yang dewasa dan arif bijaksana. Sejurnya, media ideal seperti itu di Republik Badut belum pernah ada. Yang ada selalu warna “ideologi” pemilik atau konsursium lebih dominan ketimbang yang seharusnya mewakili masyarakat umum dan independen. Berbagai koridor yang terkait dengan *do* dan *do not* selalu ada. Apakah itu terkait dengan investasi pemilik di berbagai lahan bisnis lain atau kesertaannya dalam berbagai kelompok atau organisasi, sengaja atau tidak selalu *signal* intervensi terasakan oleh teks-teks dalam redaksionalnya (*TSKdJ/XXIII/74*).

Pada awal teks artikel *TSKdJ* dipaparkan dengan panjang lebar kasus dan keadaan yang terjadi di Indonesia. Kemudian di akhir justru teks memberikan saran untuk solusi bagi Republik Badut atas kasus dan keadaan yang terjadi di Indonesia. Secara implisit tentu ada praktik yang ingin disampaikan penulis lewat susunan teks semacam ini. Kasus dan keadaan yang terjadi di Republik Indonesia ditampilkan sebagai latar belakang. Kesemuanya disampaikan dalam bentuk ringkasan cerita mengenai

Republik Indonesia kemudian ditampilkan pula informasi-informasi lain sebagai komentar.

Kasus dan keadaan yang terjadi di Indonesia diceritakan. Namun, justru saran dan usulan ditujukan kepada Republik Badut seolah berkesinambungan dan memiliki relasi yang sangat dekat. Secara implisit menunjukkan bahwa keadaan Republik Badut adalah sama persis dengan keadaan Republik Indonesia, kedua Republik tersebut adalah identik. Dengan susunan teks seperti ini seolah ingin menampilkan kepada khalayak bahwa Republik Indonesia alias Republik Badut sedang dalam keadaan yang buruk. Pemunculan subyek “Republik Badut” yang hanya disebut beberapa kali saja di paragraf akhir tanpa ada deskripsi dan keadaan detail yang dijelaskan tentang kasus dalam Republik Badut menjadikannya tidak mungkin untuk tiba-tiba diberika saran atas solusi masalah negerinya. “Republik Badut” hanya seolah dijadikan sebagai subjek pengecoh untuk menyuarakan ideologi perlawanan penulis terhadap para politisi, elit politik, dan pemerintah.

Setelah penyebutan “Republik Badut” seolah penulis memiliki kebebasan tersendiri untuk memberikan saran dan komentar atas kasus yang terjadi di Indonesia dan yang seolah ditampilkan serupa dengan kasus yang terjadi di Republik Badut. Dua saran yang dimunculkan dalam teks tampak sulit meski mungkin dapat diterapkan. Keadaan yang ideal yang seharusnya dapat berjalan dan diterapkan. Namun, selama ini belum pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Untuk mendapatkan media yang ideal, pemimpin

yang ideal, partai politik yang ideal, dan politisi yang ideal dibutuhkan kerja sama yang baik, keseidean, dan kesadaran diri yang utuh dari masing-masing anggota masyarakat, baik pemimpin, media, maupun rakyat sendiri. Hal itu ditekankan dalam teks seolah menjadi solusi yang terbaik bagi keadaan yang demikian dan seolah mengajak khalayak pembaca agar turut menyetujui gagasan yang disampaikan penulis untuk kemudian dilaksanakan bersama.

Selain relasi, hal lain yang penting untuk dilihat dari teks ialah identitas pihak-pihak yang disampaikan dalam teks. Teks artikel *TSKdJ* menggambarkan khalayak pembaca berada dalam posisi masyarakat, bukan pada posisi politisi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya teks mensugestikan keburukan dan kejelakan politisi yang merugikan rakyat.

Teks seolah mengajak untuk menyelami betapa menderitanya rakyat karena sikap politisi negeri yang diam-diam ternyata menyimpan kejahatan kepada rakyat. Teks mengajak khalayak pembaca untuk mendukung rakyat dan menentang sikap-sikap politisi yang banyak buruknya daripada baiknya tersebut. Oleh karena itu, dalam teks artikel *TSKdJ* dari awal hingga akhir menampilkan sisi-sisi buruk politisi dan kejahatan Anas Urabningrum sebagai salah satu politisi yang saat itu terjerat kasus korupsi. Politisi buruk diidentifikasi sebagai musuh bersama rakyat, bukan hanya digambarkan sebagai pihak yang bertentangan dengan penulis tetapi juga dibentuk menjadi pihak yang bertentangan dengan khalayak pembaca.

7) *Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan (UKdLJ)*

Teks artikel humor *UKdLJ* ini mengisahkan mengenai lelang jabatan. Wacana yang dikembangkan dalam artikel ini adalah lelang jabatan sebagai model pemilu ke depan. Lelang jabatan digambarkan sebagai terobosan yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk memilih lurah dan camat. Pada awalnya lelang jabatan sempat menuai kontroversi karena masyarakat menilai lelang jabatan sebagai tawar-menawar jabatan dengan kompensasi dana hingga ratusan juta rupiah bagi si penawar tertinggi. Teks artikel *UKdLJ* ini secara umum menggambarkan sisi baik dan sisi buruk dari pelaksanaan lelang jabatan jika benar lelang jabatan akan digunakan sebagai model pemilu ke depan. Penulis artikel tidak menyatakan secara lugas bahwa lelang jabatan adalah alternatif yang baik ataukah alternatif yang buruk. Teks seolah hanya ingin memaparkan sisi keseluruhan dari kemungkinan yang akan terjadi jika lelang jabatan benar diterapkan ke depannya.

Teks menyertakan informasi bahwa masyarakat sangat reaktif terhadap program lelang jabatan yang dilakukan pemprov DKI. Namun, teks tidak menghakimi sikap masyarakat tersebut, justru teks seolah meredam dan tetap berpihak kepada rakyat dengan memunculkan kalimat sebagai berikut.

Mengapa masyarakat sangat reaktif terhadap program itu? Dapat dipahami bila reaksi pro dan kontra masyarakat muncul atas program Pemprov DKI itu semata karena ia menggunakan label “lelang jabatan”, sebuah terminologi suram yang dalam rumor masyarakat diartikan sebagai tawar-menawar jabatan dengan kompensasi dana hingga ratusan juta rupiah bagi si penawar tertinggi. Namun, setelah

masyarakat menyimak dengan seksama “lelang jabatan” dalam versi Pemprov DKI ternyata tak jauh dari sebuah kompetisi uji kompetensi bagi calon pejabat (lurah dan camat); yang di dalamnya berisi serangkaian tahap ujian baik dari aspek persyaratan usia, pendidikan, dan lain-lain hingga ujian tertulis atau wawancara mengenai kompetensi manajemen, administratif, geografis, pelayanan publik, mental-spiritual, dan lain-lain. Sebuah program yang ternyata bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar fungsinya sebagai pelayan masyarakat dapat terlaksana dengan optimal (*UKdLJ/V/77-78*).

Teks tersebut sama sekali tidak menentang masyarakat juga tidak menentang program yang dibuat Pemprov DKI, yang tergambar dalam teks ialah kenetralan teks yang membenarkan sikap kedua belah pihak dengan alasan yang baik. Lelang jabatan dijelaskan sebagai sebuah kompetisi uji kompetensi bagi calon pejabat (lurah dan camat).

Program lelang jabatan bukan sesuatu hal yang baru. Wacana tersebut direpresentasikan dalam teks dengan menyatakan “di zaman Kekaisaran Cina, model pengujian seperti itu sudah diterapkan”. Kemudian teks mulai memaparkan satu per satu hal mengenai sisi positif dan negatif dari program tersebut. Paparan tersebut seolah ingin menyampaikan kepada khalayak pembaca agar tak terburu-buru menolak atau lekas setuju begitu saja.

Pemilihan secara langsung dapat berkecenderungan “disalahgunakan di berbagai lini dan berkonsekuensi ongkos politik tinggi (ditanggung peserta pemilu), biaya politik tinggi (ditanggung APBD untuk kepala daerah dan gubernur), dan ongkos sosial yang tak dapat diprediksi bila terjadi benturan persepsi atas hasil perhitungan akhir pemilu”. Kalimat semacam

itu seolah menyatakan bahwa lelang jabatan bukanlah alternatif yang baik bagi solusi demokrasi jika merugikan rakyat.

Segala kemungkinan keadaan dan konsekuensinya bagi rakyat ditampilkan dalam teks. Sumber dari segala pertimbangan program dalam demokrasi ialah “menuju kedaulatan dan kesejahteraan rakyat”. Salah satu keberpihakan teks terhadap rakyat disampaikan dalam sebuah pertanyaan “Siapa dapat menjamin prosesi itu dapat terbebas dari praktik politik uang?”. Banyak sekali sistem demokrasi yang ditawarkan saat ini kepada masyarakat tetapi dalam praktiknya justru menjadikan rakyat sebagai “korban politik uang” dan resikonya rakyatlah yang harus “menelan pil pahit berkepanjangan”. Program yang ada dalam sistem demokrasi tidak seharusnya menjauhkan rakyat dari kedaulatan dan kesejahteraan bersama. Jika merugikan rakyat maka harus ditentang. Penyusunan kalimat dan penggambaran lelang jabatan dalam teks seolah menempatkan penulis artikel sebagai pihak yang masih menimbang dan mengkalkulasi keadaan, karena seringkali program tak berjalan sesuai relaisasi konkretnya.

Dengan tidak memberikan justifikasi pada program lelang jabatan, maka kemungkinan permasalahan yang muncul atau segala sisi positif dan negatifnya menjadi layak untuk diwacanakan bersama dalam *UKdLJ*. Seluruh teks seolah menyiapkan kesiapan mental bagi masyarakat dan memberikan sumbangsih pertimbangan untuk menghadapi segala keadaan jika memang lelang jabatan akan dijadikan sebagai “salah satu model atau alternatif bagi solusi demokrasi kita”. Dalam teks juga memunculkan kata

“kita” yang merupakan kata ganti untuk menunjuk penulis artikel dan khalayak pembaca (yang sekaligus diposisikan sebagai rakyat). Hal tersebut seolah merepresentasikan keberpihakan penulis artikel kepada rakyat dan kewaspadaannya terhadap program yang sedang atau akan dijalankan para pemangku negeri.

Keunggulan sementara dari model pemilihan menggunakan lelang jabatan ditampilkan dalam teks sebagai berikut.

: pertama, aspek kualitatif calon legislatif, calon kepala daerah dan calon gubernur terpenuhi. Kedua, aspek biaya, baik ongkos maupun biaya politik jauh lebih rendah dibandingkan dengan model yang ada selama ini. Ongkos sosial, kalau toh ada dan sampai terjadi, relatif lebih lunak dan dapat diantisipasi sejak awal, misalnya ulah para *cracker* (lebih jahat dari para *hacker*). Ketiga, pola pelaksanaan dapat diselesaikan dengan tingkat prioritas dan kebutuhan (*UKdLJ/XV/81*).

Kalimat tersebut di atas mengasosiasikan bahwa uji kompetensi atau disebut sebagai lelang jabatan memiliki keunggulan pada tiga aspek jika akan diterapkan pada pemilu mendatang, yakni pada aspek kualitatif, aspek biaya, dan pola pelaksanaannya. Namun, kelemahannya ialah tidak adanya partisipasi langsung dari masyarakat. Jika tingkat wawasan, pendidikan dan kesadaran masyarakat masih beragam mungkin uji kompetensi ini layak diterapkan, tetapi jika kelak kondisi masyarakat telah mendekati layak maka “keadilan harus dikembalikan lagi kepada rakyat”.

Kalimat disusun sedemikian rupa dalam teks untuk menyampaikan kelemahan alternatif uji kompetensi. Kata “jika kelak” merepresentasikan bahwa pada saat ini kondisi masyarakat memang masih beragam dari segi wawasan, pendidikan, dan kesadaran masyarakatnya sehingga uji

kompetensi disuarakan sebagai salah satu alternatif yang baik untuk pemilu ke depan. Keberpihakan teks pada program yang diwacanakan akan menjadi alternatif pemilu ke depan tidak lantas mengesampingkan posisi rakyat yang sangat penting dalam demokrasi dengan memunculkan kalimat “kedaulatan harus dikembalikan lagi kepada rakyat”, jika kondisi masyarakat telah dinilai mampu untuk memberi penilaian atas pemimpin yang memang benar-benar layak. Dalam pemilihan langsung, satu suara dari orang yang memiliki wawasan baik akan memiliki nilai yang sama dari satu suara seseorang yang memiliki wawasan tidak cukup baik. Sehingga para politisi berlomba-lomba untuk membeli suara rakyat dengan uang atau semacamnya, bukan berlomba-lomba untuk memperbaiki diri agar layak memimpin. Seharusnya pemimpin memang seseorang yang terpilih, bukan dipilih.

Wacana keberpihakan penulis artikel terhadap rakyat juga dapat dilihat dari bagaimana relasi yang hendak dibangun dalam teks. Teks artikel menyertakan empat pihak yang berhubungan, yakni penulis teks, rakyat, Pemprov DKI, dan pemerintahan. Tak ada nama yang disebut dalam teks, hanya penyebutan pihak secara general. Pemprov DKI dijelaskan dalam teks artikel sebagai pihak yang mengawali terobosan dalam memilih sosok pemimpin (lurah dan camat pada saat itu) melalui lelang jabatan yang tak ubahnya sama dengan uji kompetensi bagi para calon pemimpin.

Meskipun teks membicarakan panjang lebar mengenai apa yang dilakukan Pemprov DKI dan keterangan yang melengkapinya. Namun,

Pemprov DKI tidak dikaitkan dengan pihak manapun dalam teks. Bukan pihak Pemprov DKI-nya yang dijadikan acuan, tetapi terobosan dari Pemprov DKI-lah yang dipinjam oleh penulis teks untuk kemudian dikomentari. Layakkah untuk salah satu alternatif pemilu ke depan yang murah, efektif, dan tepat sasaran dengan berbagai argumentasi pendukung dan penyanggah.

Praktisnya di dalam teks, relasi yang dimunculkan ialah relasi antara lelang jabatan dengan kesejahteraan masyarakat. Lelang jabatan dikatakan baik jika penerapan dan hasilnya menjadikan rakyat lebih sejahtera. Sedangkan lelang jabatan akan dikatakan buruk jika penerapan dan hasilnya menjadikan rakyat makin sengsara dibanding model pemilihan langsung yang sebelumnya digunakan.

Hal tersebut sebenarnya hendak merepresentasikan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dua pihak tersebut digambarkan sebagai pihak yang saling memengaruhi. Pemerintah digambarkan sebagai elit pemegang kekuasaan yang kewajibannya ialah memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sementara masyarakat ialah pihak yang haknya ialah mendapat kesejahteraan dari pemimpinnya, yakni pemerintah. Khalayak pembaca dan masyarakat seolah diajak bersama-sama untuk berpikir bahwa apapun yang berakhir pada kesengsaraan rakyat maka harus ditentang dan diperangi, dan apa-apa yang berpotensi memberikan kesejahteraan bagi rakyat maka harus didukung dan dikawal pelaksanaannya.

Selain relasi, aspek identitas juga berperan dalam melihat identitas penulis teks ditampilkan dan dikonstruksi dalam artikel *UJdLJ*. Teks artikel tersebut menggambarkan bagaimana khalayak pembaca direpresentasikan pada posisi masyarakat. Penulis teks pun juga mengidentifikasi dirinya dalam melihat masalah kasus uji kompetensi alias lelang jabatan tersebut, secara mandiri dan sebagai bagian dari pihak masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kali penulis menggunakan kata “kita” dalam penyampaian gagasannya. Konstruksi kata dan kalimat seolah merepresentasikan kesamaan gagasan dan kesamaan tujuan antara penulis teks, rakyat, dan khalayak pembaca.

8) *Awas Janji-janji Gombal Mukiyō (AJGM)*

Teks artikel humor politik *AJGM* mengisahkan mengenai kampanye di Republik Badut. Wacana yang dikembangkan dalam artikel ini adalah terpisahnya realitas kampanye dengan realitas kinerja kepemimpinan setelah pemilihan. Bahasa kampanye digambarkan hanya sebagai ekspresi kreativitas untuk menarik perhatian masa atau simpati publik. Tidak ada makna dan kesungguhan dalam beretorika saat kampanye.

Teks artikel *AJGM* membandingkan sikap parpol yang ideal saat kampanye dan sikap parpol yang tidak ideal. Teks tidak menghakimi secara langsung bahwa parpol di Republik Badut banyak yang tidak cerdas dan tidak bervisi ke depan. Teks hanya menyindir dengan kalimat yang implisit bahwa parpol yang cerdas, terintegrasi dan bervisi ke depan seharusnya

melengkapi bangunan idealismenya dengan semua perangkat proyeksi antara apa yang dipresentasikan saat kampanye dengan fakta-fakta yang telah dicapai selama periode kepemerintahannya.

Selain mengenai parpol, secara umum teks artikel *AJGM* menggambarkan kekejaman retorika sebagai komunikasi politik saat kampanye untuk membohongi dan membodohi masyarakat sedangkan masyarakatlah yang menjadi korban harapan palsu atas janji-jani parpol ketika kampanye. Dalam teks dibuktikan dengan pernyataan bahwa sesuai fakta empiris memang realitas kampanye cenderung terpisah atau dipisahkan dari relitas kinerja kepemimpinan; hasil terpisah pula dari tanggung jawab parpol selaku institusi pengusung.

Parpol memang bersalah dengan memisahkan realitas kampanye dengan realitas kinerja kepemimpinan karena itu artinya janji saat kampanye hanyalah sebatas janji belaka kepada masyarakat bukan ingin mewujudkan dengan sungguh-sungguh, sebatas menarik perhatian masa dan mencari simpati publik melalui retorika. Akan tetapi teks lebih banyak memberikan informasi dan pendapat yang berseberangan dengan retorikanya parpol seperti menyampaikan teori retorika versi Aristoteles dan retorika dari Plato bahwa retorika selain dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat juga dapat digunakan untuk menipu dan memanipulasi sesuatu pada waktu yang sama.

Sebagian teks membicarakan soal parpol yang tidak baik, sebagian lagi membicarakan mengenai retorikanya sebagai sesuatu yang lebih sering

ditampilkan untuk dikomentari. Di sana dijelaskan hanya sedikit sekali hal baik yang dilahirkan dari sebuah retorika, tetapi informasi mengenai keburukan dan hal negatif dari retorika kampanye lebih sering disampaikan. Parpol dan retorikanya saat kampanye memang tak dapat dilepaskan karena keduanya melekat. Teks lebih berpihak kepada masyarakat karena setiap kali membahas mengenai parpol dan retorika saat kampanye, selalu kepentingan rakyat yang menjadi tujuan utamanya.

Wacana keburukan parpol dan retorika kampanyenya dapat dilihat dari bagaimana hal itu direpresentasikan dalam teks. Kata pertama yang disampaikan untuk merepresentasikan “tahun kampanye” ialah “tahun kecap”. Hal tersebut menjelaskan bahwa semua calon dari masing-masing parpol jelas akan dikatakan sebagai yang terbaik dibanding yang lain untuk meraih suara rakyat. Selain “tahun kampanye”, realitas kampanye direpresentasikan sebagai “ekspresi kreativitas untuk menarik perhatian massa dan simpati publik”. Kalimat semacam itu menerangkan bahwa pertanggungjawaban muatan yang terkandung di dalam pesan-pesan kampanye seolah diabaikan dan dilupakan. Hanya sekadar kreativitas yang bertujuan membungkus segalanya dengan sangat bagus tetapi seolah tidak ada makna dan kesungguhan yang dibawa.

Realitas kampanye ini juga ditampilkan dengan buruk, seperti dianggap terpisah dari tanggung jawab parpol selaku institusi pengusung. Semua informasi tersebut tidak dibahasakan dengan bahasa penilaian pribadi dari penulis artikel melainkan meminjam data dari “fakta empiris”

untuk menggambarkan bahwa pembodohan semacam ini telah jelas kebenarannya. Informasi yang membuktikan bahwa parpol berupaya melepaskan diri dari keterikatan dengan individu anggota yang tersandung kasus hukum karena parpol takut mendapat citra yang buruk dan memengaruhi kredibilitas parpol. Pembodohan dengan kilah dalih demikian, oleh teks disampaikan dengan istilah “sangat mencolok”.

Dalam teks, pemilu disamakan dengan sebuah “kompetisi” sehingga kemenangan adalah target yang harus dicapai. Sikap buruk para parpol dalam sebuah kompetisi diberi keterangan seperti “tindakan kurang terpuji acapkali ditempuh demi mencapai tujuan itu”. Ketika sebuah retorika berhasil memengaruhi masyarakat, maka itu ditampilkan dalam teks sebagai suatu kesalahan, dan kesalahan itu ditimpakan kepada parpol yang dianggap lihai bererotorika. Retorika digambarkan sebagai suatu kebohongan, maka bagi masyarakat yang kemudian mempercayai sebuah pidato yang paling persuasif dilabeli dengan “tidak mampu menganalisis secara jernih”. Hal tersebut bukan berarti menentang masyarakat tetapi menyuarakan ideologi perlawanannya justru terhadap parpol terkait hanya saja melalui ketidakmampuan masyarakat.

Teks artikel *AJGM* menyuarakan ketidakinginan kehidupan masyarakat dikendalikan oleh orang-orang yang pandai berpidato dan bererotorika saja, tetapi retorika, janji, wacana, atau apapun istilahnya harus dikawal dan dibuktikan ke masyarakat. Jika ingkar janji maka penulis artikel

menyuarkan gagasannya secara pribadi dengan kalimat “bahkan perlu dipertanggungjawabkan di mata hukum”.

Seluruh teks seolah menimpa kesalahan semata kepada parpol dan retorikanya, jika di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak sesuai karena retorika dalam kampanye memuat harapan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Sikap persuasif dari parpol melalui retorikanya ditanggapi oleh penulis artikel dengan kalimat persuasif pula kepada masyarakat agar “ekstra waspada pada setiap persuasi politik di musim kampanye”. Kewaspadaan itu lahir karena retorika diduga akan mengepung masyarakat lewat berbagai jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kalimat-kalimat disusun sehingga membentuk pengertian tertentu. Kalimat “Awas Janji-janji Gombal Mukiy” yang dijadikan judul dalam artikel ini, misalnya. Kalimat itu mengasosiasikan bahwa janji gombal Mukiy ialah sesuatu yang sangat berbahaya dan harus diwaspadai oleh masyarakat, terlebih di musim kampanye. Gombal Mukiy adalah semacam istilah yang dipakai di Jawa untuk menggambarkan kebohongan atau kepalsuan yang berlebihan atau terlalu tinggi.

Janji gombal jelas istilah yang sengaja disajikan untuk ditangkap kepada khalayak pembaca sebagai gambaran atas kampanye yang gencar dilakukan oleh parpol. Setiap janji yang disebut gombal, merepresentasikan bahwa ia hanya kata-kata disebut janji tanpa ada realitas perwujudannya. Judul yang terkesan ringan dan santai tersebut menjadi bermakna besar dan memiliki isi berat ketika teks menghubungkan janji gombal mukiy tersebut

dengan janji seorang pemimpin kepada rakyatnya. Janji itu menjadikan sesuatu yang dijanjikan menjadi lebih tidak sepele karena berhubungan dengan seluruh masyarakat di Republik Badut yang menunggu harapan.

Selain itu, parpol yang menang dan parpol yang kalah digambarkan sama-sama berpotensi menjadi pihak yang buruk. Parpol menang dianggap melakukan banyak hal tidak terpuji untuk memenangkan pemilu yang notabene dianggap mereka sebagai kompetisi, sedangkan parpol yang kalah digambarkan sebagai pihak yang sulit sportif karena latar belakang psikologi dalam kompetisi itu. “Retorika” pun demikian, direpresentasikan sebagai persuasi komunikasi politik yang berpeluang sangat besar untuk menciptakan keutuhan maupun kekisruhan persepsi. Namun, dari kesemua informasi tersebut dan wacana yang disajikan secara utuh hingga akhir, seolah tidak dijabarkan secara imbang antara sisi positif dan sisi negatif dari retorika sebagai komunikasi politik.

Teks juga menyusun kalimat sedemikian rupa sehingga mengesankan kepada khalayak pembaca bahwa parpol memang buruk dan hampir semua parpol menggunakan retorika untuk sesuatu yang tidak baik. Informasi dalam teks lebih banyak menjelaskan sisi negatif parpol di saat kampanye dan menjadikan rakyat seolah menjadi korban keegoisan parpol. Sisi positif dari parpol dan retorika yang sesekali muncul dalam teks hanya ditampilkan sebagai sesuatu yang minoritas dan tidak didukung oleh banyak argumen dan bukti.

Teks *AJGM* sesungguhnya tidak memberikan informasi secara pasti apakah wacana yang sedang dikembangkan dalam artikel ini mengenai Republik Badut ataukah mengenai Republik Indonesia. Wacana berfokus pada masalah yang sedang terjadi, tidak membatasi berada di republik mana masalah tersebut sebenarnya terjadi. Hal tersebut ditampilkan dalam kalimat “Republik Badut mungkin sebuah Republik sungguhan, mungkin hanya metafora, mungkin juga ia negeri yang disebut orang sebagai Indonesia. Hal yang paling penting dari semuanya, untuk melangkah ke depan, negeri ini membutuhkan pemimpin yang baik”.

Kalimat tersebut mengasosiasikan ke benak khalayak pembaca dua hal. Pertama, Republik Badut yang dimaksud sesungguhnya ialah Republik Indonesia. Menceritakan keburukan Republik sendiri adalah sebuah hal yang kurang etis apalagi menyindir dengan banyak kasusnya, maka Republik Badut hanyalah analogi untuk Republik Indonesia. Tidak perlu dipusingkan soal wacana *AJGM* ini tentang Republik mana atau ditujukan untuk Republik mana. Kedua, apa pun jawabannya Republik Badut atau pun Republik Indonesia memang berada dalam keadaan yang kritis. Masyarakat sebenarnya menjerit meminta tolong dan memang sedang membutuhkan pemimpin yang baik.

Semua rentetan peristiwa yang ditampilkan dalam *AJGM* tersebut sesungguhnya hanya menginginkan pemimpin yang baik. Penulis artikel juga meminjam suara Prof. Komaruddin Hidayat di akhir teks untuk memperkuat pendapatnya, bahwa “Masyarakat memerlukan inspirasi dan

pemimpin nasional yang mampu menggerakkan bangsa kita untuk mencapai kemajuan. Tanpa itu bangsa ini terancam terjebak dalam kubangan masalah yang mengerdilkan, bahkan menularkan energi negatif". Dengan cara seperti itu seolah menampilkan kepada khalayak pembaca alangkah benarnya pendapat yang disampaikan oleh Prof. Komaruddin Hidayat.

Wacana perlawanan tersembunyi yang menentang kebiasaan para parpol yang dinilai buruk tersebut juga dapat dilihat dari bagaimana relasi yang hendak dibangun dalam teks. Teks artikel menyertakan empat pihak yang saling berhubungan, yakni parpol, masyarakat, penulis artikel, dan Prof. Komaruddin Hidayat. Prof. Komaruddin Hidayat disebut dalam teks hanya satu kali dan tidak disertakan informasi juga mengenai siapa beliau. Hanya Prof. Komaruddin Hidayat ditampilkan dalam teks sebagai seorang ahli yang juga mengamati keadaan yang sedang terjadi dan memiliki kesamaan pendapat dengan penulis artikel. Sehingga Pemunculan Prof. Komaruddin Hidayat ialah sebagai penguat argumen dari penulis artikel sendiri.

Praktis dalam teks terdapat empat pihak yang direlasikan secara eksplisit maupun implisit, yakni (1) penulis artikel dan parpol, (2) parpol dan masyarakat, (3) masyarakat dan khalayak pembaca, (4) khalayak pembaca dan penulis artikel. Pertama, penulis artikel dan parpol merupakan dua pihak yang digambarkan secara berbeda dalam teks. Penulis artikel adalah bagian dari masyarakat yang menginginkan pemimpin yang baik untuk ke depannya. Sedangkan parpol digambarkan sebagai pihak yang

mencalonkan anggotanya untuk menjadi pemimpin. Namun, cara yang dilakukan parpol terlalu egois, retorika dalam kampanye yang dilakukan parpol membohongi dan memanipulasi persepsi, janji-janji yang disampaikan parpol hanya bualan, realitas kinerja parpol tak terbukti, tujuan utama kampanye parpol hanya kemenangan bukan rakyat sebagai prioritas. Relasi kedua pihak tersebut ditampilkan secara bertentangan.

Kedua, parpol dan masyarakat. Kedua pihak ini juga direlasikan secara bertentangan. Parpol adalah pelaku pembohongan dan pembodohan, sedangkan rakyat digambarkan sebagai korban pembohongan dan pembodohan parpol. Ditampilkan sebagai pembohongan karena masyarakat tidak semuanya mengerti, banyak anggota masyarakat yang belum bisa berpikir jernih sehingga mudah saja percaya dengan janji parpol dan celah itu yang dijadikan parpol untuk membodohi rakyat. Parpol ditampilkan sebagai pelaku penindasan retorika, rakyat ditampilkan sebagai korban penindasan retorika.

Ketiga, masyarakat dan khalayak pembaca. Teks menempatkan hubungan khalayak pembaca dengan masyarakat adalah sama, berada dalam satu pihak, berada dalam posisi yang sama. Khalayak pembaca seolah diajak oleh penulis artikel untuk menyelami keadaan dan perasaan masyarakat ketika parpol bersikap membohongi dan membodohi masyarakat dengan janji gombalnya. Bukan untuk menyelami keadaan dan perasaan anggota parpol yang akan mencalonkan diri atau parpol secara keseluruhan. Keempat, khalayak pembaca dan penulis artikel. Pola hubungan antara

khalayak pembaca dan penulis artikel dibuat saling terikat. Penulis artikel menjelaskan ideologi dengan argumennya kepada khalayak pembaca agar khalayak pembaca mengikuti pola pikir penulis artikel yang telah disusun sedemikian rupa dalam teks.

Biasanya kekuatan sosial dan tingkat kedudukan akan mendominasi ekonomi, sosial, politik dan budaya dalam suatu negara. Namun, melalui *AJGM* dominasi ini justru seolah disuarakan dari rakyat untuk menentang kekuasaan yang lebih tinggi atas sesuatu yang dianggap tidak baik atau tidak layak. Artikel humor politik merupakan salah satu media untuk bersuara dan yang diusung dalam artikel humor politik ini ialah gagasan dari penulis artikel mengenai kampanye para parpol dan retorikanya yang memiliki potensi buruk bagi masyarakat untuk tertipu dan terbodohi. Penulis artikel menyuarakan gagasannya untuk memberikan kesadaran politik kepada masyarakat melalui informasi-informasi dan pola pikirnya agar diterima oleh masyarakat.

Aspek lain yang berkaitan dengan relasi, ialah identitas pihak-pihak yang ditampilkan dalam teks. Teks tersebut menggambarkan bagaimana pembaca diletakkan pada posisi masyarakat dan bukan pada posisi anggota parpol. Teks artikel *AJGM*, misalnya, memberitakan banyak informasi negatif mengenai kampanye dan parpol serta mensugestikan kepada khalayak pembaca bahwa masyarakat selama ini seringkali dibohongi dan dibodohi oleh kampanye parpol.

Teks memposisikan khayak pembaca untuk membela masyarakat dan menentang para parpol yang berkampanye dengan tujuan membohongi dan membodohi rakyat. Masyarakat diidentifikasi sebagai pihak yang tidak ingin dikendalikan oleh orang-orang yang pandai berpidato dan beretorika saja melainkan menginginkan pemimpin yang juga pandai membuktikan janji dalam realitas kinerja. Masyarakat berada dalam keadaan yang sangat kritis dan membutuhkan pemimpin yang baik, tidak hanya pada saat kampanye.

Teks artikel dari awal sampai akhir menyampaikan bahwa kampanye hanyalah dianggap sebagai ritual pemilu semata tidak mencerminkan yang sesungguhnya akan dilaksanakan kelak.. Oleh karena itu, pihak mana yang bersikap buruk kepada masyarakat dan merugikan masyarakat maka mereka dianggap musuh bersama yang harus dilawan dan ditentang. Hal tersebut digambarkan sebagai sesuatu yang wajar karena yang tidak berpihak kepada rakyat ialah penganggu dalam mencapai kesejahteraan bersama.

9) *Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB)*

Teks artikel humor ini menyampaikan tentang opini penulis yang dilabeli sebagai representasi *uneg-uneg* rakyat Republik Badut. Wacana yang dikembangkan dalam artikel humor ini adalah kepalsuan sikap pemimpin di balik apa yang ditampakkannya selama ini kepada masyarakat.

Teks artikel humor *MRCdB* ini secara umum menggambarkan bagaimana tipuan sikap pemerintah dan pihak berwenang terhadap masyarakat umum. Rakyat memang seharusnya dapat bersikap cerdas dalam menanggapi sikap pemerintah dan keruwetan yang terjadi. Namun, wacana

yang dikembangkan dalam artikel ini condong kepada tuduhan pemerintahlah yang paling bersalah karena banyaknya sandiwara yang diperankan di depan masyarakat Republik Badut.

Teks artikel tidak menampilkan sisi baik pemerintah dalam setiap sikap yang dilakukan. Teks juga tidak menampilkan kesalahan rakyat yang kurang bisa menganalisis topeng pemerintahnya, sehingga rakyat dengan mudah percaya begitu saja atas segala maksud yang disampaikan pemerintah. Seluruh uraian teks ini menggambarkan bahwa pemerintah selalu memiliki kepentingan pribadi atau golongan dalam setiap keputusannya bukan atas kepentingan rakyat dan sifat mengayominya.

Wacana kepalsuan sikap para pemimpin Republik Badut dapat dilihat dari bagaimana mereka direpresentasikan dalam teks. Terdapat enam hal yang berusaha disingkap untuk melihat keadaan yang sesungguhnya. Pertama, ketertipuan masyarakat ini dimulai dari bagaimana revolusi ditampakkan sebagai sebuah sesuatu yang luar biasa padahal sesungguhnya “tidak menghebohkan dan menegangkan”. Hal tersebut mengartikan bahwa revolusi adalah sesuatu yang biasa-biasa.

Penyepelean terhadap revolusi di dalam teks dipertegas dengan pemunculan kata “cuma” sebagai komentar pada kalimat selanjutnya, “Ibarat komputer ia cuma mengganti *hardisk* lalu dilakukan install ulang *software* baru yang tidak tercemar virus. Cuma itu!”. Teks seolah menggiring rakyat untuk tidak terlalu memuji dan membangggakan “revolusi” yang diusung pemerintah. Kedua, mengenai subsidi BBM. Sikap

pemerintah dalam membedakan kaya dan miskin dalam penerimaan subsidi BBM dilabeli dengan kata-kata buruk seperti “trik pemerintah” yang disamakan dengan “logika pertentangan kelasnya Marx”. Hal tersebut merepresentasikan bahwa pemerintah hanya ingin tampak dipandang baik oleh rakyatnya padahal sebenarnya hanya tipuan trik belaka.

Ideologi pertentangan dalam teks disampaikan dengan penyepadan sikap pemerintah dengan kelas Marx. Ketiga, soal tarif transportasi publik yang tidak masuk agenda pemerintah diberi kata-kata tuduhan seperti “yang dipikir Cuma fiskal, subsidi salah sasaran dan Balsem (BLSM)”. Selain itu, tuduhan serupa yang dialamatkan kepada pemerintah ialah “sangat egois dan parsial”.

Keempat, mengenai sindiran penulis untuk menaikkan harga BBM dengan tinggi jika diberi otoritas sebagai “pesangon” untuk mengusung 2014 yang akan datang. Kenaikan BBM seolah dianggap sebagai akal-akalan saja demi menaikkan anggaran daripada dianggap sebagai kebijakan yang baik bagi kelangsungan hidup bersama.

Kelima, sindiran terhadap caleg yang menolak dipublikasikan KPU, mendapat sebutan kurang baik seperti “sindroma malu-malu kucing”. Keenam, mengenai KPK dengan kasus century. Label kasar juga disampaikan kepada sikap KPK dengan menyebut sikapnya selama ini sebagai “drama” dan “sinetron” belaka. Dengan memberi justifikasi pada sikap pemerintah yang dinilai hanya trik, drama, dan sandiwara belaka maka

segala kebaikan dan sisi positif dari keputusan pemerintah menjadi tidak mendapat perhatian sama sekali.

Teks tidak mempermasalahkan kepemahaman masyarakat yang beragam. Namun, justru mempermasalahkan segala keputusan dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kalimat-kalimat disusun sehingga membentuk persepsi tertentu tentang pemerintah. Tanpa sedikitpun menyalahkan rakyat, seakan-akan rakyat tidak memiliki kekuatan untuk mengubah dirinya. Teks dibatasi hanya masalah sikap pemerintah yang salah dan buruk terhadap rakyatnya.

Teks artikel humor *MRCdB* menampilkan lima poin ciri-ciri rakyat yang cerdas dan berdaulat. Namun, kelima poin tersebut tidak memberikan informasi yang buruk mengenai ketidakmampuan rakyat tetapi justru menyindir pemerintah atas predikat-predikat yang tidak baik di tiap poinnya. Poin pertama, ciri rakyat yang cerdas dan berdaulat ialah “tidak terpegaruh oleh politik uang”. Hal tersebut mengasosiasikan ke benak khalayak pembaca bahwa selama ini rakyat dibodohi oleh pengaruh politik uang dari pemerintah.

Poin kedua, ciri rakyat yang cerdas dan berdaulat ialah “tidak berhutang budi kepada penguasa apalagi parpol tertentu” karena sebenarnya uang BLSM ialah uang yang berasal dari rakyat. Hal tersebut mengasosiasikan ke benak khalayak pembaca bahwa BLSM yang ditujukan kepada rakyat bukanlah atas kebaikan pemerintah melainkan karena rakyat sendiri.

Poin ketiga, ciri rakyat yang cerdas dan berdaulat ialah tak surut keyakinan meskipun mendapat “intimidasi dan berbagai ancaman”. Hal tersebut mengasosiasikan ke benak khalayak pembaca bahwa rakyat sering mendapat intimidasi dan ancaman dari pihak tertentu yang dalam hal ini dicondongkan kepada pemerintah sebagai pelakunya.

Poin keempat, ciri rakyat yang cerdas dan berdaulat adalah berani membuat “parlemen jalanan” sebagai langkah pamungkas ketika “penyelenggara negara ingkar dari konstistusi dan telah menyalahgunakan kekuasaan”. Pelabelan kata “ingkar” dan “menyalahgunakan kekuasaan” kepada para penyelenggara negara serta pendukungan terhadap adanya “parlemen jalanan” mengasosiasikan ke benak khalayak pembaca bahwa alangkah sering para penyelenggara negara berbuat ingkar dan menyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut kemudian harus dilawan dengan munculnya “parlemen jalanan”.

Poin kelima, ciri rakyat yang cerdas dan berdaulat ialah memiliki hak dalam berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi dalam pemilu disebutkan sebagai “hak” bukan kewajiban, sehingga keikutsertaan rakyat terhadap pemilu disugestikan kepada khalayak pembaca sebagai kesadaran diri bukan pemaksaan, sehingga jika ada yang tidak berkenan berpartisipasi maka tidak boleh dipaksa.

10) *Anomali Komunikasi Rakyat – Aparat (AKRA)*

Teks artikel humor *AKRA* ini mengisahkan mengenai Pak Kepala Daerah yang ingkar kepada janjinya sendiri, serta aparat kepolisian yang tega menembaki rakyat yang tidak bersalah demi melindungi Pak Kepala Daerah yang jelas bersalah. Wacana yang dikembangkan dalam artikel humor ini adalah komunikasi yang dibuat rumit dan tidak adil oleh Pak Kepala Daerah. Dua pihak yang menjadi fokus *AKRA* ini ialah Pak Kepala Daerah dan polisi.

Pak Kepala Daerah digambarkan sebagai orang yang tak punya hati. Ia tega bersandiwara untuk menarik simpati warga masyarakat dalam masa kampanye demi mendapatkan kemenangan suara. Terlebih rayuan itu dilakukan dengan berpura-pura hangat, santun, sampai bersujud memohon agar warga masyarakat sudi memilihnya menjadi kepala daerah. *AKRA* menggunakan kata “bersujud” untuk merepresentasikan permohonan yang bersungguh-sungguh kepada warga masyarakat dengan segala kerendahan diri. Janji-janji pun diberikan untuk mencapai maksudnya. Namun, sayang semua itu hanyalah “janji gombal”. Semua itu dilakukan hanya sampai semua maksudnya tercapai, setelah hasratnya untuk menjadi kepala daerah telah terpenuhi maka berhentilah sikap hangat itu, berhentilah keramahan itu, berhentilah sikap senyum itu, berhentilah sikap santun itu, berhentilah “sujud” itu, dan berhentilah janji itu. Sebatas lisan, tanpa perbuatan.

Pak Kepala Daerah memang bersalah, mengingkari janji dan melukai hati rakyatnya, pembelaan dari polisi juga berpihak kepada Pak Kepala

Daerah. Namun, teks *AKRA* tidak menampilkan sisi kebaikan Pak Kepala Daerah juga pihak polisi. Seluruh isi teks menampilkan keburukan Pak Kepala Daerah serta aparat polisi yang menjaganya juga menampilkan betapa malangnya nasib rakyat yang datang menghadap Pak Kepala Daerah untuk menanyakan janji beliau yang justru dihadang tiga truk polisi serta ditembak, “Beberapa orang dari rombongan tak bergerak sama sekali, beberapa lainnya mengerang kesakitan”.

Wacana kezaliman Pak Kepala Daerah dan aparat polisi dapat dilihat dari bagaimana keduanya direpresentasikan dalam teks. Semua janji Pak Kepala Daerah dilabeli dengan kata “janji gombal”. Kata tersebut menggambarkan bahwa awal mula terjadinya kerusuhan dan penembakan beberapa warga masyarakat adalah disebabkan oleh sikap Pak Kepala Daerah yang ingkar.

Janji adalah sesuatu yang dipegang rakyat dan sangat diharapkan perwujudannya. Jika kesejahteraan rakyat tidak menjadi prioritas bagi pemimpin maka kekesalan dan kekecewaan warga masyarakat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat layak dilakukan. Sikap buruk lain dari Pak Kepala Daerah digambarkan dengan pemberian komando kepada aparat kepolisian untuk melindungi dirinya, seperti pada kalimat “.. tiga truk polisi didatangkan untuk mengamankan keadaan”.

Tidak berbeda dengan Pak Kepala Daerah, meskipun wakil masyarakat telah menjelaskan kepada petugas keamanan bahwa maksud kedatangan warga berbondong-bondong adalah untuk menanyakan janji Pak

Kepala Daerah, tetap saja “rombongan dilarang masuk”. Seluruh isi teks menimpa kesalahan kepada Pak Kepala Daerah dan aparat kepolisian. Sedangkan warga masyarakat direpresentasikan sebagai pihak yang terzalimi. Sebaliknya, bahasa yang halus digunakan *AKRA* untuk menampilkan sikap masyarakat atas protesnya, seperti berikut.

Sambil meluapkan kekesalan dan kekecewaan, rombongan masyarakat itu akhirnya berteriak-teriak dari luar pagar. Ibarat realitas rumput kering, kekesalan, dan kekecewaan itu lalu menggumpal menjadi kemarahan. Satu dua orang menggoyang-goyang pagar bangunan, lalu disusul beberapa yang lain. Satu dua orang memukul-mukul tiang lampu jalanan, lalu disusul beberapa yang lain. Bukan hanya pagar yang roboh, tiang lampu dan lampunya juga dirobohkan dan dirusak masa. Lalu merembet ke fasilitas publik lainnya, merembet pada kendaraan bermotor dan kaca-kaca bangunan. Bara api kemarahan masyarakat nyaris meluluh lantakkan simbol-simbol kemegahan dan keangkuhan pemerintahan daerah (*AKRA/IV/95*).

Dengan bahasa tersebut merepresentasikan bahwa masyarakat awalnya tidak meniatkan untuk merusak fasilitas publik, mereka awalnya hanya berteriak-teriak dari luar pagar untuk meluapkan kekesalan dan kekecewaan kepada Pak Kepala Daerah. Namun, karena tidak ada respon maka mereka baru memulai aksi menggoyang-goyang pagar bangunan. Hal itu pun tetap tidak mendapat respon. Dari sanalah barulah warga masyarakat berani memukul-mukul tiang lampu, juga merobohkannya lalu merembet ke fasilitas publik, merembet pada kendaraan bermotor dan kaca bangunan.

Dalam *AKRA*, perusakan fasilitas publik, kendaraan bermotor dan kaca bangunan oleh masyarakat, disimbolkan sebagai aksi peluluhlantakan kemegahan dan keangkuhan Pemerintah daerah yang tidak merespon kedatangan rakyat dengan baik. Dari situlah *AKRA* seolah menunjukkan

pembenarannya atas sikap masyarakat. Masyarakat dianggap sebagai korban dan Pemerintah daerah sebagai pihak yang zalim, sehingga peluapan kekesalan dan kekecewaan semacam itu seolah dibenarkan. Semua paparan tersebut mengasosiasikan pembelaan *AKRA* terhadap rakyat.

Kekesalan dan kekecewaan rakyat seharusnya dapat ditanggapi dengan baik, tetapi Pemerintah Daerah seolah membuat komunikasi menjadi rumit dan tidak adil sehingga masalah pun semakin runyam dan berkepanjangan. *AKRA* seolah menegaskan bahwa Pak Kepala Daerah adalah pemimpin yang tidak baik, dan polisi adalah petugas keamanan yang tidak benar. Keduanya bekerja membela kekuasaan, bukan membela kepentingan warga masyarakatnya, melupakan janji setelah bermanis-manis dengan warga. Polisi menolak warga untuk berkomunikasi secara baik-baik dengan Pak Kepala Daerah. Kericuhan terjadi hingga akhirnya jatuh korban mati serta luka-luka.

Paparan teks seolah mengasosiasikan ke benak khalayak pembaca, dua hal. Pertama, alangkah sepele alasan yang dipakai untuk melukai hati, perasaan dan diri warga masyarakatnya, hanya demi jabatan dan ego segelintir orang. Kedua, begitu besar harga yang harus dibayar oleh masyarakat atas komunikasi yang dibuat rumit dan tidak adil oleh pemerintah daerah. Semua rentetan suasana yang mencekam tersebut seolah disebabkan semata oleh kesalahan perilaku Pak kepala Daerah.

Wacana semacam itu juga dapat dilihat dari bagaimana relasi yang hendak dibangun dalam teks. Teks artikel humor *AKRA* menyertakan tiga

pihak yang saling berhubungan, yakni Pak Kepala Daerah, polisi dan warga masyarakat. Oleh karena Pak Kepala Daerah dan polisi digambarkan berada dalam satu pihak yang sama. Maka secara garis besar hanya ada dua pihak yang dikorelasikan, yakni Pak Kepala Daerah-polisi, dan warga masyarakat.

Pak kepala daerah-polisi digambarkan sebagai pihak yang kejam. Sementara masyarakat digambarkan sebagai komunitas yang lugu dan memegang janji. Keduanya bukan hanya digambarkan secara bertolak belakang, tetapi juga digambarkan saling bertikai sehingga melahirkan suasana mencekam dan ricuh. Pak Kepala Daerah dan polisi berusaha untuk memanfaatkan warga masyarakat yang dianggap lugu dan bodoh demi kepentingan pribadi, sementara masyarakat adalah pihak yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan nyata.

Selain relasi, identitas pihak-pihak tersebut juga penting untuk diperhatikan. Teks artikel *AKRA* seolah meletakkan khalayak pembaca pada posisi masyarakat, bukan pada posisi Pak Kepala Daerah atau polisi. Teks artikel tersebut misalnya, tidak mensugestikan kepada khalayak pembaca untuk bersimpati kepada Pak Kepala Daerah juga polisi. Teks justru memposisikan khalayak pembaca agar berempati kepada khalayak masyarakat. Oleh karena itu, teks artikel *AKRA* dari awal sampai akhir memaparkan tentang keburukan dan sindiran kepada kejahatan Pak Kepala Daerah dan aparat polisinya. Yang menjadi musuh masyarakat bukan hanya Pak Kepala Daerah lagi, melainkan pihak mana saja yang menghalangi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat.

11) *Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK)*

Teks artikel ini mengisahkan mengenai korupsi para pemangku negeri yang secara spesifik disebut *MkNBK* dengan para politisi dan pejabat publik. Mereka yang dipercaya rakyat untuk mengelola negara justru menyalahgunakan kepercayaan itu untuk menyalurkan sahwat-sahwat personal dan komunal mereka akan kekayaan dan kekuasaan.

Wacana yang dikembangkan dalam berita ini adalah usulan untuk menyikapi bangunan negeri yang hampir roboh karena fenomena korupsi. Selain itu, teks juga menyinggung soal fenomena-fenomena nirlogika lain yang bertebaran: akal sehat dicampakkan, tenggang rasa semakin mengeras dan membeku menjadi primordialisme individualistik; paham sektarianisme menebar teror dan ketakutan di mana-mana; kekerasan dan perilaku vandalistik merebak bagai jagoan kesiangan, hingga penegakkan hukum yang tergadaikan; sikap melegalkan jalan pintas mencapai keberhasilan dan kekayaan dengan jalan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dianggap wajar dan bukan perilaku menyimpang. Kesemuanya itu adalah serentetan fenomena yang dilakukan oleh para pemangku negeri.

Sikap politik para pemangku negeri digambarkan sebagai sikap egois dan mau menang sendiri. Dari berbagai sikap yang para pemangku negeri lakukan, *MkNBK* mengerucutkan pada satu fenomena besar dan khusus, yakni korupsi. Sikap koruptif para pemangku negeri memang salah dan tidak dapat dibenarkan tetapi teks artikel ini sama sekali tidak menyertakan kebaikan sehingga mengesankan bahwa segala kebijakan yang telah

dilakukan para pemangku negeri adalah buruk dan tidak membela rakyat. Seluruh uraian teks adalah paparan kejahatan dan keburukan para pemangku negeri.

Wacana kejahatan dan keburukan para pemangku negeri juga dapat dilihat dari bagaimana mereka direpresentasikan dalam teks. Mereka dinilai “melakukan trik, manuver” dan “sim salabim”. Selain itu banyak sekali sikap buruk mereka yang disebut dalam teks secara lugas seperti “mau benar sendiri”, “mau menang sendiri”, “narabas”, “menyalahgunakan kepercayaan rakyat untuk menyalurkan sahwat-sahwat personal dan komunal”. Kata-kata semacam itu yang disebut beberapa kali seolah mengasosiasikan kesalahan memang jelas berada di pihak para pemangku negeri semata. Sumber dari rusaknya bangunan negeri adalah perilaku pragmatis para pejabat negeri semata, yang memang narabas, tidak dapat dipercaya, egois, dan ingin menang sendiri.

Semua elemen pemerintah tak terlewat dari sindirian dan kritik oleh penulis dalam teks artikel *MkNBK*, para politisi, pejabat publik, pegawai negeri korup, parlemen yang memperjualbelikan ayat-ayat hukum sehingga dilabeli memihak kepada “kapitalis jahat dan mafia siluman”, sampai KPK yang dianggap belum mampu mewujudkan harapan konkret masyarakat luas. Dengan menyebut segala kinerja KPK “hanya sebatas ritual pendataan para pendosa” maka “investigasi (penyelidikan, penyidikan) yang telah dilakukan, pemanggilan, pemeriksaan, penetapan terseangka, penetapan terdakwa, dan seterusnya” seolah tidak berguna sama sekali.

Setelah semua fenomena-fenomena nirlogika dipaparkan di setengah teks, maka kemudian memunculkan pemikirannya sebagai bentuk usulan perbaikan atas segala kerusakan bangunan negeri yang hampir roboh karena korupsi.

Pertama, pemilu yang murah dan proposional dengan coblosan elektronik online yang terintegrasi secara regional dan terpantau nasional atau secara serentak dan menyeluruh. Kedua, penyediaan ruang bagi partisipasi publik dari pers atau media massa, sedini mungkin. Hal tersebut dengan tujuan memberikan informasi lebih transparan, alami, dan objektif, membuktikan rekam jejak positif di masyarakat serta visi misi mereka untuk didiskusikan bersama.

Salah satu dari keduanya diusulkan dengan tujuan memutus mata rantai siklus lingkaran setan keluar modal-balik modal. Istilah “siklus lingkaran setan keluar modal-balik modal” adalah satir yang ditujukan bagi para pelaku korupsi negeri. Sindiran lain dapat dilihat dari tiga pertanyaan yang disampaikan lugas dalam teks, sebagai berikut.

1. Apakah itu terjadi lantaran banyak pejabat publik lain juga melakukannya?
2. Atau karena godaan yang begitu menggiurkan sehingga membuat iman dan benteng pertahanan melemah?
3. Atau karena untuk mencapai jabatan yang ada saat ini harus mengeluarkan ongkos politik yang besar, sudah sewajarnya bila

mengembalikan moodal plus bunga – dan jika memungkinkan, melipatgandakan modal?

Dalam teks tidak disinggung terkait azaz praduga tak bersalah. Kesemuanya menyudutkan para politisi, para pejabat publik yang sebagian besar dianggap sebagai koruptor dan penyebab utama skeptisme masyarakat. Disampaikan bahwa sudah berulang kali dilakukan studi banding anggota parlemen ke luar negeri. Namun, seperti tidak membawa oleh-oleh ilmu dan pengetahuan baru yang berguna bagi bangsa dan negara. Salah satu oleh-oleh yang digambarkan dalam teks sebagai harapan masyarakat ialah ilmu dan pengetahuan bagaimana memberantas korupsi di suatu negeri sehingga “setelah melihat mereka pulang, anggota parlemen makin bijak dan bestari”.

Seperti yang disampaikan pada judul teks artikel humor satir ini, “*Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi*”. Kalimat tersebut mengasosiasikan bahwa Republik Badut memang harus mengakui fenomena korupsi masal yang menghancurkan bangunan negerinya dan sudah seharusnya menggali ilmu dari negara-negara yang layak. Memang tidak mungkin suatu negeri benar-benar terhindar dari korupsi dan benar-benar bersih. 12 negara yang disebut sebagai negara paling minim korupsinya ini pun disebut sebagai “12 negara paling minim korupsinya” bukan negara bebas korupsi. 12 negara tersebut antara lain: Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, Swiss, dan Israel.

Dalam kalimat tersebut memberikan gambaran bahwa perjalanan-perjalanan yang selama ini dilakukan oleh para anggota parlemen sebenarnya salah tujuan. Hal tersebut diperjelas dengan kalimat eksplisit yang mengatakan “Tidak perlu menyasar-nyasar dengan menghabiskan biaya besar tanpa hasil”.

Tingkat kerumitan untuk memperbaiki kasus-kasus korupsi di Republik Badut tidak disinggung dalam *MkNBK*. Misalnya dalam kutipan akhir yang seolah menjadi simpulan *MkNBK*, berikut:

Seharusnya bukan perkara rumit untuk menimba pengetahuan dan informasi bagaimana parlemen di negara-negara tersebut mengawal pemerintahannya sehingga menjadi negara yang minim korupsinya; negara yang bersih dan berwibawa di mata dunia. Cukup dengan *copy paste* konstitusi mereka dengan sedikit suntingan konten yang berkaitan dengan nilai lokal Republik Badut; selesai bukan? Seharusnya memang sangat sederhana seandainya parlemen kita juga dapat membuktikan bahwa dirinya juga bersih dan berwibawa di mata rakyatnya.

Kalimat tersebut seakan ingin menegaskan kepada khalayak pembaca dua hal. Pertama, menimba pengetahuan dan informasi dari negara-negara lain bukanlah perkara rumit untuk menjadikan negara yang minim korupsinya. Kedua, parlemen Republik Badut memang tidak bersih dan tidak berwibawa di mata rakyatnya.

Wacana mengenai keburukan pemangku negeri dan parlemen juga dapat dilihat dari bagaimana relasi yang hendak dibangun dalam teks. Tekst artikel ini menyertakan dua pihak saja di dalamnya, yakni para pemangku negeri dan rakyat. Para politisi, pejabat publik, dan para parlemen disebut beberapa kali di dalam teks, tetapi kesemuanya disimpulkan dalam satu

pihak, yakni para pemangku negeri. Dua pihak yang digambarkan secara berbeda dalam teks. Para pemangku negegri digambarkan sebagai pihak yang sikapnya selalu tidak benar dan merugikan masyarakat luas. Sedangkan masyarakat digambarkan sebagai pihak yang banyak dirugikan oleh sikap dan kebijakan para pemangku negeri. Dua pihak tersebut seolah digambarkan dalam relasi yang tidak rukun antara satu sama lain. Dikarenakan seringnya masyarakat dirugikan atas sikap koruptif para pemangku negeri, maka pelaku korupsi harus ditumpas dan diadili dengan hukuman yang memberikan efek jera.

Selain relasi, teks juga memberikan gambaran bagaimana identitas kedua pihak tersebut diwujudkan dalam teks. Pembaca dalam teks diposisikan sebagai masyarakat, bukan dalam posisi para pemangku negeri yang di dalamnya termasuk para politisi, pejabat negegri dan para anggota parlemen. Teks tersebut, misalnya, tidak mensugestikan kepada khalayak untuk melihat sisi baik dan upaya-upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak memaparkan alasan kenapa seringkali gagal dalam memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Teks memposisikan khalayak pembaca agar mendukung sikap masyarakat untuk segera menumpas sikap koruptif dan mensugestikan kepada khalayak pembaca bahwa usulan-usulan yang ditampilkan dalam teks adalah sikap yang baik dan tepat untuk membersihkan negeri dari sikap koruptif para pemangku negeri.

12) *Bukan Lawak Senayan (BLS)*

Teks artikel humor ini mengisahkan mengenai Lawak di Republik Badut, yang tidak lagi laku manggung karena kalah dengan lawak senayan, istana, Kuningan, Cikeas, Trunojoyo, dan beberapa tempat lain. Wacana yang dikembangkan dalam artikel ini ialah kegatalan sejumlah politisi dan pejabat publik untuk ikut melawak di televisi. Mereka digambarkan sebagai pihak yang lucu karena keganjilan-keganjilan sikap mereka. Salah satu kasus yang dianggap menggelikan ialah caciannya yang ditujukan kepada Butet Kertaradjasa setelah membawakan monolog *Deklarasi Pemilu Damai 2009* oleh salah satu peserta pemilu damai yang sebelumnya pernah *nanggap* Butet dengan tema yang berbeda.

Teks artikel *BLS* kemudian menanggapi caciannya tersebut dengan menampilkan tanggapan dari Indra Tranggono di harian ibu kota tanggal 20 Juni 2009, yang seolah mendukung Butet. Susunan teks semacam itu secara implisit menunjukkan praktik yang ingin disampaikan oleh penulis. Darminto melalui *BLS* meminjam mulut Indra Tranggono di harian ibu kota untuk memperkuat pendapatnya. Dalam tulisan Indra Tranggono yang berjudul “Negeri yang Suka Tertawa” disampaikan sebagai berikut.

“Maka ketika politik macet dan hanya menjadi jagat “jual-beli” kekuasaan, seni lawak perlu tampil dengan semangat dasarnya yang kritis, cerdas, visioner dan elegan. Seni lawak mampu menjadi medium yang akan mengembalikan publik pada esensi kemanusiaan. Pada pemulihan manusia... dst (*BLS/VII/109*). ”

Dengan cara menanggapi caciannya dari salah satu peserta pemilu damai yang mencaci Butet dengan komentar dari Indra Tranggono, teks seolah

menampilkan kepada khalayak pembaca, alangkah tidak bijaknya caciannya yang ditujukan kepada Butet tersebut, karena seni lawak sesungguhnya dianggap mampu menjadi medium yang akan mengembalikan publik pada esensi kemanusiaan.

Mungkin memang benar jika seni lawak mampu menjadi medium yang akan mengembalikan publik pada esensi kemanusiaan. Mungkin juga benar jika caciannya terhadap Butet seharusnya tidak perlu ada. Akan tetapi wacana yang dikembangkan seolah menyalahkan pencaci Butet. Teks tidak menampilkan kutipan langsung dari Butet atau apa yang Butet sampaikan hingga mungkin dapat menjadi penyebab terlukanya hati pencaci. Latar belakang tersebut tidak ditampilkan secara jelas. Begitu juga dengan caciannya yang dimaksud juga tidak diekplisitkan. Oleh karena caciannya membawa makna negatif dan buruk, maka pencaci Butet direpresentasikan sebagai pihak yang jahat dan bersalah dalam artikel dan karena seni lawak ditampilkan sebagai sesuatu yang diperlukan sebagai kritik sosial, maka Butet direpresentasikan sebagai pihak yang baik dan tidak bersalah.

Teks artikel seolah menggambarkan salah satu peserta pemilu damai tersebut, yang tidak disebutkan identitas jelasnya, sebagai pihak yang salah tetapi tidak mau dikritik. Di sana tidak digambarkan bagaimana suasana hati pencaci sebelumnya hingga ia tersinggung barangkali, kenapa ia melakukannya? dan sebagainya.

Kegatalan para politisi dan pejabat publik untuk melawak di televisi adalah sindiran atas kelucuan dan kekonyolan sikap mereka selama ini.

Seolah banyak sekali kekonyolan yang telah mereka lakukan, tetapi *BLS* hanya mengangkat satu kasus saja sebagai contohnya. Selanjutnya Darminto malalui *BLS* juga memberikan penjelasan panjang lebar mengenai keadaan peta lawak Republik Badut saat itu dan bagaimana melahirkan pelawak yang komitmen kuat pada mutu, bukan sekadar pelawak berbasis industri.

Dipaparkan dalam *BLS* bahwa mutu dalam seni lawak akan terbangun ketika antara teman, ide, dan estetika berjalan lancar, wajar, dan proposional. Selain itu, kebaruan ide, pilihan lelucon yang sehat dan tepat, kritik sosial yang cerdas, bernilai pendidikan, dan dapat menjadi media katarsis bagi masyarakatlah yang juga akan memengaruhi mutu lawak tersebut.

Dengan menguraikan panjang lebar mengenai bagaimana melahirkan pelawak yang bermutu dan lawakan yang cerdas merepresentasikan pendapat Darminto bahwa seni lawak sesungguhnya memang sangat diperlukan sebagai salah satu bentuk kritik sosial yang baik bagi Republik Badut. Butet, Indra Tranggono dan Darminto tidak berbicara secara langsung, tidak berjumpa, tetapi dengan menyejajarkan pendapat mereka dalam satu teks, seolah mereka saling menanggapi terkait para politisi dan para pejabat publik, seni lawak dan kritik sosial.

Wacana mengenai perlawanan terhadap lawak Senayan juga dapat dilihat dari bagaimana mereka direpresentasikan dalam teks. Lawak senayan disejajarkan lucunya dengan “*perform stand up comedy*” yang belakangan sedang digemari dan booming. Kalimat tersebut mengasosiasikan bahwa

keganjilan-keganjilan sikap para politisi dan pejabat publik di Senayan sangat luar biasa di luar sangkaan masyarakat dan disejajarkan dengan keadaan *stand up comedy* yang sedang digemari dan booming mengasosiasikan bahwa tingkah tidak baik dari para politisi dan pejabat publik di Republik Badut memang sangat banyak dan ramai menghiasi berita-berita perpolitikan negeri.

Tingkah para politisi dan pejabat publik Republik Badut ini juga diberi dengan kata-kata yang negatif seperti “kegatalan untuk melawak semakin tak terbendung” dan “tak waras”. Seluruh teks seolah menggambarkan antipatinya terhadap para politisi dan pejabat publik. Selain itu sindiran juga diberikan kepada pelawak asli yang dianggap bergenit-genit dalam gaya politisi.

Wacana semacam itu juga dapat dilihat dari bagaimana relasi yang hendak dibangun dalam teks. Teks berita menyebut beberapa pihak di antaranya: para politisi dan pejabat publik, Butet Kertaradjasa, Indra Tranggono, Miing Bagito, Quarterd S, dan masyarakat. Satu kasus yang dimunculkan dalam teks ialah kasus antara Butet Kertaradjasa dan pihak politisi-pejabat. Kedua pihak tersebut dimunculkan dalam teks untuk dikomentari. Indra Tranggono merupakan satu pihak yang disebut namanya dalam teks sebagai pihak yang mengomentari hal tersebut dengan kecondongannya kepada Butet, bukan pihak politisi-pejabat. Sedangkan Miing Bagito dan Quarterd S adalah dua pihak yang idenya digunakan untuk memperkuat pendapat Darminto untuk menghidupkan mutu seni lawak

sehingga melahirkan lelucon yang sehat dan tepat, kritik sosial yang cerdas, bernilai pendidikan, dan dapat menjadi media katarsis bagi masyarakat.

Praktis dalam teks artikel tersebut diterangkan hanya dua pihak, para politisi-pejabat publik dan masyarakat. Secara tidak langsung kritik sosial yang cerdas yang ditujukan kepada para politisi-pejabat publik ialah pemihakan kepada masyarakat. Artinya adalah para politisi-pejabat publik dan masyarakat ialah dua pihak yang digambarkan secara berbeda dalam teks. Salah satu sindiran mengenai hal ini ditampilkan pada *BLS/VI/108* ketika masyarakat menjadi semakin bingung dan mencurigai dirinya sendiri “apakah yang tak waras itu yang menonton atau yang ditonton?”.

Masih berkaitan dengan relasi, yakni identitas pihak-pihak yang diberitakan dalam teks. Khalayak pembaca dalam teks ditempatkan pada posisi masyarakat, yang seolah dituntut untuk pandai melakukan kritik sosial yang cerdas melalui seni lawak yang bermutu. Sedangkan, teks tidak mensugestikan kepada khalayak pembaca untuk menempati posisi para politisi atau pejabat publik yang notabene sebagai pihak yang dikritik. Oleh karena itu, para politisi dan pejabat publik akan menjadi musuh bersama apabila menentang untuk dikritik ketika mereka bersikap “lucu”.

13) *Karantina Generasi Republik Badut (KGRB)*

KGRB ialah teks artikel humor politik yang mengisahkan tentang seorang presiden, di mana republik yang ia pimpin sedang berada di bibir jurang, hampir hancur. Presiden dalam teks dilabeli dengan panggilan “Kanjeng Prabu Republik Badut”. Teks ini mengisahkan mengenai seorang

presiden yang sedang bingung dan gelisah memikirkan bagaimana mengatasi keadaan negerinya yang sedang di bibir jurang tersebut. Kemudian Kanjeng Prabu Presiden Republik Badut ini mengundang salah seorang rakyat biasa, di mana dalam teks ia dikisahkan sebagai penulis cerita ini. Agar memudahkan, penulis teks menggunakan kata ganti “saya” untuk menyebutkan identitas dirinya dalam teks *KGRB*.

Teks *KGRB* merupakan teks yang bernuansa satir. Wacana yang dikembangkan dalam teks artikel ini adalah antipati yang tersembunyi dari penulis teks kepada Kanjeng Prabu Presiden Republik Badut. Antipati yang tersembunyi tersebut dapat dilihat dari bagaimana sindiran terhadap Kanjeng Prabu Republik Badut direpresentasikan dalam teks.

Presiden Republik Badut sendiri diberi panggilan oleh penulis teks dengan “Kanjeng Prabu”. Panggilan tersebut merupakan panggilan kehormatan yang mengandung tingkatan lebih tinggi dari pemanggilnya. Namun, rasa hormat itu terpatahkan ketika dalam teks, sikap penulis justru digambarkan dengan tidak segera mengiyakan dan menghadap Presiden ketika diminta datang, bahkan butuh waktu lima kali undangan melalui telepon barulah penulis teks mau menghadap presiden ke istana. Itupun dengan alasan yang direpresentasikan dengan kalimat “Terus terang saya benar-benar tidak tega”. Selama penulis empat kali mangkir dari undangan presiden terhadap dirinya, ia justru tidak datang dengan alasan sangat sibuk.

Jika rasa hormat itu sungguh ada dari seorang penulis teks kepada presiden, maka penulis teks tidak akan membuat presiden menunggu ketika

mmebutuhkan dirinya. Maka dapat disimpulkan bahwa panggilan “Kanjeng Prabu Presiden” penghormatan lisan saja, tetapi di dalam hati justru sebaliknya.

Teks juga menggambarkan sikap presiden yang menjadikannya tampak kurang berwibawa. Ketika di dalam ruang istana kepresidenan misalnya, sambutan presiden kepada penulis teks digambarkan dengan menggunakan kalimat “Presiden sendiri menyambut dengan tergopoh-gopoh, mungkin beliau khawatir saya balik lagi ke rumah”. Seolah presidenlah yang sangat membutuhkan penulis teks tersebut, sedangkan penulis teks tersebut dalam posisi tidak membutuhkan presiden. Ketimpangan ini mengesankan kepada khalayak pembaca mengenai posisi presiden yang kurang dihormati

Seluruh teks *KGRB* ini seolah kurang menunjukkan penghormatan kepada presiden. Mulai dari kegudahan dan kegelisahan hati presiden yang kurang mendapat respon baik, penciptaan sejumlah lirik lagu hingga menciptakan sejumlah album baru yang kurang mendapat komentar yang mendukung, sampai pada kalimat yang menyatakan secara eksplisit sikap antipatinya pada presiden. Hal tersebut dapat dicermati pada teks komentar sebagai berikut.

“Rumit amat sih. Kamu bilang aja ke dia, salah satu cara untuk menyelematkan bangsa ini cukup gampang dan tidak perlu melakukan pemusnahan peradaban; yaitu: suruh dia mundur, secepatnya. Makin cepat makin baik. Cuma itu. Karena jurang yang dia maksud itu adalah dirinya sendiri. Proyeksi dari ketakutan-ketakutannya. Suer!!!” (*KGRB/XII/155*).

Teks tersebut merupakan kutipan langsung dari seorang rekan penulis, tetapi pada komentar selanjutnya penulis juga digambarkan seolah mendukung pendapat seorang teman tersebut. Antipati terhadap presiden tersebut dapat dilihat dari sapaan “dia” yang merepresentasikan sikap kurang hormat, dan yang kedua ialah kalimat “Suruh dia mundur, secepatnya. Makin cepat makin baik. Cuma itu. Karena jurang yang dia maksud itu adalah dirinya sendiri. Proyeksi dari ketakutan-ketakutannya. Suer!!!” yang merupakan penegasan dari sikap menolak keberadaan presiden yang sedang menjabat saat itu.

Wacana semacam itu juga dapat dilihat dari bagaimana relasi yang hendak dibangun dalam teks. Teks artikel ini menyertakan empat pihak, yakni penulis teks, Presiden Republik Badut, teman dari penulis teks, masyarakat. Tiga pihak diantaranya digambarkan secara berbeda dengan satu pihak yang lain. Penulis teks, teman dari penulis teks, dan masyarakat digambarkan sebagai komunitas yang memiliki satu pendapat yang sama yakni menginginkan presiden mundur secepatnya. Makin cepat main baik karena jurang yang dimaksud presiden ialah dirinya sendiri. Proyeksi dari ketakutan-ketakutannya. Sedangkan presiden digambarkan sebagai pemimpin yang sedang gelisah atas keadaan negeri yang dirasa sedang berada di bibir jurang kehancuran.

Penulis di dalam teks memang seolah tampak berada sebagai pihak yang netral. Tidak membela presiden, juga tidak menentangnya. Namun jika dicermati pada *KGRB/XIV/156*, misalnya, sebagai berikut.

Adakah satu atau sebagian di antara Anda yang sanggup menyampaikan itu kepada beliau? Saya sungguh berterima kasih kalau Anda mau membantu saya. Sebagai pihak yang tahu artinya profesi, saya sungguh tidak mau terjebak dalam permainan emosi dan perasaan yang agak sensitif ini. Mau, kan? Okelah kalau begitu! Terima kasih atas jawabannya.

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa, penulis teks tidak menyampaikan kepada presiden langsung terkait perintah untuk mundur secepatnya dikarenakan tidak mau terjebak dalam permainan emosi dan perasaan, bukan karena tidak ingin presiden mundur. Teks juga menyertakan kalimat “Saya sungguh berterima kasih kalau ada yang mau membantu saya”. Kalimat tersebut kembali menegaskan bahwa penulis teks juga menginginkan bahwa presiden lebih baik mundur.

Terkait juga dengan relasi, yakni identitas pihak-pihak terkait dalam teks. Teks artikel *KGRB* menggambarkan bagaimana khalayak pembaca diletakkan pada posisi masyarakat dan disugesti untuk membenarkan segala sikap dan pendapat dari pihak penulis serta komentar pedas dari rekan penulis. Termasuk sikap dan pendapat yang menyarankan agar presiden mundur secepatnya. Teks memang menggambarkan identitas presiden secara biasa dan sederhana, bahkan kurang terkesan wibawa. Namun teks tidak mensugestikan kepada khalayak pembaca untuk menyelami apa yang dirasakan oleh presiden. Dalam keadaan negeri yang berada di bibir jurang, teks justru memposisikan pembaca agar berempati kepada masyarakat, bukan kepada presiden.

Di akhir teks artikel *KGRB*, cerita berbingkai ini diakhiri dengan kalimat “Persoalannya adalah pertemuan dengan Presiden itu memang tidak

pernah ada dan tak pernah terjadi. Itulah!”. Hal tersebut merupakan salah satu ciri khas dari humor dan satir yang setelah mengkritik sana-sini, menulis sesuka hati, lalu mangkir dari tanggung jawab. Protes sosial dalam humor oleh sebagian besar orang tidak akan mendapat perhatian serius karena yang menyuarakan dianggap tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam protes sosial berupa humor sudah diambil kolektif. Sehingga kekolektifanlah yang bertanggung jawab.

14) *Andai Gue Jadi Gubernur DKI (AGJGDKI)*

Teks artikel *AGJGDKI* mengisahkan mengenai Bang Odi yang sedang menjawab pertanyaan wawancara, kemudian ia menyampaikan uneg-uneg rencananya yang telah lama ia catat-catat pada lembaran terpisah-pisah. Ada yang ditulis di kertas bekas bungkus rokok, ada pula di kertas yang sudah agak kumal. Ia menulis soal gagasannya, andai ia menjadi gubernur DKI Jakarta.

Wacana yang dikembangkan dalam teks artikel ini adalah ide Bang Odi tentang Jakarta, bahwa yang utama ialah bagaimana isi perubahan pada Jakarta agar warga tambah maju, adil, makmur, bukan sekadar akan bikin perubahannya saja. Bang Odi digambarkan sebagai seorang putra Betawi asli yang nyentrik, yang selama ini dikenal suka melantur kalau bicara, tetapi mampu memberikan pemikirannya yang serius dan bersemangat ketika diajak membahas topik yang sedang hangat.

Dalam teks dipaparkan delapan impian Bang Odi tentang Jakarta jika ia menjadi gubernur, (1) mengajak rapat semua jajaran untuk membicarakan APBD dan disampaikan terang benderang kepada media massa dan publik; (2) mengundang orang “gila” dari dalam maupun luar negeri, yakni orang-orang kreatif yang selalu berpikir beda untuk mendengar impian mereka tentang Jakarta; (3) mereaktualisasi lalu lintas air sebagai salah satu solusi kemacetan Jakarta, berapa pun biayanya kalau bisa nombok; (4) soal banjir, maka Jakarta akan diuruk sehebat-hebatnya agar lebih tinggi dari Bogor dan Puncak, sehingga tidak ada lagi keluhan kiriman banjir dari Bogor dan puncak; (5) perda regulasi untuk memberdayakan warga miskin kota. Warga yang sudah maju atau lumayan maju harus berhenti dulu, menunggu warga miskin kota mendapat kesempatan belajar, berlatih, dan mencapai titik di mana warga maju berada. Baru mereka semua diizinkan bersaing secara bebas; (6) Memberi ruang gerak dan ekspresi berbagai upacara keagamaan agar dapat menjadi tour keagamaan dan menambah keuntungan bagi sektor hotel, mal, pusat kerajinan dan kesenian di sekitarnya; (7) meningkatkan kemakmuran yang otomatis mereduksi kecemburuhan sosial, kriminalitas dan diskriminasi etnik; (8) Setelah Jakarta makmur, adil, dan sejahtera maka predikat sebagai ibukota negara dicopot dan dipindah ke kota lain, agar kota lain ikut berkembang dan maju.

Teks artikel ini secara tidak langsung seolah menyiratkan bahwa sebenarnya selama ini Jakarta berada dalam posisi statis dan belum mengalami perubahan berarti. Ada program-program perubahan yang

dibuat. Namun perubahan itu belum dianggap oleh Bang Odi sebagai perubahan yang bikin warganya tambah maju, sejahtera, adil, dan makmur. Selain itu, wacana ini juga hendak ditujukan kepada seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI.

Wacana tentang sikap yang seolah skeptis kepada seorang putra Bangsa Republik Badut yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI dapat dilihat dari bagaimana ia direpresentasikan dalam teks. Terdapat sapaan “orang yang saya maksud itu”, sebagai kalimat untuk menggantikan subjek “calon Gubernur DKI”. Sapaan tersebut seolah kurang mengesankan rasa hormat atau simpati kepada calon Gubernur DKI yang dimaksud. Sebelum masuk pada inti pembahasan artikel, ditemukan frasa “bukan apa-apa” yang menyiratkan justru memang ada apa-apa, kemudian dilanjutkan dengan kalimat “mulanya memang saya maksudkan untuk memberi semacam masukan pada jago saya itu”. Kesan yang ditangkap dari kalimat tersebut seolah terdapat keraguan dari teks terhadap calon Guberbur DKI tersebut. Meskipun ada kata “jago saya”, tetapi keseluruhan kalimat tersebut menyampaikan sindiran yang halus kepada calon Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Teks artikel ini menyanjung, kemudian menjatuhkan, kemudian menyanjung lagi dan mengantiklimaksan lagi. Alur tersebut mengasosiasikan sindiran yang sangat halus. Ditambah lagi pada akhir teks artikel ditutup dengan kritikan-kritikan dan masukkan-masukkan yang seolah memberikan kesan bahwa *AGJGDKI* meragukan kompetensi dan

pemahaman calon Gubernur DKI Jakarta dalam mengenal dan menangani Jakarta, kelak.

Jakarta memang dikenal sebagai ibu kota yang masih semrawut, sering banjir dan memiliki kemacetan yang parah. Namun kesemuanya itu seolah sudah dibebankan tanggung jawabnya pada si calon Gubernur DKI. Selain sikap yang agak skeptis, juga ditampilkan teks dukungan pada si calon Gubernur DKI Jakarta, sebagai berikut.

Siapa tahu tulisan sederhana yang saya buat dapat membuat beliau makin berkeyakinan bahwa tidak di daerah tidak di ibukota, yang namanya manajemen manusia dan wilayah, sama saja. Yang membedakan hanya kasusnya. Jadi kenapa harus ragu dan surut langkah oleh berbagai “terror” yang dialamatkan padanya (*AGJGDKI/II/157-158*).

Kalimat tersebut seolah ingin menegaskan bahwa keinginan menjadi Gubernur DKI Jakarta janganlah dianggap menjadi suatu cita-cita yang lebih luhur dari pada menjadi Gubernur di daerah, tapi juga jangan takut untuk melangkah menjadi Gubernur DKI Jakarta karena pada dasarnya yang namanya manajemen manusia dan wilayah, sama saja. Yang membedakan hanya kasusnya. Jika sungguh-sungguh ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta maka beberapa pesan kemudian seolah menjadi wejangan dari Bang Odi untuk si calon Gubernur DKI Jakarta.

Dukungan dan sikap yang seolah skeptis tersebut bergantian disampaikan sepanjang teks artikel *AGJGDKI*. Namun jika melihat simpulan akhir teks, maka kalimat tersebut benar merepresentasikan bahwa ada perlawanan yang tersirat dari *AGJGDKI* kepada si calon Gubernur DKI. Hal tersebut dapat dicermati pada kalimat berikut.

Jadi kesimpulannya, kalau sekadar mau bikin perubahan di Jakarta itu mah soal kecil, tapi bikin perubahan yang isi perubahannya itu bikin warga tambah maju, sejahtera, adil, dan makmur, itu yang *kagak gampang, coy!* Begitu katanya mengakhiri percakapan (*AGJGDKI/XVIII/162*).

Kalimat tersebut mengasosiasikan ke benak khalayak pembaca dua hal. Pertama, Perubahan dari pemimpin yang baru itu seharusnya bukan sekadar mengadakan program baru atau sistem baru tetapi apakah sesuatu yang baru itu telah dapat dikatakan perubahan? Kunci perubahan yang dimaksud ialah menjadikan warga tambah maju, sejahtera, adil, dan makmur. Kedua, Menjadi gubernur DKI Jakarta itu tidak mudah, maka si calon Gubernur DKI Jakarta haruslah orang yang mumpuni. Jika merasa tidak mumpuni maka lebih baik tidak usah mencalonkan, dari pada hanya sekadar ingin memenangkan gengsi atau meraih kesuksesan lebih, tetapi kemajuan warga, kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran warga Jakarta tetap sama atau bahkan lebih parah.

Wacana semacam itu juga dapat dilihat dari bagaimana relasi yang hendak dibangun dalam teks. Teks artikel ini menyebut empat pihak yang tersebut di dalamnya, yakni Bang Odi, si calon Gubernur DKI yang dimaksud Bang Odi, pewawancara, dan warga Jakarta. Yang banyak memberikan suara dalam teks ialah Bang Odi dan pewawancara yang juga merangkap sebagai penulis artikel dalam kisah teks. Si calon Gubernur DKI Jakarta dan warga Jakarta hanya disebut saja dalam teks, tetapi tidak dimunculkan kalimat langsung dari keduanya.

Praktis dalam teks, terdapat dua pihak yang memiliki relasi secara langsung dalam teks, yakni pewawancara dan Bang Odi. Kedua pihak tersebut digambarkan dengan pemikiran yang kurang lebih sama dan saling mendukung. Keduanya membincangkan mengenai si Calon Gubernur DKI Jakarta dan rakyat Jakarta. Bang Odi dan pewawancara digambarkan sebagai pihak yang berpendapat demi kemakmuran warga Jakarta pada khususnya, sementara si calon Gubernur DKI Jakarta digambarkan sebagai pihak yang berhadapan dengan mereka semua. Apabila si calon Gubernur DKI Jakarta adalah pemimpin yang baik dan bertanggungjawab, maka pihak di hadapannya akan mendukungnya. Namun jika si calon Gubernur DKI Jakarta adalah orang yang buruk dan tidak bertanggung jawab maka perlawanan akan siap dilakukan oleh pihak yang berada di hadapannya.

Masih berkaitan dengan relasi, adalah identitas pihak-pihak yang diceritakan dalam teks artikel *AGJGDKI*. Teks digambarkan berada di pihak rakyat Jakarta pada khususnya serta membela segala kepentingan dan kebaikan untuk warga Jakarta. Teks tersebut misalnya, menjelaskan delapan poin rencana untuk Jakarta yang kesemuanya selalu membela kepentingan warga Jakarta. Kemudian teks ditutup dengan simpulan yang seolah menyatakan bahwa siapa pun calon Gubernur DKI Jakarta itu baik dan akan didukung oleh warga Jakarta asalkan ia dan jajarannya mampu menunjukkan bukti nyata kinerja atas program perubahan yang menjadikan warga Jakarta tambah maju, sejahtera, adil, dan makmur. Itu bukan hal yang mudah.

Teks memposisikan khalayak pembaca agar berempati pada kesejahteraan warga Jakarta pada khususnya dan berwaspada pada janji perubahan si calon Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, teks artikel dari awal hingga akhir berisi masukan dan harapan yang seolah menjadi salah satu bentuk sikap kehatia-hatian dan kewaspadaan kepada si calon Gubernur DKI Jakarta.

15) *Menunggu Godot yang Datang Codot (MGyDC)*

Teks artikel ini mengisahkan mengenai seorang politikus di negeri bernama Hedonesia Raya. Politikus bernama Adygank Adigonk Adygoenha yang sering disebut dengan Mr. A3 ialah seorang politikus yang busuk dan jahat. Wacana yang dikembangkan dalam artikel humor ini adalah kebusukan dan kejahatan Mr. A3 tersebut. Ia digambarkan bukan hanya sebagai orang yang egois, tapi juga sebagai orang yang tak punya hati nurani.

Terdapat empat hal yang menjadi sorotan sebab kebusukan dan kejahatan politikus A3. Pertama, statusnya sebagai politikus dianggapnya sebagai pekerjaan, bukan media aktualisasi diri. Sehingga berlakulah hukum ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya bisa mendapatkan untung sbeesarnya. Kedua, terkait visi, misi, dan motivasinya untuk bisnis, sehingga merasa tak ada hubungannya status politikusnya dengan pembelaan pada aspirasi rakyat. Ketiga, anggapan politik sebagai perang, di mana kalau tidak membunuh makan akan terbunuh. Sehingga merasa bahwa kemanusiaan, empati, solidaritas sosial, keberpihakan pada kaum lemah tak

ada urusannya dengan statusnya sebagai politikus. Keempat, hedonisme dianggapnya sebagai *way of life*.

Secara umum, *MGyDC* menggambarkan bagaimana keburukan-keburukan seorang politikus dan seolah keburukan yang telah dilakukan itu tidak pernah disadarinya, bahkan hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan membanggakan bagi dirinya. Teks artikel *MGyDC* sesungguhnya ialah tudangan hebat yang ditujukan kepada politikus, akan tetapi menjadi sangat halus karena disampaikan dengan bahasa humor ironi dan analogi. Teks artikel *MGyDC* sama sekali tidak menampilkan sisi kebaikan dan keberpihakan politikus terhadap rakyat lemah. Yang digambarkan di sana ialah pengakuan kejujuran serta kebanggaan Mr. A3 sebagai seorang politikus atas kemenangan-kemenangan di atas perang dan bisnisnya meski harus melukai dan menindas rakyat kecil.

Wacana kebusukan dan kejahatan Mr. A3 sebagai seorang politikus dapat dilihat dari bagaimana Mr. A3 direpresentasikan dalam teks. Teks artikel *MGyDC* memilih menggunakan bahasa orang pertama. Jadi teks menampilkan kebusukan dan kejahatan politikus dengan menggunakan kata “saya” untuk menceritakan segala tentang dirinya, pemikirannya dan sikap-sikapnya dalam berpolitik selama ini. Mr. A3 menganggap politik adalah bisnis dengan alasan yang buruk seperti,

“Yang jelas saya masuk ke partai politik, pakai modal. Mencalonkan diri jadi anggota parlemen juga pakai modal; jadi bila dikorelasikan dengan hukum ekonomi, pas toh?”

Kalimat semacam itu mengasosiasikan bahwa politikus menganggap politik adalah lahan bisnis untuk mencari keuntungan, bukan untuk membela kepentingan rakyat.

Sikap politikus juga direpresentasikan dalam teks dengan “wakil rakyat yang *nggak* pernah nyambung sama aspirasi rakyat”, “idealisme kita berbeda”, dan “hedonisme sebagai *way of life*”, “*high profile*”, “tak punya malu”, membunuh hati nurani sendiri”, “egois – baik inividu maupun kelompok (partai)”, “piawai berbohong”, “pandai berakting”, “*money politic*”, “konspirasi” dan lain lain yang semakin menegaskan keburukan-keburukan politikus. Sikap Mr. A3 sebagai seorang politikus digambarkan sangat buruk dalam teks. Seluruh teks seolah membenarkan dan menegaskan bahwa politikus adalah sosok yang sangat buruk di mata rakyat dan semua pihak. Namun malah hal itu digambarkan sebagai sikap yang benar dan membanggakan di mata politikus sendiri.

Politikus adalah sosok yang tega, kejam, dan jahat terhadap rakyat. Selain itu kejahanatan politikus tersebut direpresentasikan juga dengan adanya dukungan dari sejumlah pihak untuk melancarkan suatu tujuan yang sama. Teks berikut misalnya.

Mengapa ini nyaman bagi kami, saya khusunya, karena institusi atau lembaga lain yang ada seperti eksekutif, yudikatif, bahkan pers, sudah satu nada dan irama dengan filosofi kami semua. Kalau toh ada kasus-kasus mencolok yang terkait di lembaga kami atau lembaga setingkat di eksekutif yudikatif, pers sudah tahu apa yang harus mereka lakukan; ya, mereka segera menyajikan berita-berita kecil seperti orang mencuri buah cokelat, sandal jepit, kapuk, dan sebagainya menjadi berita besar dan dramatis sehingga orang berpaling ke sana
MGyDC/XII/182

Teks tersebut mengasosiasikan kebusukan dan kejahatan politikus ada dan semakin menjadi-jadi, tidak lain karena adanya dukungan dari para elit penguasa dan pers. Sehingga teks *MGyDC* selain mengupas kebusukan dan kejahatan politikus, ternyata juga menampilkan kebusukan dan kejahatan lembaga eksekutif, yudikatif, bahkan pers yang mendukung segala kejahatan politikus.

Kalimat ironi dan susunan kata yang sedemikian rupa dibentuk dalam *MGyDC* menjadi sebuah pengertian tertentu yang membentuk pemikiran khalayak pembaca. Sekali lagi, seluruh teks, mulai dari mengaggap aktivitas politikus yang dilabeli sebagai bentuk “bisnis” dan “perang”, visi misi yang dilabeli dengan tujuan “profit”, serta filosofi negerinya yang dilabeli dengan kalimat “siapa kuat dia yang dapat”, seolah menegaskan bahwa segala kebusukan dan kejahatan politikus adalah sesuatu yang memang tidak ada hubungannya dengan aspirasi rakyat, kemanusiaan, empati, solidaritas sosial, keberpihakan pada kaum lemah.

Di sana yang ada hanyalah kemenangan, keuntungan dan hedon, kehormatan, kekayaan, di mana dengan menjadi pemenang maka akan mendapat kehormatan. Dengan mendapat kehormatan maka akan mendapatkan keistimewaan. Kalimat simpulan yang semakin menegaskan kegilaan politikus terhadap kekayaan dapat dilihat, misal pada kalimat “..;dengan keistimewaan saya layak mendapatkan gelar warga teladan dari warga. Dengan demikian segala fasilitas kemudahan dan kemewahan melekat secara otomatis ke dalam diri saya”. Kalimat tersebut

mengasosiasikan ke dalam benak khalayak pembaca bahwa tujuan utama aktivitas dan kinerja politikus selama ini ialah kemudahan fasilitas hidup dan kemewahan bagi dirinya sendiri.

Dari sekian banyak pemaparan tentang kebusukan dan kejahatan politikus, ternyata *MGyDC* masih menyematkan pikiran positif mengenai politikus, bahwa tidak semua politikus bersikap seperti Mr. A3. Hal tersebut direpresentasikan dalam kalimat “tetapi kami (saya dan teman-teman yang sepaham)”. Secara implisit, artinya ada beberapa politikus yang tidak memiliki paham yang sama dengan filosofi hidup Mr.A3. Meskipun yang menjadi topik yang ditonjolkan dalam *MGyDC* tetap berfokus pada pemaparan kebusukan dan kekejaman politikus.

Secara umum, *MGyDC* mengasosiasikan ke benak khalayak pembaca dua hal. Pertama, alangkah murahnya hati nurani seorang politikus yang digadaikan demi harta dan tahta. Seolah membela kepentingan cukong, bandar, pemegang kuasa, kekuatan, dan sekutunya lalu menyingkirkan kepentingan rakyat yang justru lemah dan tak berdaya. Kedua, politikus memang orang yang “tidak benar”. Ketika menindas yang lemah dan mendukung yang kuat, ia tak sedikit pun merasa bersalah. Justru ia menjelaskan dengan berbagai macam alasan bahwa yang ia lakukan telah sesuai dengan aturan dan tidak melanggar sedikitpun, karena pandangan hidup negeri tempat ia tinggal ialah “hdeonisme” dan lagu kebangsaannya ialah “Hedonesia Raya”.

Wacana semacam itu juga dapat dilihat dari bagaimana relasi yang hendak dibangun dalam teks. Teks artikel ini menyertakan tujuh pihak yang berhubungan, yakni (1) Mr. A3 sebagai politisi; (2) rakyat; (3) para bandar, cukong dan sekutunya; (4) eksekutif; (5) yudikatif; (6) pers; dan (7) Ernest Hemmingway. Dalam teks artikel *MGyDC*, Ernest Hemmingway disebut seorang novelis kondang. Namanya disebut dalam teks untuk dibandingkan kehebatannya dengan politisi yang duduk di parlemen. Satu kata dari novelnya dihargai sekian dollar AS oleh penerbit, sedangkan politisi di parlemen yang memasukkan satu kata atau menghilangkan satu kata dari alinea atau pasal RUU akan dibayar hingga milliaran rupiah, di muka. Praktis dalam teks artikel *MGyDC*, pihak politikus dan pihak Ernest Hemmingway digambarkan memiliki kesamaan dalam urusan bayaran, meskipun politikus dianggap lebih berjaya soal materi dari pada Ernest Hemmingway, seorang novelis kondang.

Selanjutnya ialah pihak para bandar, cukong dan sekutunya yang digambarkan mendapat dukungan dan sejalan pemikirannya dengan politisi. Kemudian para politisi digambarkan mendapat dukungan dan sejalan pemikirannya pula dengan pihak eksekutif, yudikatif, dan pers. Ketiga pihak tersebut, yakni politisi, para bandar cukong, dan eksekutif yudikatif pers, digambarkan berada dalam satu pihak yang sama yang saling mendukung satu sama lain.

Praktis dalam teks artikel *MGyDC*, ketiga pihak tersebut digambarkan berada di pihak yang berbeda dengan rakyat. Politisi, eksekutif, yudikatif

dan pers digambarkan sebagai pihak yang rela melakukan apa saja demi uang dan keuntungan pribadi maupun golongan, meskipun harus membela para bandar dan cukong, serta merugikan pihak rakyat yang lemah dan tak berdaya. Sedangkan seharusnya tugas politisi, eksekutif dan yudikatif ialah membela kepentingan rakyat, kemudian pers yang seharusnya bertugas kritik sosial justru menjadi senjata untuk memperkuat kekuatan elit penguasa. Pihak-pihak tersebut bukan hanya digambarkan bertolak belakang dengan rakyat, tetapi juga merugikan rakyat.

Selanjutnya, mengenai identitas pihak-pihak yang diceritakan dalam teks artikel. Teks tersebut menggambarkan bagaimana khalayak pembaca ditempatkan pada posisi masyarakat dan bukan pada posisi politisi, eksekutif, yudikatif, pers, maupun bandar dan cukong. Teks artikel ini, misalnya tidak memberikan kesan positif kepada politisi, begitu juga pada eksekutif, yudikatif, maupun pers, apalagi pada cukong dan bandar.

Teks ini mensugestikan bahwa masyarakat adalah “kita”, pihak yang tertindas, pihak yang terdzalimi oleh penguasa dan elit penguasa lalim. Teks justru seolah membakar kesadaran masyarakat untuk bertindak, berpikir kritis dan mendukung pernyataan-pernyataan Darminto. M. Sudarmo yang dijabarkan dalam *MGyDC*. Oleh karena itu, dalam teks artikel dari awal sampai akhir berisi sindiran dan keburukan para politisi dan elit penguasa. Mereka adalah pihak yang jelas-jelas, sikap dan keputusan-keputusan mereka seringkali merugikan kepentingan masyarakat.

b. Analisis Intertekstualitas

Fungsi interdiskursivitas dalam teks memiliki fungsi mediasi antara teks dan konteks. Hal ini berhubungan dengan penjelasan tentang tata cara repertoar genre dan wacana itu dieksplorasi dalam tatanan wacana untuk memproduksi dan menginterpretasi teks. Bagaimana wacana dan genre dikombinasikan atau bagaimana teks akhirnya diproduksi dan diinterpretasikan, bergantung pada konteks sosialnya (Titscher, Stefan, dkk, 2009: 246).

Setiap teks sebenarnya didasarkan pada teks yang lain. Kemudian setiap peristiwa dievaluasi, diasimilasi, disuarakan, dan diekspresikan kembali dengan bentuk dan bahasa yang lain. Begitu juga wacana artikel humor *Republik Badut* yang seolah didasarkan pada peristiwa nyata yang terjadi di Indonesia. Merunut satu persatu teks artikel humor politik dalam Republik Badut mengasosiasikan bahwa artikel yang disajikan memang lahir dari teks yang datang sebelumnya dan didasarkan pada peristiwa lain sebelumnya, baik yang eksplisit maupun implisit.

Darminto sebagai pemproduksi teks menghadapi aneka suara di luar dirinya dan di luar teks yang ia buat. Ia menuangkan suatu peristiwa yang ada di sekitarnya dengan aneka suara dari banyak pandangan kemudian dievaluasi dan disuarakan kembali dalam bentuk artikel humor politik seperti yang terkumpul dalam buku Republik Badut. Hal tersebut serupa dengan apa yang disampaikan Bachtin mengenai teori intertekstualitas dalam sastra bahwa pada dasarnya penulis teks tidak berbicara dengan dirinya sendiri, ia selalu berhadapan dengan suara lain atau teks lain.

Artikel humor politik Republik Badut membahas mengenai kerumitan dan kepelikan peristiwa Politik yang terjadi di Republik tersebut. Namun, seringkali dalam artikelnya juga menampilkan peristiwa politik yang terjadi di Republik Indonesia dengan tujuan menyerupakan keadaan carut marut pada kedua Republik tersebut. Menempatkan keadaan politik Republik Indonesia yang sedang pelik di tengah pembahasan artikel mengenai berbagai keadaan politik di Republik Badut bukanlah semata-mata persoalan susunan kalimat tetapi secara implisit merupakan praktik yang ingin disuarakan oleh Darminto bahwa Republik Badut ialah analogi dari Republik Indonesia itu sendiri.

Melaui tipe wacana, genre dan style, Fairclough menyampaikan bahwa hal tersebut dapat membantu menjelaskan atau menjabarkan elemen yang lain. Genre dari teks artikel politik republik Badut adalah humor. Style dari teks Republik Badut berupa sinisme dan sarkasme. Dengan berpagar genre teks dan style yang diambil maka Darminto sebagai penulis teks seolah mengonstruksi pengetahuan dan informasi kepada khalayak dengan bahasa ringan sehari-hari yang lebih personal. Wacana politik yang akan ditampilkan dan dievaluasi Darminto harus dikembangkan dengan cara menghibur. Peristiwa yang carut marut seolah ditransformasikan ke dalam kodifikasi yang populer, ringan, dan enak dibaca. Oleh karena ditransfomasikan ke dalam bahasa artikel yang menghibur, peristiwa pelik yang diangkat disampaikan dengan bahasa informal dengan maksud mengundang senyum masyarakat bawah sekaligus menyadarkan diri bagi pembacanya.

Beberapa kali di dalam teks artikel disampaikan bahwa Republik Badut bukanlah Republik sungguhan. Hal tersebut disampaikan secara eksplisit oleh Darminto dalam artikel *DBRB*, “Republik Badut adalah negeri main-main, bukan sungguhan” dan dalam teks artikel *AJGM*, “Republik Badut mungkin sebuah republik sungguhan, mungkin hanya metafora, mungkin juga ia negeri yang disebut orang sebagai Indonesia. Hal yang paling penting dari semuanya, untuk melangkah maju ke depan, negeri ini membutuhkan pemimpin yang baik”. Hal tersebut menjadi sebuah bukti pernyataan implisit bahwa apa pun yang dibicarakan tentang Republik Badut sesungguhnya itulah pertarungan dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Darminto membahasakan dengan ironi halus.

Kasus yang menimpa Butet Kertaradjasa misalnya, setelah membawakan monolog *Deklarasi Pemilu Damai 2009* pada Rabu malam, 10 Juni 2009 (pada teks artikel humor *BKS*). Kasus tersebut ditransformasikan ke dalam teks media dalam banyak tipe, dalam surat kabar, dalam laporan, analisis, komentar para ahli intelektual, mahasiswa, kelompok beragama, artikel akademis ataupun obrolan di warung-warung, dan sebagainya. Namun, Darminto mentransformasikannya ke dalam bentuk humor yang menyindir sebagai bahasa perlawanannya terhadap pemerintah, sebagai berikut.

Seperti pengakuan Butet sendiri, ia mendapat banyak pujian, sekaligus caciannya karena materi monolognya itu membuat tidak berkenan salah satu peserta Pemilu Damai, yang sebelumnya pernah *nanggap* Butet dengan tema yang berbeda. Untunglah, di lain hal, ada juga semacam “Atsmosfir” yang agak membangkitkan sedikit pencerahan setelah membaca tulisan Indra Tranggono di harian ibukota, 20 Juni 2009, yang berjudul “Negeri yang Suka Tertawa”. Saya kutipkan bagian yang mungkin inspiratif buat kita semua, “Maka ketika politik macet dan hanya menjadi jagat “jual-beli”

kekuasaan, seni lawak perlu tampil dengan semangat dasarnya yang kritis, cerdas, visioner dan elegan. Seni lawak mampu menjadi medium yang akan mengembalikan publik pada esensi kemanusiaan. Pada pemulihan manusia..... dst. (*BKS/VII/109*).

Ketika membaca teks *BKS* secara utuh, pernyataan Butet pada *BKS* bukan hanya pernyataan Butet saja melainkan juga sampai pada seni lawak, pelawak berkualitas, demokrasi negeri, politik, jual beli kekuasaan, dan sebagainya. Darminto menggunakan seni lawak dan tulisan Indra Tranggono di harian ibukota, 20 Juni 2009 sebagai cara menyampaikan ideologi perlawanannya kepada pemerintah dan menyuarakan itu semua kepada khalayak pembaca.

Kristeva (1980: 66) berpendapat bahwa setiap teks terjalin dari kutipan, peresapan, dan transformasi teks-teks lain. Begitu juga pada kasus Republik Badut dalam analisis intertekstualitas. Ketika Darminto menulis, ia akan mengambil komponen-komponen teks lain sebagai dasar penulisan artikelnya. Semua peristiwa politik dan komponen-komponen politik yang ia ambil disusun dan diberi warna dengan penyesuaian untuk tujuan menyuarakan ideologi perlawanannya yang disembunyikan dalam humor, sindiran, sinisme, sarkasme dan metaforanya. Darminto juga menambah sebuah peristiwa politik yang ia wacanakan dalam artikel dengan komponen-komponen lain dari peristiwa yang lain untuk memperkuat maksud dan tujuannya, sehingga artikel humor politik menjadi wacana utuh yang menyuarakan ideologi perlawanannya tersembunyi terhadap pemerintah.

Teks artikel Republik Badut tentu dipengaruhi oleh teks-teks lain yang dibaca penulisnya. Hal tersebut dilihat dari ditampilkannya berbagai rujukan atau

kutipan teks secara langsung maupun tidak langsung dalam beberapa artikel Republik Badut. Kemudian proses pencarian materi yang hendak ditulis, dan proses pertentangan maupun penerimaan atas peristiwa-peristiwa politik atau teks-teks politik yang telah dibaca penulis. Dalam hal ini maksudnya ialah sebuah pendapat atau berita dari peristiwa politik yang dikutip dapat dijadikan pegangan untuk penulisan artikelnya atau untuk dikomentari habis-habisan sebagai bentuk pertangangannya. Seperti contoh pada teks artikel *KRK* yang mengutip secara tidak langsung pernyataan Dino Patti Djajal (*Kompas*, 21 Mei 2013) dan mengutip secara langsung pernyataan Franz Magnis Suseno SJ, pada teks artikel *BKS* yang mengutip langsung tulisan Indra Tranggono di harian ibukota, 20 Juni 2009 dan mengutip pengakuan Butet secara tidak langsung, teks artikel *AJGM* yang menampilkan kutipan langsung dari Komaruddin Hidayat, pada teks artikel *TSKdJ* yang mengutip pendapat Prof. JE Sahetapy di acara Indonesia Lawyesr Club (TV One, 5 Maret 2013), dan seterusnya.

Penulis yang baik sesungguhnya ialah pembaca yang baik. Sebelum menjadi penulis, Darminto akan mengenyangkan wawasan dengan membaca yang berhubungan dengan materi yang akan ia tulis dan mengaitkannya dengan banyak sesuatu lain di luar materi dan di luar dirinya. Kemudian melahirkan teks wacana baru dengan tujuan baru sesuai dengan yang ingin dicapainya. Mengamati setiap teks-teks yang disajikan Darminto dalam Republik Badut, ia tampak tidak sembarangan belanja dari berbagai teks dan rujukan. Dengan ideologi perlawan yang diusung Darminto secara halus dan tersembunyi, maka teks dan rujukan pun menjadi seolah diarahkan dengan tujuan dan maksud itu. Begitu juga dengan

kalimat-kalimat teks humor yang sengaja disusun sedemikian rupa seolah menggambarkan bagaimana Darminto menempatkan dirinya di tengah banyak suara yang berada di luar dirinya.

Sumber teks yang lain bukan hanya yang berbentuk teks tertulis tetapi juga yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Seperti dalam *Panik Paranoid Parpol Linglung (PPPL)*, di mana Darminto menggunakan wawasan tentang kehidupan penulis dan pengarang untuk menentang dan mengontraskan dengan kehidupan para anggota parlemen. Penulis dan pengarang menulis beratus-ratus bahkan beribu-ribu kaimat tetapi penghargaan terhadap kalimat itu tidak memadai. Sedangkan para anggota parlemen dapat memasukkan dan mencoret satu kaimat dalam pasal saja mendapat bayaran miliaran hingga puluhan miliar. Seperti dalam *Anomali Komunikasi Rakyat-Aparat (AKRA)*, di mana Darminto menggunakan kebiasaan komunikasi politik antara rakyat Indonesia dengan aparatnya untuk menulis teks baru bergenre humor sinisme, dengan meuangkannya menjadi sebuah kasus yang terjadi di Republik Badut, republik main-main, republik yang tidak sungguh-sungguh ada.

Untuk memahami makna secara utuh mengenai artikel-artikel dalam Republik Badut juga tak boleh mengabaikan suasana, waktu, tempat, kejadian, dan peristiwa apa yang terjadi ketika atau sebelum teks itu ditulis. Artikel humor politik yang ringan dalam buku *Republik Badut* ditampilkan memiliki kesamaan suasana, waktu, tempat, kejadian, dan kepelikan peristiwa politik dengan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada teks artikel humor politik

DBRB, HPKG, HKRP, PPPL, TSKdJ, UKdLJ, AJGM, MRCDB, AKRA, MkNBK, BKS, KGRB, AGJGDKI, dan MGyDC.

Selain itu dalam beberapa teks artikel humor politik justru menampilkan suasana, keadaan, dan peristiwa politik yang terjadi di Republik Badut secara bertentangan dengan suasana, keadaan, dan peristiwa politik yang terjadi di Republik Indonesia dengan maksud menyindir. Hal tersebut dapat dilihat pada teks artikel humor politik *KRK*.

c. Analisis *Discourse Practice*

Berdasarkan teori wacana Fairclough, analisis selanjutnya akan dibahas mengenai dimensi kewacanaan atau *discourse practice*. Dalam analisis ini, penafsiran dilakukan terhadap pemrosesan wacana yang meliputi aspek produksi teks artikel, termasuk bagaimana penyebarannya, dan aspek konsumsi teks. Fairclough berpendapat bahwa *discourse practice* dapat dicapai melalui analisis aspek produksi teks dan konsumsi teks tersebut.

Materi empiris yang akan dianalisis dalam penelitian ini berupa artikel humor politik. Maka penulis akan menganalisis bagaimana artikel “republik badut” akhirnya dapat dicetak dalam bentuk buku dengan judul *Republik Badut*, proses apa yang telah dilalui dan perubahan apa yang dialami teks selama proses produksi tersebut.

Seperti yang telah disampaikan dalam analisis intertekstual yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa artikel *Republik Badut* sebenarnya berangkat dari kasus-kasus nyata dalam perpolitikan Indonesia dengan sumber surat kabar, berita

television and media lain di Indonesia yang telah melalui proses baca, evaluasi, dan asimilasi dari penulis teks tersebut. Kasus-kasus yang diperbincangkan dalam artikel-artikel *Republik Badut* ditransformasi dari bentuk formal berita menjadi bentuk artikel humor yang menghibur dan lebih ringan dibaca. Hal tersebut memberikan jawaban tentang bagaimana jenis pemproduksian yang telah dilewati.

Penerbit telah memagari *Republik badut* dengan genre fiksi humor, maka editor penerbitan akan menyeleksi mana-mana suara kritik yang terlalu keras untuk kemudian diperhalus atau bahkan dihilangkan, guna mencapai wacana dengan versi humor tersebut tadi. Namun, dalam pengantar penulis teks menyampaikan kebersediaan tersebut dengan menyatakan “Tapi saya yakin pihak penerbit lewat tim editornya pasti akan melakukan apa yang terbaik untuk pembaca”.

Dalam kata pengantar juga disampaikan oleh penulis *Republik Badut* bahwa ia diberi saran oleh penerbit untuk menuliskan artikel republik badut dalam bentuk buku. Hal tersebut menggiring analisis pada sebuah jawaban bahwa ideologi perlawanan yang disuarakan Darminto M. Sudarmo sebenarnya telah disetujui oleh penerbit, maka sebagian kekhawatiran telah hilang atas hilangnya esensi ideologi yang diusung Darminto M. Sudarmo. Ideologi adalah esensi dasar dari wacana yang diusung oleh penulis dan penerbit, maka proses pengeditan penerbit akan tetap berada pada garis ideologi perlawanan penulis.

Perhatian pada aspek produksi teks selanjutnya ialah mengenai siapa penulis artikel *Republik Badut* karena setiap wacana akan selalu diwarnai oleh ideologi penulisnya. Artikel yang terdapat dalam *Republik Badut* merupakan hasil

penulisan pribadi Darminto M.Sudarmo yang telah melalui transformasi dari teks-teks yang telah lahir sebelumnya. Hal tersebut menyatakan bahwa bagaimana ideologi yang terkandung dalam *Republik Badut* sesungguhnya merupakan ideologi yang dimiliki oleh Darminto M.Sudarmo. Pihak institusi dalam analisis ini tidak terlalu mendapat perhatian besar karena teks artikel yang menjadi analisis dalam penulisan ini diwarnai oleh proses editing penerbit saja, yang berbeda dengan artikel berita bernada serius yang diwarnai oleh berbagai macam tuntutan dan kecondongan dari pihak penerbit maupun redaksi secara eksplisit.

Republik Badut ditulis oleh Darminto M. Sudarmo. Seorang kartunis yang lahir pada tanggal 23 Maret 1956. Darminto juga aktif sebagai penulis artikel, cerita pendek, puisi, hingga laporan jurnalistik di beberapa surat kabar. Darminto menggunakan nama “Odios Arminto (Odios)” dan “Atin Supriyatn” untuk karya tulisnya dan menggunakan nama “Odios”, “Mas Dar”, “Dar MS” untuk menandai karya kartunnya. Sejak tahun 1982 sampai sekarang 2016, Darminto menulis artikel/kolom masalah sosial-budaya, diantaranya tentang lawak dan humor di *Kompas*, *Kontan*, *Surabaya Post*, *Suara Merdeka*, *Kedaulatan Rakyat*, *Pikiran Rakyat*, *Sinar Harapan*, *Suara Pembaruan*, *Vista TV*, *Panji Masjarakat*, *Gatra*, *Horison*, *Multi*2000*, *Tokoh*, dan *HumOr*.

Teks artikel humor *Republik Badut* sebelumnya berangkat dari sebuah tulisan yang disebarluaskan melalui media blog. Kemudian, Artikel tersebut dikumpulkan dan tercetak menjadi sebuah buku. Wacana ideologi perlawananan Darminto disebarluaskan melalui tulisan dalam buku yang pada satu sisi memiliki

kekuatan teks yakni kekekalan waktu yang lebih baik dibandingkan wacana televisi.

Latar belakang Darminto M.Sudarmo yang seorang penulis artikel dan kartunis yang biasa menyuarakan kritik sosial pada penguasa juga memberikan warna pada artikel *Republik Badut* yang bernuansa kritik sosial pula. Ideologi perlawannya terhadap ketimpangan sosial atas penguasa terhadap rakyatnya disuarakan melalui bahasa humor politik yang ringan dan sering juga bergaya bahasa sinisme, sarkasme. Melalui praktik kewacanaan semacam ini, Darminto M. Sudarmo sebenarnya telah mengupayakan pelestarian dunia sosial, termasuk hubungan-hubungan sosial yang melibatkan hubungan kekuasaan yang tak sepadan. Oleh sebab itu berdasarkan pandangan Jorgensen (2010: 120) maka Darminto M. Sudarmo dalam praktiknya telah memberi kontribusi kepada perubahan sosial di sepanjang garis hubungan kekuasaan dalam proses komunikasi dan masyarakat secara umum.

Republik Badut memang sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2013 akhir oleh penerbit Beranda di Malang, Jawa Timur, dengan ISBN 978-602-8-8. Wacana politik bukanlah hal baru. Setiap hari, setiap saat akan selalu bermunculan hal-hal baru, kasus-kasus politik yang baru. Selalu saja muncul peristiwa dan kejadian-kejadian politik yang baru dan mencuri perhatian. Hal tersebut menjadikan masalah lama yang belum tuntas semacam dilupakan dan tidak ada ujung penyelesaian. Masyarakat Indonesia selalu saja mudah tergoda dengan hal-hal baru dan masalah lama seolah termaafkan. Justru seharusnya, tidak

boleh ada istilah kasus lama dalam politik. Selama kasus tersebut belum tuntas, maka ia masih memiliki tempat untuk dibahas.

Setiap wacana yang dihadirkan dalam masyarakat selalu hadir dengan mengusung ideologi dan makna tertentu. Tak terkecuali juga pada wacana humor. Artikel humor yang dekat dengan kasus yang benar-benar terjadi di Indonesia pada saat itu menjadikan pembaca membuka carut-marut negeri sendiri dengan segar tanpa ketegangan. Meskipun ada banyak wacana humor yang hadir dalam masyarakat tetapi setiap wacana pastilah memiliki tema tersendiri dan ideologi yang khusus diusungnya untuk dibaca masyarakat.

Pada aspek konsumsi teks yang akan dianalisis ialah khalayak pembacanya. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui bagaimana mereka menginterpretasi teks-teks yang dihasilkan. Sebelumnya akan ditilik sejenak mengenai upaya pemproduksian teks untuk melanggengkan tersampainya ideologi perlawanan penulis kepada khalayak pembaca yang sekaligus memuat beberapa komentar pembaca yang secara khusus dipesan oleh penerbit. Pada sampul depan buku ditampilkan komentar dari aktor, Butet Kertarajasa, sebagai berikut.

Republik Badut adalah sebuah ikhtiar menjaga kewarasan jiwa di zaman edan: zaman yang memanjakan keserakahan, zaman yang membiakan otak bertahta di dengkul. Jika Anda masih bisa menemukan kelucuan-kelucuan kemudian tersenyum dan tertawa, meskipun pahit, membuktikan Anda masih “gila” tingkat pemula alias waras jiwanya.

Menurut Butet, orang yang waras jiwanya ialah orang yang justru mampu menemukan kelucuan dari tulisan Darminto meskipun terkadang pahit harus menertawakan diri sendiri.

Darminto M. Sudarmo melalui kata pengantarnya menyampaikan bahwa “Hal yang paling mendebarkan dalam komunikasi parodis adalah bila salah satu dari unsur komunikasi: komunikator, komunikan, dan bahan yang disampaikan tidak terjadi kesetaraan persepsi. Akibatnya bisa sangat aneh, bahkan tidak terduga sama sekali”. Hal tersebut menggambarkan bahwa Darminto M. Sudarmo secara eksplisit menyampaikan bahwa harus ada persamaan persepsi antara penulis dan khalayak pembaca untuk menemukan unsur kelucuan dari artikel *Republik Badut* tersebut.

Pembaca yang menjadi sasaran *Republik Badut* perlu untuk diketahui sebagai salah satu cara untuk mengetahui interpretasi khalayak pembaca terhadap teks artikel humor *Republik Badut* Darminto M. Sudarmo. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat Darminto pada kata pengantar buku yang menyatakan bahwa pembaca buku *Republik Badut* setidaknya mereka ialah pembaca yang memiliki kepedulian pada persoalan-persoalan isu politik dan kebangsaan paling muthakir karena model komunikasi yang disampaikannya sengaja mengambil model komunikasi lugas dan bergegas. Misalnya Darminto mengatakan saja KPK atau MY atau MK atau DPR atau singkatan-singkatan lainnya tanpa memberikan rujukan. Semua itu merupakan satu hal yang dapat digunakan untuk membantu menuntun analisis praktik wacana dalam hal siapa para pembaca *Republik Badut*.

Interpretasi dari pembaca merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam melihat bagaimana praktik kewacaan *Republik Badut*. Buku ini memuat komentar 22 tokoh dari khalayak pembaca. Satu komentar yang berasal dari Butet Kertaradjasa ditampilkan pada sampul depan dan enam komentar dari

enam tokoh ditampilkan di sampul belakang buku, yakni Eko Tunas (sastrawan), Winarto (Jurnalis, trainer dan dosen komunikasi), Adji Subela (Pemerhati Budaya), Tiyok (Kartunis/ilstrator Harian Media Indonesia), Prasetyohadi Priyatno (Pemred majalah “Kicau Bintari”), dan Kemala Atmojoyo (mantan pemred Majalah *MITRA*). Sedangkan 15 komentar lainnya disusun secara khusus di dalam buku pada halaman preliminaries, sebelum halaman judul, kata pengantar dan catatan hak cipta. Ke-15 komentar tersebut akan ditampilkan oleh penulis pada lampiran penelitian secara lengkap. Berikut enam komentar yang ditampilkan oleh penerbit pada sampul belakang buku.

... Saya rasa para politisi kita masih mengalami ketegangan berpolitik, perlu membaca buku “Republik Badut” untuk mengendurkan syaraf-syaraf mereka.

Eko Tunas, sastrawan.

... Setelah membaca buku ini, ada dua kemungkinan reaksi. Pertama, Anda akan tertawa terbahak-bahak tanpa henti atau kedua Anda akan tertawa sejenak, lalu berhenti dan menangis.

Winarto, Jurnalis, trainer, dan dosen komunikasi.

Tidak membeli buku ini sebuah dosa terbesar yang tidak terampunkan hingga Hari Kiamat ke-II!

Adji Subela, Pemerhati budaya.

Hanya di “Republik Badut” elit penguasanya mulai dari presiden, menteri, penegak hukum, aparat kemanan, dan anggota dewan yang katanya terhormat bias dijabat oleh sekelompok badut-badut.

Tiyok, Kartunis/ illustrator harian Media Indonesia.

Semoga penulisnya tidak segera dipanggil presiden, Mahkamah Konstitusi DPR, mabes TNI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, karena telah mengubah nama NKRI menjadi NKR, Negara Kesatuan Republik Badut.

Prasetyohadi Prayitno, Pemred majalah “Kicau Bintaro”.

Darminto adalah Art Buchwald-nya Indonesia.

Kemala Atmojo, mantan pemred majalah MATRA.

Endorsement dalam bahasa Indonesia memiliki arti ‘dukungan’. *Endorser* sendiri biasanya berasal dari *public figure* seperti artis atau orang-orang yang dikenal oleh masyarakat di bidangnya atau orang yang ahli dalam bidangnya.

Figur seorang *endorser* biasanya akan memengaruhi minta konsumen dalam membeli buku. Enam komentar yang disebutkan di atas merupakan *endorsement* dari enam *endorser* yang berbeda.

Republik Badut menampilkan 22 *endorsement* yang diambil dari 22 *endorser* yang berbeda. Mereka ialah aktor, penyuka humor, wartawan senior, pemred majalah, guru, dosen, seniman, aktivis seni-budaya, jurnalis, pemerhati budaya, sastrawan Semarang, kartunis, wartawan, penulis, dan sastrawan. Mereka merupakan para *celebrity endorser* yang dalam praktik wacananya mereka sekaligus merupakan perwakilan dari khalayak pembaca yang mendukung ideologi perlawanan yang disuarakan secara tersembunyi oleh Darminto M. Sudarmo. Tidak semuanya merupakan artis yang dikenal oleh semua pihak. Namun, pada bidangnya, nama-nama tersebut dianggap tidak asing lagi.

Banyaknya *endorsement* yang ditampilkan oleh *Republik Badut* mungkin merupakan bagian dari strategi pemasaran buku. Namun, demikian di dalam *endorsement* juga mengandung sebuah kegiatan komunikasi dari penulis buku dan pembacanya. Sebagian *endorser* mungkin dikenal oleh masyarakat luas, sebagian lagi dikenal dalam para komikus atau pakar humor, tetapi sebagian yang lain mungkin justru tidak terlalu dikenal secara luas. Inilah yang mengasosiasikan bahwa *endorsement* yang dimunculkan tidak hanya sekadar komunikasi bisnis dan strategi pemasaran buku melainkan sebagai penggambaran interpretasi dari khalayak pembaca terhadap artikel-artikel yang dibacanya.

Analisis ini dipusatkan bagaimana pengarang teks bergantung pada wacana-wacana yang ada untuk mencipta suatu teks dan bagaimana penerima teks

menerapkan wacana yang ada dalam konsumsi dan interpretasi teks (Jorgensen & Phillips, 2007: 128), karena melalui *discourse practice* sebagai tempat menggunakan, menghasilkan, dan menkonsumsi teks bisa membentuk dan dibentuk oleh praktik sosial. Wacana humor kritis dari Darminto mungkin akan lebih diminati oleh para pecinta humor dan para pembaca yang memang memiliki kepedulian pada persoalan-persoalan dan isu-isu politik kebangsaan. Praktik wacana semacam ini lahir dari kepedulian para pemerhati dan praktik kewacaan yang didukung oleh kelompoknya juga jelas akan memberi kontribusi pada pembentukan masyarakat dalam dunia sosial.

Republik Badut sebenarnya ialah Republik Indonesia. Hal tersebut dipertanggungjawabkan dengan pengutipan kalimat, isu, data, materi yang terdapat pada media di Republik Indonesia. Seperti isu mengenai penghargaan *World Statesmen Award* dari Appeal of Conscience Foundation kepada presiden SBY, pengerdilan nilai rupiah, korupsi kuota impor daging sapi, korupsi oleh Anas Urbaningrum, lelang jabatan pemprov DKI, kasus yang pernah menimpa Butet Kertaradjasa setelah membawakan monolog *Deklarasi Pemilu Damai 2009* pada Rabu malam, 10 Juni 2009, maraknya korupsi, penyebutan Jakarta sebagai salah satu kota di Republik Badut, penyebut kementerian sebagai mesin kapling dana, dan sebagainya.

Seperti yang telah disampaikan tersebut di atas bahwa dalam *Republik Badut*, Darminto sempat menyampaikan kasus yang menimpa Butet Kertaradjasa setelah membawakan monolog *Deklarasi Pemilu Damai 2009* pada Rabu malam, 10 Juni 2009. Ia mendapat banyak pujian, sekaligus cacian karena materi

monolognya itu membuat tidak berkenan salah satu peserta Pemilu Damai, yang sebelumnya pernah *nanggap* Butet dengan tema yang berbeda. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa gaya humor Darminto membawa ideologi yang memang sengaja disamarkan dalam terminologi humornya. Ini bukan hanya sekadar “ngritik sana-ngrtitik sini, diam-diam lalu menyelinap pergi” seperti yang disampaikan Darminto dalam kata pengantarnya. Namun, ini adalah upaya untuk memberikan kontribusi kepada perubahan sosial atas munculnya hubungan kekuasaan yang tidak sepadan.

Republik Badut melalui analisis kewacanaan dapat diketahui bahwa ia berupaya melestarikan dunia sosial termasuk hubungan-hubungan sosial yang melibatkan masyarakat dan para penguasa yang senjang dengan memberikan kontribusi kepada perubahan sosial di sepanjang garis hubungan kekuasaan yang tidak menyimpang. Maka dari itu ideologi perlawanan *Republik Badut* disampaikan dalam proses komunikasi secara samar dan sesuai dengan bahasa masyarakat secara umum (Jorgensen & Phillips, 2007: 120).

d. *Analisis Sosiocultural Practice*

1) **Realitas Politik: Analisis Aspek Situasional**

Setiap teks artikel *Republik Badut* dihasilkan dalam suatu kondisi dan suasana yang khas dan unik. Wacana tidak lain adalah suatu tindakan, maka tindakan itu sesungguhnya ialah upaya untuk merespon situasi dan konteks tertentu yang terjadi pada saat itu di Republik Badut yang tidak lain adalah Republik Indonesia. Seperti pada teks *HPKG* misalnya, salah satu kasus

yang diwacanakan *HPKG* ialah tentang pembunuhan seorang anggota Kopassus Angkatan Darat di sebuah kafe Yogyakarta dan aksi balas dendamnya di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Seperti yang diberitakan dalam *liputan6.com* pada 6 April 2013 oleh Raden Trimutia Hatta yang diposting pada pukul 00:09, Presiden SBY menyatakan bahwa sikap para pelaku penyerangan Lapas Sleman yang mengakui perbuatannya adalah ksatria. Berikut kutipan langsung dari Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, *news liputan6*.

"Saya dapatkan laporan semuanya, para prajurit yang melakukan tindakan itu tampil secara bertanggung jawab, secara ksatria, dan siap mendapatkan sanksi hukum apapun. Demikian juga para komandan akan ikut bertanggung jawab semuanya," tegas SBY di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

HPKG adalah respon atas situasi dalam konteks tersebut di atas. Pada saat itu ketua tim investigasi TNI Brigjen Ungkul Kawistoro Yudhoyono yang menangani kasus tersebut juga menyatakan bahwa pelaku pembunuhan adalah ksatria, "Secara ksatria dan dilandasi kejujuran tinggi dan tanggung jawab, serangan Lapas Cebongan pada 23 Maret pukul 00.15 WIB diakui, dilakukan oleh oknum anggota TNI AD". Namun, *HPKG* tak menyoroti komentar tersebut. Ia lebih menyoroti komentar presiden, seorang kepala negara suatu republik, yang dianggap keliru dan berlebihan dalam memberikan komentar.

Contoh lainnya mungkin pada teks artikel *TSKdJ* misalnya, wacana tersebut merespon kasus korupsi di tahun 2013 yang dilakukan oleh Anas Urbaninrum yang melalui pro dan kontra, kemudian hilang timbul tanpa

kejelasan. Penglihatan atas realitas aktual yang ada sangat bergantung bagaimana Darminto sebagai penulis artikel humor menafsirkan keadaan. Namun, setiap wacana yang disuarakan akan merupakan cerminan ideologi penulisnya sendiri.

Realitas politik yang terjadi di Indonesia berada pada kondisi belum sejahtera. Adanya kesenjangan antara rakyat dan pemimpinnya. Seolah saling menyerang untuk memperebutkan kesejahteraan masing-masing, sedangkan seharusnya mereka bersama-sama berjuang untuk kesejahteraan rakyat dan para wakil rakyat yang sesungguhnya merupakan bagian dari rakyat. Kenyataan itu belum ditemukan di Indonesia. Indonesia pada saat itu, di tahun 2013 berstatus sebagai negara demokrasi. Namun, relitasnya Indonesia adalah negara yang belum sesungguhnya demokrasi dan belum seutuhnya menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gerakan selalu berasosiasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan respon atau reaksi atas kondisi tertentu (realitas sosial) di masyarakat. Realitas sosial tentu mencakup hal yang sangat luas dan kompleks. Pembahasan di sini akan dipersempit kepada telaah atas reaksi (respon perlawanan) terhadap hubungan-hubungan sosial yang ada di masyarakat dan juga hubungan kekuasaan yang terjadi antara masyarakat dan negara yang dinilai bermasalah atau harus diubah. Respon perlawanan Darminto tersebutlah yang kemudian dituangkan dalam artikel-artikel humornya yang dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul *Republik Badut*.

Gerakan dapat dipahami sebagai usaha untuk mengubah satu situasi (kondisi) kepada keadaan baru. Dalam kerangka kehidupan masyarakat, maka gerakan tidak lain dari berbagai upaya yang memaksudkan untuk mengubah tatanan yang tidak adil, menuju sebuah tata baru yang lebih memberi jaminan pada realisasi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan umat manusia (Timur Mahardika, 2000: 5). *Republik Badut* adalah wacana yang menentang posisi kekuasaan dengan merepresentasikan hubungan sosial dan realitas dengan cara yang berbeda. Melalui humor, Darminto mencoba memberikan gambaran suatu kasus tentang situasi sosial politik di tahun 2013 dengan sudut pandang penulisnya, hubungan struktural antara masyarakat dan elit penguasa dengan menganalogikan Republik Indonesia dengan nama Republik Badut. Ketidaksejahteraan yang tidak merata seolah menjadi faktor utama Darminto untuk menyuarakan ideologi perlawanannya.

2) **Analisis Aspek Institusional**

Analisis wacana kritis pada *Republik Badut* sebagai pendekatan kritis yang secara politik ditujukan untuk memihak pada kelompok-kelompok sosial yang tertindas (Jorgensen, 2007: 120), yakni masyarakat kecil yang sering dirugikan atas sikap pemerintah dan elit penguasa yang sering bertindak sesuka hati demi kepentingan pribadi dan golongan tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat.

Secara institusional penerbit, maka ia akan dihadapkan pada perebutan khalayak pembaca. *Republik Badut* merupakan satu dari sekian wacana

humor yang diupayakan penerbit agar menjadi buku bacaan humor berkualitas yang dibaca dan disukai oleh banyak orang. Seperti yang telah disampaikan dalam analisis praktik wacana, *Republik Badut* menggunakan kekuatan *endorsement* yang dimunculkan dari banyak pihak. *Republik Badut* mengandung ideologi perlawanan yang disuarakan oleh Darminto sebagai penulis terhadap pemerintah dan para elit penguasa.

Pengaruh ekonomi media sedikit banyak akan berpengaruh terhadap buku-buku yang diterbitkan. Penerbit seolah menyadari bahwa humor pada saat itu adalah sesuatu yang banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat. Tahun 2013, ketika *Republik Badut* diterbitkan, pada saat itu pula banyak bermunculan tayangan humor di televisi dan banyaknya wacana humor yang bermunculan dari berbagai penerbit. Hal tersebut seolah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi penerbit untuk membukukan dan menerbitkan kumpulan artikel Darminto yang kemudian diberi judul *Republik Badut*.

Ukuran yang dipakai dalam industri penerbitan adalah menjadikan *Republik Badut* sebagai bacaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Oleh karena bertujuan menarik khalayak pembaca sebanyak-banyaknya maka penerbit akan berusaha memproduksi artikel humor politik yang ringan, enak dibaca, tapi tetap berkualitas. Tema carut marut politik Indonesia dan genre fiksi humor yang dipilih untuk diterbitkan pun juga seolah telah melalui proses penyesuaian dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Selain ekonomi media, faktor institusi lain yang memiliki pengaruh besar terhadap *Republik Badut* ialah politik. Institusi politik memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan wacana-wacana yang muncul di media. Pemerintah jelas memiliki wewenang dalam melakukan kontrol dan pengendalian terhadap wacana yang muncul di masyarakat. Sehingga *Republik Badut* lahir melalui proses penyesuaian antara harus menyampaikan realitas carut marut politik negeri dan sekaligus harus menyiasati resiko munculnya reaksi pemerintah yang membahayakan penulis artikel juga media penerbitan. Sebuah peristiwa politik yang menarik dan penting untuk disuarakan dan diketahui khalayak pembaca harus ditransformasikan dalam bentuk yang lebih ringan dan sederhana tetapi tetap menyuarakan ideologi perlawanan dari Darminto.

Institusi politik memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap wacana artikel *Republik Badut*, tetapi institusi politik yang ada pada saat itu di Indonesia akan menjadi faktor pertimbangan tersendiri bagi penulis dan penerbit memilik wacana yang mana dan bagaimana untuk diterbitkan (Eriyanto, 2001: 324). Darminto seolah menyadari bahwa saat ini gencar sekali disuarakan politik lewat media yang sengaja dibuat untuk tujuan politik dan mengontrol pikiran masyarakat sebagai khalayak pembaca agar mendukung gagasan dan kekuatan politik yang tengah berkuasa saat itu. Media adalah alat yang kuat bagi para pemilik modal. Namun, kehadiran *Republik Badut* yang ringan dan tidak serius sesungguhnya membawa ideologi besar dan bersifat kritis karena bertujuan memberikan kontribusi

kepada perubahan sosial yang melibatkan hubungan kekuasaan tak sepadan sebagai upaya pelestarian dunia sosial, sebagai bentuk komunikasi penyeimbang atas banyaknya media yang bermunculan dengan tujuan politik, memarjinalkan masyarakat kecil, melegitimasi kesalahan para elit penguasa, dan sebagainya. Selain masalah ekonomi, bersedianya Darminto dalam menerima tawaran penerbit mengasosikan bahwa Darminto ingin menyuarakan ideologi perlawanannya secara lebih luas kepada masyarakat melalui sajian humor.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang menjadikan ideologi perlawanan yang seharusnya disuarakan dengan tegas dan apa adanya harus diringankan, dihaluskan atau bahkan disamarkan oleh penulis atau media penerbit. Hal tersebut dilakukan agar *Republik Badut* bisa lebih diterima oleh masyarakat dan keberadaannya tidak membahayakan posisi media bersangkutan.

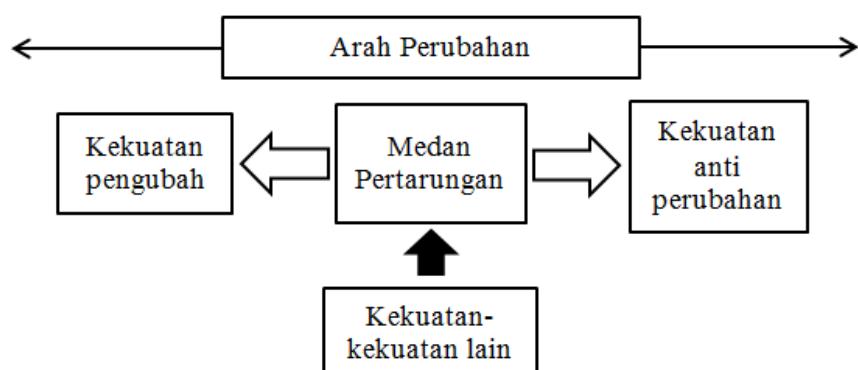
Produksi *Republik Badut* merupakan proses yang kompleks karena ia menyertakan dan berhubungan dengan banyak kekuatan dan faktor yang ada di dalam masyarakat. Hasil akhir dari seluruh proses negosiasi semacam itu ialah artikel humor politik *Republik Badut* dengan ideologi perlawanannya yang dibahasakan melalui humor, dengan bahasa yang ringan dan diksi yang mudah dipahami.

3) Analisi Aspek Sosial Budaya

Jika aspek situasional lebih mengarah pada waktu atau suasana yang mikro (konteks peristiwa saat teks artikel dibuat), maka aspek sosial lebih

melihat pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. *Republik Badut* membawa ideologi perlawanan dari penulisnya untuk merespon sesuatu yang dianggap salah, keliru dan harus diperbaiki. Membuka jalan perubahan (Timur Mahardika, 2000: 119-125) pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran korban ketidakadilan dan sekaligus membangun *front* bagi suatu usaha bersama. Usaha perubahan sosial merupakan tindakan yang terencana, sistematik dan mengarahkan tindakan pada sasaran-sasaran tertentu. Analisis pada aspek sosial bukan hal yang netral, setiap analisis pasti mengandung unsur pemihakan. Hal ini tentu bukan masalah. Oleh sebab itu, suatu analisis selalu diawali dengan komitmen, karena sangat berkaitan dengan asumsi-asumsi, keyakinan-keyakinan atau sudut pandang yang digunakan oleh penganalisis.

Usaha perubahan akan menghasilkan suatu dinamika, tarik-menarik antara kekuatan yang tidak menghendaki perubahan dan kekuatan yang menggerakkan perubahan. Medan pertarungan adalah sesuatu yang rumit tetapi secara sederhana hanya akan terbentuk dua pihak utama di dalamnya, yakni kekuatan pengubah dan kekuatan antiperubahan.



Gambar 2. Arah Perubahan
(sumber: Timur Mahardika, 2000: 130)

Perubahan akan terjadi atau tidak, akan sangat dipengaruhi oleh kondisi kekuatan dari berbagai pihak tersebut di atas. Gerakan perubahan ditentukan oleh kualitas (kapasitas, kemampuan) dan kuantitas (satuan jumlah) kekuatan pengubah tersebut. Terdapat tiga jalan yang dapat ditempuh, yakni jalan non-kooperatif, jalan kooperatif, dan jalan kombinasi kooperatif dan non-kooperatif.

Pengertian non-kooperatif. Pertama, tidak mengakui sedikit pun keabsahan penguasa (rezim antiperubahan). Dengan demikian segala produk politik, hukum, dan policy lain, dipandang sebagai tindakan ilegal dari pemerintah. Bekerja sama dengan rezim berarti, memberi keabsahan, pembernanan, dan sekaligus pengakuan ketundukan dari kekuatan pengubah. Kedua, pada kehendak perubahan atau watak perubahan yang ditawarkan, di mana perubahan yang dibawa adalah perubahan mendasar, yang berarti menggantikan sepenuhnya tatanan lama (Timur Mahardika, 2000: 136-143)

Jalan kooperatif ditempuh dengan alasan kekuatan pengubah terlampaui kecil dibanding kekuatan (antiperubahan), sehingga suatu langkah konfrontatif hanya akan menghantam tembok, sia-sia, dan dapat mengorbankan diri secara percuma. Terdapat dua taktik dalam jalan ini, yakni mengubah dari dalam dan mengubah dari luar. Pengubah dari dalam, kekuatan pengubah masuk dan menjadi bagian dari kekuatan antiperubahan,

berupaya sedemikian rupa sehingga bisa diterima oleh kekuatan antiperubahan dan bahkan kemudian memperoleh posisi-posisi penting yang dari sana peluang mengubah muncul. Meskipun taktik pertama ini memiliki resiko yang kecil dan menjanjikan tetapi tidak sedikit yang kemudian justru mengantarkannya menjadi kaki tangan rezim. Pengubah dari luar, juga mengandung maksud hadap-hadapan antara kekuatan pengubah dengan kekuatan antiperubahan. Hanya saja tidak berlangsung secara konfrontatif karena kekuatan pengubah masih berjalan di bawah tata aturan, hukum, dan kebijakan-kebijakan yang ada. Taktik ini cukup banyak dipilih oleh kalangan menengah, yang secara prinsip turut menikmati ketimpangan yang ada.

Kombinasi kooperatif dan nonkooperatif. Dalam taktik ini berarti pertama, pada satu sisi masih memberi muka kepada sistem. Dengan itu, melakukan usaha-usaha yang berangkat dari sistem tetapi dengan maksud untuk mendeklegitimasi kekuasaan yang patos, despotik, dan menindas rakyat. Kedua, di sisi lain secara sistematik mempersiapkan kekuatan yang nyata dan siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

Jalan nonkooperatif adalah jalan yang pernah digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan kalangan mahasiswa pada khususnya untuk menggulingkan rezim Soeharto pada tahun 1998. Pada tahun 2013 saat *Republik Badut* dibuat, Indonesia sedang berada pada pemerintahan demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan analisis sosial pada masa

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Darminto lebih memilih menyuarakan ideologi perlawanannya untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik dengan strategi kombinasi nonkooperatif dan kooperatif. Darminto tetap mematuhi sistem. Namun, sikap nonkooperatif yang dilakukan bukanlah bersifat radikal.

Republik Badut merupakan salah satu wacana kritis yang dimaksudkan untuk melestarikan dunia sosial yang melibatkan hubungan-hubungan kekuasaan yang tidak sepadan di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan analisis sosial Darminto melalui *Republik Badut* bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada perubahan sosial tetapi tetap mematuhi sistem pemerintahan yang berjalan pada waktu itu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ideologi perlawanan *Republik Badut* ditulis sebagai bagian dari kontrol masyarakat untuk mengawal jalannya demokrasi di Republik Indonesia pada waktu itu.

Ideologi perlawanan yang disuarakan oleh Darminto terfokus kepada para elit penguasa, politisi, parlemen negara, dan kepala negaranya pada saat itu (Susilo Bambang Yudhoyono). Presiden Yudhoyono bukan hanya terpilih secara demokratis melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat dengan dukungan populer lebih dari 60 persen suara, melainkan juga tak bisa dimakzulkan oleh parlemen.

Legitimasi politik yang kuat belum tentu bisa menjamin keberhasilan seorang presiden dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Aspek personal Yudhoyono yang menonjol bukan hanya berpotensi menjadi

kekuatan melainkan juga menjadi sumber kelemahan pada diri Yudhoyono sebagai. Personalitas Yudhoyono dapat dicermati pada tabel 8, sebagai berikut.

Aspek Menonjol	Kekuatan	Kelemahan
Sifat moderat, mau berubah, dengan alasan yang memadai, relaistis, menilai tinggi moralitas, memandang manusia setara.	Mampu menerima kritik dengan argumentasi, mau melakukan perbaikan yang realistik dan menempatkan setiap orang setara.	Kurang gigih dalam memperjuangkan ide-idenya.
Mementingkan intelektualitas	Mementingkan intelektualitas	Terlalu banyak pertimbangan sehingga lambat mengambil keputusan.
Keterbukaan pikiran	Mampu mneyerap dan memahami hal-hal yang berbeda, dan dapat menggunakan berbagai sudut pandang dalam menyelesaikan masalah.	Terkesan ragu-ragu karena menunggu banyak masukan dari pihak lain sebelum membuat keputusan.
Pola penalaran sistematik	Pemahaman secara menyeluruh	Lambat membuat keputusan
Kebutuhan pretesi	Pekerja keras, selalu berusaha mendapat yang diinginkan dan selalu ingin hasil terbaik.	Datar secara emosional dan emosi tidak lepas.
Kebutuhan afiliasi	Mau mendengar, berusaha memberikan empati, dan senang berdialog.	Kurang tegas dan kurang memiliki kontrol terhadap orang.
Penampilan yang selalu terjaga, berwibawa dan dapat diandalkan.	Disegani, ditututri. Dan mampu menjadi teladan.	Dapat menimbulkan kesan berpura-pura dan tidak menampilkan yang sebenarnya.

Tabel 6. Personalitas Yudhoyono sebagai Capres
(Sumber: Syamsuddin Haris, 2014: 190)

Terlepas dari persoalan keretakan relasi personal antara Megawati dan Yudhoyono, penilaian dan kritik Megawati tampaknya ada benarnya jika dihubungkan dengan meluasnya kecenderungan politik pencitraan di satu

pihak, dan kegagalan Presiden Yudhoyono, baik dalam merealisasikan komitmen perubahan maupun mewujudkan efektivitas pemerintahan seperti yang dijanjikannya sebelum pemilu presiden di lain pihak. (Haris, 2014: 194) Ia menyebutkan tiga kecenderungan politik pencitraan pada pemerintahan Yudhoyono, yakni (1) pencitraan bahwa pemerintah sungguh-sungguh bekerja, (2) pencitraan tentang keseriusan Presiden Yudhoyono dalam memutuskan suatu kebijakan, dan (3) pencitraan bahwa kebijakan pemerintahan berpihak kepada rakyat.

Pencitraan-pencitraan tersebut dibuktikan secara ringkas oleh Haris (2014: 194-199) sebagai contohnya. Pertama, pencitraan bahwa pemerintah sungguh-sungguh bekerja. Munculnya fenomena baru selama pemerintahan Yudhoyono, yakni intensitas Rapat Kabinet Indonesia Bersatu yang seringkali tidak mengenal tempat, waktu bahkan jarak. Kecenderungan untuk melakukan rapat kabinet yang tidak mengenal waktu itu dibenarkan oleh manta Mensesneg Prof. Dr. Yusril Ihza mahendra, bahwa Presiden Yudhoyono “hobinya rapat”, sehingga seolah-olah dengan rapat yang begitu sering pemerintah telah bekerja. Rapat kabinet secara *teleconference* juga hampir dilakukannya hampir setiap hari ketika melakukan kunjungan kenegaraan ke AS. Hal tersebut kemudian dihentikan karena mendapat kritik dari partai-partai di DPR.

Kedua, pencitraan keseriusan presiden sebelum mengambil keputusan. Penggambaran betapa cermat, hati-hati dan seriusnya Yudhoyono memilih para calon menteri sebagai pembantunya dalam pemerintahan dilakukan

dengan cara mengundang setiap calon mneteri ke Puri Cikeas, Bogor dan meminta para calon memberikan pandangan tentang isu tertentu sebagai bagian dari proses *fit and proper test* yang harus dilalui. Kepastian ada tidaknya perombakan kabinet pada awal Mei 2007 yang menimbulkan kontroversi tentang urgensi perombakan, kemudian keseriusan Yudhoyono yang berbulan-bulan menggantung perantian menteri Dalam Negeri, Moh. Ma'ruf, yang tidak bisa aktif karena menderita sakit yang cukup parah, padahal kesibukan kementrian tersebut sangat tinggi sehubungan dengan statusnya selaku wakil pemerintah di DPR dalam penyelesaian revisi undang-undang bidang politik. Fenomena perombakan kabinet pertama dan kedua jelas mencerminkan begitu kentalnya politik pencitraan yang dilakukan Presiden Yudhoyono. Padahal yang terjadi pada *reshuffle* kabinet hanyalah pergeseran posisi menteri yang berasal dari partai politik.

Ketiga, pencitraan bahwa kebijakan pemerintah berpihak rakyat. Pencitraan di balik kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Dalam jangka tiga tahun pemerintahannya untuk ketiga klinya menaikkan harga BBM sebagai bagian dari upaya menutup defisit APBN akibat membengkaknya beban subsidi negara dalam struktur harga BBM. Yudhoyono berulang kali dalam pernyataan publik menyatakan bahwa menaikkan harag BBM adalah pilihan terakhir padahal baik partai-partai di DPR, akademisi, maupun tokoh masyarakat lainnya secara publik mengusulkan berbagai skema lain. Juga pada BLT yang disampaikan Haris bahwa hal tersebut memberi kesan kepada rakyat kecil bahwa seolah

pemerintah itu baik hati, pemurah, dan peduli pada mereka. Sedangkan hal tersebut tidak mendidik dan menciptakan ketergantungan rakyat miskin terhadap belas kasihan negara yang juga mengindikasikan secara terang atas kegagalan pemerintah menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak pada nasib rakyat. Selanjutnya ialah gencarnya pemerintah menbangun citra dengan intensnya berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah mengiklankan program yang dilakukan bagi rakyat, baik melalui media cetak maupun elektronik sehingga seolah semua itu terimplementasi dan dinikmati rakyat. Padahal pemerintah Yudhoyono sendiri idak memiliki mekanisme audit internal yang transparan untuk membuktikan bahwa berbagai program yang dikampanyekan dan diiklankan tersebut benar-benar tepat sasaran dan tak lebih dari sekadar pembentukan citra belaka.

Kesemua pencitraan tersebut bukanlah suatu masalah jika didukung oleh sikap tegas, kemampuan manajerial, dan kepemimpinan yang efektif, baik sebagai pemimpin maupun fasilitator perubahan. Sedangkan kesan lamban dan ragu-ragu sering tampak dari pemerintahan Yudhoyono seperti yang telah disampaikan Agus Takwin dan Niniek L. karim pada tabel tersebut di atas. Keputusan menaikkan BBM misalnya, presiden Yudhoyono memerlukan 11 kali rapat kabinet, sehingga membuka peluang bagi para spekulasi BBM memanfaatkan keadaan sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

Keadaan di Indonesia seingkali merupakan kondisi di bawah kekuasaan penguasa tertentu, maka *Republik Badut* muncul sebagai respon

atau reaksi atas keadaan yang tengah terjadi tersebut dan dialami Darminto serta rekan-rekan seperjuangannya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sebagai bentuk perlawanan yang halus yakni melalui humor sindiran yang tajam dan mengena dengan tujuan untuk mengubah keadaan masyarakat kepada suatu keadaan baru yang dipandang lebih baik dan lebih bermakna.

Betapa pun baik suatu pemikiran, tapi jika salah dalam mengomunikasikan maka kebaikan itu tidak akan bisa diterima meskipun benar. Maka bahasa pun harus dipilih secara sesuai. Darminto merupakan sosok yang telah lama berkecimpung dalam dunia komik dan humor. Maka Darminto termasuk salah satu orang yang memiliki peran dalam hidupnya humor di Indonesia. Humor adalah cara yang diambil Darminto untuk mengomunikasikan gagasannya, menyuarakan ideologi perlawanannya terhadap ketidakadilan, ketimpangan, dan kecurangan yang ia rasakan. Yang dilakukan Darminto dalam menyuarakan ideologi perlawanannya adalah sebagai berikut.

- a) Menggunakan bahasa yang ringan dan populer sehingga mudah dimengerti oleh banyak orang. Namun, juga menggunakan beberapa istilah politik yang umum sehingga tetap dapat dipahami oleh masyarakat yang memiliki kepedulian pada persoalan-persoalan isu politik dan kebangsaan paling mutakhir.
- b) Menyampaikan keadaan politik secara apa adanya dari sudut pandang Darminto yang sejurnya dengan keberpihakannya kepada masyarakat

kecil pada khususnya. Mendasarkan ideologinya pada sesuatu berita politik yang nyata, bukan berita bohong.

- c) Menyertakan contoh konkret atas penjelasan yang panjang. Agar penggiringan khalayak pembaca mengikuti ideologi perlawanan penulis tepat sasaran.
- d) Menyampaikan isu politik dan kasus kebangsaan paling mutakhir pada saat itu sehingga masalah yang dibicarakan masih hangat. Untuk menarik perhatian, maka mengangkat isu yang sedang menjadi bahan pembicaraan merupakan strategi yang tepat. Mengangkat isu hangat artinya membuka akses bagi pendengar untuk ambil bagian dan kemungkinan paham bagi khalayak pembaca lebih besar.
- e) Menyampaikan dengan bahasa tulis yang dianggap lebih kekal daripada bahasa lisan.

Ideologi perlawanan yang disuarakan Darminto itu tidak begitu saja hadir, melainkan melalui proses sejarah masa lalu, masa kini dan masa depan. Struktur pemerintahan Indonesia pada saat itu sedang tidak stabil ekonominya, membengkaknya beban subsidi negara dalam struktur harga BBM misalnya, politik pencitraan yang dilakukan Presiden Yudhoyono juga menambah deretan keadaan politik di Indonesia. Nilai-nilai pemerataan dan keadilan yang disuarakan pemerintah melalui berbagai media cetak dan tulis memberikan citra baik bagi pemerintah untuk melahirkan nilai ketaatan kepada pemerintah. Di sini yang paling berkepentingan adalah pemerintah. Banyaknya kasus juga melahirkan banyaknya reaksi dari bangsa Indonesia.

Elit penguasa memiliki gerakan untuk mempertahankan status quo, dan rakyat juga memiliki gerakan untuk perubahan atas keadaan yang dianggap timpang atau tidak seharusnya. Yang berbahaya ialah ketika elit penguasa bergerak melibatkan massa rakyat tetapi pada akhirnya hanya menempatkan rakyat sebagai alat tekan dan kemudian setelah tujuan tercapai dan perubahan telah ada, ternyata yang berubah hanya elit politik berupa sirkulasi kekuasaan, bukan perubahan dalam arti yang sebenarnya. Maka penglihatan yang sangat jeli sangat diperlukan agar dapat membedakan gerakan yang membela rakyat atau hanya sekadar memanfaatkan rakyat. Konstruksi wacana perlawanan dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo tercantum di dalam lampiran.

3. Ideologi Perlawanan dalam Buku *Republik Badut*

Kelebihan analisis wacana kritis Norman Fairclough terletak pada pengupasan wacana secara komprehensif dari teks, latar belakang terciptanya teks, dan pewacanaannya sebagai praktik sosial budaya. Teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya yang telah dikupas di bagian depan akhirnya lebih memudahkan teridikasinya suatu ide Darminto M. Sudarmo sebagai dalang yang berada di balik teks. Sesuatu yang berada di balik teks tersebut, dalam hal ini adalah wacana ideologi yang tersembunyi di dalam bahasa humor politik.

Sindiran maupun satir dalam humor yang dilakukan oleh Darminto tentang perlawanannya merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap setiap ketimpangan yang terkandung dalam teks humor tersebut. Althusser menyatakan

bahwa ideologilah yang menjadikan masyarakat sadar atas kondisi sosial tempat mereka bersosialisasi dengan masyarakat. Sikap penulis senada dengan teori yang disung Marx mengenai ideologi-ideologi dari kaum proletar untuk melakukan perjuangan melawan kelas-kelas borjuis karena adanya suatu ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan sosial.

a. Perlawanterhadap Kejahanatan atau Kecurangan (Korupsi)

Baechler (2001: 244-246) menyatakan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan, kekayaan dan prestise lebih besar pada waktu tertentu mempunyai kesempatan lebih besar untuk menjaga demokrasi dibandingkan dengan mereka yang memiliki kurang dari itu. Namun, mereka yang memiliki kelebihan kekuasaan tersebut dapat menggunakan kekuasaannya untuk menanggung biaya koalisi, untuk bertindak korup (jahat, curang) dan membentengi diri sendiri dengan antek-anteknya. Kemudian kekuasaan, prestise dan kekayaan menjadi sangat bergantung pada individu-individu. Kesenjangan dan ketidakadilan tersebut kemudian melahirkan sebuah perlawanterhadap agar bakat-bakat dapat mengemuka dan terealisasi atau menyamakan peluang masing-masing orang. Protes-protes bisa menjadi tidak terkendali dikarenakan beberapa kepentingan objektif muncul sebagai kepentingan subjektif yang tidak dirasakan oleh sebagian orang.

Seperti yang telah dijabarkan secara tekstual di bagian depan, teks humor *HPKG*, *DBRB*, *PPPL*, *TSKdJ*, *HKRP*, *MRCdB*, *MkNBK* dan *KGRB* yang dianalisis memiliki semangat perlawanterhadap kejahanatan dan kecurangan

(korupsi) negara. Sebagian kutipan humor dari masing-masing teks artikel humor tersebut akan dimunculkan pada bagian berikut.

Secara keseluruhan *Republik Badut* merupakan kumpulan artikel humor yang bergaya satir, dengan bahasa ironi, sinisme, bahkan sarkasme. Sindiran secara halus yang disampaikan oleh Darminto, pertama kali dimunculkan pada *DBRB*. Perlawanannya terhadap kejahanatan dan kecurangan (korupsi) para elit penguasa dilakukan dengan cara *nglulu*, yang menyebut Republik Badut sebagai negeri main-main, sehingga masyarakat membolehkan para elit penguasanya melakukan korupsi sesuka hati. Hal tersebut dapat dicermati pada kutipan teks sebagai berikut.

DBRB/V/2

Republik Badut adalah negeri main-main, bukan sungguhan. Negeri yang serba membolehkan. Boleh korupsi sesuka hati. Boleh kolusi sampai mati. Boleh nepotisme asal orang sendiri. Orang-orang penting di negeri ini harus bergaji tinggi, mendapat tunjangan mencengangkan. Mendapat fasilitas tak terbatas. Para pejabat harus tampil hebat. Saat bicara harus tegak dan gagah. Saat bepergian harus naik mobil mewah dan elegan. Jangan risaukan Negara merana. Jangan pedulikan apa saja kata media. Apalagi komentar tukang kritik yang sebenarnya sirik.

Sindiran dengan gaya *nglulu* terhadap sikap koruptif para elit penguasa tersebut kemudian diteruskan dengan mengatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh rakyat menghadapi sikap para elit penguasanya yang gemar korupsi, bahwa rakyatlah yang harus mandiri dan tahu diri, tak boleh ikut-ikutan berpolitik, tidak perlu protes serta demo. Pemandangan yang dipaparkan Darminto menjadikan sindiran terasa lebih tajam. Perihal sikap rakyat tersebut dapat diamati pada kutipan teks, sebagai berikut.

DBRB/VI/2-3

Rakyat Republik Badut harus mandiri dan tahu diri. Mau sengsara atau sejahtera semua pilihan tersedia. Lewat depan, samping atau pintu belakang, siapa yang melarang? Kalah bersaing jangan lalu main tuding. Neolib atau neokolonialisme, itu hanya komentar orang-orang gatal. Kompetisi, kalah menang tanggung sendiri. Tidak ada proteksi, tidak ada intervensi. Rakyat melarat, anggaplah itu kodrat. Rakyat sejahtera, anggaplah itu fakta. Rakyat tak perlu ikut-ikutan berpolitik, sudah ada yang mengurus. Tidak perlu protes dan demo turun ke jalan, bikin macet dan rusak pemandangan. Baik-baik saja bekerja, pulang ke rumah sejenak istirahat, para pemangku negeri Republik Badut telah siap dengan segudang hiburan.

Dalam teks artikel *DBRB*, Darminto memberikan sindiran kepada para pemangku negeri yang koruptif dengan cara senang menyebut mereka sebagai “pelawak-pelawak”, “Pelawak Senayan”, dan “Pelawak Medan Merdeka Utara”. Sebab kelucuan itu disampaikan Darminto dalam *DBRB/I/1* bahwa hal tersebut dikarenakan sepak terjang para penguasa yang merasa nyaman-nyaman saja kendati pelaku mereka sangat koruptif dan jauh dari harapan masyarakat.

Sindiran diteruskan pada *HPKG* dengan menampilkan pemandangan yang ada di republik. Rakyatnya digambarkan sebagai pihak yang terlalu serius menyikapi para pelaku “kekerasan” penjarahan uang negara, sedangkan para pelakunya terlalu santai dalam menanggapi sikap rakyat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghujamkan sindiran demi sindiran kepada pelaku korupsi uang negara. Darminto kemudian menyebut bahwa “Ada yang tidak beres dengan sistem nilai dan budaya di antara mereka”. Berikut kutipan *HPKG* yang dapat dicermati.

HPKG/XVII/23-24

Kegaduhan demi kegaduhan nyaris datang silih berganti. Pemicunya dari masalah yang sangat personal dan sepele hingga yang sangat gawat dan berpotensi mendatangkan perpecahan masyarakat maupun bangsa. Republik Badut tampaknya semakin imun terhadap berbagai peristiwa dadakan dan

tak terduga. Ekskalasi kekerasan dan agresivitas masyarakat semakin mencolok dan meluas. Sangat kontras pemandangan itu bila dibandingkan dengan para pelaku “kekerasan” penjarahan uang negara yang tampil santai penuh senyum bak selebriti. Ada yang tidak beres dengan sistem nilai atau budaya di antara mereka. Ada yang aneh dari kita dalam memaknai semua fenomena itu. Para ahli berasumsi semua itu tak jauh dari representasi dan hasil karya para pemangku negeri. Bak kata peribahasa, “Buah jatuh tak pernah jauh dari pohonnya”.

Selanjutnya perlawanan terhadap pelaku korupsi dan kejahatannya disampaikan pada *HKRP* dengan mengangkat salah satu kasus yang sempat heboh di Indonesia, yakni kasus korupsi impor daging sapi dengan pelaku yang dalam *HKRP* disebut dengan AF (Ahmad Tathanah). Selain AF, Darminto dalam *HKRP* juga menyebut eksekutif, legislatif, dan yudikatif turut bermain di dalamnya. Penegasan Darminto untuk membenarkan tuduhan tersebut digunakan kalimat “Itu memang faktanya”, sebagai pungkasan pembahasan di *HKRP/IX/28*. Selain itu *HKRP* juga menampilkan perlawanannya terhadap kejadian dan kecurangan (korupsi) para pemangku negeri melalui berbagai isme yang dianggap berlaku di Indonesia. Berikut kutipan yang dapat dicermati.

HKRP/X/28-29

Pertanyaannya, mengapa tujuan parpol lewat para politisi dan pejabat publiknya berkecenderungan aneh begitu? Kalau itu bermula dari niat pribadi, mengapa terjadi nyaris serempak di semua parpol yang mendapatkan kesempatan menduduki posisi-posisi tertentu? Apakah ideologi mereka telah berubah. Sehingga belum tersosialisasi secara merata kepada masyarakat. Mari kita lihat pemaknaan terbaru dari berbagai isme yang ada di dunia, atau setidaknya yang ada di literatur para parpol di Indonesia.

LIBERALISME: Anda pemilik dua ekor sapi. Bank menghubungi Anda, mengkapling daging dalam porsi ons dan kilo. Pembeli membayar uang muka dan cicilan berjangka. Syarat dan ketentuan berlaku.

KAPITALISME: Anda punya dua ekor sapi betina. Anda menjual yang satu dan membeli seekor sapi jantan.

SOSIALISME: Anda punya dua ekor sapi. Anda berikan satu ekor sapi itu pada tetangga.

KOMUNISME: Anda punya dua ekor sapi. Pemerintah menyita keduanya dan mengganti Anda dengan jatah susu.

NAZISME: Anda punya dua sapi, pemerintah menyita keduanya dan menembak Anda.

FASISME: Anda pemilik dua ekor sapi. Pemerintah menangkap, mengirim Anda ke kerja paksa dan kedua sapi ke kandang negara.

MEKANISME (PASAR): Anda memiliki dua ekor sapi, pemerintah menyita keduanya, menembak yang satu, memeras susu sapi yang satunya lagi dan menuangkannya dengan sia-sia.

PRAGMATISME: Anda memiliki dua ekor sapi, dibeli makelar dengan harga kompromi. Pasar langka daging sapi. Harga langsung naik tinggi sekali. Makelar, oknum “pemerintah” dan perusahaan pengimpor daging sapi tersenyum berseri-seri.

Hukum adalah salah satu dasar paling vital bagi rezim dan demokrasi (Baechler, 2001: 248). Pada teks humor *HPKG* yang sekilas ditampilkan seperti yang tersebut di atas merupakan perlawanan yang dengan sindiran yang tegas. Dengan mengatakan bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif turut bermain, maka itu sekaligus menjelaskan bahwa hukum telah tumpul, yang vital telah terserang.

Sindiran terhadap hukum bagi tindak korupsi juga disampaikan Darminto pada *MkNBK*. Sikap koruptif yang luar biasa, maka harus ditangani dengan sikap yang luar biasa pula. *Punishment* dianggap bukan menjadi solusi bagi pemberantasan korupsi jika siklus lingkaran setan itu masih berlaku. Berikut Darminto memaparkan ideologi perlawanannya di balik teks humornya *MkNBK*.

MkNBK/I/98

Harus diakui, secara umum, kondisi Republik Badut saat ini berada dalam keadaan *extra ordinary situation*; keadaan yang luar biasa. Dibutuhkan penyikapan yang juga luar biasa. Tidak cukup hanya membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena lembaga resmi kepolisian dan kejaksaan agung tidak berdaya apa-apa. Tidak cukup hanya mempercayakan tegak lurusnya undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Tidak cukup menyerahkan jujur dan adilnya pelaksanaan peradilan kepada Mahkamah Yudisial. Semua hal, yang ada kaitannya dengan moralitas dan etika politik

pemangku negeri harus dikritisi dan dicermati dari kaca mata *extra ordinary matters*.

MkNBK/XII/103

Skeptisme pun muncul, selama putaran siklus lingkaran setan itu berlaku, mustahil *punishment* seberat apa pun dapat menjadi solusi bagi pemberantasan korupsi di Republik Badut; apalagi bila sanksi hukumannya, sedang-sedang saja (di bawah lima tahun). Mata rantai sebab – akibat – keluar modal dan mengembalikan modal – itu seperti menemukan “kebijakan”-nya sendiri sebagai sistem yang melekat, apalagi bila motif memperoleh jabatan itu dilatarbelakangi oleh kalkulasi-kalkulasi pragmatis dan matematis.

Hampir setiap paragraf dalam *MkNBK* kental membahas mengenai korupsi para pemangku negeri dan hukum yang lemah. Di sini tidak akan diulas semua, tetapi hanya beberapa teks saja yang dianggap sebagai perwakilan pergulatan dan perlawanan yang disuarakan keras oleh Darminto di balik teks humornya, dengan menyebut korupsi sebagai “sahwat personal atau komunal”, “lingkaran setan”, “keluar modal-balik modal” yang menimbulkan skeptisme bagi masyarakat. Berikut salah satu teks yang menyuarakan perlawanan terhadap sikap koruptif para politisi dan pejabat publik.

MkNBK/VI/100

Sakit yang menggerogoti seluruh bangunan negeri itu bersumber dari perilaku pragmatis dan narabas para pemangku negeri; lebih spesifik lagi, para politisi dan pejabat publik yang dipercaya rakyat untuk mengelola negara. Namun, menyalahgunakan kepercayaan itu untuk menyalurkan sahwat-sahwat personal atau komunal mereka akan kekayaan dan kekuasaan. Penjarahan kekayaan negara yang notabene adalah juga kekayaan rakyat, terjadi lewat berbagi modus yang sangat tipikal seakan memenuhi asas legalitas dan konstitusional. Di parlemen, ayat-ayat hukum yang sebenarnya punya dampak signifikan bagi masyarakat luas, diperjualbelikan demi kepentingan dan pamrih sesaat. Bayangkan bila parlemen hanya mengedepankan keberpihakan pada kapitalis jahat dan mafia siluman, akan seperti apa penderitaan yang harus ditanggung masyarakat luas? Aspirasi publik, nyaris hanya sebatas kosmetik ketika para caleg merayu-rayu calon konstituennya; ketika mereka sudah duduk nyaman di kursi legislatif, maka prioritas yang terjadi berbeda lagi kalkulasinya.

Di akhir wacana perlawanannya, Darminto menutup dengan simpulan dasarnya mengenai korupsi di republik yang terus menggerus seluruh bangunan negeri. Begitu juga soal studi banding ke luar negeri untuk menangani korupsi yang sudah mengacak-acak negeri, dan rupanya tanpa hasil. Berikut simpulan yang dibahasakan Darminto menggunakan bahasa usulan.

(*MkNBK/XXI/106*)

Seharusnya bukan perkara rumit untuk menimba pengetahuan dan informasi bagaimana parlemen di negara-negara tersebut mengawal pemerintahannya sehingga menjadi negara yang minim korupsinya; negara yang bersih dan berwibawa di mata dunia. Cukup dengan *copy paste* konstitusi mereka dengan sedikit suntingan konten yang berkaitan dengan nilai lokal Republik Badut; selesai bukan? Seharusnya memang sangat sederhana seandainya parlemen kita juga dapat membuktikan bahwa dirinya juga bersih dan berwibawa di mata rakyatnya.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di republik disebut dalam *PPPL* sebagai “bukan lagi perilaku individu yang senyap dan menyelinap Namun, sudah merambah ke struktural dan berjamaah bahkan sebagian juga disiapkan sejak dalam perencanaan suatu peraturan dan perundang-undangan”. Dalam *MRCdB* dikatakan bahwa “koruptor terus beroperasi, KPK terus menangkapi, begitu terus sepanjang hari”. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah “Kapan bangsa ini bisa berkarya dan berprestasi?”. Dalam *MkNBK* sikap koruptif disebut sebagai “sikap politik para pemangku negeri yang mau bener sendiri dan mau menang sendiri”.

Tidak ada pemberian sedikitpun dalam teks humor Darminto terhadap tindak koruptif karena memang itu jelas dapat menghancurkan bangunan negeri dan menggerogotinya. Perlawanan terhadap sikap koruptif para pemangku negeri juga disuarakan pada *KGRB*, yang menyebut para pemangku negeri sebagai para

“tetua”, dan ternyata tak ada yang dapat dicontoh dari para “tetua”. Berikut kutipan *KGRB* yang dapat dicermati.

KGRB/I/148

Masyarakat Republik Badut yang waras pinginnya sih yang muda mencontoh yang tua supaya mereka dapat mewarisi nilai-nilai unggul agar regenerasi kepemimpinan tetap berjalan secara *smooth* dan damai. Persoalan kemudian timbul ketika fakta yang terjadi sungguh sangat memprihatinkan dan bikin pilu hati; apanya yang bisa dicontoh dari yang tua jika setiap hari dipertontonkan di tayangan TV tentang para “tetua” yang digiring ke KPK sebagai barisan pejabat atau politisi korup yang sepak terjangnya hanya menjarah harta Negara.

Tindak kejahatan dan kecurangan korupsi tidak dilekatkan kepada pihak-pihak tertentu secara personal. Oleh Darminto, Tindak kejahatan dan kecurangan korupsi itu diarahkan kepada semua jajaran elit penguasa yang dianggap bertanggung jawab atas korupsi yang semakin merajalela dan mengacak-acak bangunan negeri. Tidak ada umpanan yang kasar pada kesemua teks humor tersebut. Hanya bahasa yang halus tetapi bernuansa kegeraman dalam humor.

Perlwanan tidak disuarakan secara eksplisit oleh Darminto dalam teks humornya, karena humornya memang difungsikan sebagai pereda ketegangan agar menjadi perbaikan secara menyeluruh dan fundamental dalam tahap awal lanjutan tentunya demi mencapai suatu kesejahteraan bersama.

Hasil analisis teks, praktik wacana dan praktik sosial budaya yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai landasan untuk menguatkan pernyataan Marx tentang wacana ideologi Darminto. Dalam hal ini perlwanan berusaha disebarluaskan kepada khalayak melalui buku humor politik yang dengan sengaja diimplisitkan untuk menyerang secara lembut dan tidak frontal. Selain itu ideologi Darminto juga disebarluaskan untuk menggiring pembaca agar mengikuti ideologinya. Hal

tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kontrol sosial atas segala ketimpangan dan ketidakadilan melalui pengaruh perilaku, keyakinan, dan sikap terhadap orang lain, khususnya terhadap para elit penguasa.

b. Perlawanannya terhadap Elit Penguasa

Setiap komponen dalam pergerakan patut menyadari bahwa tidak semua gerakan akan membawa perbaikan hidup yang bermakna bagi massa rakyat. Bentuk perlawanannya, penolakan atas sesuatu yang merugikan pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang identik dilakukan oleh massa rakyat. Namun, sesungguhnya banyak kasus yang menunjukkan bahwa perlawanannya juga muncul dari kalangan elit yang merasa dirugikan kepentingannya. Dengan demikian , perlawanannya atas sesuatu yang dipandang merugikan bukan merupakan ciri khas massa rakyat saja. Kalangan elit melakukan perlawanannya guna memperkuat posisi mereka atau bahkan meningkatkan kualitas posisi mereka (Timur Mahardika, 2000: 147-152).

Permasalahannya adalah seringkali gerakan elit penguasa tidak tertuju pada kesejahteraan rakyat, sehingga muncul gerakan dari rakyat baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Hal tersebut dikarenakan kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan dari para elit penguasa yang memunculkan ketidakpuasan dan kebencian publik kepada penguasa. I Dewa Putu Wijana menyatakan dalam disertasinya bahwa humor merupakan salah satu sarana efektif di saat saluran kritik lainnya tidak dapat menjalankan fungsinya.

Para elit penguasa secara gerakan tidak ditentukan oleh kuantitas massa seperti gerakan rakyat. Namun, kekuatan mereka ditentukan oleh manuver, trik politik, atau dengan menggunakan teknik-teknik lobi. Yang berbahaya ialah ketika gerakan elit penguasa menonjolkan ciri gerakan rakyat, sedangkan itu hanya merupakan siasat elit untuk bisa mendesak kepentingan mereka sendiri (Timur Mahardika, 2000: 152-153).

Ideologi perlawanan yang disuarakan oleh Darminto, M. Sudarmo melalui pengamatan analisis teks, analisis praktik wacana, dan praktik sosial budaya mencondongkan sebagai salah satu perjuangan untuk mengubah kehidupan massa rakyat yang tersingkir, hina, miskin, menjadi kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Humor adalah teknik dan strategi yang dipilih oleh Darminto, M. Sudarmo sebagai jalan untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik. Bagi rakyat kecil misalnya, kehidupan yang lebih baik adalah manakala kepentingan mereka terjaga, sehingga dengan itu rakyat dapat hidup dan menghidupi kehidupannya dengan lebih bermakna. Suatu hal yang buruk sebenarnya jika kecenderungan rakyat miskin hanya untuk sekadar mempertahankan hidup, sebab rakyat kecil tak dapat mengaktualisasikan kemanusianya secara penuh. Dengan demikian, ketika datang suatu serangan yang merampas apa yang dimiliki atau apa yang menjadi kepentingan pokok rakyat kecil, suatu perlawanan akan muncul, apa pun bentuknya.

Seperti yang dijabarkan secara tekstual di bagian depan, teks humor *HPKG*, *HKRP*, *MRCdB*, *AKRA*, *MKNBK*, dan *BKS* yang dianalisis memiliki semangat perlawanan terhadap elit penguasa dan tindak represif. Akan tetapi pada bagian

ini, hanya teks humor yang memiliki sindiran keras dan frontal yang akan dijabarkan.

Sindiran Darminto terhadap elit penguasa yang dianggap “iseng” dalam membuat kebijaksanaan dapat dilihat pada teks humor *HPKG* sebagai berikut.

HPKG/VII/19-20

Betapa simpelnya logika itu, apakah para elit penguasa dan aristokrat keuangan itu tidak pernah berpikir, bahwa “pengerdilan” nilai uang itu setidaknya pernah terjadi dua kali sebelumnya di republik ini. Yang pertama seribu perak menjadi satu perak. Setelah melewati sejumlah persoalan dan waktu, terjadi kegatalan serupa alasannya bermacam-macam, satu perak hasil pengerdilan itu tak bernilai sakti lagi. Maka setelah terkumpul seribu perak dikerdilkan lagi menjadi satu perak, dengan harapan serupa.

Dalam *HPKG* juga ditampilkan keadaan yang kontras antara kegaduhan dan agresivitas masyarakat dengan pemandangan para pelaku “kekerasan” penjarahan uang negara yang tampil santai penuh senyum bak selebriti. Ketidakberesan yang ada ialah sebab sikap para elit penguasanya. Hal tersebut ditampilkan melalui teks sebagai berikut.

HPKG/XVII/24

Ada yang tidak beres dengan sistem nilai atau budaya di antara mereka. Ada yang aneh dari kita dalam memaknai semua fenomena itu. Para ahli berasumsi semua itu tak jauh dari representasi dan hasil karya para pemangku negeri. Bak kata peribahasa, “Buah jatuh tak pernah jauh dari pohonnya”.

Sindiran humor politik terhadap elit penguasa juga ditampilkan pada *HKRP*, sebagai berikut.

HKRP/IX/28

Mulanya saya tidak percaya rumor itu. Mustahil parlemen yang bertugas sebagai wasit juga ikut main sepakbola, ikut memberi sanksi, bahkan ikut bertepuk tangan layaknya penonton. Tetapi aneh bin ajaib. Bukan hanya eksekutif yang main, legislatif dan yudikatif juga ada yang tergoda bermain ke sana. Itu memang faktanya.

Darminto menyebut eksekutif, legislatif, dan yudikatif ikut bermain dalam kecurangan karena keadaan tersebut nyaris terjadi serempak dan menjadi sulit terdeteksi apakah itu niat pribadi atau ideologi baru para elit pengusa yang belum tersosialisasi secara merata kepada masyarakat (*HKRP/X*).

Perlwanan terhadap pemerintahan dalam teks humor *MRCdB* menggunakan bahasa sinisme yang cenderung kasar. Hal tersebut dapat dicermati secara tidak langsung pada lima poin *uneg-uneg* rakyat Republik Badut, sebagai berikut.

MRCdB/I/89

Ciri-ciri rakyat yang cerdas dan berdaulat:

1. Sikap politiknya tidak terpengaruh oleh politik uang.
2. Biarpun setahun terima BLSM seribu kali, mereka tahu duit itu berasal dari rakyat karena itu mereka tidak berutang budi kepada penguasa apalagi parpol tertentu.
3. Intimidasi dan berbagai ancaman lain tak membuat mereka surut dari keyakinan semula.
4. Parlemen jalanan adalah langkah pamungkas ketika penyelenggara negara ingkar dari konstitusi dan telah menyalahgunakan kekuasaan secara sistematis dan terstruktur.
5. Partisipasi dalam pemilu adalah hak, Oleh karena itu, keikutsertaan rakyat terjadi karena kesadaran bukan pemaksaan.

Selain pada elit penguasa, perlwanan juga digambarkan kepada aparatus negara, yang dalam hal ini adalah polisi. *AKRA* menampilkan polisi sebagai pihak yang bertindak represif terhadap rakyat. Sedangkan rakyat digambarkan Darminto sebagai pihak yang datang hanya untuk menagih sesuatu yang telah dijanjikan pada masa kampanye. Berikut kutipan *AKRA*.

AKRA/II/95

Syahdan, Pemilukada rampung secara apik dan tuntas. Si calon yang ramah dan banyak senyum itu terpilih hampir mutlak. Masyarakat bergembira menyongsong pemimpin pilihan mereka. Waktu pun berlalu, sesuatu yang ditunggu-tunggu ternyata tak kunjung muncul yang ada hanya suasana senyap dan bisu. Masyarakat tampak gelisah, pembangunan jembatan yang

dijanjikan tak kunjung terealisasi. Listrik masuk desa mereka, tak juga terlihat tanda-tandanya. Jalanan tanah becek yang akan diaspal juga cuma janji gombal.

Dengan realitas tersebut kemudian masyarakat berbondong-bondong menemui kepala daerah. Kedatangan mereka yang berjumlah banyak langsung dihadang petugas keamanan. Dalam *AKRA*, polisi pun ikut bertindak sebagai berikut.

AKRA/V/95

Polisi turun tangan. Bentrok antara masa dan polisi tak terhindarkan; semakin lama semakin meruncing. Lalu terdengar suara dor-dor-dor! Satu, dua, tiga dan beberapa orang dari rombongan masa terhuyung lalu roboh tergeletak di pelataran pemda. Sejenak hening. Masa serombongan seperti tersihir, serentak mereka diam. Ternganga, seperti tak percaya pada apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Terlihat beberapa orang dari rombongan tak bergerak sama sekali, beberapa lainnya mengerang kesakitan.

AKRA/VI/95

Waktu seperti berhenti. Suasana semakin mencekam. Begitulah harga yang harus dibayar untuk komunikasi yang dibuat menjadi rumit dan tak adil. Sebuah ironi yang terus-menerus berulang dan kita tak pernah belajar dari pengalaman masa lalu.

Polisi merupakan salah satu aparatus negara yang digambarkan dengan tindak represifnya. Oleh Darminto, perlawanan tidak disuarakan secara kasar tetapi disampaikan dengan bahasa bercerita secara runtut dan logis, sehingga ideologinya diharapkan dapat diterima dan diikuti oleh khalayak pembaca. Kekuasaan dan wewenang polisi sebagai bagian dari aparatus negara dijadikan sebagai alat untuk menindas rakyat.

Sikap aparatus negara, yang terdiri dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial juga mendapat sindiran dari Darminto melalui *MkNBK*, sebagai berikut.

(MkNBK/I/98)

Harus diakui, secara umum, kondisi Republik Badut saat ini berada dalam keadaan *extra ordinary situation*; keadaan yang luar biasa. Dibutuhkan

penyikapan yang juga luar biasa. Tidak cukup hanya membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena lembaga resmi kepolisian dan kejaksaan agung tidak berdaya apa-apa. Tidak cukup hanya mempercayakan tegak lurusnya undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Tidak cukup menyerahkan jujur dan adilnya pelaksanaan peradilan kepada Mahkamah Yudisial. Semua hal, yang ada kaitannya dengan moralitas dan etika politik pemangku negeri harus dikritisi dan dicermati dari kaca mata *extra ordinary matters*.

Aparatus negara seolah digunakan oleh negara untuk memperkuat posisi elit penguasa dan melindungi mereka dari sesuatu yang membahayakan posisi. Sehingga hukum yang merupakan hal vital dalam demokrasi menjadi sesuatu yang tumpul. Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan manusia dan dengan sendirinya menjadi mutlak memuat keadilan dan kepastian. Ketika hukum direalisasi menjadi alat yang justru melawan keadilan dan menyebar ketidakpastian, maka suatu gerakan untuk keadilan tidak bisa dikatakan melawan hukum, tetapi mungkin dapat disebut sebagai melawan penguasa. Patut ditegaskan bahwa melawan penguasa belum tentu melawan hukum, sebab bisa jadi yang melawan hukum adalah penguasa itu sendiri.

c. Perlawanan terhadap Tindak Represif

Kata /represif/ dalam KBBI (2013: 1167) diartikan sebagai ‘penekanan’, ‘pengekangan’, ‘penahanan’, dan ‘penindasan’. Para penguasa sudah tentu bertujuan untuk menjaga stabilitas, mempertahankan status quo, dan memperlemah kekuatan-kekuatan pro perubahan. Tindak represif di sini diartikan sebagai sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparatus negara.

Perlawanan terhadap kekerasan di sini dipahami sebagai sebuah suatu tindakan yang secara aktif menentang kekerasan. Perlawanan bukan untuk

menghancurkan, melainkan tindakan yang tetap berpegang kepada prinsip menentang kekerasan. Ketidakpatuhan kepada kebijakan yang merugikan harus tegas dibedakan dengan ketidakpatuhan kriminal. Yang pertama untuk menjaga martabat manusia dan yang kedua menebar nestapa. Negara dengan kekuasaannya boleh saja menekan gerak tumbuh ketidakpatuhan kriminal tetapi menekan ketidakpatuhan politik merupakan tindakan buruk dan pelanggaran yang buruk terhadap hak-hak warga negara. Pada *Republik Badut* tindak represif para aparatus negara salah satunya digambarkan pada teks artikel humor politik *AKRA*.

d. Perlawanannya terhadap Retorika Para Politisi

Retorika politik (Thomas & Shan, 2007: 76) dilihat sebagai cara mengaburkan maksud dengan sengaja sehingga pernyataan menjadi sulit dimengerti. Gaya bahasa dan metafora kemudian dimanfaatkan dan digunakan sedemikian rupa untuk mengongkritkan konsep yang abstrak, untuk mengaburkan maksud, dan untuk menguatkan pesan ideologi. Bahasa yang digunakan sesungguhnya dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia.

Perubahan memang bukan sesuatu yang dinanti melainkan harus diusahakan. Namun, rencana perubahan kemudian direalisasikan oleh para politisi melalui janji-janji palsu saat kampanye. Kampanye di sini memiliki makna yang berbeda dengan memberikan penerangan. Sayangnya para politisi sebagai juru penerang hanya berbekal ajaran normatif, tanpa mengenali realitas yang hidup. Selain itu, dedikasi para politisi yang kurang terhadap masyarakat, menjadikan masyarakat kurang simpati terhadap para politisi. Retorika yang menawan dan

serangkaian rencana ketika kampanye tidak akan ada artinya jika pelakunya tidak memiliki daya sensitivitas tinggi terhadap rakyat, sehingga tidak dapat mengetahui denyut napas rakyat. Ketika suatu masalah genting datang, tindakan konkret untuk menjawab kebutuhan menjadi tidak terealisasi.

Perlwanan terhadap retorika saat kampanye itulah yang coba disuarakan Darminto M. Sudarmo kepada khalayak pembaca. Beberapa teks artikel dalam *Republik Badut* yang menegaskan perlwanan Darminto tersebut terdapat pada teks humor *HKRP*, *PPPL*, *TSKdJ*, *UKdLJ*, *AJGM*, *MRCdB*, *MKNBK*, dan *MGyDC*. Pada bagian ini teks perlwanan akan dikutip sebagian saja yang dianggap dapat membantu menjelaskan ideologi perlwanan Darminto terhadap para politisi dan retorikanya.

Mengenai retorika, Darminto memberikan gambaran secara eksplisit dalam *AJGM*, bahwasanya “Retorika adalah seni publik yang mampu membentuk opini, beberapa orang dahulu, termasuk Plato menemukan kesalahan di dalamnya. Mereka mengklaim bahwa retorika dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, padahal pada saat yang sama ia juga bisa digunakan untuk menipu atau memanipulasi”. Teks tersebut menunjukkan perlwanan Darminto terhadap retorika yang digunakan oleh para politisi dan juru kampanye belakangan ini. Kehidupan masyarakat dapat dikendalikan oleh orang-orang yang pandai berpidato dan beretorika karena masyarakat disebut dalam *AJGM* sebagai pihak yang tidak mampu menganalisis secara jernih, sehingga masyarakat mudah terpengaruh oleh pidato yang paling persuasif. Bukan rakyat yang disalahkan

Darminto, dalam hal ini sejumlah orang yang menggunakan retorikanya untuk membodohi rakyatlah yang ditentang oleh Darminto secara tegas.

Selain perlawanan terhadap retorika, Darminto juga memaksudkan untuk melakukan perlawanan terhadap para politisi yang dianggap hanya main-main dalam jabatannya. Salah satu politisi yang dimunculkan pertama ialah AF (Ahmad Fathonah) atas sikap koruptifnya. Berikut sikap penolakan Darminto terhadap keburukan para politisi yang dipaparkan dalam *HKRP*.

HKRP/I/25

Inilah hiburan dalam bentuk humor-humor yang AF to date (bisa dibaca: up to date), dapat pula dibaca af to date). Popularitas dan kontroversi AF (Ahmad Fathanah) terkait dengan kasus korupsi kuota impor daging sapi memang tiada duanya. Bukan saja keterkaitannya dengan sosok yang namanya sering disingkat LHI (Lutfi Hasan Isaaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera), Namun, juga sejumlah wanita cantik (disebutkan setidaknya 40 orang) yang tersebar di berbagai titik lokasi dan destinasi; dan semua ada hubungannya dengan sejumlah transaksi, aliran dana hingga miliaran rupiah.

HKRP/II/25

Humor pertama, “Ada tiga orang berinisial AF yang akhir-akhir ini menjadi terkenal, yaitu Aceng Fikri, Ahmad Fathanah dan Alek Ferguson. Yang terakhir bergelar ‘Sir’, dua sebelumnya bergelar ‘Syur...’.”

Memaparkan kejahatan yang dilakukan salah satu politisi republik melalui *HKRP* seolah menjadi sikap implisit atas perlawanan Darminto terhadap para politisi negeri secara umum. Terdapat dua predikat yang disandangkan kepada Ahmad Fathanah, yakni sebagai pelaku korupsi kuota impor daging sapi dan sebagai politisi syur terkait hubungannya dengan sejumlah wanita cantik di berbagai titik destinasi.

Perlawanan implisit juga disampaikan melalui penggambaran skeptisme masyarakat terhadap para politisi dalam *PPPL* serta menyandangkan label

“parpol bodrex” kepada para politisi sebagai sarkasme. Hal tersebut dapat diamati pada kutipan teks sebagai berikut.

PPPL/VIII/56

Ibarat unit media atau pers, parpol yang semacam ini oleh Rheinald Kasali disebut sebagai parpol bodrex. Mirip pers yang semua wartawannya tidak dapat gaji tapi dibekali kartu pers dan para wartawan mencari makan sebagai wartawan bodrex. Semua orang dapat membayangkan akan seperti apa produk pemberitaan yang muncul ke publik dan media tersebut. Akan seperti mental professional para wartawannya ketika di lapangan. Begitulah salah satu sisi runyam parpol di Republik Badut.

Terkait sebutan “parpol bodrex”, yang dianggap berjalan secara individu tanpa visi, misi dan pengarahan yang jelas maka berpeluang besar lahirnya retorika, janji dan wacana yang semrawut dari parpol bodrex tersebut. Dalam teks yang lain, yakni *AJGM*, Darminto menjelaskan bahwa semua kebijakan dan janji tetap harus dikawal bersama. Hal tersebut dapat diamati pada teks, sebagai berikut.

AJGM/VII/85

Retorika, janji, wacana, atau apapun istilahnya adalah anak kandung gagasan parpol. Ia perlu dikawal dan dibuktikan ke masyarakat. Bahkan perlu dipertanggungjawabkan di mata hukum. Bukan sekadar hukuman moral dan sosial. Setiap terjadi penerbitan gagasan, hakikatnya telah terjadi sebuah proses komunikasi yang di dalamnya memuat harapan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dengan demikian, ia mengandung kewajiban dari si penerbit gagasan untuk memenuhi janji sesuai takaran porsi dan proporsinya. Kalau semua pihak berkeinginan tradisi politik negeri ini bermartabat dan elegan, maka retorika, tak dapat lagi hanya dijadikan alat untuk membohongi dan membodohi publik?

Kalimat eksplisit untuk mengharap pemenuhan janji sebagai tanggung jawab dari politisi parpol merupakan bentuk tersembunyi dari perlawanan terhadap para politisi yang ingkar terhadap janjinya, retorikanya dan wacanawacananya. Jika tak terbukti nyata dalam kinerja, maka perlawanan ini seolah menegaskan bahwa retorika hanyalah alat untuk membohongi dan membodohi rakyat.

Beberapa kutipan lain secara eksplisit dalam *PPPL* dan *MRCdB* juga menampilkan perlawanan terhadap retorika yang biasa dimainkan para politisi dan skeptisme masyarakat terhadap politisi. Hal tersebut dapat ditemukan pada teks artikel sebagai berikut.

PPPL/VII/55

“Skeptisme juga muncul di sebagian masyarakat menengah dan terdidik”

PPPL/IX/56

“Maraknya kasus korupsi yang sebagian pelakunya pejabat publik dan politisi (produk parpol) membuat masyarakat melek didik menjadi semakin traumatis”

PPPL/X/57

“Bukan salah demokrasi mengandung. Bukan salah institusi parpol sebagai pilar demokrasi. Tetapi manusia-manusia yang ada di tiap bilik institusi itu sangat menyadari betapa besar kekuasaan yang mereka miliki”

PPPL/I/53

Banyaknya pemberitaan serba miring tentang parpol, akhirnya menumpuk sebagai klimaks sikap rakyat yang skeptis dan masa bodoh. Sikap itu tercermin dari dialog masyarakat, bahkan hingga kelas bawah. Untuk kegiatan nyoblos di pemilukada, misalnya, mereka tak sembarangan dapat menyediakan waktu untuk kegiatan itu. Sebagai buruh lepas, mereka tak akan mendapat bayaran kalau tidak masuk kerja

MRCdB/IV/91

Skeptis pada bakal caleg 2014? Coblos saja semua, kekhawatiran Anda akan sirna!

Sikap-sikap negatif para politisi ditampilkan pada hampir seluruh teks artikel humor Darminto, sebagai bentuk sindiran dan perlawanan terhadapnya. Seperti sindiran terhadap Anas Urbaningrum yang secara singkat ditampilkan dalam salah satu paragraf *TSKdJ* sebagai berikut.

TSKdJ/IV/69

Salah satu celah yang dilupakan oleh media dan banyak pengamat berhasil dibuka oleh Prof. JE Sahetapy di acara Indonesia Lawyers Club, *TV One*, 5 Maret 2013, adalah pertanyaan terhadap Anas sendiri; andaikata benar dia mengetahui sejumlah kasus kejahatan besar atau skandal yang terjadi di lingkungan elit penguasa dan sekian lama mendiamkannya, baru setelah dirinya tersandung kasus lalu bertekad membuka itu lewat halaman perhalaman karena merasa dirinya dijadikan korban konspirasi mereka, di mana moralitas seorang Anas sebenarnya?

Satir berbentuk sindiran terhadap sikap juru kampanye pemilu, yang tidak lain adalah para politisi dalam *UKdLJ* ditampilkan dengan halus, sebagai berikut.

UKdLJ/XVII/80-81

Ingat pemilu jadi ingat kampanye. Tampaknya, masa kampanye di negeri ini selalu mengulang sejarah. Juru kampanye selalu bercerita tentang program-program yang indah permai, lalu dengan berapi-api akan memperbaiki berbagai keadaan yang belum beres seperti minimnya infrastruktur, layanan sosial dan lain-lainnya, tapi soal implementasi dan pembuktianya setelah dirinya terpilih sebagai anggota legislatif, ya nanti dulu.

Sindiran lebih keras terhadap peserta kampanye yang cenderung menabrak rambu dan etika demi mencapai kemenangan belaka serta kisah juru kampanye yang kena batunya menjadi salah satu gaya Darminto untuk melakukan perlawanannya terhadap retorika para politisi. Hal tersebut dapat dicermati pada teks artikel humor sebagai berikut.

AJGM/XI/87

Semangat yang menggebu untuk menang acapkali membuat siapapun peserta kampanye dalam setiap pemilu cenderung menabrak rambu atau etika. Kemenangan adalah target, karena itu mesin politik harus bekerja semaksimal mungkin agar target yang sudah direncanakan dapat tercapai. Etika adalah wilayah lain dan dia dianggap berada di luar domain politik *ansign*. Kemenangan adalah kehormatan dan kebanggaan, sementara kekalahan adalah sebaliknya.

UKdLJ/XVIII/76

Tapi ada juga jurkam yang kena batunya. Terutama pada saat kampanye terbuka untuk berbagai kontestan parpol secara bergantian. Jurkam ini tergolong jago pidato. Ia naik ke atas panggung dan berkampanye dengan sangat bersemangat, massa yang hadir juga mengelu-elukan dengan gegap gempita, tetapi setelah jurkam itu turun panggung, duduk beristirahat di tempat yang telah disediakan, ia kaget. Ia lupa menyebutkan namanya dan dari partai politik mana berasal. Yang paling fatal, ia juga lupa meminta massa memilih dirinya pada Pemilu nanti. “Matik, aku!” keluhnya sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Nah!

Ketidakharmonisan hubungan antara partai politik dan masyarakat disampaikan Darminto melalui analogi muda-mudi pacaran. Perlawanan melalui

analogi ketidakharmonisan tersebut dapat ditemukan pada *MRCdB/IV/91*, “Hubungan parpol dengan rakyat itu nyaris seperti muda-mudi pacaran; dimulai dari pacaran indah, perkawinan lalu percekongan, perselingkuhan.. dan setelah piring dan gelas berterbangan perceraian tak dapat dicegah lagi”.

Melalui teks artikel humor *MGyDC*, Darminto seolah menelanjangi satu per satu sisi-sisi negatif para politisi, sehingga jika membacanya seolah tidak ada hal baik yang dilakukan oleh mereka. Hal ini merupakan satir yang dipaparkan Darminto melalui tokoh politisi dalam teks yang bernama Adygank Adigoonk Adygoenha. Di sana, ia seolah membongkar sisi-sisi buruknya sendiri dengan bahasa yang yakin dan mantap hati seolah tidak merasa bersalah. beberapa kutipan teks artikel *MGyDC* tersebut dapat diamati pada teks sebagai berikut.

MGyDC/IV/179

Yang jelas saya masuk ke partai politik, pake modal. Mencalonkan diri jadi anggota parlemen juga pake modal; jadi bila dikorelasikan dengan hukum ekonomi, pas toh? Barangsiapa berkegiatan di suatu bidang tertentu di dalamnya memerlukan modal uang, maka di situlah kaidah bisnis berlaku. Bahkan kalau perlu, dengan modal sekecil-kecilnya bisa mendapatkan untung sebesar-besarnya

MGyDC/V/179

Bukannya menyombong, sebagai anggota parlemen yang bertugas di komisi X (baca: eks; bukan sepuluh), saya berhak mendapatkan *advantage* sebagai warga kelas terhormat; itulah makanya saya lebih suka pakai istilah parlemen bukan wakil rakyat, karena *de facto*, kerja saya memang tidak harus berkaitan dengan kepentingan rakyat. Itu fakta konkret yang harus dipahami dulu, soal terminologi ini perlu dituntaskan dulu sebelum menuju perdebatan yang bertele-tele, *okay*?

MGyDC/VI/179

Ada memang suara-suara berisik yang selalu memojokkan kami, eh saya, bunyinya begini: wakil rakyat kok nggak pernah nyambung sama aspirasi rakyat. Gimana, sih? Ya, jelas dong mereka kan tidak pernah tahu apa yang ada di kepala dan hati saya; apalagi mengenai visi, misi, dan motivasi saya bergerak di bisnis ini. Ya, parpol dan politikus ini saya sebut sebagai bidang bisnis. Jelas?

Pada kutipan-kutipan tersebut di atas, sikap para politikus yang ditentang disebutkan secara implisit, dengan menyebut politikus adalah suatu pekerjaan, politikus tidak bekerja sesuai dengan kepentingan rakyat, dan politikus tidak pernah nyambung dengan aspirasi rakyat. Perlawanan tersebut disuarakan secara sinisme dan satir.

Selain di dalam teks humor, perlawanan terhadap para politikus juga disuarakan melalui satir *oneliner* yang dimaksudkan sebagai sindiran bahwa politisi baik itu tidak ada. Hal tersebut dapat dilihat pada pembukaan teks artikel humor *TSKdJ*, sebagai berikut.

Politisi buruk adalah sekelompok politikus yang hanya sibuk memperkaya diri dan golongannya; sedangkan politisi baik adalah sekelompok politikus yang belum ketahuan kedok dan belangnya.

*someone

Puncak dari sebuah kampanye adalah ketika pemilihan umum berlangsung. Tahun yang disebut Darminto dalam *AJGM* sebagai “Tahun kecap”. Sikap rakyat yang beragam seolah mendapat pembelaan dari tulisan Darminto. Salah satu suara Darminto yang cenderung keras dalam perlawanannya terhadap para politisi beserta segenap program kerja dan retorikanya disampaikan secara implisit seperti yang dilihat dalam *MRCdB*, sebagai berikut.

MRCdB/IV/91

Golput yang baik dan benar bukan pemilih yang tidak mencoblos sama sekali – karena kertas suara kosong bisa disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Golput yang elegan adalah yang mencoblos lebih dari satu. Kertas suara langsung dinyatakan tidak sah. Dan di sana tidak ada peluang untuk disalahgunakan oleh siapa pun.

Pada teks yang lain, dalam *UKdLJ*. Darminto kembali menyuarakan perlawanannya yang implisit terhadap para jurkam yang jago berpidato ketika

kampanye. Menjadikan juru kampanye yang kena batunya sebagai bahan ejekan dan tertawaan adalah salah satu bentuk perlawanan yang tersembunyi. Teks berikut memberikan gambaran bahwa berpidato yang baik di hadapan masyarakat bagi juru kampanye bukanlah demi tujuan menyumbangkan pemikiran terbaik melalui visi misi parpol dan segenap janji demi kesejahteraan bersama melainkan demi mendapat simpati masyarakat sehingga terpilihlah diri agar memiliki tempat yang strategis untuk bersikap sesuka hati. Berikut teks artikel *UKdLJ* yang dapat dicermati.

UKdLJ/XVIII/76

Tapi ada juga jurkam yang kena batunya. Terutama pada saat kampanye terbuka untuk berbagai kontestan parpol secara bergantian. Jurkam ini tergolong jago pidato. Ia naik ke atas panggung dan berkampanye dengan sangat bersemangat, massa yang hadir juga mengelu-elukan dengan gegap gempita, tetapi setelah jurkam itu turun panggung, duduk beristirahat di tempat yang telah disediakan, ia kaget. Ia lupa menyebutkan namanya dan dari partai politik mana berasal. Yang paling fatal, ia juga lupa meminta massa memilih dirinya pada Pemilu nanti. “Matik, aku!” keluhnya sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Nah!

Sesuatu yang membuat ideologi borjuis mudah dikritik adalah tidak memiliki kapasitas untuk memperbaiki tatanan sosial, tanpa membiarkan kesatuannya tampak, tanpa menghukum dirinya dengan menggeser posisi ke arah lain, tanpa membuka instabilitas suatu tatanan yang dirancang untuk mengangkat martabat masyarakat (Thompson, 1984: 28).

e. Perlawanan terhadap Pencitraan Presiden

Pembentukan citra (*image building*) nampaknya menjadi salah satu hal yang ditentang oleh *Republik Badut* dan acapkali dianggap berhenti sekadar sebagai pembentukan citra belaka sehingga seolah tidak berdampak positif bagi

kesejahteraan rakyat. Perlawanannya tersembunyi yang dilakukan Darminto terhadap pencitraan presiden ditemukan pada teks humor *HPKG*, *HKRP*, *MRCdB*, *MKNBK*, *BKS*, dan *KGRB*.

Dalam *HPKG*, perlawanannya ditujukan kepada presiden yang melakukan pencitraan ketegasan dan ditampilkan di depan media. Apa yang dilarang presiden untuk dilakukan oleh menterinya ternyata justru dilanggar sendiri olehnya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan teks berikut.

HPKG/IV/18-19

Makin unik lagi, sang presiden yang sebelumnya tampak gencar mencucurkan menteri-menterinya yang merangkap jabatan supaya mengundurkan diri fakta yang kemudian terjadi justru membuat *cingak* kita semua, tanpa merasa risau dia sendiri memberi contoh presiden yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Agar tidak terlalu mencolok mata, dia juga memilih dua menterinya (orang sendiri) supaya merangkap jabatan tanpa mempedulikan menteri-menteri yang pernah dicecarinya. Republik Badut benar-benar kaya aksen dan sabetan.

Pencitraan keseriusan dan ketegasan presiden dalam memutuskan sesuatu terhadap menteri-menterinya hendak menggambarkan betapa cermat, hati-hati dan seriusnya Yudhoyono dalam memilih menteri sebagai pembantunya dalam pemerintahan (Syamsuddin Haris, 2014: 195).

Perlawanannya lain mengenai pencitraan presiden juga terdapat pada teks lain dalam artikel yang sama, yakni mengenai pengerdilan uang dan penyebutan kata “satria” terhadap pelaku kasus balas dendam anggota Kopassus Angkatan Darat di sebuah kafe Yogyakarta. Berikut kutipan singkat yang dapat dicermati.

HPKG/I X/20

Bukan hanya itu, bagi masyarakat kecil yang ada di desa, penyesuaian itu sudah pasti akan memicu inflasi yang sangat frontal dan telak. Muara dari ke-“iseng”an itu hanya akan mendatangkan malapetaka baru bagi rakyat kecil. Sebuah keberuntungan, gagasan yang berorientasi elitis itu tidak menarik bagi banyak kalangan sehingga batal diberlakukan.

HPKG/XVI/23

Tentang terucapnya kata ksatria oleh Presiden sehubungan dengan pengakuan itu tentu saja membuat banyak kalangan bertanya-tanya bagaimana bisa belasan pasukan membunuh orang yang disebutnya preman dalam tahanan dan tanpa bisa melakukan perlawanannya apa-apa disebut ksatria? Ya, andai cukup mengatakan berterima kasih karena mau jujur dan terbuka, persoalan kata ksatria jelas akan berbeda; karena ia telah mengandung muatan makna yang telah disepakati sebagai tindakan murni positif dan membanggakan.

Darminto tidak menyatakan secara lugas bahwa keputusan dan sikap presiden pada saat itu adalah pencitraan belaka. Namun, teks tersebut menonjolkan pencitraan SBY dalam dua kasus. Kasus yang pertama mengenai keputusan pengerdilan rupiah, dari seribu perak menjadi satu perak. Sedangkan di sisi lain “keisengan” tersebut dianggap justru menjadi “malapetaka baru bagi rakyat kecil”. Demikian Darminto menggambarkan pencitraan presiden dalam kasus pengerdilan rupiah yang kemudian tidak jadi diberlakukan karena dianggap kurang dukungan. Kasus yang kedua yakni mengenai penyebutan kata “satria” yang juga dianggap sebagai pencitraan belaka di mata angkatan bersenjata.

Perlawanannya secara implisit terhadap pencitraan presiden juga terdapat pada teks artikel humor *HKRP*. Sindiran tersebut ditujukan kepada presiden SBY atas penampilan personalnya yang “charming” tetapi tidak memberikan efek terhadap kesejahteraan rakyat, sehingga kosa kata “jarang tersenyum” kemudian dipadankan oleh Darminto dengan kosakata “tampak menderita” yang seolah bermakna ‘lelah’ atas sebuah pencitraan selama melalui *performance*. Hal tersebut dapat dicermati pada teks berikut.

HKRP/VI/26-27

Di negeri serius, yang kepala negaranya jarang tersenyum dan tampak menderita, tak mungkin hal-hal yang dapat mengacau dan menyengsarakan

rakyat itu dapat terjadi. Selain orang-orang yang disebutkan itu berasal dari partai bersih berbasis agamis, juga mana mungkin mereka tega melukai kepercayaan rakyat yang memilih mereka sendiri. Itulah masalahnya. Itulah seharusnya!

Pencitraan bahwa kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat ditampilkan Darminto pada teks humor *MRCdB*, *HKRP*, dan *KRK*, sebagai berikut.

MRCdB/II/90

Lagi soal logika subsidi. Yang kaya kan ada beban dan kewajibannya sendiri, misalnya bayar pajak gede untuk apa saja, dirinya sendiri, perusahaan, rumah, mobil, dll... jadi kalau mereka sedikit bisa menikmati subsidi kan juga dari uangnya sendiri... trik pemerintah mempertentangkan kaya miskin dalam soal subsidi BBM itu seperti logika pertentangan kelasnya Marx... bagaimana ini?

Sependapat dengan ideologi perlakuan Darminto terhadap pencitraaan presiden bahwa kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat, Haris juga menyampaikan hal yang sama dalam bukunya (2014, hal. 197-198) bahwa dalam jangka waktu sekitar tiga tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau memutuskan untuk ketiga kalinya menaikkan harga BBM dengan menyatakan hal tersebut sebagai pilihan terakhir yang dapat diambil karena tidak ada alternatif lain, tetapi di waktu yang sama diberikan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat kecil sehingga seolah-olah pemerintah itu baik hati, pemurah, dan peduli pada mereka.

Pencitraan lain yang sedikit kontroversial ialah soal penghargaan yang diterima presiden SBY pada akhir Mei, seperti yang ditampilkan Darminto dalam teks artikel humor *HKRP*, sebagai berikut.

HKRP/XII/30

Fakta *up to date* lain, kontroversi mengenai presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan penghargaan World Statement Award dari Appeal of Conscience Foundation, suatu yayasan antaragama bergengsi di Amerika Serikat, yang ternyata telah diterima presiden SBY pada akhir Mei

2013. Sebelumnya perkara itu menuai reaksi pro dan kontra yang cukup sengit. Ada anjuran menarik dari masyarakat, sebaiknya penghargaan itu diberikan saja kepada keluarga Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) karena dia adalah sosok presiden Indonesia yang paling tepat menerimanya.

Penerimaan penghargaan World Statesment Award dari Appeal of Consciensce Foundation seolah dinilai Darminto sebagai pencitraan belaka. Penjelasan tersebut dibuktikan dengan ditampilkannya pendapat Frans Magnis Suseno yang mengirim protes tertulis kepada ACF dan sikap implisit yang mengharapkan agar Presiden menolak secara halus penghargaan tersebut. Berikut kutipan teks artikel *KRK* yang dapat dicermati.

KRK/III/15

Reaksi keras berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai kasus intimidasi, kekerasan, dan pembunuhan, terhadap kelompok minoritas keagamaan mencederai kehidupan bangsa beberapa tahun terakhir. Tidakkah fakta-fakta itu mampu menyulut nurani dan pertimbangan Presiden SBY untuk menolak secara halus pemberian penghargaan itu demi menjaga perasaan bangsa Indonesia. Konon beberapa tokoh penting juga menyuarakan penolakan; salah satu di antaranya adalah rohaniwan dan Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Drivarkara, Jakarta, **Frans Magnis Suseno SJ**, mengirim protes tertulis lewat surat elektronik ke ACF. “Penghargaan itu menghina kelompok-kelompok minoritas yang selama ini menjadi korban kekerasan.” Belum ada respon resmi dari ACF. Namun, seperti yang sudah-sudah, masyarakat selalu dapat menebak bagaimana sikap akhir Presiden SBY yang mengulur keadaan dengan keheningan. Para pemrotes seperti berkomunikasi dengan angin, senyap. Salah satu pojok dari media nasional menohok situasi imun dan beku itu dengan sindiran yang menyengat, “Rezeki, kok, ditolak!”.

Ditampilkannya pendapat Frans Magnis Suseno SJ sebagai seorang rohaniawan dan Guru Besar ditujukan untuk memperkuat pendapat Darminto dalam menyuarakan ideologi perlawanannya. Selain sikap Frans, Darminto juga menampilkan pernyataan sikap Yusuf Kalla yang sangat diplomatis pada *KRK/II/15*, bahwa “Penghargaan ACF untuk Presiden SBY itu sebenarnya adalah kredit untuk bangsa Indonesia”.

Perlawanan dalam bentuk teks humor sinisme terhadap pelaku pencitraan dan pembohongan publik disuarakan dengan memberikan alternatif teori untuk menelanjangi kepura-puraan. Sindiran keras secara implisit tersebut ditegaskan oleh Darminto dalam teks humor *MkNBK*, sebagai berikut.

MkNBK/II/98

Kaca mata yang luar biasa pulalah yang akan dapat membuka semua tabir keagungan semu, pencitraan artifisial dan pembohongan publik itu nama kaca mata analisis itu bisa ilmu apa saja, asal luar biasa dan bukan ilmu normatif. Ilmu yang cocok dengan kondisi luar biasa tadi. Beberapa alternatif teori dari ketiga tokoh ilmuwan humor di bawah ini juga dapat menelanjangi segala kepura-puraan. Dapat menyelinap dan menginvestigasi motif-motif yang sangat rumit dan tersembunyi. Tak ada kecualasan dan tipu muslihat dapat bersembunyi dari bidikan analisis mereka. Di liang semut sekalipun. Apalagi, bila semua itu terjadi di sebuah negeri yang bernama Republik Badut. Lewat analisis mereka, kita akan mendapatkan simpul-simpul pemahaman bagaimana isi perut dan organ dalam orang-orang penting di Republik Badut. Bagaimana mereka bekerja, melakukan trik, manuver, dan membuka tabir rahasia sim salabim yang ada.

Sinisme terhadap presiden secara implisit juga ditampilkan dalam kasus monolog Butet, sebagai berikut.

BKS/VI/108

Itu baru satu hal. Hal lain yang ambigu dan berbuntut polemik agak “menggelikan” karena adanya silang arus interest/persepsi adalah tentang kasus yang pernah menimpa Butet Kertaradjasa setelah membawakan monolog *Deklarasi Pemilu Damai 2009* pada Rabu malam, 10 Juni 2009; catatan masa lalu yang tak boleh dilupakan.

Di bawah teks tersebut di atas, sebagai lanjutan, *BKS* menyampaikan bahwa Butet mendapat banyak pujian sekaligus cacian dari salah satu peserta pemilu damai karena materi monolognya, peserta pemilu yang sebelumnya pernah *nanggap* Butet dengan tema yang berbeda.

Perlwanan akhir yang ditujukan kepada presiden disuarakan dengan bahasa yang cenderung kasar, yakni sinisme. Hal tersebut dapat dicermati pada teks berikut.

KGRB/XII/155

Saya mencoba menghubungi beberapa teman dan meminta saran mereka via SMS. Sebagai besar SMS yang masuk inti sarannya sama. Kurang lebih seperti ini, “Rumit amat sih. Kamu bilang aja ke dia, salah satu cara untuk menyelematkan bangsa ini cukup gampang dan tidak perlu melakukan pemusnahan peradaban; yaitu: suruh dia mundur, secepatnya. Makin cepat makin baik. Cuma itu. Karena jurang yang dia maksud itu adalah dirinya sendiri. Proyeksi dari ketakutan-ketakutannya. Suer!!!”

Pada kutipan-kutipan teks humor tersebut kesemuanya secara eksplisit dan implisit ditujukan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Darminto secara sinisme menentang kecenderungan presiden dan pemerintahan dalam (1) pencitraan bahwa pemerintahan sungguh-sungguh bekerja, (2) pencitraan tentang keseriusan presiden dalam memutuskan suatu kebijakan, dan (3) pencitraan bahwa kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat.

Hasil analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk menguatkan pernyataan Marx tentang wacana ideologi penulis. Dalam hal ini perlwanan berusaha disebarluaskan Darminto kepada khalayak pembaca melalui buku *Republik Badut* yang berisi sekumpulan artikel humor politik mengenai sinisme, dan satir politik yang senang diimplisitkan untuk menyerang secara halus dan tidak frontal. Selain itu bentuk komunikasi yang dilakukan Darminto tersebut juga sebagai kontribusi kepada perubahan sosial dalam upaya melestarikan dunia sosial, termasuk hubungan-hubungan sosial yang melibatkan hubungan kekuasaan yang tidak sepadan.

Darminto M. Sudarmo menggunakan humor berupa artikel yang berisi kritik terhadap kondisi riil Indonesia. *Republik Badut* menolak tindakan korupsi, tindakan penindasan para elit penguasa, tindakan represif, tindakan retorika para politisi selama kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Republik Badut* juga menolak pencitraan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, *Republik Badut* yang ditulis Darminto M. Sudarmo justru mendukung kelompok masyarakat kecil yang dalam teori Marxis disebut sebagai kaum proletar. Dalam analisis dijelaskan bahwa sindiran dan satir *Republik Badut* digunakan oleh Darminto M. Sudarmo sebagai upaya untuk melestarikan dunia sosial, termasuk hubungan-hubungan sosial yang melibatkan hubungan kekuasaan yang tidak sepadan. Darminto M. Sudarmo telah membantu memberikan kontribusi kepada perubahan sosial di sepanjang garis hubungan kekuasaan dalam proses komunikasi dan masyarakat secara umum.

Peran penulis menunjukkan kepada khalayak pembaca apa yang diabaikan oleh mereka. Kesuksesan kritik sosial melalui sebuah humor bergantung pula pada tingkat bagaimana penulis mencegah campur tangan ideologi yang merefleksikan pihak yang kuat secara politik dan sosial. Melalui artikel-artikel yang disebutkan di atas sebelumnya dalam *Republik Badut*, Darminto telah berusaha mengekspresikan masalah yang berhubungan dengan carut marut kehidupan berpolitik di Indonesia. Darminto menyuguhkan fakta-fakta aktual yang tak terelakkan dan sulit dibantah oleh negeri Indonesia. Sikap melakukan perlawanan-perlawanan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan melalui sebuah humor merupakan sikap politik, sebuah dukungan menuju masyarakat yang lebih adil dan

sejahtera. Bagaimanapun, hal tersebut tidak membebaskan teks dari kemarahannya.

f. Penyatuan Gagasan Senasib Sepenanggungan dari Kaum Proletar

Althusser (1971: 132-133) berpendapat bahwa Althusser berpendapat bahwa menghasilkan tenaga kerja tidak hanya menghasilkan keterampilan melainkan juga menghasilkan ketundukan terhadap aturan yang dibuat, yakni menghasilkan kemampuan untuk melegitimasi ideologi yang berkuasa atas agen eksloitasi dan penindasan, sehingga mereka juga akan melakukan dominasi kelas penguasa melalui kata-kata.

Kaum proletar yang dimaksud dalam *Republik Badut* tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat pekerja semata, melainkan seluruh kelompok masyarakat yang termarginalkan dari suatu kelas sosial. Dari kelima belas teks yang dianalisis, semua mengimplisitkan bahwa khalayak pembaca merupakan bagian dari kaum proletar yakni rakyat yang merasakan ketimpangan sistem yang terjadi di republik.

Sebenarnya hampir di setiap teks artikel humor yang ditampilkan Darminto mengandung unsur pembelaan terhadap kaum proletar. Namun, pada bagian ini akan ditampilkan beberapa teks yang menonjolkan sisi pembelaan teks terhadap nasib kaum proletar, seperti yang tersebut pada *UKdLJ*, *HPKG*, *PPPL*, *TSKdJ*, *AJGM*, *MRCdB*, *MKNBK*, dan *AGJDKI*.

Dalam *UKdLJ*, pembelaan terhadap rakyat biasa atau yang dianggap sebagai kaum proletar disampaikan dengan menanggapi kinerja birokrasi Pemprov DKI,

apakah dilakukan untuk tujuan rakyat atau kepentingan golongan. Hal tersebut dapat dicermati dalam kutipan berikut.

UKdLJ/V/77-78

Mengapa masyarakat sangat reaktif terhadap program itu? Dapat dipahami bila reaksi pro dan kontra masyarakat muncul atas program Pemprov DKI itu semata karena ia menggunakan label “lelang jabatan”, sebuah terminologi suram yang dalam rumor masyarakat diartikan sebagai tawar-menawar jabatan dengan kompensasi dana hingga ratusan juta rupiah bagi si penawar tertinggi. Namun, setelah masyarakat menyimak dengan seksama “lelang jabatan” dalam versi Pemprov DKI ternyata tak jauh dari sebuah kompetisi uji kompetensi bagi calon pejabat (lurah dan camat); yang di dalamnya berisi serangkaian tahap ujian baik dari aspek persyaratan usia, pendidikan, dan lain-lain hingga ujian tertulis atau wawancara mengenai kompetensi manajemen, administratif, geografis, pelayanan publik, mental-spiritual, dan lain-lain. Sebuah program yang ternyata bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar fungsinya sebagai pelayan masyarakat dapat terlaksana dengan optimal.

Pembelaan terhadap nasib kaum proletar juga disampaikan dalam menanggapi kasus penyesuaian mata uang yang ketika itu beredar isu akan diberlakukannya kebijakan baru tersebut dan dianggap merugikan masyarakat kecil. Satir yang menyindir kebijakan sebagai “keisengan” tersebut, disampaikan pada *HPKG*, sebagai berikut.

HPKG/IX/20

Bukan hanya itu, bagi masyarakat kecil yang ada di desa, penyesuaian itu sudah pasti akan memicu inflasi yang sangat frontal dan telak. Muara dari ke“iseng”an itu hanya akan mendatangkan malapetaka baru bagi rakyat kecil. Sebuah keberuntungan, gagasan yang berorientasi elitis itu tidak menarik bagi banyak kalangan sehingga batal diberlakukan.

Pembelaan selanjutnya juga dilakukan Darminto dalam kasus pemilu yang dianggap merugikan kaum buruh. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

PPPL/IV/54

Aturan pemilu sejak republik ini berdiri, tidak pernah menghitung warga berkategori tenaga atau buruh lepas. Warga yang hidup matinya bergantung dari waktu dan tenaganya hari itu. Tidak bekerja, tidak ada penghasilan tidak ada yang bisa dimakan. Itulah sosok-sosok nyata kemiskinan sejati.

Hingga kini, bahkan Negara yang meminta-minta sumbangan kepada mereka, berupa luangan waktu untuk nyoblos atau berpartisipasi dalam event politik. Bukankah ini tidak adil dan tak tahu diri. Setelah ritual politik pemilihan kepala daerah, nasib para buruh lepas itu tetap sama atau bahkan makin terpuruk, siapa peduli?

Kutipan di atas menyatakan bahwa kehidupan warga buruh ialah penggambaran sosok nyata kemiskinan sejati. Pembelaan terhadap warga buruh pada *PPPL* dicontohkan dalam kasus pemilihan kepala daerah yang sama sekali tidak menuntungkan nasib kaum buruh karena setelah meluangkan waktu untuk memilih kepala daerahnya meski harus izin tidak bekerja dan tidak mendapat upah, ternyata setelah ritual tersebut berakhir pun nasib para buruh pun tetap sama bahkan terkadang justru menjadi makin terpuruk karena kurang diperhatikan. Satir tersebut merupakan pembelaan yang kentara sekaligus sindiran bagi pemerintah daerah dan birokrasinya.

Masih soal pesta demokrasi pada teks *PPPL*, baris selanjutnya juga disampaikan pembelaan terhadap masyarakat terkait kasus golput. Di mana sesungguhnya golput adalah buah dari kekecewaan terhadap pemerintahan yang kurang peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, sehingga melahirkan sikap skeptis dari masyarakat terhadap birokrasinya. Golput disampaikan Darminto bukan sebab provokasi sejumlah pihak melainkan karena ulah pemerintahan itu sendiri yang seolah hanya menjadikan masyarakat sebagai objek *lip service* pada saat kampanye. Kemudian rakyat pun menjadi skeptis. Berikut kutipan *PPPL* yang dapat dicermati.

PPPL/VI/55

Gerakan buruh lepas yang tanpa komando dan nyaris serempak terjadi di berbagai wilayah Republik Badut, makin membuktikan bahwa kesadaran politik masyarakat paling rentan perekonomiannya ini sudah tumbuh.

Kalangan tertentu berasumsi sikap itu sebagai dampak dari provokasi golput sejumlah pihak yang skeptis terhadap pelaksanaan pesta demokrasi. Namun, andai para pengamat dan peninjau atau penilai itu mau menyelami persoalan hakiki yang terjadi di masyarakat bawah, mereka pasti akan malu pada pernyataannya sendiri.

PPPL/IX/56-57

Lagi-lagi masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek lips service belaka dan itu baru diwacanakan ketika menjelang pemilu atau saat-saat masa kampanye berlangsung.

Meskipun skeptisme rakyat lahir dari pemimpin yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat, Darminto juga menyuarakan pembelaannya kepada rakyat secara impilisit dengan menaruh harapan besar terhadap munculnya sosok pemimpin yang baik. Hal tersebut dapat dicermati pada kedua kutipan teks artikel humor, sebagai berikut.

TSKdJ/XVI/72

Salah satu ciri pemimpin yang baik pula, dia akan mengutamakan banyak *blusukan* ke negerinya sendiri (terutama yang sedang dirundung permasalahan) bukan sebaliknya, banyak *blusukan* ke negeri luar yang katanya mau berburu investor. Investor akan berbondong-bondong datang ke negeri kita bila Republik Badut diakui sebagai negara baik; bukan sebaliknya, membujuk-bujuk mereka, merengek-rengek pada mereka. Sudah berbiaya besar, tak ada jaminan berhasil pula!

AJGM/XV/88

Moralitas Analisis

Republik Badut mungkin sebuah republik sungguhan, mungkin hanya metafora, mungkin juga ia negeri yang disebut orang sebagai Indonesia. Hal yang paling penting dari semuanya, untuk melangkah maju ke depan, negeri ini membutuhkan pemimpin yang baik.

“Masyarakat memerlukan inspirasi dan pemimpin nasional yang mampu menggerakkan bangsa kita untuk mencapai kemajuan. Tanpa itu bangsa ini terancam terjebak dalam kubangan masalah yang mengerdilkan, bahkan menularkan energi negatif,” demikian pesan menarik dari Prof. Komaruddin Hidayat.

Pembelaan terhadap rakyat pada teks artikel humor *MkNBK* disampaikan melalui kasus penjarahan uang negara yang berimbang pada penderitaan masyarakat luas. Berikut kutipan teks artikel humor yang dapat diamati.

MkNBK/VI/100

Penjarahan kekayaan negara yang notabene adalah juga kekayaan rakyat, terjadi lewat berbagi modus yang sangat tipikal seakan memenuhi asas legalitas dan konstitusional. Di parlemen, ayat-ayat hukum yang sebenarnya punya dampak signifikan bagi masyarakat luas, diperjualbelikan demi kepentingan dan pamrih sesaat. Bayangkan bila parlemen hanya mengedepankan keberpihakan pada kapitalis jahat dan mafia siluman, akan seperti apa penderitaan yang harus ditanggung masyarakat luas? Aspirasi publik, nyaris hanya sebatas kosmetik ketika para caleg merayu-rayu calon konstituennya; ketika mereka sudah duduk nyaman di kursi legislatif, maka prioritas yang terjadi berbeda lagi kalkulasinya.

Pembelaan terhadap rakyat dan proletar secara menonjol juga ditemukan pada teks artikel humor *MRCdB* dan *AGJDKI* sebagai berikut.

MRCdB/IV/91

Seratus ribu rupiah sehari mengakibatkan lima tahun menderita; itulah lobang jebakan manis yang penuh bisa. Waspadalah! Waspadalah! Waspadalah!!!

AGJGDKI/XVIII/162

Jadi kesimpulannya, kalau sekadar mau bikin perubahan di Jakarta itu mah soal kecil, tapi bikin perubahan yang isi perubahannya itu bikin warga tambah maju, sejahtera, adil, dan makmur, itu yang *kagak gampang, coy!* Begitu katanya mengakhiri percakapan

Darminto melalui Satirnya seolah berorasi di hadapan masyarakat di satu sisi dan berorasi di hadapan pemerintah di sisi lainnya untuk membela rakyat kelas bawah pada umumnya, meski dalam *AGJDKI* hanya membicarakan soal masyarakat Jakarta. Pembelaan secara implisit disampaikan agar kehidupan rakyat yang terkesan miskin dan tidak sejahtera menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, adil dan makmur.

Mengamati lima perlawanan yang disuarakan Darminto melalui *Republik Badut*, (Fairclough, 1989: 2-4) menyatakan bahwa bahasa bukanlah sesuatu yang layak untuk diremehkan. Meskipun sangat penting ditekankan bahwa bahasa bukanlah satu-satunya yang terkait dengan kakuasaan. Ideologi telah meresap

dalam bahasa, yang secara nyata seharusnya berarti bahwa ideologi bahasa yang alami harus menjadi satu tema pokok dalam ilmu sosial modern.

Setelah 15 teks artikel humor politik melewati analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosial budaya, studi ini membuktikan bahwa penulis sengaja menanamkan dan menginvestasikan ideologinya dalam teks-teks artikel humor politiknya. Penulis memilih kata-kata, membuat alur cerita fiktif yang menganalogikan kebenaran alur cerita perpolitikan negeri yang terjadi di Republik Indonesia, relasi yang dibuat antar tokohnya, dan identitas tokoh dalam teks artikel humor politik yang dibuat sedemikian rupa membawa kepentingan untuk tujuan tertentu. Ideologi perlawanan yang disuarakan secara tersembunyi oleh penulis melalui humor, satir, dagelan, guyon parikeno dan semacamnya di dalam *Republik Badut* bertujuan untuk memberikan dampak persepsi pembaca tentang berita perpolitikan di Republik Indonesia. Siapa ‘yang salah’ dan ‘yang benar’ serta siapa ‘yang menindas’ dan ‘yang tertindas’.

Penelitian ini signifikan dalam aspek berikut. Pertama, penelitian ini membuktikan bahwa pilihan kata dapat digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan ideologi mereka. Hal ini mengingatkan para guru untuk lebih memperhatikan pilihan kata dari pada hanya berfokus pada teks makna dan struktur kalimat dalam perkuliahan mereka untuk bahasa dan jurnalis siswa. Kegiatan membaca beberapa bacaan kritis humor yang sedang marak di Indonesia akan membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka.

Kedua, studi analisis ideologi perlawanan yang tersembunyi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tawa itu berpihak. Bacaan teks artikel humor

politik yang terlihat ringan dan candaan saja, sebenarnya tidak bebas nilai. Keangkuhan memang suatu produk kehidupan sosial yang alamiah tetapi itu melahirkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Layaknya sebuah racun yang keluar dalam tubuh manusia. Tubuh secara alami akan mengeluarkan racun yang harus dikeluarkan atau dinetralkan. Jika dibiarkan dalam jangka waktu lama maka racun itu akan menghancurkan atau bahkan mematikan. Maka tubuh mengeluarkan racun yang lain sebagai penawarnya. Seperti yang disampaikan oleh Seno Gumira Ajidarma (2012: 14) bahwa obat khusus bagi keangkuhan ialah tawa, dan bahwa kekurangan yang pada hakikatnya (dapat) ditertawakan adalah keangkuhan.

Ideologi perlawanan yang tersembunyi dalam Buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo terangkum dalam tabel, sebagai berikut.

Tabel 7. Ideologi Perlawanan dalam buku *Republik Badut*

No	Humor	Ideologi Perlawanan					
		Korupsi	Elit Pengusa	Represif	Politisi	Pencitraan Presiden	Pembelaan Proletar
1.	(DBRB)	√					√
2.	(KRK)					√	√
3.	(HPKG)	√				√	√
4.	(HKRP)	√	√		√		√
5.	(PPPL)	√			√		√
6.	(TSKdJ)	√			√		√
7.	(UKdLJ)						√
8.	(AJGM)				√		√
9.	(MRCdB)	√	√		√	√	√
10.	(AKRA)			√			√
11.	(MkNBK)	√	√		√		√
12.	(BLS)		√			√	√
13.	(KGRB)	√				√	√
14.	(AGJGDKI)						√
15.	(MGyDC)				√		√

C. Keterbatasan Penelitian

Terlepas dari temuan utama dan signifikansi dari penelitian ini, penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Penelitian ini dibatasi pada analisis 15 teks artikel humor politik Darminto M. Sudarmo yang dipilih dari buku *Republik Badut*. Contoh-contoh yang sedikit dan terbatas jumlahnya, yang berarti temuan penelitian mungkin terbatas pula.
2. Beberapa ekspresi lain dari ideologi misalnya desain cover buku *Republik Badut*, gambar yang ada di dalamnya serta *layout* tidak dianalisis, sehingga sulit untuk lebih menafsirkan ideologi perlawanan secara lebih dalam.
3. Penelitian ini hanya menggunakan *secondary data* yang relevan dengan tema penelitian dan penelusuran literatur yang relevan, tanpa menggunakan data yang diperoleh dari *depth interview* terhadap Darminto M. Sudarmo, sehingga hasil analisis tidak mampu merambah aspek sosiokultural secara lebih mendalam.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut.

1. Konstruksi teks humor dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo cenderung menggambarkan Republik Badut sebagai analogi dari Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kesamaan nama, tokoh, karakter, waktu, tempat, dan cerita yang kesemuanya dikonstruksi dalam humor yang sejalan dengan tiga teori humor Meyer dan lima jenis humor yang disadur dari Neal Norick dan Darminto M. Sudarmo sebagai berikut.
 - a. Tiga teori humor yang sejalan dengan teori humor Meyer, antara lain:
 - 1) Teori bantuan. Berikut teks humor yang termasuk dalam teori bantuan: *Kinerja Rasa Kosmetika (KRK)*, *Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)*, *Tahun-tahun Sport Kantong dan Jantung (TSKdJ)*, *Awas Janji-jani Gombal Mukiyoo (AJGM)*, *Anomali Komunikasi Rakyat Aparat (AKRA)*, *Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK)*, *Bukan Lawak Senayan (BLS)*, *Andai Gue Jadi Gubernur DKI (AGJGDKI)*.
 - 2) Teori keganjilan. Berikut teks humor yang termasuk dalam teori keganjilan: *Dunia Batin Republik Badut (DBRB)*, *Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG)*, *Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan*

(UKdLJ), Karantina Generasi Republik Badut (KGRB), Menunggu Godot yang Datang Codot (MGyDC).

- 3) Teori superioritas. Berikut teks humor yang termasuk dalam teori superioritas: *Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL)*, *Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB)*.
- b. Lima jenis humor, antara lain:
 - 1) Pelesetan (*imitation and parody*). Teks humor yang termasuk dalam jenis pelesetan (*imitation and parody*), antara lain: *Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)*.
 - 2) Guyongan parikenan. Teks humor yang termasuk dalam jenis guyongan parikenan, antara lain: *Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL)*, *Awas Janji-jani Gombal Mukiyoo (AJGM)*, *Anomali Komunikasi Rakyat Aparat (AKRA)*.
 - 3) Ironi. Teks humor yang termasuk dalam jenis ironi, antara lain: *Dunia Batin Republik Badut (DBRB)*, *Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)*, *Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan (UKdLJ)*, *Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB)*, *Bukan Lawak Senayan (BLS)*.
 - 4) Satir. Teks humor yang termasuk dalam jenis satir, antara lain: *Kinerja Rasa Kosmetika (KRK)*, *Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG)*, *Tahun-tahun Sport Kantong dan Jantung (TSKdJ)*, *Karantina Generasi Republik Badut (KGRB)*, *Andai Gue Jadi*

Gubernur DKI (AGJGDKI), Menunggu Godot yang Datang Codot (MGyDC).

- 5) Sinisme. Teks humor yang termasuk dalam jenis sinisme, antara lain:
Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK).
2. Konstruksi wacana perlawanan dalam buku *Republik Badut* karya Darminto M. Sudarmo dibentuk oleh beberapa aspek yang sejalan dengan pola analisis wacana kritis Norman Fairclough, yakni: representasi, relasi, identitas, intertekstualitas, praktik wacana (*discourse practice*), serta praktik sosial budaya (*sociocultural practice*) yang kesemuanya ditampilkan dan digambarkan dengan pola susunan sedemikian rupa untuk menyuarakan gagasan Darminto M. Sudarmo. Betapa pun baik suatu pemikiran, tapi jika salah dalam mengomunikasikan maka kebaikan itu tidak akan bisa diterima meskipun benar. Maka bahasa pun harus dipilih secara sesuai. Darminto merupakan sosok yang telah lama berkecimpung dalam dunia komik dan humor. Maka Darminto termasuk salah satu orang yang memiliki peran dalam hidupnya humor di Indonesia. Humor adalah cara yang diambil Darminto untuk mengomunikasikan gagasannya, menyuarakan ideologi perlawanannya terhadap ketidakadilan, ketimpangan, dan kecurangan yang ia rasakan. Konstruksi wacana perlawanan Darminto M. Sudarmo disampaikan dalam beberapa cara sebagai berikut.
 - a. Darminto M. Sudarmo mengekspresikan kritik sosialnya terhadap ketidakadilan, ketimpangan, dan kecurangan yang ia rasakan dalam bentuk

humor serta menyuguhkan fakta-fakta aktual yang tak terelakkan dan sulit dibantah oleh Negeri Indonesia.

- b. Menggunakan diksi sederhana dan populer sehingga mudah dipahami oleh khalayak pembaca.
 - c. Menyampaikan keadaan politik di Indonesia dalam sudut pandang Darminto M. Sudarmo untuk menggiring khalayak pembaca kepada ideologi yang diusungnya dengan menyertakan sumber berita, peristiwa konkret dan penalaran yang runut
 - d. Menyampaikan isu politik dan kasus kebangsaan mutakhir pada saat itu sebagai strategi untuk membuka akses bagi khalayak pembaca untuk ambil bagian dan memberi pemahaman lebih kepada khalayak pembaca terkait kasus yang dibicarakan.
 - e. Menyampaikan dengan bahasa tulis yang memiliki kelebihan dalam kekekalan dibanding dengan menggunakan bahasa lisan.
3. Ada enam aspek ideologi perlawanan yang disuarakan oleh Darminto M. Sudarmo dalam buku *Republik Badut*, antara lain:
 - a. Perlawanan terhadap kejahatan dan kecurangan (korupsi). Perlawanan ini dilakukan dengan cara *nglulu*, yang menyebut Republik Badut sebagai negeri main-main, sehingga masyarakat membolehkan para elit penguasanya melakukan korupsi sesuka hati. Ada tujuh teks artikel humor politik yang mengandung semangat perlawanan terhadap kejahatan dan kecurangan (korupsi) negara: *Dunia Batin Republik Badut (DBRB)*, *Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL)*, *Tahun-tahun Sport*

Kantong dan Jantung (TSKdJ), Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP), Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB), dan Karantina Generasi Republik Badut (KGRB).

- b. Perlawanannya terhadap para elit penguasa. Kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan dari para elit penguasa memunculkan ketidakpuasan dan kebencian publik kepada penguasa. Ada lima teks artikel humor politik yang mengandung semangat perlawanannya terhadap elit penguasa dan tindak represif: *Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)*, *Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB)*, *Anomali Komunikasi Rakyat Aparat (AKRA)*, *Melancang ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK)*, dan *Bukan Lawak Senayan (BLS)*.
- c. Perlawanannya terhadap tindak represif. Ketidakpatuhan kepada kebijakan yang merugikan berbeda dengan ketidakpatuhan kriminal. Yang pertama untuk menjaga martabat manusia dan yang kedua menebar nestapa. Pada *Republik Badut* tindak represif para aparatus negara salah satunya digambarkan pada teks artikel humor politik *Anomali Komunikasi Rakyat Aparat (AKRA)*.
- d. Perlawanannya terhadap retorika para politisi. Retorika yang menawan dan serangkaian rencana ketika kampanye tidak akan ada artinya jika pelakunya tidak memiliki daya sensitivitas tinggi terhadap rakyat, sehingga tidak dapat mengetahui denyut napas rakyat. Perlawanannya itulah yang coba disuarakan Darminto M. Sudarmo kepada khalayak pembaca melalui 8 teks artikel humor politik dengan terhadap retorika para

politisi: *Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP), Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL), Tahun-tahun Sport Kantong dan Jantung (TSKdJ), Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan (UKdLJ), Awas Janji-jani Gombal Mukiy (AJGM), Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB), Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK), Menunggu Godot yang Datang Codot (MGyDC)*.

Perlawanan terhadap pencitraan presiden. Perlawanan tersembunyi yang dilakukan Darminto terhadap pencitraan presiden ditemukan pada empat teks humor: *Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG), Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB), Bukan Lawak Senayan (BLS), Karantina Generasi Republik Badut (KGRB)*.

- e. Penyatuan gagasan senasib sepenanggungan dari kaum proletar. Kaum proletar yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat pekerja semata, melainkan seluruh kelompok masyarakat yang termarginalkan dari suatu kelas sosial. Hampir setiap artikel humor politik Darminto M. Sudarmo mengandung unsur pembelaan terhadap kaum proletar. Ada 8 artikel yang paling menonjolkan sisi pembelaan Darminto M. Sudarmo terhadap kaum proletar: *UKdLJ, HPKG, PPPL, TSKdJ, AJGM, MRCdB, MKNBK*, dan *AGJDKI*.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan maka ditemukan implikasi berupa informasi bahwa untuk memahami ideologi yang

terkandung dalam sebuah wacana maka tidak cukup hanya melakukan analisis teks secara linguistik saja, melainkan diperlukan analisis lain seperti analisis praktik kewacanaan dan analisis sosial budaya yang melingkupi teks tersebut. Hal itu dirangkum oleh Norman Fairclough dalam teori analisis wacana kritis dengan pendekatan kritis, sehingga dapat difungsikan dalam kepentingan interaksi sosial dengan komunikasi yang baik dan mengena.

Analisis wacana kritis dalam penelitian ini adalah teori yang memanyungi beberapa teori atau konsep yang lebih sederhana yang sifatnya turunan, seperti wacana tulis, wacana kelas, wacana di luar kelas, dan lain sebagainya. Kemampuan berkomuniaksi secara kritis-kreatif dan demokratis dapat digunakan untuk membantu kemampuan berkomunikasi siswa, mahasiswa, atau masyarakat pada umumnya. Juga informasi bagi guru bahasa Indonesia untuk menemukan wacana-wacana kritis dalam kehidupan dan dibawa dalam kelas untuk dikritisi bersama dengan interaksi yang menyenangkan.

Persoalan ideologi perlawanan dalam sebuah wacana hanyalah satu kasus saja untuk menguak sesuatu yang tersembunyi di balik wacana. Namun, pembelajaran bahasa kritis ini akan tetap menyentuh persoalan pendidikan secara nasional. Semuanya tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, perlu perencanaan dan kebijakan yang matang serta profesional.

Oleh karena itu, perlu ada peta perencanaan pembangunan nasional dan pendidikan pada khusunya. Sehingga pendidikan nasional seyogyanya melatih masyarakat berbahasa sejak dini secara kritis, kreatif, demokratis, dan bernalar. Giroux (dalam Denzin & Lincoln, 2009: 172) menegaskan bahwa sekolah bisa

menjadi institusi tempat diajarkannya bentuk-bentuk ilmu pengetahuan, nilai, dan relasi sosial guna mendidik orang-orang muda agar memperoleh pemberdayaan yang kritis, bukannya penakhlukkan.

Melalui adanya penelitian mengenai ideologi perlawanan dalam bahasa humor politik ini, guru bahasa Indonesia semakin menyadari bahwa bahasa bukan sesuatu yang biasa saja, bahasa merupakan sesuatu yang istimewa ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan perpolitik negeri misalnya. Bahasa dapat membawa pengaruh dan dampak kehidupan sosial yang besar dalam kehidupan bernegara. Kehidupan kenegaraan dan segala tatanan dalam kehidupan ini tak boleh terlepas dari keimanan dan ketakutan kepada Allah, karena Republik Indonesia bukan negara sekularisme atau pun negara hedonisme.

Berpolitik bukan berarti boleh berbuat sekehendak hati. Berpolitik bukan hanya milik para elit penguasa. Berpolitik seyogyanya menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan demi kemashalatan bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemimpin tetapi tanggung jawab semua masyarakat untuk mengawal jalannya kepemimpinan pemerintah. Terlebih guru bahasa Indonesia, yang memiliki tanggung jawab dalam mengajarkan komunikasi yang bermakna sehingga generasi muda dan rakyat menjadi tercerdaskan, memiliki kemampuan berpikir kritis-kreatif sebagai modal dalam pembelajaran komuniaksi akademis.

Khususnya untuk para generasi muda yakni siswa atau pun mahasiswa, calon pemimpin bangsa. Seringkali dikemukakan bahwa pelajaran bahasa Indonesia selama ini terkesan membosankan dan diremehkan. Bekal komunikasi yang baik di depan kelas untuk seorang guru bahasa Indonesia sangat dibutuhkan

untuk membangun interaksi kelas yang demokratis, saling menghormati, dan bernalar. Sehingga tercermin kemudian dalam kehidupan di luar sekolah untuk bersikap demokratis, saling menghormati, berpikir kritis-kreatif, dan tak mudah termakan oleh rayuan, bujukan dan isu-isu politik negeri yang sering kali ditunggangi oleh berbagai kepentingan tertentu.

C. Saran

1. Ideologi perlawanan dari kelompok yang tidak dominan sangat penting untuk diketahui dan diketengahkan, karena biasanya kelompok dominan dalam praktik – praktik sosial dan institusional akan mengontrol kelompok lain dengan menggunakan ideologi mereka sehingga membuat hubungan keduanya tampak natural dan diterima sebagai kebenaran.
2. Suatu teks akan lebih dapat dimaknai kalau menyertakan dimensi konteks sosialnya. Makna tidak intrinsik berada di dalam teks. Seseorang yang membaca suatu teks akan menemukan dan menghadapi pesan dalam teks, tetapi belum dianggap menemukan maknanya.
3. Melawan dengan humor dapat diibaratkan seperti marah dengan wajah tersenyum. Pembunuhan berdarah dingin ialah pembunuhan yang tenang dan tidak mencurigakan. Itulah hubungan antara humor dan perlawanan. Makna hubungan ini dianjurkan agar dapat lebih dieksplisitkan kepada para penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anjuran ini sangat terlihat layak, karena manusia sudah terbiasa dengan humor dan bangsa Indonesia terbiasa dengan kepribadian tradisionalnya yang tidak suka dikritik secara

langsung. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan dunia sosial termasuk hubungan-hubungan sosial yang melibatkan masyarakat dan para penguasa yang senjang dengan memberikan kontribusi kepada perubahan sosial di sepanjang garis kekuasaan yang tidak menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Chaedar Alwasilah. (2002). *Pokoknya Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Agus Salim. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Al Sawi, I. M. (2015). A Multimodal Analysis of The Representation of The Egyptian President in Al Ahram Egyptian Newspaper in 2012. *European Scientific Journal*, 192-209.
- Alex Sobur. (2012). *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Althusser, L. (1971). *Ideology and Ideological State Apparatuses*. In L. Althusser (Ed.), *Lenin and Philosophy and other Essays*. New York: Monthly Review Press.
- Althusser, L. (2006). *Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation)*. New York: Blackwell Publishing.
- Amundsen, I. (1999). *Political Corruption: an Introduction to The Issues*. Norway: Michelsen Institute.
- Baechler, J. (2001). *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis*. (Terjemahan Bern Hidayat). Paris: UNESCO. (Buku asli diterbitkan tahun 1995).
- Bardon, A. (2005). *The Philosophy of Humor (In Comedy: A Geographic Historical Guide)*. Wake Forest University: Greenwood Press.
- Baxter, L., & Babbie, E. (2004). *The Basic of Communication Research*. Boston: Wadsworth.
- Bayram, F. (2010). Ideology and Political Discourse: A Critical Discourse Analysis of Erdogan's Political Speech. *Arecls*, 7, 23-40.

- Billig, M. (2002). Freud and The Language of Humour. *Journal of Psychology*, 15, 452-455.
- Bogdan, C. R., & Biklen, K. S. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn and Bacon.
- Brown, G., & Yule, G. (1983). *Discourse Analysis*. New York: Cambridge University Press.
- Camps, B.-F. (2012). *Political Humor as A Confrontational Tool Against The Syrian Regime*. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau.
- Danandjaja, J. (1989). *Humor* (Vol. Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid VI). Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Darminto M. Sudarmo. (2013). *Republik Badut (Negeri Analogi Sejuta Adegan yang Bikin Geli Hati)*. Malang: Beranda.
- Deddy Mulyana. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda Karya.
- Denzin, K. N., & Lincoln, S. Y. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. (Terjemahan Dariyatno, dkk). Thousand Oaks: Sage. (Buku asli diterbitkan tahun 2000).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia.
- Dwi Cahyono Aji. (2008). *Ideologi Gender dalam Rubrik Oh Mama, Oh Papa di Majalah Kartini Kajian Analisis Wacana Kritis*. Tesis magister, tidak diterbitkan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. Harlow: Longman.

- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis*. New York: Longman.
- Fairclough, N. (2003). *Language and Power*. (Terjemahan Indah Rohmani). Harlow: Longman. (Buku asli diterbitkan tahun 1989).
- Forester, J. (2004). Responding to Critical Mements with Humor, Recognition, and Hope. *Negotiation Journal*, 20, 221-237.
- Hart, C. (2010). *Critical Discourse Analysis And Cognitive Science (New Perspectives on Immigration Discourse)*. New York: Palgrave Macmillan.
- He, X. (2015). Contrastive Analysis of Lexical Choice and Ideologies in News Reporting the Same Accidents between Chinese and American Newspaper. *Theory and Practice in Language Studies*, 5, 2356-2366.
- Heri Budianto. (2013). *Pertarungan Politik Kasus Bank Century di Media Massa (Critical Discourse Analysis Pemberitaan Kasus Bank Century di Harian Umum Kompas, Republika, dan Rakyat Merdeka)*. Disertasi doktor, tidak diterbitkan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Holbert, R. (2013). Developing a Normative Approach to Political Satire: An Empirical Perspective. *International Journal of Communication*, 7, 305-323.
- I Dewa Putu Wijana. (1995). *Wacana Kartun dalam Bahasa Indonesia*. Disertasi doktor, tidak diterbitkan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ibnu Hamad. (2004). *Konstruksi Realitas Politik di Media Massa sebuah Study Critical Discourse Analysis Discourse*. Jakarta: Granit.
- Ibnu Hamad. (2005). Lebih Dekat dengan Analisis Wacana. *No.56*, 325-343.
- Johnson, S., & Milani, T. (Eds.). (2010). . *Language Ideologies and Media Discourse*. New York: Continuum.
- Jorgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2007). *Analisis Wacana Teori dan Metode*. (Terjemahan Imam Suyitno, dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- LaMarre, H. (2009). The Irony of Satire: Political Ideology and The Motivation to See What You Want to See in. *The Colbert Report Sage*, 12, 212-231.
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Lincoln, S. Y., & Guba, G. E. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Liu, K. (2012). Humor Styles, Self-Esteem and Subjective Happiness. *Journal of Discovery-SS Student*, 1, 21-41.
- Lovorn, M. (2008). Humor in the Home and in the Classroom: The Benefits of Laughing While We Learn. *Journal of Education and Human Development*, 2, 1-12.
- Martin, A. (2007). *The Psychology of Humor: An Integrative Approach*. Burlington: Elsevier Academic Press.
- McIlheran, J. (2006). The Use of Humor in Corporate Communication. *Corporate Communications*, 11, 267-274.
- Meyer, J. (2000). Humor as a Double-Edged Sword: Four Function of Humor in Communication. *International Communication Association*, 310-331.
- Mulyana. (2005). *Kajian Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Musolff, A., & Jörg , Z. (Eds.). (2009). *Metaphor and Discourse*. New York: Palgrave Macmillan.
- Perret, R. (2016). Librarian Attitudes toward Classroom Humor. *Summer*, 55, 261-266.
- Praptomo Baryadi. (2012). *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Qassim, A. (2006). Arab Political Cartoons. *ARA*, 305, 81-100.

- Rahmanadji, D. (Agustus 2007). Sejarah, Teori, Jenis, dan Fungsi Humor. *Bahasa dan Seni*, Tahun 35, Nomor 2. Diambil pada tanggal 13 Agustus 2016, dari <http://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/Sejarah-Teori-Jenis-dan-Fungsi-Humor.pdf>.
- Rahmatan Idul. (2014). *Representasi Tekstual Praktik-praktik Sosial dalam Pidato Internasional Hasan Rouhani*. Disertasi doktor, tidak diterbitkan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ridanpää, J. (2014). Politics of Literary Humour and Contested Narrative Identity (of A Region With No Identity). *Sage*, 21 (4), 711-726.
- Romero, E., & Cruthirds, K. (2006). The Use of Humor in The Workplace. *Academy of Management Perspectives*, 20, 58-69.
- Sani, I., Abdullah, M., & Ali, A. (2012). The Role of Humor in the Construction of Satire in Nigerian Political Cartoons. *Journal of Communication and Media Technologies*, 2, 148-165.
- Seno Gumira Ajidarma. (2012). *Antara Tawa dan Bahaya (Kartun dalam Politik Humor)*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutton, R.-S., & Jo Napoli, D. (2012). Deaf Jokes and Sign Language Humor. *Journal of Humor*, 25, 311-337.
- Syamsuddin Haris. (2014). *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tapley, R. (2007). The Value of Humor. *Departement of Philosophy, History & Politics*, 40, 421-431.
- Teubert, W. (2010). *Meaning, Discourse and Society*. New York: Cambridge University Press.

- Thomas, L., & Shan, W. (2007). *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*. (Terjemahan Sunoto, dkk). New York: Routledge. (Buku asli diterbitkan tahun 1999).
- Thompson, J. B. (1984). *Studies in the Theory of Ideology*. Los Angeles: University of California Press.
- Thompson, J. B. (2003). *Analisis Ideologi Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. (Terjemahan Haqqul Yaqin). Berkeley: University of California Press. (Buku asli diterbitkan tahun 1984).
- Timur Mahardika. (2000). *Gerakan Massa Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Titscher, S. (2009). *Metode Analisis Teks dan Wacana*. (Terjemahan Gazali, dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Buku asli diterbitkan tahun 2000).
- Tsakona, V., & Diana Elena , P. (Eds.). (2011). *Studies in Political Humour (In Between Political Critique and Public Entertainment)*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Van Dijk, T. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. London: Sage.
- Van Dijk, T. (2000). *Ideology and Discourse (A Multidisciplinary Introduction)*. Barcelona: Pompeu Fabra University.
- Van Dijk, T. (2009). *Society and Discourse (How Social Contexts Influence Text and Talk)*. New York: Cambridge University Press.
- Westwood, R., & Rhodes, C. (2007). *Humour, Work and Organization*. New York: Rouledge.
- Yoce Aliah Darma. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Hasil Penelitian dan Pembahasan

No	Teks	Konstruksi Teks Humor	Wacana Perlawanan*	Ideologi
1.	<i>Dunia Batin Republik Badut (DBRB)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Berfokus pada permainan kognisi yang berada di luar nalar (teori keganjilan). - Jenis humor: ironi 	<ul style="list-style-type: none"> - Republik Badut dijalankan tanpa visi yang jelas, serupa dipimpin oleh para pelawak andalan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlawanan terhadap kejahanatan dan kecurangan (korupsi).
2.	<i>Kinerja Rasa Kosmetika (KRK)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan). - Jenis humor: satir. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Penghargaan World Statesmen Award dari Appeal of Conscience Foundation ACF oleh SBY ditampilkan sebagai penghargaan atas hasil kerjanya yang berupa kosmetika belaka. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlawanan terhadap pencitraan presiden.
3.	<i>Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Berfokus pada permainan kognisi yang berada di luar nalar (teori keganjilan). - Jenis humor: satir 	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden SBY dinilai tidak bijaksana dan tidak adil dalam memandang masalah. - Eskalasi kekerasan dan agresifitas masyarakat yang mencolok dan meluas dikarenakan meniru “kekerasan” penjarahan uang negara oleh elit penguasa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlawanan terhadap pencitraan presiden - Perlawanan terhadap kejahanatan dan kecurangan (korupsi).
4.	<i>Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiap kementerian merupakan kapling mesin dana bagi parpol penguasa maupun koalisi agar diatur membaginya, asal tidak tercipta pres 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlawanan terhadap kejahanatan dan kecurangan (korupsi). - Perlawanan terhadap

		<ul style="list-style-type: none"> - Jenis humor: pelesetan dan ironi 	<p>dan KPK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - para elit penguasa. - Perlawanan terhadap retorika para politisi.
5.	<i>Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengerdilkan pihak lain untuk memperoleh efek tawa (teori superioritas). - Jenis humor: guyon parikenan 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya kasus korupsi dan pemberitaan serba miring tentang parpol menjadikan masyarakat bersikap skeptis dan traumatis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlawanan terhadap kejahatan dan kecurangan (korupsi). - Perlawanan terhadap retorika para politisi.
6.	<i>Tahun-tahun Sport Kantong dan Jantung (TSKdJ)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan). - Jenis humor: sati 	<ul style="list-style-type: none"> - Anas Urbaningrum digambarkan sebagai politisi buruk, sedangkan politisi baik adalah sekelompok politikus yang belum ketahuan kedok dan belangnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlawanan terhadap kejahatan dan kecurangan (korupsi). - Perlawanan terhadap retorika para politisi.
7.	<i>Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan (UKdLJ)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Berfokus pada permainan kognisi yang berada di luar nalar (teori keganjilan). - Jenis humor: ironi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada yang menjamin prosesi pemilihan pemimpin terbebas dari praktik politik uang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyatuan gagasan senasib sepenangggungan dari kaum proletar.
8.	<i>Awas Janji-janji Gombal Mukiyono (AJGM)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan). - Jenis humor: guyon parikenan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa kampanye dikatakan sebagai ekspresi kreativitas untuk menarik perhatian massa dan simpati publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlawanan terhadap retorika para politisi.
9.	<i>Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengerdilkan pihak lain untuk memperoleh efek tawa (teori superioritas). - Jenis humor: ironi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepalsuan sikap pemimpin di balik apa yang ditampakkan selama ini kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlawanan terhadap kejahatan dan kecurangan (korupsi). - Perlawanan terhadap para elit penguasa.

			- Perlawan terhadap retorika para politisi. - Perlawan terhadap pencitraan presiden.
10.	<i>Anomali Komunikasi Rakyat Aparat (AKRA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan). - Jenis humor: guyon parikenan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekesalan dan kemarahan warga masyarakat digambarkan sebagai sesuatu yang layak dilakukan ketika janji yang ditagih dibalas dengan kekerasan oleh aparat kepolisian.
11.	<i>Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan). - Jenis humor: sinisme 	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap koruptif para pemangku negeri sangat salah dan tidak bisa dibenarkan. Segala kinerja KPK hanya sebatas ritual pendataan para pendosa.
12.	<i>Bukan Lawak Senayan (BLS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk memainkan emosional humor (teori bantuan). - Jenis humor: ironi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertunjukan lawak yang sedang laku ialah lawak senayan, setelah sebelumnya lawak istana, kuningan, cikeas, trunojoyo, dan beberapa tempat lain.
13.	<i>Karantina Generasi Republik Badut (KGRB)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Berfokus pada permainan kognisi yang berada di luar nalar (teori keganjilan). - Jenis humor: satir 	<ul style="list-style-type: none"> - Seorang rakyat yang antipati dan bersikap kurang hormat kepada Kanjeng Prabu Republik Badut karena merasa tidak ada yang dapat dicontoh dari para "tetua".
14.	<i>Andai Gue Jadi Gubernur</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketegangan yang dimunculkan dan dihilangkan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Jakarta masih dalam keadaan statis, perubahan yang ada belum dianggap senasib sepe-

<i>DKI (AGJGDKI)</i>	memainkan emosional humor (teori bantuan). - Jenis humor: satir	menjadikan warga makin maju, sejahtera, adil, dan makmur.	nanggungan dari kaum proletar.
15. <i>Menunggu Godot yang Datang Codot</i> (MGyDC)	- Berfokus pada permainan kognisi yang berada di luar nalar (teori keganjilan). - Jenis humor: satir	- Menampilkan Mr. A3 (Adygank, Adygonk, Adygeonha) sebagai politikus di Republik Badut yang egois dan tak punya hati. Hedonisme sebagai pandangan hidup negaranya dan Hedonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negaranya.	- Perlawan terhadap retorika para politisi.

Keterangan

* Teori Analisis Wacana Kritis-Norman Fairclough

Lampiran 2. Kemiripan Keadaan Republik Badut dengan Republik Indonesia

No	Teks	<i>Republik Badut</i>	Republik Indonesia	Keterangan
1.	<i>Dunia Batin Republik Badut (DBRB)</i>	Menceritakan pelawak-pelawak Senayan yang terhormat menggantikan grup lawak Srimulat yang mangkal di Taman Ria, Senayan, Jakarta.	Terdapat grup lawak Srimulat di Indonesia yang mangkal di Taman Ria senayan, Jakarta.	Kesamaan nama, tempat, dan cerita.
2.	<i>Kinerja Rasa Kosmetika (KRK)</i>	Mengomentari penghargaan <i>World Statesmean Award</i> dari Appeal of Conscience Foundation untuk Presiden SBY.	Terjadi kontroversi atas penghargaan <i>World Statesmean Award</i> dari Appeal of Conscience Foundation yang diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.	Kesamaan nama, waktu, tempat, dan cerita.
3.	<i>Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG)</i>	Membahas kasus pembunuhan salah seorang anggota Kopassus AD di sebuah kafe di Yogyakarta oleh kelompok preman serta penyerbuan balas dendam sekelompok orang bersenjata ke LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta.	Terdapat kasus pembunuhan salah seorang anggota Kopassus AD di sebuah kafe di Yogyakarta oleh kelompok preman serta penyerbuan balas dendam sekelompok orang bersenjata ke LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta.	Kesamaan nama, waktu, tempat, dan cerita.
4.	<i>Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)</i>	Menceritakan kasus Ahmad Fathanah terkait kasus korupsi.	Terdapat kasus Ahmad Fathanah terkait kasus korupsi.	Kesamaan nama, waktu, tempat, dan cerita.
5.	<i>Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL)</i>	Republik Badut ialah negara demokrasi.	Republik Indonesia ialah negara demokrasi.	Kesamaan bentuk negara.
6.	<i>Tahun-tahun</i>	Mengisahkan kasus Anas Urbaningrum	Terdapat kasus Anas Urbaningrum	Kesamaan nama,

	<i>Sport Kantong dan Jantung (TSKdJ)</i>	yang tersandung kasus korupsi.	yang tersandung kasus korupsi.	waktu, tempat, dan cerita.
7.	<i>Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan (UKdLJ)</i>	Menceritakan lelang jabatan lurah dan camat yang dilakukan pemprov DKI Jakarta untuk menguji kompetensi jabatan.	Pernah dilakukan lelang jabatan lurah dan camat oleh pemprov DKI Jakarta untuk menguji kompetensi jabatan.	Kesamaan nama, waktu, tempat, dan cerita.
8.	<i>Awas Janji-janji Gombal Mukiyo (AJGM)</i>	“Republik Badut mungkin sebuah republik sungguhan, mungkin hanya metafora, mungkin juga ia negegri yang disebut orang sebagai Indonesia” (AJGM: halaman 88).	Tersebut dalam Republik Badut	Kesamaan nama.
9.	<i>Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB)</i>	Menyebut kasus Munawarman dan Thamrin A. Tamogala.	Terdapat kasus Munawarman dan Thamrin A. Tamogala di Indonesia.	Kesamaan nama dan cerita.
10.	<i>Anomali Komunikasi Rakyat Aparat (AKRA)</i>	Sering terjadi bentrok antara masa dan polisi.	Sering terjadi bentrok antara masa dan polisi.	Kesamaan karakter dan cerita.
11.	<i>Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK)</i>	Memiliki tim pemberantasan korupsi yang bernama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).	Memiliki tim pemberantasan korupsi yang bernama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).	Kesamaan nama dan cerita.
12.	<i>Bukan Lawak Senayan (BLS)</i>	Menceritakan kasus yang menimpa Butet Kertaredjasa setelah membawakan monolog <i>Deklarasi Pemilu Damai 2009</i> pada Rabu malam, 10 Juni 2009.	Terjadi kasus yang menimpa Butet Kertaredjasa setelah membawakan monolog <i>Deklarasi Pemilu Damai 2009</i> pada Rabu malam, 10 Juni	Kesamaan nama, karakter, waktu, tempat, dan cerita.

			2009.	
13.	<i>Karantina Generasi Republik Badut (KGRB)</i>	Kanjeng Prabu Presiden Republik Badut ialah penulis lagu dan pernah meluncurkan album.	Mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pernah menulis lagu dan meluncurkan sebuah album.	Kesamaan tokoh, karakter, dan cerita.
14.	<i>Andai Gue Jadi Gubernur DKI (AGJGDKI)</i>	Calon pilgub DKI 2012 di Republik Badut ialah seorang putra Betawi dengan <i>style</i> yang khas dan tanpa beban.	Calon pilgub DKI 2012 di Republik Indonesia ialah seorang putra Betawi dengan <i>style</i> yang khas dan tanpa beban, Jokowi.	Kesamaan tokoh, karakter, dan cerita.
15.	<i>Menunggu Godot yang Datang Codot (MGyDC)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyandingkan pandangan hidup Republik Badut, yakni “hedonisme” dengan pandangan hidup Republik Indonesia, yakni pancasila. - Menyebut Republik Badut sebagai Republik Hedonesia Raya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Republik Indonesia biasa disebut oleh masyarakat Indonesia sebagai Indonesia Raya, seperti lagu kebangsaan negara. 	Kesamaan nama dan karakter.

Lampiran 3. Konstruksi Wacana Perlawanan

No	Humor	Analisis Teks *	Wacana Perlawanan
1.	<i>Dunia Batin Republik Badut (DBRB)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan sikap-sikap negatif para penguasa negeri yang merugikan rakyat (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan elit penguasa sebagai penindas dan rakyat sebagai yang ditindas (relasi). - Khalayak pembaca dan Darminto mengidentifikasikan dirinya dalam teks pada posisi rakyat, bukan pada posisi elit penguasa (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Republik Badut dijalankan tanpa visi yang jelas, serupa dipimpin oleh para pelawak andalan.
2.	<i>Kinerja Rasa Kosmetika (KRK)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan sikap Presiden SBY yang telah mencedera kehidupan bangsa (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan Presiden SBY dan rakyat sebagai dua pihak yang bertolak belakang (relasi). - Khalayak pembaca dan Darminto mengidentifikasikan dirinya dalam teks pada posisi rakyat, bukan pada posisi Presiden SBY (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Penghargaan World Statesmen Award dari Appeal of Conscience Foundation ACF oleh SBY ditampilkan sebagai penghargaan atas hasil kerjanya yang berupa kosmetika belaka.
3.	<i>Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan betapa buruknya keadaan Republik Badut yang disebabkan oleh buruknya sikap para elit penguasa (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan elit penguasa dan rakyat sebagai dua pihak yang bertolak belakang (relasi). - Khalayak pembaca dan Darminto mengidentifikasikan dirinya dalam teks pada posisi rakyat, bukan posisi elit penguasa (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Presiden SBY dinilai tidak bijaksana dan tidak adil dalam memandang masalah. - Eskalasi kekerasan dan agresifitas masyarakat yang mencolok dan meluas dikarenakan meniru “kekerasan” penjarahan uang negara oleh elit penguasa.
4.	<i>Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan kementerian sebagai kapling mesin dana (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan para politisi dan rakyat adalah dua pihak yang bertolak belakang (relasi). - Para politisi ditampilkan dan digambarkan dalam teks sebagai musuh bersama (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiap kementerian merupakan kapling mesin dana bagi parpol penguasa maupun koalisi agar diatur membaginya, asal tidak tercium pres dan KPK.
5.	<i>Panik-Paranoid Parpol Linglung (PPPL)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan rakyat yang skeptis terhadap pencoblosan dan sikap koruptif parpol (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan parpol dan rakyat adalah dua pihak yang bertolak belakang (relasi). - Menampilkan dan menggambarkan parpol, pemerintah, dan negara sebagai pihak 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya kasus korupsi dan pemberitaan serba miring tentang parpol menjadikan masyarakat bersikap skeptis dan traumatis.

		yang paling bersalah dalam penderitaan yang dialami rakyat kecil (identitas).	
6.	<i>Tahun-tahun Sport Kantong dan Jantung (TSKdJ)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan sikap koruptif para politisi (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan jarak yang dibuat antara rakyat dengan para politisi (relasi). - Politisi buruk diidentifikasi sebagai musuh bersama, bukan hanya sebagai pihak yang ditentang oleh penulis secara pribadi (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Anas Urbaningrum digambarkan sebagai politisi buruk, sedangkan politisi baik adalah sekelompok politikus yang belum ketahuan kedok dan belangnya.
7.	<i>Uji Kompetensi dalam Lelang Jabatan (UKdLJ)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan penerapan lelang jabatan dan pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakat (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan hubungan rakyat dan pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban pada pihak yang lain dalam hal memberikan kesejahteraan (relasi). - Menampilkan dan menggambarkan identitas penulis, rakyat, dan khalayak pembaca sebagai pihak-pihak dengan gagasan dan tujuan yang sama (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada yang menjamin prosesi pemilihan pemimpin terbebas dari praktik politik uang.
8.	<i>Awas Janji-janji Gombal Mukiyoo (AJGM)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan retorika saat kampanye sebagai sesuatu yang tak bermakna dan tidak sungguh-sungguh (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan Darminto, rakyat, dan khalayak pembaca berada pada satu pihak yang sama, serta parpol adalah pihak lain yang ditentangnya (relasi). - Darminto mengidentifikasi diri sebagai bagian dari rakyat yang ditampilkan dan digambarkan bertentangan dengan parpol (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahasa kampanye dikatakan sebagai ekspresi kreativitas untuk menarik perhatian massa dan simpati publik.
9.	<i>Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat (MRCdB)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan kepalsuan sikap pemimpin di depan rakyatnya (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan hubungan yang tidak baik antara pemerintah dan rakyatnya (relasi). - Pemerintah diidentifikasi sebagai pihak yang sering melakukan politik uang, suka mengintimidasi, ingkar dan menyalahgunakan kekuasaan (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepalsuan sikap pemimpin di balik apa yang ditampakkan selama ini kepada masyarakat.
10.	<i>Anomali Komunikasi Rakyat Aparat (AKRA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan tindak represif aparat kepolisian terhadap rakyat demi melindungi kepala daerah yang ingkar janji (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan hubungan kepala daerah-polisi dengan rakyat yang saling bertikai (relasi). - Pihak-pihak yang menghalangi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat diidentifikasi sebagai musuh rakyat dan musuh bersama, termasuk kepala daerah dan polisi (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekesalan dan kemarahan warga masyarakat digambarkan sebagai sesuatu yang layak dilakukan ketika janji yang ditagih dibalas dengan kekerasan oleh aparat kepolisian.

11. <i>Melancang ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MKNBK)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan fenomena korupsi yang menyebabkan bangunan negeri hampir roboh (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan ketidakrukuhan hubungan para pemangku negeri dan rakyat (relasi). - Para politisi dan pejabat publik ialah para pemangku negeri yang diidentifikasi sebagai pihak yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat untuk menyalurkan syahwat personal dan komunal terhadap kekayaan dan kekuasaan (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap koruptif para pemangku negeri sangat salah dan tidak bisa dibenarkan. Segala kinerja KPK hanya sebatas ritual pendataan para pendosa.
12. <i>Bukan Lawak Senayan (BLS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan kelucuan dan keganjilan-keganjilan sikap sejumlah politisi dan pejabat publik (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan para politisi dan pejabat publik berada dalam satu pihak yang sama, dan rakyat berada di pihak lain (relasi). - Khalayak pembaca ditempatkan pada posisi rakyat, sedangkan politisi dan pejabat publik ditempatkan musuh bersama (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertunjukan lawak yang sedang laku ialah lawak senayan, setelah sebelumnya lawak istana, kuningan, cikeas, trunojoyo, dan beberapa tempat lain.
13. <i>Karantina Generasi Republik Badut (KGRB)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan seorang presiden yang bingung dan gelisah dengan negerinya yang berada di bibir jurang (represenasi). - Menampilkan dan menggambarkan Darminto yang antipati terhadap Presiden Republik Badut (relasi). - Darminto diidentifikasi dalam teks sebagai pihak yang menginginkan presiden mundur dari jabatannya (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Rakyat yang antipati dan bersikap kurang hormat kepada Kanjeng Prabu Republik Badut karena merasa tidak ada yang dapat dicontoh dari para “tetua”.
14. <i>Andai Gue Jadi Gubernur DKI (AGJGDKI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan ide Bang Ode andai dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan hubungan pewawancara dan Bang Odi sebagai pihak yang mendukung siapapun calon Gubernur DKI yang membela rakyat dan bertanggung jawab (relasi). - Khalayak pembaca diposisikan agar berempati pada kesejahteraan rakyat Jakarta, dan berwaspada terhadap janji perubahan calon gubernur (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Jakarta masih dalam keadaan statis, perubahan yang ada belum dianggap menjadikan warga makin maju, sejahtera, adil, dan makmur.
15. <i>Menunggu Godot yang Datang Codot (MGyDC)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan dan menggambarkan sikap-sikap buruk politikus yang dianggapnya sebagai sesuatu yang lumrah dan justru membanggakan (representasi). - Menampilkan dan menggambarkan politisi, eksekutif, yudikatif, dan pers sebagai pihak yang bertolak belakang dengan rakyat (relasi). - Mr. A3 diidentifikasi sebagai seorang politikus yang egois dan tak punya hati nurani, seorang politikus yang busuk dan jahat (identitas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Menampilkan Mr. A3 (Adygank, Adygonk, Adygeonha) sebagai politikus di Republik Badut yang egois dan tak punya hati. Hedonisme sebagai pandangan hidup negaranya dan Hedonesia Raya sebagai sebutan negaranya.

Lampiran 4. Korpus Data

No	Judul Humor	Teori dan Jenis Humor	Data dan Kode Data
1.	Dunia Batin Republik Badut (DBRB)	- Teori keganjilan - ironi	<p>Korupsi/DBRB/I/1 Di Republik Badut tidak ada kata benar atau salah yang ada adalah lucu atau tidak lucu. Itu moralitas dasar sekaligus ideologi yang menjadi pijakan seluruh ekspresi para pemangku negeri tersebut. Kondisi itu sangat paralel dengan sepak terjang para elit penguasa, yang merasa nyaman-nyaman saja kendati perilaku mereka sangat koruptif dan jauh dari harapan masyarakat. <i>/DBRB/II/1</i></p> <p>Parlemen yang penuh anomali, eksekutif yang serba ambigu, dan yudikatif yang awut-awutan, tidak perlu masyarakat merisaukannya, karena tak ada yang salah dan benar di sana. Skandal demi skandal hilang timbul tanpa ada kejelasan. Konspirasi demi konspirasi diciptakan untuk mengalihkan perhatian. Isu demi isu datang dan pergi seenak hati. Semua itu jelas membuktikan bahwa republik ini bergerak tanpa visi. Maka tidak perlu heran bila kita semua bertanya, “<i>Akan dibawa ke mana sebenarnya negeri ini?</i>” <i>DBRB/III/1-2</i></p> <p>Seperti namanya, republik ini diselenggarakan oleh “pelawak-pelawak” andalan. Pelawak dalam konteks ini, berbeda sekali maknanya dengan pelawak sungguhan yang sering Anda tonton di TV. Mereka orang-orang pilihan dan sangat berpengalaman. Mereka ahli menghibur dan mengobati duka lara masyarakatnya. Mereka mahir menciptakan lelucon segar, bernyanyi dan bermain kata. Mereka tangkas beretorika, memoles citra dan tampil penuh pesona. Mereka terus membangun kharisma. Mereka sangat terlatih berbicara tentang apa saja. Tak penting soal benar dan salahnya. Tak penting soal bohong dan kenyataannya. Tak penting rakyat sejahtera atau sengsara. Tugas mereka adalah menghibur semata.</p>

		<p><i>DBRB/IV/3</i></p> <p>Jadi kalau ada orang bilang mereka pelawak Senayan atau Medan Merdeka Utara, terserah saja apa kata orang-orang tersebut. Kasus grup lawak Srimulat yang semula solid mangkal di Taman Ria Senayan, Jakarta, tiba-tiba cabut secara terburu-buru dan pindah ke tempat lain, sebabnya sudah jelas dan semua orang tahu, bahwa eksistensi mereka kalah lucu dari pelawak-pelawak Senayan yang terhormat itu. Ternyata momentum itu jadi keterusan hingga kini, tahun 2013, dan bukan tak mungkin, tahun-tahun sesudahnya. Bahkan, fakta yang sulit dibantah akurasinya itu semakin terbukti dengan munculnya fenomena pelawak-pelawak sungguhan yang merasa perlu mem “bait” diri dan bergabung sebagai penghuni Senayan untuk dapat legitimasi sebagai pelawak sukses dan berjaya. Supaya merasa <i>afadol</i> dan <i>sahih</i>.</p> <p><i>DBRB/V/2</i></p> <p>Republik Badut adalah negeri main-main, bukan sungguhan. Negeri yang serba membolehkan. Boleh korupsi sesuka hati. Boleh kolusi sampai mati. Boleh nepotisme asal orang sendiri. Orang-orang penting di negeri ini harus bergaji tinggi, mendapat tunjangan mencengangkan. Mendapat fasilitas tak terbatas. Para pejabat harus tampil hebat. Saat bicara harus tegak dan gagah. Saat bepergian harus naik mobil mewah dan elegan. Jangan risaukan negara merana. Jangan pedulikan apa saja kata media. Apalagi komentar tukang kritik yang sebenarnya sirik.</p> <p><i>DBRB/VI/2-3</i></p> <p>Rakyat Republik Badut harus mandiri dan tahu diri. Mau sengsara atau sejahtera semua pilihan tersedia. Lewat depan, samping atau pintu belakang, siapa yang melarang? Kalah bersaing jangan lalu main tuding. Neolib atau neokolonialisme, itu hanya komentar orang-orang gatal. Kompetisi, kalah menang tanggung sendiri. Tidak ada proteksi, tidak ada intervensi. Rakyat melarat, anggaplah itu kodrat. Rakyat sejahtera, anggaplah itu fakta. Rakyat tak perlu ikut-ikutan berpolitik, sudah ada yang mengurus. Tidak perlu protes dan demo turun ke jalan, bikin macet dan rusak pemandangan. Baik-baik saja bekerja, pulang ke rumah sejenak istirahat, para</p>
--	--	---

		<p>pemangku negeri Republik Badut telah siap dengan segudang hiburan.</p> <p><i>DBRB/VII/3</i></p> <p>Ini salah satu gambaran hiburan yang diproyeksi dalam batin dan bayangan masa depan Republik Badut, ketika masa-masa itu tiba pada waktunya.</p> <p>Syahdan, pada tahun 2500, di alam baka terjadi peristiwa yang tak seperti biasanya. Tampak di depan pintu akhirat , dua malaikat dengan wajah berseri menyambut kedatangan arwah para presiden dari berbagai negara di dunia. Terlihat dalam rombongan itu sejumlah presiden dari negara Amerika, Asia, Eropa dan Afrika; tentu saja, dari Republik Badut juga termasuk salah satu diantaranya.</p> <p><i>DBRB/VIII/4</i></p> <p>Setelah sejumlah upacara dilangsungkan, arwah Lincoln mendapat giliran pertama maju. Dengan sigap kedua malaikat itu berdiri menyambut kedatangannya, menyalami dengan hangat damm mempersilakan Lincoln masuk ke dalam. Selanjutnya presiden-presiden lain juga mendapat giliran serupa. Seperti misalnya John F. Kennedy, Bush, Carter, Nixon, Clinton, Nelson Mandella, dan lain-lain. Ketika giliran Presiden Republik Badut tiba, terlihat hanya satu malaikat yang berdiri menyambut kedatangannya. Sedangkan malaikat lainnya tampak duduk di kursi dan menatap Presiden Republik Badut dengan wajah agak cemas. Setelah presiden itu masuk ke dalam, salah satu malaikat bertanya dengan heran.</p> <p>“Heran, kenapa kamu duduk dengan wajah pucat sambil memegang kursi begitu erat?”</p> <p>“Ah kau seperti tak tahu saja. Aku tadi memang sangat khawatir, soalnya takut kalau kursi milikku satu-satunya ini juga di-<i>embat</i>.</p> <p><i>DBRB/IX/4</i></p> <p>Pertanyaannya siapakah Presiden Republik Badut yang <i>cinta banget sama</i> jabatan? Betul sekali. Anda memang lebih tahu dari orang-orang yang ada di sekitar Anda. Bahkan lebih mengerti daripada penulisnya sendiri.</p> <p><i>DBRB/X/5</i></p>
--	--	---

			Begitulah, dunia batin Republik Badut. Idealisme dan visi negeri yang kinclong; mau serba enak, serba benar sendiri. Negeri dengan konstitusi seksi, pandangan hidup pop, dan filosofi <i>metal</i> ; artinya, tidak mengenal kata salah atau benar. Pendek kata, begitulah negeri <i>alay</i> . Sublim dan <i>unpredictable</i> .
2.	Kinerja Rasa Kosmetika (KRK)	- Teori bantuan - satir	<p>Pencitraan/<i>KRK/I/14</i> Menurut Dino Patti Djalal (Kompas, 21 Mei 2013), Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat dan mantan juru bicara Presiden RI, buka republik Badut, pada akhir Mei 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan menerima penghargaan Sorild Statesmen Award dari Appeal of Conscience Foundation; suatu yayasan antar agama bergengsi di Amerika Serikat. Itu hanya salah satu penghargaan, sebekumnya Presiden SBY telah sering ment for Democracy, US-ASEAN Business Council, dan WWF/WRI/TNC. Kalau di antara Anda ada yang belum paham lembaga semacam apa pemberi penghargaan itu, konsultasi saja ke mesin pencari data dan informasi “professor” Google. Kalau caranya benar dan proposional, Anda seharusnya tidak perlu kecewa. Kalau jawaban yang Anda terima dalam bahas yang kurang Anda pahami, sudah tersedia halaman penerjemahan. <i>Enak, to? Asyik, to?</i> Kata Mbah Surip almarhum.</p> <p><i>KRK/II/15</i> Karena peristiwa itu terjadi di Republik Indonesia, kia serahkan saja bagaimana rakyat Indonesia menyikapinya. Dino tampaknya menanggapi reaksi beragam dari masyarakat dengan santai. Peristiwa seperti itu dianggapnya tidak terlalu luar biasa, apalagi untuk Presiden SBY yang sudah terbiasa menerima penghargaan internasional. Dino bahkan mengutip pernyataan sikap Jusuf Kalla yang sangat diplomatis, “Penghargaan ACF untuk Presiden SBY itu sebenarnya adalah kredit untuk bangsa Indonesia”.</p> <p><i>KRK/III/15</i> Reaksi keras berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai kasus intimidasi, kekerasan, dan pembunuhan, terhadap kelompok minoritas keagamaan</p>

		<p>mencederai kehidupan bangsa beberapa tahun terakhir. Tidakkah fakta-fakta itu mampu menyulut nurani dan pertimbangan Presiden SBY untuk menolak secara halus pemberian penghargaan itu demi menjaga perasaan bangsa Indonesia. Konon beberapa tokoh penting juga menyuarakan penolakan; salah satu di antaranya adalah rohaniwan dan Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, Franz Magnis Suseno SJ, mengirim protes tertulis lewat surat elektronik ke ACF. “Penghargaan itu menghina kelompok-kelompok minoritas yang selama ini menjadi korban kekerasan.” Belum ada respon resmi dari ACF. Namun, seperti yang sudah-sudah, masyarakat selalu dapat menebak bagaimana sikap akhir Presiden SBY yang mengulur keadaan dengan keheningan. Para pemrotes seperti berkomunikasi dengan angin, senyap. Salah satu pojok dari media nasional menohok situasi imun dan beku itu dengan sindiran yang menyengat, “rezeki, kok, ditolak!”.</p> <p>KRK/IV/16</p> <p>Andai itu terjadi di Republik Badut, masyarakat tentu akan merespon dengan cara yang unik dan beda. Tidak pakai protes-protesan. Tidak pakai marah-marahan. Paling tidak mereka akan menyarankan agar penghargaan itu diberikan saja ke seorang pejuang pluralisme, toleransi antarumat beragama, yaitu Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid). Karena beliau sudah meninggal maka untuk kepribadian itu dapat diwakilkan pada salah seorang keluarganya; misalkan Yenny Wahid. Atau kalau anjuran itu tak membuat kepekaan rasa Kanjeng Prabu Presiden rela hati menyerahkannya, ya apa boleh buat. Rakyat cukup membiarkannya saja. Tidak perlu mendukung, tidak perlu melarang. Bahkan kalau perlu tidak usah ada berita atau wacana tentang itu. Biarkan keadaan merespon dengan senyap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sepulang dari menerima penghargaan pemangku negeri yang sudah merasa sangat bangga pada “prestasi” dan “kinerja” nya akan <i>shock</i> bukan kepalang! Pemangku negeri yang sering disebut Kanjeng Prabu Presiden akan sangat marah, “Bagaimana bisa begini? Tidak ada pers meliput, tidak ada sambutan dan penghargaan. Apa semua pada <i>budeg</i> dan buta, ini penghargaan internasional yang sangat bergengsi, lho!” Tetapi sayang</p>
--	--	--

			<p>disayang, kejengkelan itu kurang mendapat sambutan. Kurang ada yang tertarik mewacanakannya.</p> <p><i>KRK/V/16</i></p> <p>Begitulah. Lain ladang lain belalang. Lain lubuk lain ikannya. Masyarakat Republik Badut selalu punya cara untuk mengimbangi situasi yang bagaimana pun sublimnya. Tidak gampang kagetan, tidak gampang <i>gumunan</i>, karena mereka sudah menyadari sekian lama hidup dalam Badut!</p>
3.	<p><i>Hiburan Politik Kemasan Gosip (HPKG)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori Keganjilan - Satir 	<p>Pencitraan/<i>HPKG/I/17-18</i></p> <p>Nah, kini saatnya kita menyimak hiburan-hiburan dari Republik Badut. Ada sekelompok masyarakat – Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) – yang rajin mengingatkan pemangku negeri menjelang akhir jabatannya dimanfaatkan dengan baik untuk fokus menyelesaikan berbagai persoalan negeri yang masih menggantung. Maksudnya tentu saja supaya waktu yang tinggal sedikit itu tidak banyak terganggu oleh urusan internal pribadi maupun internal partainya seperti: fakta integritas, misalnya dan banyak lagi lainnya urusan-urusan yang tidak porsional dan proposisional untuk kapasitas dirinya. Bukankah itu sebuah <i>good will</i> yang simpatik? Sangat mudah ditebak apa yang menjadi harapan MKRI, agar beliau meletakkan jabatannya sebagai presiden, dapat meninggalkan kenangan yang bersih, indah, dan <i>memorable</i>. Bukankah cara MKRI menyatakan kepedua liannya kepada sang pemangku negeri cukup santun dan terus terang?</p> <p>Bahkan untuk membuat peristiwa itu layak menjadi catatan sejarah mereka akan merayakan momentum itu dengan mendatangkan ribuan massa turun ke jalan, beramai-ramai menyapa pemimpin mereka. Mengapa mereka justru dituduh akan melakukan kudeta? Dengan apa? Mereka tidak bersenjata, tidak ada kelompok bersenjata di belakang mereka. Lagi pula kalau mau melakukan kudeta, mengapa mereka harus memberitahu terlebih dahulu, alangkah tidak masuk akal gerakan politik seperti itu. Imajinasi berlebihan, sungguh dapat merusak hati dan pikiran.</p> <p><i>HPKG/II/18</i></p>

		<p>Di republik ini juga memiliki fenomena unik, terebutlah sebuah partai politik yang tampak sangat gigih menepis dan menolak banjirnya perhatian masyarakat dari luar partai intinya mereka tak ingin diusik oleh pemerhati maupun media karena mereka merasa itu urusan rumah tangganya sendiri padahal semua tahu, partai itu berskala nasional dan menjadi bagian dari seluruh rakyat negeri tersebut. Logika yang ambigu mereka pikir elektabilitas partai itu datang dari mana? Dari dunia gaib?</p> <p><i>HPKG/III/18</i></p> <p>Ketika melakukan kongres luar biasa, arah angin yang ditiupkan partai penguasa ini juga lucu tak mau ke depan, tetapi justru balik lagi ke semangat paternalistik sehingga kaderisasi sama sekali tidak pernah terjadi. Lebih uniknya lagi, ketua umumnya dipilih dari sang pendiri partai yang saat itu sudah nyaman jadi presiden. Semua orang mengarah ke ketua umum partai agar kelak punya kans jadi presiden. Ini sudah jadi presiden malah diarahkan untuk jadi ketua umum.</p> <p><i>HPKG/IV/18-19</i></p> <p>Makin unik lagi, sang presiden yang sebelumnya tampak gencar mencecar menteri-menterinya yang merangkap jabatan supaya mengundurkan diri fakta yang kemudian terjadi justru membuat <i>cingak</i> kita semua, tanpa merasa risau dia sendiri memberi contoh presiden yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Agar tidak terlalu mencolok mata, dia juga memilih dua menterinya (orang sendiri) supaya merangkap jabatan tanpa mempedulikan menteri-menteri yang pernah dicecaranya. Republik Badut benar-benar kaya aksen dan sabetan.</p> <p><i>HPKG/V/19</i></p> <p>Sebenarnya dalam norma kepatutan umum, etika dan moralitas politik dalam aturan mainnya harus berada di garis dan jalur ideal, tanpa perlu ada catatan dan kilah dalih personal yang sewaktu-waktu dapat berubah. Republik Badut memang ditempati orang-orang yang sesuai dengan filosofi negerinya; tidak ada urusannya dengan salah dan benar.</p> <p><i>HPKG/VI/19</i></p>
--	--	---

		<p>Beberapa waktu lalu di negeri yang dikenal kreatif dan banyak kejutannya ini pernah beredar rumor akan adanya penyesuaian nilai uang dari 1000 perak menjadi satu perak. Rekomendasi, istilah mereka. Dengan pertimbangan masyarakat yang kerepotan membawa uang (fisik) banyak tapi bernilai nominal rendah dapat diatasi kesulitannya sehingga menjadi lebih praktis, selain secara prestise terjadi kesejajaran ketika berhadapan dengan mata uang dollar AS atau Euro.</p> <p><i>HPKG/VII/19-20</i></p> <p>Betapa simpelnya logika itu, apakah para elit penguasa dan aristokrat keuangan itu tidak pernah berpikir, bahwa “pengerdilan” nilai uang itu setidaknya pernah terjadi dua kali sebelumnya di republik ini. Yang pertama seribu perak menjadi satu perak. Setelah melewati sejumlah persoalan dan waktu, terjadi kegatalan serupa alasannya bermacam-macam, satu perak hasil pengerdilan itu tak bernilai sakti lagi. Maka setelah terkumpul seribu perak dikerdilkan lagi menjadi satu perak, dengan harapan serupa.</p> <p><i>HPKG/VIII/20</i></p> <p>Bayangkan satu perak yang terjadi di tahun 2013 ini sebenarnya pernah bernilai satu juta perak di zaman dulu. Kalau 1000 perak saat ini dikerdilkan menjadi satu perak, maka satu perak setelah rekomendasi itu berarti bernilai satu miliar di zaman dulu. Betapa malangnya mata uang Republik Badut tersebut. Mustahil para elit penguasa tidak memahami, bahwa kehormatan nilai mata uang bukan ditentukan oleh faktor penyesuaian semu dan emosional semata ada faktor-faktor lain yang lebih penting dan esensial, seperti faktor foundamental, misalnya.</p> <p><i>HPKG/IX/20</i></p> <p>Bukan hanya itu, bagi masyarakat kecil yang ada di desa, penyesuaian itu sudah pasti akan memicu inflasi yang sangat frontal dan telak. Muara dari ke“iseng”an itu hanya akan mendatangkan malapetaka baru bagi rakyat kecil. Sebuah keberuntungan, gagasan yang berorientasi elitis itu tidak menarik bagi banyak kalangan sehingga batal diberlakukan.</p>
--	--	---

		<p><i>HPKG/X/20-21</i></p> <p>Tidak berhenti sampai di sini. Kreativitas lain juga sedang ramai diwacanakan di masyarakat luas; yaitu wacana tentang santet, ilmu gaib, atau kekuatan supranatural jahat dan tak ketinggalan soal kumpul kebo, pornografi, pornoaksi, direncanakan akan dimasukkan menjadi pasal-pasal tambahan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai respon pemangku negeri terhadap banyaknya keluhan masyarakat yang dirugikan oleh penajah jasa gaib tersebut. Pasal-pasal itu rencananya juga dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan perlindungan bagi orang-orang yang berkemungkinan menerima stigma buruk yang kemudian dihakimi masyarakat tanpa melalui proses pembelaan diri, apalagi peradilan.</p> <p><i>HPKG/XI/21</i></p> <p>Sekilas rencana itu menarik Namun, bila direnungkan secara mendalam, pasal-pasal itu juga memiliki efek samping lain yang belum dapat diduga bagaimana bentuknya. Salah satu asumsi yang paling nyata, pasal-pasal itu sangat jelas memiliki daya bunuh pada salah satu warisan budaya nenek moyang. Budaya tradisi yang juga tumbuh subur di berbagai negara maju lainnya. Bagaimana klimaks dari rancangan pasal-pasal ini, mari kita tunggu bersama-sama.</p> <p><i>HPKG/XII/21</i></p> <p>Wacana yang termasuk mengasyikkan untuk diikuti adalah menyimak berita perseteruan antara Adi Bing Slamet dan Eyang Subur. Tidak jelas benar apa latar belakang sengketa mereka, tapi munculnya nama Eyang Subur yang selama ini menyelinap dan hanya dikenal di kalangan artis dan selebritis tertentu sungguh merupakan hiburan yang sangat sayang untuk dilewatkan. Apalagi ketika media infotainment menyuguhkan suasana di dalam rumah Eyang Subur yang penuh benda kristal dan keramik gemerlap, seperti ada nuansa mistis tersendiri. Pro-kontra dari para selebriti yang pernah menjadi “murid” Eyang Subur makin mengundang rasa ingin tahu publik, siapa sebenarnya Eyang Subur itu?</p> <p><i>HPKG/XIII/22</i></p>
--	--	--

		<p>Kalau oleh Adi Bing Slamet, yang pernah menjadi salah satu pengikutnya selama belasan tahun, tiba-tiba lalu mengait-ngaikan praktik Eyang Subur dengan ajaran sesat, terasa sangat lucu. Mungkin praktik Eyang Subur yang disebut sebagai guru spiritual bagi pengikutnya, tak beda seorang psikolog atau konsultan bidang tertentu. Namun, begitulah, masyarakat Republik Badut sangat menyukai hal-hal yang agak menyerempet-nyerempet gaib, klenik, dan sebagainya. Belum jelas juga bagaimana ujungnya. Para tokoh agama juga dilibatkan untuk mendiagnosa praktik si Eyang tersebut, bahkan memberikan fatwa. Pertanyaannya, ada apa dengan Bing Slamet yang telah sekian belas tahun yang telah menjadi pengikut Eyang Subur, mengapa tiba-tiba dan mendadak suntak ia baru tersadar kalau dirinya menjadi salah satu korban dari ajaran Eyang Subur itu dan berteriak-teriak menyuarakan itu ke publik luas? Belasan tahun, sungguh waktu yang sangat mencukupi untuk dapat menyadari apa yang terjadi dan ada di sekitarnya.</p> <p><i>HPKG/XIV/22-23</i></p> <p>Belum sempat mengendap ketentraman warga, keheningan yang hanya sesaat itu lalu dipecahkan oleh dua peristiwa mengagetkan; pertama, pembunuhan terhadap seorang anggota Kopassus Angkatan Darat di sebuah kafe di Yogyakarta oleh sekelompok preman dan kedua, penyerbuan “balas dendam” sekelompok orang bersenjata ke lembaga pemasyarakatan Cebongan, Sleman, di Yogyakarta, yang menewaskan keempat tahanan tersangka pelaku pembunuhan yang dititipkan sementara di penjara tersebut. Bukan penyerbuan biasa, karena dilakukan dengan cara sistematis, cepat dan nyaris tak menyisakan jejak. Ada yang menarik, setelah Tim Investigasi TNI AD melakukan kunjungan ke lokasi Grup II Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura, Jawa Tengah, muncullah pengakuan spontan dan bertanggung jawab dari kesebelas pelaku.</p> <p><i>HPKG/XIV/23</i></p> <p>Pengakuan yang di luar dugaan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, tak terkecuali Presiden juga menyampaikan apresiasi secara terbuka. Namun, ada</p>
--	--	---

		<p>sejumlah pihak yang berpendapat, andai para oknum pelaku itu mengumumkan bertanggung jawab atas tragedi tersebut begitu usai melakukan operasi penyerbuan dan menyampaikannya secara terbuka di media, maka apresiasi masyarakat tentu akan lebih besar lagi. Tidak perlu masyarakat dilibatkan dalam suasana batin mencekam dan menderita trauma psikologis berkepanjangan.</p> <p><i>HPKG/XVI/23</i></p> <p>Tentang terucapnya kata ksatria oleh Presiden sehubungan dengan pengakuan itu tentu saja membuat banyak kalangan bertanya-tanya bagaimana bisa belasan pasukan membunuh orang yang disebutnya preman dalam tahanan dan tanpa bisa melakukan perlawanannya apa-apa disebut ksatria? Ya, andai cukup mengatakan berterima kasih karena mau jujur dan terbuka, persoalan kata ksatria jelas akan berbeda; karena ia telah mengandung muatan makna yang telah disepakati sebagai tindakan murni positif dan membanggakan.</p> <p><i>HPKG/XVII/23-24</i></p> <p>Kegaduhan demi kegaduhan nyaris datang silih berganti. Pemicunya dari masalah yang sangat personal dan sepele hingga yang sangat gawat dan berpotensi mendatangkan perpecahan masyarakat maupun bangsa. Republik Badut tampaknya semakin imun terhadap berbagai peristiwa dadakan dan tak terduga. Ekskalasi kekerasan dan agresivitas masyarakat semakin mencolok dan meluas. Sangat kontras pemandangan itu bila dibandingkan dengan para pelaku “kekerasan” penjarahan uang negara yang tampil santai penuh senyum bak selebriti. Ada yang tidak beres dengan sistem nilai atau budaya di antara mereka. Ada yang aneh dari kita dalam memaknai semua fenomena itu. Para ahli berasumsi semua itu tak jauh dari representasi dan hasil karya para pemangku negeri. Bak kata peribahasa, “Buah jatuh tak pernah jauh dari pohonnya”.</p>
4.	<i>Hiburan Korupsi Rasa Perempuan (HKRP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori bantuan - Pelesetan dan ironi <p>Korupsi/HKRP/I/25 Inilah hiburan dalam bentuk humor-humor yang AF <i>to date</i> (bisa dibaca: <i>up to date</i>), dapat pula dibaca af <i>to date</i>). Popularitas dan kontroversi AF (Ahmad Fathanah)</p>

		<p>terkait dengan kasus korupsi kuota impor daging sapi memang tiada duanya. Bukan saja keterkaitannya dengan sosok yang namanya sering disingkat LHI (Lutfi Hasan Isaaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera), Namun, juga sejumlah wanita cantik (disebutkan setidaknya 40 orang) yang tersebar di berbagai titik lokasi dan destinasi; dan semua ada hubungannya dengan sejumlah transaksi, aliran dana hingga miliaran rupiah.</p> <p><i>HKRP/II/25</i></p> <p>Humor pertama, “Ada tiga orang berinisial AF yang akhir-akhir ini menjadi terkenal, yaitu Aceng Fikri, Ahmad Fathanah dan Alek Ferguson. Yang terakhir bergelar ‘Sir’, dua sebelumnya bergelar ‘Syur...’.”</p> <p><i>HKRP/III/25-26</i></p> <p>Tak perlu akal sehat untuk menemukan motif apa dibalik keroyalan AF. Tak perlu analisis para psikolog untuk melihat kasus itu dari sisi kejiwaan. Apakah semua itu ada hubungannya dengan upaya penyucian uang atau bagian dari gratifikasi seks terkait keperluan lobi dan <i>entertainment</i>? Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kalau gratifikasi benda atau uang mudah untuk dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lalu kalau gratifikasi seks, bagaimana menyerahkannya ke KPK? Itulah humor kedua dalam artikel ini.</p> <p><i>HKRP/IV/26</i></p> <p>Sejurnya, bila direnungkan agak mendalam, kita semua bertanya, bagaimana mungkin harga daging sapi di negeri ini bisa diacak-acak oleh beberapa plintir orang? Mengapa praktik korupsi dan oligarki yang semula banyak terjadi di rezim Soeharto, kini setelah 15 tahun reformasi juga makin menjamur dan tumbuh subur?</p> <p><i>HKRP/V/26</i></p> <p>Hanya di negeri lelucon hal-hal muskil semacam ini boleh terjadi; anggota parlemen punya teman makelar dan menteri di pemerintahan yang sedang berkuasa. Selain berteman, ketiganya juga punya komitmen untuk membesarkan partai dan menyukseskannya pada pemilu tahun depan. Untuk itu tak ada komponen lain yang</p>
--	--	---

		<p>paling dibutuhkan partai selain dana. Salah satu mesin dana yang paling logis untuk diolah adalah kementrian. Selain menjadi pusat otoritas kebijakan juga punya hak menentukan rekanan. Maka yang kemudian terjadi, terjadilah!</p> <p><i>HKRP/VI/26-27</i></p> <p>Di negeri serius, yang kepala negaranya jarang tersenyum dan tampak menderita, tak mungkin hal-hal yang dapat mengacau dan menyengsarakan rakyat itu dapat terjadi. Selain orang-orang yang disebutkan itu berasal dari partai bersih berbasis agamis, juga mana mungkin mereka tega melukai kepercayaan rakyat yang memilih mereka sendiri. Itulah masalahnya. Itulah seharusnya!</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p><i>HKRP/V/27</i></p> <p>Masyarakat awam melihat semua menteri membantu Presiden dalam bekerja menyelenggarakan negara. Setiap menteri punya kementrian, zaman sebelumnya disebut departemen. Tiap kementrian punya otoritas dalam domainnya masing-masing. Menteri-menteri itu berasal dari partai penguasa dan koalisi (partai oposisi jangan harap), yang sebelumnya telah menandatangi semacam kontrak politik salah satu sikap yang diharapkan presiden, tiap partai koalisi tidak hanya sehaluan di kabinet tetapi juga di parlemen. Dengan begitu apa dikehendaki pemerintah (baca: presiden) hendaknya segera mendapat persetujuan; baik di kabinet maupun di parlemen.</p> <p><i>HKRP/VI/27</i></p> <p>ITulah yang dilihat masyarakat awam. Ini sangat berbeda dengan yang dilihat politisi Senayan. Rumornya, tiap kementrian itu sesungguhnya merupakan kapling mesin dana bagi parpol penguasa maupun koalisi bagaimana cara membaginya, itu sangat <i>private and confidential</i>. Pokoknya pandai-pandai saja parpol mengolahnya, mengkreasi, dan mengeksplor-nya. Yang penting jangan sampai tercium pers. Jangan sampai ketahuan KPK. Kalau hal yang sangat tidak diinginkan tersebut sampai terjadi, resiko tanggung sendiri!</p>
--	--	--

		<p>HKRP/VII/28 Mulanya saya tidak percaya rumor itu. Mustahil parlemen yang bertugas sebagai wasit juga ikut main sepakbola, ikut memberi sanksi, bahkan ikut bertepuk tangan layaknya penonton. Tetapi aneh bin ajaib. Bukan hanya eksekutif yang main, legislatif dan yudikatif juga ada yang tergoda bermain ke sana. Itu memang faktanya.</p> <p>HKRP/VIII/28-29 Pertanyaannya, mengapa tujuan parpol lewat para politisi dan pejabat publiknya berkecenderungan aneh begitu? Kalau itu bermula dari niat pribadi, mengapa terjadi nyaris serempak di semua parpol yang mendapatkan kesempatan menduduki posisi-posisi tertentu? Apakah ideologi mereka telah berubah. Sehingga belum tersosialisasi secara merata kepada masyarakat. Mari kita lihat pemaknaan terbaru dari berbagai isme yang ada di dunia, atau setidaknya yang ada di literatur para parpol di Indonesia.</p> <p>LIBERALISME: Anda pemilik dua ekor sapi. Bank menghubungi Anda, mengkapling daging dalam porsi ons dan kilo. Pembeli membayar uang muka dan cicilan berjangka. Syarat dan ketentuan berlaku.</p> <p>KAPITALISME: Anda punya dua ekor sapi betina. Anda menjual yang satu dan membeli seekor sapi jantan.</p> <p>SOSIALISME: Anda punya dua ekor sapi. Anda berikan satu ekor sapi itu pada tetangga.</p> <p>KOMUNISME: Anda punya dua ekor sapi. Pemerintah menyita keduanya dan mengganti Anda dengan jatah susu.</p> <p>NAZISME: Anda punya dua sapi, pemerintah menyita keduanya dan menembak Anda.</p> <p>FASISME: Anda pemilik dua ekor sapi. Pemerintah menangkap, mengirim Anda ke kerja paksa dan kedua sapi ke kandang negara.</p> <p>MEKANISME (PASAR): Anda memiliki dua ekor sapi, pemerintah menyita keduanya, menembak yang satu, memeras susu sapi yang satunya lagi dan menuangkannya dengan sia-sia.</p>
--	--	---

		<p>PRAGMATISME: Anda memiliki dua ekor sapi, dibeli makelar dengan harga kompromi. Pasar langka daging sapi. Harga langsung naik tinggi sekali. Makelar, oknum “pemerintah” dan perusahaan pengimpor daging sapi tersenyum berseri-seri.</p> <p><i>HKRP/IX/29</i></p> <p>Anggap saja semua isme di atas humor ketiga. Pada tahun-tahun 1980-an, LHI juga sangat popular dan hampir meramaikan pemberitaan di koran-koran ibukota maupun daerah. Singkatan atau inisial itu selalu terkait dengan sosok unik bernama Arwah Setiawan. Bedanya, LHI saat itu tak pernah ada kaitannya dengan korupsi atau kuota impor daging sapi karena ia merupakan kepanjangan dari Lembaga Humor Indonesia. Kinerjanya diapresiasi masyarakat secara aktif menyajikan pertunjukkan humor bermutu, yang mencerdaskan dan mencerahkan! Kekhawatiran yang ada, bila anak cucu kita kelak melakukan browsing LHI di mesin pencari internet, jawabannya bukan lagi Lembaga Humor Indonesia, melainkan justru mengenai sosok yang lain. Sosok yang juga memuat <i>sub-entry</i>: Darin, <i>papah</i>, <i>Mamah</i> dan ini boleh dibilang sebagai humor keempat Anda.</p> <p><i>HKRP/X/30</i></p> <p>Fakta <i>up to date</i> lain, kontroversi mengenai presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan penghargaan World Statement Award dari Appeal of Conscience Foundation, suatu yayasan antaragama bergengsi di Amerika Serikat, yang ternyata telah diterima presiden SBY pada akhir Mei 2013. Sebelumnya perkara itu menimbulkan reaksi pro dan kontra yang cukup sengit. Ada anjuran menarik dari masyarakat, sebaiknya penghargaan itu diberikan saja kepada keluarga Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) karena dia adalah sosok presiden Indonesia yang paling tepat menerimanya.</p> <p><i>HKRP/XI/30</i></p> <p>Apapun sisa opini yang mengiringi keputusan Presiden SBY, kenyataannya penghargaan itu sudah diterimanya. Klimaks atau antiklimaks, masyarakat yang menilai. Khusus mengenai penghargaan dari pihak asing, sebaiknya memang kita</p>
--	--	--

			<p>lebih berhati-hati. Prinsipnya, jangan sampai bangsa Indonesia hanya menjadi obyek eksperimentasi pihak-pihak yang dimungkinkan menanam “budi” untuk mengunduh “motif” di lain waktu. Paling tidak, jangan sampai ironi yang terdapat di humor kelima ini, menimpa bangsa kita.</p> <p><i>HKRP/X/30-31</i></p> <p>Suatu hari, pada April 1998, Panitia Nobel merencanakan hendak memberi hadiah Nobel bagi Presiden Soeharto. Salah seorang panitia kemudian menghubungi Pak Harto di Cendana, Jakarta. Berhubung Pak Harto sedang berada di kamar mandi, maka yang menerima telepon itu adalah Mbak Tutut. Ketika panitia menyampaikan niatnya, Mbak Tutut tampak sangat <i>surprised</i>, karena itu ia menjadi agak gugup. Terutama ketika dikonfirmasi soal nama lengkap presiden.</p> <p>“Nama lengkap Bapak ya Romo Soeharto,” jawab Mbak Tutut malu-malu dan terdengar sayup-sayup di telinga panitia.</p> <p><i>HKRP/X1/31</i></p> <p>Beberapa minggu kemudian setelah Panitia Nobel berunding, diumumkan kepada publik dunia, bahwa salah seorang dari wilayah Asia Tenggara menerima Hadiah Nobel untuk Bidang Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia adalah Ramos Horta.</p>
5.	Panik Paranoid Parpol Linglung (PPPL)	<ul style="list-style-type: none"> - Teori Superioritas - Guyon parikenan 	<p>Pembelaan proletar/<i>PPPL/I/53</i></p> <p>Banyaknya pemberitaan serba miring tentang parpol, akhirnya menumpuk sebagai klimaks sikap rakyat yang skeptis dan masa bodoh. Sikap itu tercermin dari dialog masyarakat, bahkan hingga kelas bawah. Untuk kegiatan nyoblos di pemilukada, misalnya, mereka tak sembarangan dapat menyediakan waktu untuk kegiatan itu. Sebagai buruh lepas, mereka tak akan mendapat bayaran kalau tidak masuk kerja.</p> <p><i>PPPL/II/53</i></p> <p>Mencoblos , setidaknya memerlukan waktu paling cepat setengah hari, hingga lebih. Itu artinya bagi buruh lepas, satu hari itu sama dengan hampa penghasilan. Maka respon ekstremnya, mereka mau mencoblos kalau dapat ganti upah satu hari kalau tidak lebih baik mereka memilih untuk bekerja. Tanpa penghasilan satu hari berarti</p>

		<p>tak ada cadangan dan auntuk keperluan keluarga esok hari. Jadi bagi mereka, waktu adalah upah.</p> <p><i>PPPL/III/53-54</i></p> <p>Di zaman otoriter, sikap seperti itu dapat dikategorikan warga Negara yang kurang baik. Bahkan dapat dikenai stigma macam-macam. Karen itu mereka takut sekali dengan stigma itu. Meski dalam hati mengerutuk, mereka terpaksa mengorbankan waktu satu hari untuk mencoblos. Kini di zaman yang berbeda mereka telah dapat mengkalkulasi pegawai negeri atau swasta mendapatkan kesempatan untuk nyoblos dan itu tidak mengurangi hak bulanan (gaji) yang bakal mereka terima. Beberapa instansi, bahkan, meliburkan hari pencoblosan itu sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang partisipasinya sangat penting dalam menentukan warna politik pemerintahan daerah di masa mendatang.</p> <p><i>PPPL/IV/54</i></p> <p>Aturan pemilu sejak republik ini berdiri, tidak pernah menghitung warga berkategori tenaga atau buruh lepas. Warga yang hidup matinya bergantung dari waktu dan tenaganya hari itu. Tidak bekerja, tidak ada penghasilan tidak ada yang bisa dimakan. Itulah sosok-sosok nyata kemiskinan sejati. Hingga kini, bahkan Negara yang meminta-minta sumbangan kepada mereka, berupa luangan waktu untuk nyoblos atau berpartisipasi dalam <i>event</i> politik. Bukankah ini tidak adil dan tak tahu diri. Setelah ritual politik pemilihan kepala daerah, nasib para buruh lepas itu tetap sama atau bahkan makin terpuruk, siapa peduli?</p> <p><i>PPPL/V/54-55</i></p> <p>Fakta itu menjadi cermin nyata bahwa pesta demokrasi ternyata justru hanya menjadi beban bagi masyarakat buruh lepas. Itu baru pemilukada, belum pemilu legislatif, belum pemilu presiden. Alangkah banyak pemilu, alangkah banyak waktu yang harus disediakan oleh buruh lepas untuk ritual bangsa. Tak adakah ekstra perlakuan dan pelayanan untuk mereka? Kalau negara lewat KPU tetap berasumsi bahwa partisipasi masyarakat itu harus dan sebangun, sungguh naif. Kecuali negara telah bertindak</p>
--	--	--

		<p>bijak seperti yang terjadi di beberapa negara maju, memberikan santunan atau tunjangan rutin kepada masyarakat rentan penghasilan atau penganggur. Ternyata di Republik Badut itu tak terjadi. Kalau toh ada upaya pemberian tunjangan atau banuan, sifatnya sporadis dan kadang berlatar belakang pamrih politis. Maka jangan heran kalau ada rakyat yang menggunakan kedaulatannya untuk skeptic karena mereka harus menolong dirinya sendiri. Karena tak juga ada perubahan dan perbaikan untuk nasibnya kendati ratusan peristiwa politik hilir mudik di hadapan mereka.</p> <p><i>PPPL/VI/55</i></p> <p>Gerakan buruh lepas yang tanpa komando dan nyaris serempak terjadi di berbagai wilayah Republik Badut, makin membuktikan bahwa kesadaran politik masyarakat paling rentan perekonomiannya ini sudah tumbuh. Kalangan tertentu berasumsi sikap itu sebagai dampak dari provokasi golput sejumlah pihak yang skeptis terhadap pelaksanaan pesta demokrasi. Namun, andai para pengamat dan peninjau atau penilai itu mau menyelami persoalan hakiki yang terjadi di masyarakat bawah, mereka pasti akan malu pada pernyataannya sendiri.</p> <p><i>PPPL/VII/55-56</i></p> <p>Skeptisme juga muncul di sebagian masyarakat menengah dan terdidik. Pertama mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa manajemen parpol yang ada di Republik Badut sungguh rumit dan tidak transparan. Bagaimana bisa lembaga publik tidak ada aturan baku tentang mekanisme pendanaannya; bagaimana caranya dan masuk dan dana keluar, mana yang boleh dan tidak boleh, bagaimana laporan keuangan tahunan dan per-semesternya, mengapa tidak ada lembaga otoritas yang dapat ditunjuk untuk melakukan audit pembukuan internalnya, belum lagi kode etik yang mengatur <i>relationship</i>-nya dengan pihak-pihak yang dikhawatirkan dapat menganggu fungsi pengawasan dan sebagainya.</p> <p><i>PPPL/VIII/56</i></p> <p>Ibarat unit media atau pers, parpol yang semacam ini oleh Rheinald Kasali disebut sebagai parpol bodrex. Mirip pers yang semua wartawannya tidak dapat gaji tapi</p>
--	--	---

		<p>dibekali kartu pers dan para wartawan mencari makan sebagai wartawan bodrex. Semua orang dapat membayangkan akan seperti apa produk pemberitaan yang muncul ke publik dan media tersebut. Akan seperti mental professional para wartawannya ketika di lapangan. Begitulah salah satu sisi runyam parpol di Republik Badut.</p> <p><i>PPPL/IX/56-57</i></p> <p>Kedua, maraknya kasus korupsi yang sebagian pelakunya pejabat publik dan politisi (produk parpol) membuat masyarakat melek didik menjadi semakin traumatis. Lima belas tahun reformasi bukannya Republik Badut bertambah maju dan sejahtera, Namun, justru makin menuju jurang kehancuran. Korupsi bukan lagi perilaku individu yang senyap dan menyelinap Namun, sudah merambah ke struktural dan berjamaah bahkan sebagian juga disiapkan sejak dalam perencanaan suatu peraturan atau perundang-undangan. Lagi-lagi masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek <i>lips service</i> belaka dan itu baru diwacanakan ketika menjelang pemilu atau saat-saat masa kampanye berlangsung.</p> <p><i>PPPL/X/57</i></p> <p>Bukan salah demokrasi mengandung. Bukan salah institusi parpol sebagai pilar demokrasi. Tetapi manusia-manusia yang ada di tiap bilik institusi itu sangat menyadari betapa besar kekuasaan yang mereka miliki. Di parlemen, mereka dapat membuat merah-hijau-kuningnya warna kebijakan. Mereka juga dapat membuat satu kalimat yang dimasukkan atau dicoret dari pasal atau ayat undang-undang. Kalimat-kalimat itu dapat bernilai miliaran hingga puluhan miliar. Sangat kontras sekali dengan pembuat kalimat yang bernama penulis atau pengarang. Meskipun yang disebut terakhir ini sudah menulis beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu kalimat, penghargaan terhadap kalimat itu sungguh jauh dari memadai. Itulah ajaibnya parpol. Andai keajaiban itu digunakan sesuai amanah yang melekat padanya, sungguh indah dan harmonisnya warga suatu negara.</p> <p><i>PPPL/XI/57</i></p>
--	--	--

			<p>Ada gagasan untuk mengisi kekosongan kualitatif parpol, orang-orang terbaik di Republik Badut perlu tampil dan membenahi itu semua. Orang-orang dengan jiwa bersih dan berdedikasi kebangsaan tinggi, dari mana pun sumbernya perlu <i>cancut taliwondo</i> bergerak ke sana, supaya parpol tidak diisi para petualang nasib dan pemburu kekayaan.</p>
6.	<p>Tahun-tahun Spot Kantong dan Jantung (TSKdJ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori bantuan - Satir 	<p><i>Politisi buruk adalah sekelompok politikus yang hanya sibuk memperkaya diri dan golongannya; sedangkan politisi baik adalah sekelompok politikus yang belum ketahuan kedok dan belangnya.</i></p> <p>*someone</p> <p>Politikus/TSKdJ/I/68</p> <p>Satir di atas tergolong sindiran yang sangat tajam dan menyengat. Seperti kita ketahui, satir masuk kategori sindiran atau kritikan yang muatan ejekannya lebih dominan dibandingkan dengan leluconnya itu sendiri. Kondisi perpolitikan Indonesia saat ini sangat subur memancing munculnya bukan saja kritikan atau sindiran tajam, tetapi juga hujatan dan caci cera.</p> <p>TSKdJ/II/68</p> <p>Kasus Anas Urbaningrum yang seharusnya berada di ranah hukum langsung menjadi bias ketika Anas berhasil membelokkan topik ke ranah politik lewat retorikanya yang penuh teka-teki dan perlawanan. Media dan masyarakat pun lalu terpancing untuk mengikuti bagaimana kelanjutan misteri – karena secara tersirat pernyataan Anas menjanjikan itu – sejumlah kasus besar yang sekian lama menggantung; dan Century salah satunya. Tak hanya terpancing media bahkan ikut terseret dalam “permainan” yang mengasyikkan itu.</p> <p>TSKdJ/III/69</p> <p>Spekulasi para pengamat pun berhamburan. Sengaja atau tidak Anas telah menggiring bangkitnya harapan masyarakat untuk melihat <i>ending</i> tertentu yang mengarah pada figur tertentu pula.</p>

		<p><i>TSKdJ/IV/69</i> Salah satu celah yang dilupakan oleh media dan banyak pengamat berhasil dibuka oleh Prof. JE Sahetapy di acara Indonesia Lawyers Club, <i>TV One</i>, 5 Maret 2013, adalah pertanyaan terhadap Anas sendiri; andaikata benar dia mengetahui sejumlah kasus kejahatan besar atau skandal yang terjadi di lingkungan elit penguasa dan sekian lama mendiamkannya, baru setelah dirinya tersandung kasus lalu bertekad membuka itu lewat halaman perhalaman karena merasa dirinya dijadikan korban konspirasi mereka, di mana moralitas seorang Anas sebenarnya?</p> <p><i>TSKdJ/V/69</i> Mungkin benar anggapan yang mengatakan, mustahil kita mengharapkan ucapan jujur dapat keluar dari seorang yang saat itu berada dalam risiko dan tekanan; Namun, seseorang yang berjiwa negarawan dan memiliki komitmen tinggi terhadap kebenaran, seberat apapun risiko yang akan dihadapi seharusnya bukan menjadi alasan.</p> <p><i>TSKdJ/VI/69</i> Skandal demi skandal hilang timbul tanpa adanya kejelasan. Konspirasi demi konspirasi diciptakan untuk mengalihkan perhatian. Isu demi isu datang dan pergi seenak hati. Semua itu seperti memberi bukti bahwa republik ini bergerak tanpa visi. Maka pertanyaannya, akan dibawa ke mana sebenarnya Indonesia kita?</p> <p><i>TSKdJ/VII/70</i> Tumpang tindih arus wacana terkesan berisik, membingungkan dan bikin pening orientasi. Apakah semua itu akan mengantarkan kita pada substansi yang produktif dan membawa pencerahan baru? Atau sekadar hiruk-pikuk spekulasi yang berujung pada antiklimaks persepsi. Masyarakat berhak tahu apa motif di balik serentetan kegaduhan itu.</p> <p><i>TSKdJ/VIII/70</i> Hiruk pikuk kasus korupsi, prahara di partai politik, bab-bab lanjutan perang urat saraf antara Anas Urbaningrum dan pihak yang disebutnya para sengkuni atau Cikeas</p>
--	--	---

		<p>sekalipun, hingga tuntutan kejelasan siapa pihak di balik kebocoran Sprindik kepada KPK; terasa paling mewarnai riuhnya opini di media. Ada apa dengan media kita? Mengapa ia menjadi sedemikian ramah dan mesra dengan rezin isu?</p> <p><i>TSKdJ/IX/70</i></p> <p>Agenda 2014</p> <p>Hampair luput dari perhatian kita. Adanya sejumlah agenda tersembunyi untuk menyongsong 2014 yang sudah di ambang pintu; mungkinkah itu yang membuat sejumlah partai politik tiba-tiba menjadi sangat paranoid? Tegang dan reaktif. Tak terkecuali Anda sendiri.</p> <p><i>TSKdJ/X/70</i></p> <p>Bukan rahasia lagi, kesulitan parpol mencari kader caleg bersih dan bermutu ditambah adanya tanda-tanda masyarakat yang mulai surut kepercayaan dan skeptis terhadap partai politik, makin menguatkan sinyalemen bahwa eksistensi parpol berada dalam tekanan psikologis serius.</p> <p><i>TSKdJ/XI/71</i></p> <p>Media sesungguhnya punya peran besar untuk fokus pada figur calon pemimpin yang akan mengawali Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dengan mewacanakan mereka, apakah dari unsur parpol atau independen, barangkali akan lebih hemat energi dan pemikiran. Apalagi bila media juga mengakomodasi partisipasi masyarakat lewat ruang atau forum yang disediakan untuk itu.</p> <p><i>TSKdJ/XII/71</i></p> <p>Tradisi model kampanye pemilu yang selama ini meungkin perlu <i>di-set up</i> karena hanya akan melahirkan spekulasi-spekulasi dan berbiaya tinggi pula. Biaya tinggi hanya akan melahirkan pemimpin yang sibuk dengan hitungan untung-rugi. Ongkos politik dan biaya politik harus direduksi secara frontal supaya kita dapat kembali ke model demokrasi yang murah dan alami. Salah satu cara untuk mencapai itu, media perlu melakukan wacana dan bursa calon pemimpin masa depan sedini mungkin.</p> <p><i>TSKdJ/XIII/71</i></p>
--	--	---

		<p>Pemimpin yang benar adalah figur yang terpilih bukan dipilih. Terpilih karena telah melalui proses waktu dan teruji rekam jejak prestasinya. Tradisi memilih calon pemimpin atau wakil rakyat yang serba dadakan dan terburu-buru, apalagi berlumuran “hadiah” yang penuh pretensi dan tidak mendidik, hanya akan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang menisbikan konstituennya; transaksi telah selesai, jual beli telah impas.</p> <p><i>TSKdJ/XIV/71-72</i></p> <p>Medialah sesungguhnya pemegang kendali opini masyarakat. Di pundaknya termuat tanggung jawab besar untuk ikut mnegawal arah dan orientasi bangsa ini. Potret DPR dalam satu dekade ini yang penuh anomali dan ambivalensi, biarkanlah menjadi cerita lama. Untuk menyiapkan perbaikan negeri ke depan, media perlu memberi perhatian istimewa pada isu kepemimpinan dan kebangsaan.</p> <p><i>TSKdJ/XV/72</i></p> <p>Salah satu solusi untuk Indonesia yang masuk akal ternyata dibutuhkan pemimpin yang baik. Dari pemimpin yang baik akan dilahirkan sistem yang baik (tradisi paternalistik membuat peran pemimpin menjadi penentu, bukan sistem). Dari sistem yang baik akan tercipta birokrasi yang baik. Dengan birokrasi yang baik, masyarakat akan menikmati kenyamanan dan kesejahteraan.</p> <p><i>TSKdJ/XVI/72</i></p> <p>Salah satu ciri pemimpin yang baik pula, dia akan mengutamakan banyak <i>blusukan</i> ke negerinya sendiri (terutama yang sedang dirundung permasalahan) bukan sebaliknya, banyak <i>blusukan</i> ke negeri luar yang katanya mau berburu investor. Investor akan berbondong-bondong datang ke negeri kita bila republik Badut diakui sebagai negara baik; bukan sebaliknya, membujuk-bujuk mereka, merengek-rengek pada mereka. Sudah berbiaya besar, tak ada jaminan berhasil pula!</p> <p><i>TSKdJ/XVII/72</i></p> <p>Bikin Koran Sendiri</p> <p>Anda pingin jadi anggota DPR, DPD, atau bupati, walikota, gubernur, presiden?</p>
--	--	---

		<p>Tidak perlu pusing dan galau membayangkan kesulitan yang akan Anda hadapi di depan nanti. Keperluan Anda untuk kampanye adalah salah satu faktor yang paling membebani, karena untuk itu akan menyedot dana hingga milliaran rupiah.</p> <p><i>TSKdJ/XVIII/73</i></p> <p>Ini resep yang akan menguras kantong, tapi secara strategi jelas lebih elegan dan berkesan orang sekolahannya. Caranya adalah bikin media sendiri, bikin koran sendiri atau majalah sendiri. Media serius. Media yang benar-benar dapat menjadi bacaan masyarakat umum. Masyarakat yang majemuk dan plural. Masyarakat yang nantinya secara sukarela akan menjadi pendukung Anda dalam kiprah politik Anda.</p> <p><i>TSKdJ/XIX/73</i></p> <p>Mengapa media serius? Iya karena media masturbasi akan dilirik dengan sebelah mata oleh para pembaca. Betapa pun gratis dan berhadiah, media narsis seperti yang selama ini ada dan dijadikan modus para pemilik modal partisan, dianggapnya akan berhasil mendongkrak citra dan <i>power</i> si pemilik, ternyata justru membuat pembacanya <i>mblenger</i>, muak karena mau muntah.</p> <p><i>TSKdJ/XX/73</i></p> <p>Di mana logika media serius yang punya kekuatan menarik empati masyarakat pembacanya? Tempatkan media itu sebagai penyambung lidah rakyat. Media sebagai corong aspirasi rakyat. Wacanakan semua yang menjadi ganjalan dan harapan masyarakat banyak. Berikan kesempatan buat masyarakat mewacanakan masalah sosial, politik, kebangsaan seluas-luasnya.</p> <p><i>TSKdJ/XXI/73-74</i></p> <p>Undangan para pakar di bidangnya menulis pemikiran orisinal tentang Republik Badut di masa depan. Berikan mereka kesempatan untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan masa lalu sekritis-kritisnya. Undang juga mantan pejabat atau politisi lalu menulis atau membeka diri lewat argumentasi yang obyektif. Tradisikan budaya polemik sehat di media tersebut, tanpa batas selama konklusi persoalan belum tuntas sampai hilir.</p>
--	--	--

			<p><i>TSKdJ/XXII/74</i> Buat rubrik-rubrik menarik, atraktif, kontroversial secara konsisten dan <i>sustainable</i>. Kalau iklan sampai membanjiri media Anda, tambah halaman lain untuk iklan, jangan sekali-kali mengurangi hak pembaca untuk menyantap rubrik-rubrik idaman yang selalu ditunggu-tunggu. Keberhasilan media Anda adalah portofolio Anda; apalagi dalam setiap terbitnya anda sebagai pribadi yang berkarier sebagai politisi juga melibatkan diri dalam perwacanaan suatu bidang yang paling Anda kuasai.</p> <p><i>TSKdJ/XXIII/74</i> Upayakan agar sikap media terhindar dari kebiasaan untuk menjustifikasi, memuji-muji, mengutuk-ngutuk, atau menyeburkan diri dalam emosi kekanakan. Buatlah semua itu masuk dalam etika analisis yang dewasa dan arif bijaksana. Sejurnya, media ideal seperti itu di Republik Badut belum pernah ada. Yang ada selalu warna “ideologi” pemilik atau konsursium lebih dominan ketimbang yang seharusnya mewakili masyarakat umum dan independen. Berbagai koridor yang terkait dengan <i>do</i> dan <i>do not</i> selalu ada. Apakah itu terkait dengan investasi pemilik di berbagai lahan bisnis lain atau kesesertaannya dalam berbagai kelompok atau organisasi, sengaja atau tidak selalu <i>signal</i> intervensi terasakan oleh teks-teks dalam redaksionalnya.</p> <p><i>TSKdJ/XIV/74-75</i> Kalau dalam pemilu Anda tetap tidak dapat lolos sebagai anggota DPR, DPD atau bupati, walikota, gubernur maupun presiden, setidaknya anda telah membantu rakyat Republik Badut menemukan pemimpin idaman mereka. Dan fakta lain yang tak dapat dipungkiri, anda telah sukses sebagai pemilik media yang isinya mampu memberikan pendidikan sosial, budaya, politik, dll, yang membangun dan mencerahkan. Sebuah bekal yang besar sekali artinya bagi perubahan dan kemajuan Republik Badut. Setuju? Joss!</p>
7.	<i>Uji Kompetensi dalam Lelang</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori keganjilan - Ironi 	<p>Politikus/<i>UKdLJ/I/76</i> Lelang jabatan lurah dan camat yang dilakukan pemprov DKI Jakarta untuk menguji</p>

	Jabatan (UKdLJ)	<p>kompetensi jabatan sebenarnya merupakan gagasan yang punya cakupan luas. Salah satunya adalah dapat menjadi alternatif untuk menjadi model Pemilu ke depan yang murah Namun, efektif dan tepat sasaran.</p> <p><i>UKdLJ/II/76</i></p> <p>Pada awalnya gagasan itu tampak hanya untuk pemberian bantuan birokrasi, yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat karena lambat dan kurang profesional. Semboyan kurang simpatik yang banyak menjadi bahan seluruh kinerja birokrasi pada umumnya adalah , “Kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah”, tampaknya perlu diluruskan lewat upaya konkret seperti “Lelang Jabatan” versi Pemprov DKI tersebut.</p> <p><i>UKdLJ/III/76-77</i></p> <p>Sebenarnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemegang otoritas untuk melakukan “pembersihan” birokrasi agar fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, Namun, upaya itu senantiasa menemui kesia-siaan. Bahkan pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, secara eksplisit ia pernah menyampaikan kegalauannya itu pada masyarakat, karena berbagai upaya telah ditempuh Namun, hasilnya selalu nihil.</p> <p><i>UKdLJ/IV/77</i></p> <p>Terobosan Pemprov DKI melakukan “lelang jabatan” lurah dan camat pada mulanya sempat menuai kontroversi Namun, setelah masyarakat mencermati bahwa tujuan dari gebrakannya yang dianggap terburu-buru itu, ternyata merupakan cara lain dari upaya untuk menyelaraskan irama kerja agar perjalanan “air kebijakan” atau <i>policy</i> pimpinan dapat mengalir secara lancar dan padu dari hulu hingga muara. Sebuah gagasan yang realistik dan progresif dalam konteks untuk mengurai benang kusut di jajaran birokrasi yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Karena fakta selalu membuktikan, sebaik apa pun program dari atas akan menjadi sangat bermasalah (tidak punya dampak signifikan) jika rute pelaksanaan di jajaran bawahannya kurang akomodatif.</p> <p><i>UKdLJ/V/77-78</i></p>
--	------------------------	---

		<p>Uji Kompetensi</p> <p>Mengapa masyarakat sangat reaktif terhadap program itu? Dapat dipahami bila reksi pro dan kontra masyarakat muncul atas program Pemprov DKI itu semata karena ia menggunakan label “lelang jabatan”, sebuah terminologi suram yang dalam rumor masyarakat diartika sebagai tawar-menawar jabatan dengan kompensasi dana hingga ratusan juta rupiah bagi si penawar tertinggi. Namun, setelah masyarakat menyimak dengan seksama “lelang jabatan” dalam versi Pemprov DKI ternyata tak jauh dari sebuah kompetisi uji kompetensi bagi calon pejabat (lurah dan camat); yang di dalamnya berisi serangkaian tahap ujian baik dari aspek persyarikatan usia, pendidikan, dan lain-lain hingga ujian tertulis atau wawancara mengenai kompetensi manajemen, administratif, geografis, pelayanan publik, mental-spiritual, dan lain-lain. Sebuah program yang ternyata bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar fungsinya sebagai pelayan masyarakat dapat terlaksana dengan optimal.</p> <p><i>UKdLJ/VI/78</i></p> <p>Program Pemprov DKI itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, di zaman Kekaisaran Cina, model pengujian seperti itu sudah diterapkan; dimulai dari Dinasti Qin (221 SM-206SM). Seperti diketahui Dinasti Qin berhasil menyatukan Cina yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada Periode Negara Perang melalui serangkaian penaklukkan terhadap kerajaan-kerajaan lain, dengan penaklukkan terakhir adalah terhadap Kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 SM.</p> <p><i>UKdLJ/VII/78</i></p> <p>Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Cina bersatu pada tahun tersebut. Dinasti ini terkenal mengawali pembangunan Tembok Besar Cina yang belakangan diselesaikan oleh Dinasti Ming serta peninggalan Terakota di makam Qin Shi Huang. Beberapa kontribusi besar Dinasti Qin, antara lain termasuk terbentuknya konsep pemerintahan terpusat, penyatuan undang-undang hukum, diterapkannya bahasa tertulis, satuan pengukuran, dan mata uang bersama seluruh Cina.</p> <p><i>UKdLJ/VIII/78-79</i></p>
--	--	---

		<p>Di zaman Kekaisaran Qin Shi Huang tersebut dan sesudahnya, setiap calon pejabat dari yang paling rendah hingga setingkat gubernur harus menempuh ujian tertulis atau wawancara dan siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi, dialah yang lolos dan terpilih untuk menduduki jabatan bersangkutan. Dalam konteks kekinian, gagasan Pemprov DKI itu sesungguhnya juga menarik diwacanakan untuk dapat dijadikan sebagai salah satu model atau alternatif bagi solusi demokrasi kita. Setidaknya gagasan itu dapat mereduksi berbagai kerumitan dan biaya tinggi yang selama ini membelit pelaksanaan kampanye dan pemilu (pemilihan kepala daerah) di seluruh Indonesia.</p> <p><i>UKdLJ/IX/79</i></p> <p>Kerumitan-kerumitan itu yang saat ini sedang diwacanakan atau ditimbang pilih oleh pemangku negeri menyangkut hasil evaluasi terhadap pemilihan langsung caleg, kepala daerah (bupati/walikota) dan gubernur oleh rakyat. Hasil evaluasi itu menyimpulkan bahwa dalam praktiknya pemilihan secara langsung itu berkecenderungan untuk disalahgunakan di berbagai lini dan berkonsekuensi ongkos politik tinggi (ditanggung peserta pemilu), biaya politik tinggi (ditanggung APBD untuk kepala daerah dan gubernur), dan ongkos sosial yang tak dapat diprediksi bila terjadi benturan persepsi atas hasil perhitungan akhir pemilu.</p> <p><i>UKdLJ/X/79</i></p> <p>Timbang pilih dan kalkulasi tampaknya selalu berujung pada pertanyaan, kalau pemilu serentak menjadi pilihan, bagaimana realisasi konkretnya? Dilaksanakan secara nasional atau regional? Dilaksanakan untuk sekaligus pemilihan caleg, presiden, gubernur dan kepala daerah atau bagian per bagian?</p> <p><i>UKdLJ/XI/80</i></p> <p>Wacana juga berkembang ketika timbul pemikiran, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung Namun, pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD. Pertanyaannya kemudian, apakah pemilihan itu dapat menjamin bebas dari politik uang? Begitu pula sebaliknya, gubernur dipilih secara langsung dan kepala daerah</p>
--	--	---

		<p>dipilih oleh DPRD, sama saja pertanyaannya. Siapa dapat menjamin prosesi itu dapat terbebas dari praktik politik uang?</p> <p><i>UKdLJ/XII/80</i></p> <p>Rakyat yang selama ini menjadi koran politik uang dan tidak menyadari kegembiraan saat itu juga beresiko menelan pil pahit berkepanjangan, menjadi semakin rusak mental maupun kesejahteraannya. Goal akhir dari demokrasi yang seharusnya menuju pada kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, akan menjadi semakin jauh dari jangkauan dan harapan masyarakat.</p> <p><i>UKdLJ/XIII/80</i></p> <p>Alternatif Pemilu Masa Depan</p> <p>Andai gagasan Pemprov DKI itu diwacanakan untuk dijadikan sebagai salah satu model atau alternatif bagi solusi demokrasi (Pemilu) kita, akan seperti apa implementasinya? Baik bakal caleg, calon kepala daerah maupun calon gubernur setelah diverifikasi Komisi Pemilihan Umum atau Daerah lalu diwajibkan menempuh serangkaian ujian tertulis atau wawancara yang dilakukan oleh Tim Juri Independen, ber-<i>track record</i> bersih dan memilih komitmen kebangsaan. Mereka terdiri atas para ahli atau pakar (di berbagai bidang ilmu terkait dan relevan), tokoh agamawan, tokoh masyarakat, LSM, pers, dan perwakilan mahasiswa.</p> <p><i>UKdLJ/XIV/81</i></p> <p>Hasil ujian setiap nama peserta dimediatekan di internet yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Penilaian tiap juri dan kumulasi angka yang diperoleh tiap peserta juga dimediatekan secara terbuka. Tugas KPU atau KPUD adalah me-<i>resume</i> nama-nama yang lolos dan lulus ujian dan mengumumkannya secara resmi ke masyarakat.</p> <p><i>UKdLJ/XV/81</i></p> <p>Keunggulan sementara model pemilihan ini adalah: pertama, aspek kualitatif calon legislatif, calon kepala daerah dan calon gubernur terpenuhi. Kedua, aspek biaya, baik ongkos maupun biaya politik jauh lebih rendah dibandingkan dengan model yang ada</p>
--	--	---

		<p>selama ini. Ongkos sosial, kalau toh ada dan sampai terjadi, relatif lebih lunak dan dapat diantisipasi sejak awal, misalnya ulah para <i>cracker</i> (lebih jahat dari para <i>hacker</i>). Ketiga, pola pelaksanaan dapat diselesaikan dengan tingkat prioritas dan kebutuhan.</p> <p><i>UKdLJ/XVI/81</i></p> <p>Kelemahannya, alternatif ini hanya bersifat sementara. Partisipasi masyarakat tidak terakomodasi secara langsung. Ini artinya, model pemilihan ini hanya layak digunakan dalam situasi tertentu ketika tingkat wawasan, pendidikan dan kesadaran masyarakat masih beragam, bahkan berjarak cukup ekstrem. Pada saatnya nanti bila jurang pemisah pengetahuan, pendidikan dan kesadaran masyarakat telah mendekati kondisi layak, kedaulatan harus dikembalikan lagi kepada rakyat.</p> <p><i>UKdLJ/XVII/80-81</i></p> <p>Ingat pemilu jadi ingat kampanye. Tampaknya, masa kampanye di negeri ini selalu mengulang sejarah. Juru kampanye selalu bercerita tentang program-program yang indah permai, lalu dengan berapi-api akan memperbaiki berbagai keadaan yang belum beres seperti minimnya infrastruktur, layanan sosial dan lain-lainnya, tapi soal implementasi dan pembuktianya setelah dirinya terpilih sebagai anggota legislatif, ya nanti dulu.</p> <p><i>UKdLJ/XVIII/76</i></p> <p>Tapi ada juga jurkam yang kena batunya. Terutama pada saat kampanye terbuka untuk berbagai kontestan parpol secara bergantian. Jurkam ini tergolong jago pidato. Ia naik ke atas panggung dan berkampanye dengan sangat bersemangat, massa yang hadir juga mengelu-elukan dengan gegap gempita, tetapi setelah jurkam itu turun panggung, duduk beristirahat di tempat yang telah disediakan, ia kaget. Ia lupa menyebutkan namanya dan dari partai politik mana berasal. Yang paling fatal, ia juga lupa meminta massa memilih dirinya pada Pemilu nanti. “Matik, aku!” keluhnya sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Nah!</p>
--	--	---

8.	<p><i>Awas Janji-janji Gombal Mukiyo (AJGM)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori bantuan - Guyon parikenan 	<p>Politikus/AJGM/I/83 Tahun kecap telah dimulai. Janji manis, janji gombal telah disiapkan lewat konseptor masing-masing parpol. Di beberapa tempat penyelenggaraan pemilukada bahkan aneka retorika dikemas dalam benuk <i>release media</i>, spanduk, baliho, poster dan iklan <i>audio-visual</i> di beberapa radio dan TV. Semua menjanjikan manisnya masa depan. Indahnya pemerintahan daerah di bawah pasangan tokoh A-B, C-D atau E-F dan seterusnya. <i>AJGM/II/83</i> Putaran roda sejarah kemudian terjadi; seperti yang sudah-sudah, sikap rakyat akan selalu beragam, ada yang memilih, tidak memilih, ada pula yang tidak peduli sama sekali. <i>The show must go on!</i> Berdasarkan hasil pengumuman suara, KPUD pun mengumumkan pasangan yang memenangkan pemilukada itu. Para pendukung calon yang menang bergembira-ria; yang kalah, bermacam-macam reaksinya; salah satunya mencoba menerima kenyataan meski dengan menyimpan segudang rasa penasaran. <i>AJGM/III/83-84</i> Sampai di sini kemudian suasana kembali ke keadaan normal. Masyarakat hanya sekilas mengingat janji atau program-program yang pernah berhamburan ke memori</p>
----	--	--	--

		<p>mereka. Kalaupun ada yang mau mencatat atau mendokumentasikan fakta hukum itu – kata-kata adalah bahasa hukum, apalagi janji- hanya sedikit pihak yang punya kemauan untuk menjadikannya sebagai delik yang dapat diwacanakan bila dalam pelaksanaan kepemerintahan nanti terjadi penyimpangan atau pengingkaran.</p> <p><i>AJGM/IV/84</i></p> <p>Lain Kampanye Lain Kinerja</p> <p>Realitas kampanye umumnya hanya dipahami sebagai salah satu tahapan dari ritual pemilu. Bahasa kampanye, dalam berbagai versinya hanya dipahami sebagai ekspresi kreativitas untuk menarik perhatian massa atau simpati publik. Pertanggungjawaban muatan yang terkandung di dalam pesan-pesan kampanye seakan terabaikan atau terlupakan. Padahal untuk mengevaluasi kinerja kepemimpinan seorang pejabat publik/politik, perlu dimulai dari proyeksi-proyeksi yang pernah dipresentasikan saat kampanye dan diperbandingkan dengan fakta-fakta yang telah dicapai selama periode kepemerintahannya.</p> <p><i>AJGM/V/84</i></p> <p>Parpol yang cerdas, terintegrasi dan bervisi ke depan seharusnya telah melengkapi bangunan idealismenya dengan semua perangkat itu. Bukan larut dalam wacana-wacana sporadis yang kemudian jadi bulan-bulanan berita kelas <i>infotainment</i>. Kelas hiburan. Semua produk gagasan parpol, lewat para politisi di parlemen maupun pejabat politik di berbagai pusat kekuasaan tak dapat menafikan unsur-unsur terkecil sekalipun selama itu bernuansa janji kepada masyarakat.</p> <p><i>AJGM/VI/85</i></p> <p>Fakta-fakta empiris membuktikan, realitas kampanye cenderung terpisah atau dipisahkan dari realitas kinerja kepemimpinan; dan hasil terpisah pula dari tanggung jawab parpol selaku institusi pengusung. Kilah dalih demikian sangat terlihat mencolok ketika para politisi tersebut tersandung kasus hukum dan berdampak serius pada citra dan kredibilitas parpol. Upaya untuk memisahkan keterkaitan antara individu dan parpol dilakukan segala daya.</p>
--	--	--

		<p><i>AJGM/VII/85</i> Retorika, janji, wacana, atau apapun istilahnya adalah anak kandung gagasan parpol. Ia perlu dikawal dan dibuktikan ke masyarakat. Bahkan perlu dipertanggungjawabkan di mata hukum. Bukan sekadar hukuman moral dan sosial. Setiap terjadi penerbitan gagasan, hakikatnya telah terjadi sebuah proses komunikasi yang di dalamnya memuat harapan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dengan demikian, ia mengandung kewajiban dari si penerbit gagasan untuk memenuhi janji sesuai takaran porsi dan proporsinya. Kalau semua pihak berkeinginan tradisi politik negeri ini bermartabat dan elegan, maka retorika, tak dapat lagi hanya dijadikan alat untuk membohongi dan membodohi publik?</p> <p><i>AJGM/VIII/85-86</i> Retorika perlu mendapat perhatian serius. Sebagai teknik persuasi politik, retorika terderivasi ke dalam tiga jenis atau kategori (versi Aristoteles atau klasik) yang masing-masing memuat urutan jenis dan penerepannya. Pertama, retorika deliberatif, memfokuskan diri pada apa yang akan terjadi di kemudian hari bila diterapkan sebuah kebijakan di masa sekarang. Kedua, retorika forensik, lebih memfokuskan diri pada sifat yuridis dan berfokus pada apa yang terjadi di masa lalu untuk menunjukkan kebijakan itu benar atau salah, perlu diapresiasi atau dikritis. Ketiga, retorika demonstratif, memfokuskan diri pada aspek epideiktik, wacana penghargaan atau penistaan dengan tujuan memperkuat sifat baik atau sifat buruk seseorang, lembaga maupun gagasan.</p> <p><i>AJGM/IX/86</i> Karena retorika adalah seni publik yang mampu membentuk opini, beberapa orang dahulu, termasuk Palto menemukan kesalahan di dalamnya. Mereka mengklaim bahwa retorika dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, padahal pada saat yang sama ia juga bisa digunakan untuk menipu atau memanipulasi. Masyarakat tidak mampu menganalisis secara jernih, karena itu mereka mudah terpengaruh oleh pidato yang paling persuasif. Dengan demikian, kehidupan</p>
--	--	--

		<p>masyarakat dapat dikendalikan oleh orang-orang yang pandai berpidato dan beretorika.</p> <p><i>AJGM/X/86-87</i></p> <p>Persuasi Komunikasi Politik</p> <p>Pelajaran yang dapat dipetik dari kondisi ini, masyarakat perlu ekstra waspada pada setiap persuasi politik di musim kampanye. Retorika dengan berbagai bentuk dan isinya dipastikan akan mengepung masyarakat lewat berbagai jalan. Sejauh ini belum ada tim ahli yang bertugas memegang kendali otoritas untuk mengevaluasi batas-batas kelayakan pesan, ekspresi, dan visualisasi dikaitkan dengan kompetensi dan kondisi faktual calon peserta pemilu. Apabila terjadi kasus obat sakit kepala yang dipromosikan sebagai obat sakit kanker, maka akan sangat berbahaya akibatnya; selain menjebak kenaifan masyarakat juga merupakan aksi pembohongan dan pembodohan publik.</p> <p><i>AJGM/XI/87</i></p> <p>Semangat yang menggebu untuk menang acapkali membuat siapapun peserta kampanye dalam setiap pemilu cenderung menabrak rambu atau etika. Kemenangan adalah target, karena itu mesin politik harus bekerja semaksimal mungkin agar target yang sudah direncanakan dapat tercapai. Etika adalah wilayah lain dan dia dianggap berada di luar domain politik <i>an sign</i>. Kemenangan adalah kehormatan dan kebanggaan, sementara kekalahan adalah sebaliknya.</p> <p><i>AJGM/XII/87</i></p> <p>Pola pikir tajam di atas tampaknya juga melekat dalam alam bawah sadar sebagian masyarakat. Pemilu yang notabene sebuah kompetisi, tujuan utamanya tiada lain selain mencapai kemenangan. Tindakan kurang terpuji acapkali ditempuh demi mencapai tujuan itu. Sehingga, bukan hal yang naeh bila pihak yang kalah berkecenderungan memprasangkai pihak yang menang.</p> <p><i>AJGM/XIII/87</i></p> <p>Dalam situasi berlatar belakang psikologis seperti ini, sulit berharap munculnya sikap</p>
--	--	---

		<p>sportif pihak yang kalah untuk berbesar hati mengakui pihak yang menang. Massa yang ada di belakang itu semua bagaikan realitas rumput kering yang sewaktu-waktu dapat disulut api provokasi negatif. Ini juga menjadi pekerjaan rumah parpol; tidak cukup hanya para kader yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan politik, massa pendukung mereka juga memerlukan pembekalan serupa.</p> <p>AJGM/XIV/88</p> <p>Dalam konteks ini, retorika sebagai ruh dan acuan persuasi komunikasi politik juga berpeluang sangat besar untuk menciptakan keutuhan maupun kekisruhan persepsi. Para politisilah yang memegang kendali di lapangan. Apakah mereka akan dengan tulus menebar gagasan dan inspirasi atau akan memanipulasi akal sehat masyarakat demi pamrih sesaat. Betapa pun pelaksanaan kampanye pemilu belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, sebagian di antaranya dianggap berhasil dan membanggakan. Salah satu pelajaran berharga yang bisa dipetik dan dijadikan catatan adalah pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 lalu, di sana akal sehat dan kedaulatan masyarakat benar-benar muncul sebagai panglima.</p> <p>AJGM/XV/88</p> <p>Moralitas Analisis</p> <p>Republik Badut mungkin sebuah republik sungguhan, mungkin hanya metafora, mungkin juga ia negeri yang disebut orang sebagai Indonesia. Hal yang paling penting dari semuanya, untuk melangkah maju ke depan, negeri ini membutuhkan pemimpin yang baik.</p> <p>“Masyarakat memerlukan inspirasi dan pemimpin nasional yang mampu menggerakkan bangsa kita untuk mencapai kemajuan. Tanpa itu bangsa ini terancam terjebak dalam kubangan masalah yang mengerdilkan, bahkan menularkan energi negatif,” demikian pesan menarik dari Prof. Komaruddin Hidayat.</p>
9.	Menjadi Rakyat Cerdas dan Berdaulat	<ul style="list-style-type: none"> - Teori superioritas - Ironi <p>Pencitraan/MRCdB/I/89</p> <p>Berikut ini adalah sekumpulan <i>oneliner</i> (lelucon opini pendek) hasil kreasi penulis yang merepresentasikan <i>uneg-uneg</i> rakyat Republik Badut. Mudah-mudahan dapat</p>

	<p>(MRCdB)</p>	<p>ikut membuka wawasan dan inspirasi bagi pembaca sekalian. Ciri-ciri rakyat yang cerdas dan berdaulat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Sikap politiknya tidak terpengaruh oleh politik uang. 7. Biarpun setahun terima BLSM seribu kali, mereka tahu duit itu berasal dari rakyat karena itu mereka tidak berutang budi kepada penguasa apalagi parpol tertentu. 8. Intimidasi dan berbagai ancaman lain tak membuat mereka surut dari keyakinan semula. 9. Parlemen jalanan adalah langkah pamungkas ketika penyelenggara Negara ingkar dari konstitusi dan telah menyalahgunakan kekuasaan secara sistematis dan terstruktur. 10. Partisipasi dalam pemilu adalah hak, Oleh karena itu, keikutsertaan rakyat terjadi karena kesadaran bukan pemaksaan. <p>MRCdB/II/90</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revolusi sebenarnya bukan sesuatu yang heboh dan menegangkan; ibarat computer ia Cuma mengganti <i>hardisk</i> lalu dilakukan install ulang <i>software</i> baru yang tidak tercemar virus. Cuma itu! - Lagi soal logika subsidi. Yang kaya kana da beban dan kewajibannya sendiri, misalnya bayar pajak gede untuk apa saja, dirinya sendiri, perusahaan, rumah, mobil, dll... jadi kalau mereka sedikit bias menikmati subsidi kan juga dari uangnya sendiri... trik pemerintah mempertentangkan kaya miskin dalam soal subsidi BBM itu seperti logika pertentangan kelasnya Marx... bagaimana ini? - Rupanya kerumitan dan keruwetan tarif transportasi publik tidak masuk agenda pemerintah dan DPR ketika mereka akan menaikkan harga BBM. Yang dipikir cuma fiskal, subsidi salah sasaran dan Balsem (BLSM). Sangat egois dan parsial. - Kalau saja diberi otoritas untuk menaikkan harga BBM, maka premium saya pathok di harga 20 ribu rupiah perliter; solar 17.500 perliter. Alasannya? Kami butuh pesangon banyak untuk strat di 2014. - Caleg yang menolak dipublikasikan KPU, jelas mengidap sindroma malu-malu
--	-----------------------	--

		<p>kucing.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yang paling ditunggu rakyat dari kasus Century tiada lain selain siapa dalang, sutradara, aktor intelektual dan biangkerok di balik itu semua. Moga drama yang ditunjukkan KPK sepadan dengan goal akhir dari sinetron ini. - Satu kg telor ayam pernah dihargai seribu perak. Lalu naik, dua ribu. Naik lagi, lima, sepuluh, lima belas dan sekarang 20 rebu rupiah. Teman saya bilang itu bukan inflasi rupiah, tapi justru TELORlah yang naik status dan nilai intrinsiknya. Menurut Anda? <p><i>MRCdB/III/91</i></p> <p>Tambahan Syarat untuk Calon Presiden Republik Badut 2014-2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Punya wawasan IT. 2. Bisa buat akun jejaring sosial sendiri. 3. Bisa menulis lagu, minimal jingle untuk pembuka “Sinetron Negara”. 4. Punya imajinasi tinggi bahwa musuh ada di mana-mana. 5. Pintar merajuk dan memasang wajah iba. <p><i>MRCdB/IV/91</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada humor khas Indonesia (baca: Jawa) namanya <i>NGLULU/NYOLU</i>. Kalau teori superioritas mengerdilkan pihak lain untuk memperoleh efek tawa, maka <i>nglulu/nyolu</i> mengangkat tinggi-tinggi pihak tertentu sampai tidak masuk akal dan orang mulai curiga, juga untuk memperoleh efek tawa. - Dalam kultur Betawi, menurut logika teorinya H Mahbub Djunaidi, kasus yang dialami Munarwan dan Thamrin A Tamagola itu akan menjadi semakin lengkap seandainya diberi ending TAT mengambil gelasnya lalu menyiram mukanya sendiri sekuyub-kuyubnya. - Kalau badan lagi meriang, <i>awak pathing greges</i> kepala <i>nyut-nyut</i>, jadi inget gantungan kunci dari Jogger, Bali, yang ada pesannya, “Beruntunglah Anda yang bias sakit kepala, karena itu pertanda Anda masih punya kepala.” - Apa yang dianggap MULIA pada situasi krisis seperti sekarang?
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Bukan raja, bukan Presiden, tapi logam... paling cepat menyelesaikan masalah tanpa masalah! - LIPI dan banyak universitas sungguhan punya banyak doktor dan ahli energi, mengapa pemerintah jarang membincangkan energy alternatif, pengganti BBM. Matahari, angin, panas bumi, laut, dst dst... Biaya dong mereka untuk melakukan penelitian supaya ada pilihan selain BBM... yang murah dan menyejahterakan rakyat! Malah duit dihambur-hamburkan untuk ongkos "politik" legislasi mulu. - Golput yang baik dan benar bukan pemilih yang tidak mencoblos sama sekali – karena kertas suara kosong bias disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Golput yang elegan adalah yang mencoblos lebih dari satu. Kertas suara langsung dinyatakan tidak sah. Dan di sana tidak ada peluang untuk disalahgunakan oleh siapa pun. - Boleh tidak setuju, dua Bapak Negara yang perlu diacu pemikiran dan gagasannya untuk rujukan kemajuan bangsa di situasi seperti ini adalah Gus Dur dan Buya Syafii Maarif. - Doa yang bakal dikabulkan Tuhan, kabarnya adalah doa yang tidak njangkar apalagi main perintah. Misalnya, Ya Tuhan beri aku rezeki berlimpah. Nah, ini beda dengan, Ya Tuhan kumohon izin pada-Mu. Berikan aku rezeki berlimpah. - Koruptor terus beroperasi, KPK terus menangkapi, begitu terus sepanjang hari. Pertanyaannya, kapan bangsa ini bias berkarya dan berprestasi? - Skeptis pada bakal caleg 2014? Coblos saja semua, kekhawatiran Anda akan sirna! - Seratus ribu rupiah sehari mengakibatkan lima tahun menderita; itulah lobang jebakan manis yang penuh bias. Waspadalah! Waspadalah! Wasapadalah!!! - Banyak orang Jawa yang kini tidak bias ngomong Jawa dan nulis Jawa, peluang bagi yang berminat buka kursus. Kursus Bahasa Jawa! - Pemakai aktif narkoba kebanyakan tergolong orang yang gagal berimajinasi. Biasanya itu terjadi karena di usia dininya mengabaikan bacaan sastra, tak gaul pada kesenian: teater, musik, dan seni rupa. Believe it or not!
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan parpol dengan rakyat itu nyaris seperti muda-mudi pacaran; dimulai dari pacaran indah, perkawinan lalu percekcokan, perselingkuhan.. dan setelah piring dan gelas berterbangan perceraian tak dapat dicegah lagi. - Tadi malam kami orang-orang “gila” dan berambut gondrong ngobrol soal kedalaman hingga semalam suntuk; untunglah tidak sampai kecemplung. <p><i>MRCdB/V/93</i></p> <p>BUNUH DIRI KARENA TEKANAN HIDUP</p> <p>Sudrun kaget mendapat kabar Tugimin, teman AKRAbnya meninggal karena bunuh diri. “Apa yang terjadi sebenarnya?” Tanya Sudrun pada Karyo, tetangga Tugimin. “Karena tidak kuat mengalami tekanan hidup, ia bunuh diri dengan cara minum solar.”</p> <p>“Lho, kenapa solar?” Tanya Sudrun heran.</p> <p>“Habis kalau premium lebih mahal, katanya”</p> <p>Gratifikasi lain gampang saja untuk dikembalikan ke KPK supaya tidak terjerat masalah hukum; tapi bagaimana cara mengembalikan gratifikasi seks?</p>
10.	<i>Anomali Komunikasi Rakyat-Aparat (AKRA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori bantuan - Guyon parikenan 	<p>Pembelaan proletar/AKRA/I/95</p> <p>Ini adegan karikatural yang mungkin perlu kita cermati bersama. Di masa kampanye, tampak seorang calon kepala daerah sangat ramah dan banyak senyum. Ke manapun ia menyalami orang-orang yang ditemuinya dengan hangat. Bahkan ketika ia menjumpai sekumpulan orang di suatu tempat, dengan sangat santun ia bersujud kepada mereka dan memohon agar sudilah mereka memilih dirinya menjadi kepala daerah dan ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka sekuat tenaga.</p> <p><i>AKRA/II/95</i></p> <p>Syahdan, Pemilukada rampung secara apik dan tuntas. Si calon yang ramah dan banyak senyum itu terpilih hampir mutlak. Masyarakat bergembira menyongsong pemimpin pilihan mereka. Waktu pun berlalu, sesuatu yang ditunggu-tunggu ternyata tak kunjung muncul yang ada hanya suasana senyap dan bisu. Masyarakat tampak gelisah, pembangunan jembatan yang dijanjikan tak kunjung terealisasi. Listrik</p>

		<p>masuk desa mereka, tak juga terlihat tanda-tandanya. Jalanan tanah becek yang akan diaspal juga cuma janji gombal.</p> <p><i>AKRA/III/95</i></p> <p>Mereka lalu berbondong-bondong menghadap Pak Kepala Daerah. Kedatangan mereka yang berjumlah banyak langsung dihadang petugas keamanan; bahkan tak lama kemudian tiga truk polisi didatangkan untuk mengamankan keadaan. Wakil masyarakat menjelaskan kepada petugas tentang niat mereka untuk bertemu langsung kepada Pak Kepala Daerah untuk menanyakan janji beliau di masa kampanye dulu. Bagi petugas persoalannya tetap menjadi lain, apalagi ia punya prosedur standar operasi sendiri, maka keputusannya, rombongan itu ditolak masuk.</p> <p><i>AKRA/IV/95</i></p> <p>Sambil meluapkan kekesalan dan kekecewaan, rombongan masyarakat itu akhirnya berteriak-teriak dari luar pagar. Ibarat realitas rumput kering, kekesalan, dan kekecewaan itu lalu menggumpal menjadi kemarahan. Satu dua orang menggoyang-goyang pagar bangunan, lalu disusul beberapa yang lain. Satu dua orang memukul-mukul tiang lampu jalan, lalu disusul beberapa yang lain. Bukan hanya pagar yang roboh, tiang lampu dan lampunya juga dirobohkan dan dirusak masa. Lalu merembet ke fasilitas publik lainnya, merembet pada kendaraan bermotor dan kaca-kaca bangunan. Bara api kemarahan masyarakat nyaris meluluh lantakkan simbol-simbol kemegahan dan keangkuhan pemerintahan daerah.</p> <p><i>AKRA/V/95</i></p> <p>Polisi turun tangan. Bentrok antara masa dan polisi tak terhindarkan; semakin lama semakin meruncing. Lalu terdengar suara dor-dor-dor! Satu, dua, tiga dan beberapa orang dari rombongan masa terhuyung lalu roboh tergeletak di pelataran pemda. Sejenak hening. Masa serombongan seperti tersihir, serentak mereka diam. Ternganga, seperti tak percaya pada apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Terlihat beberapa orang dari rombongan tak bergerak sama sekali, beberapa lainnya mengerang kesakitan.</p>
--	--	--

			<p><i>AKRA</i>/VI/95</p> <p>Waktu seperti berhenti. Suasana semakin mencekam. Begitulah harga yang harus dibayar untuk komunikasi yang dibuat menjadi rumit dan tak adil. Sebuah ironi yang terus-menerus berulang dan kita tak pernah belajar dari pengalaman masa lalu.</p>
11.	<p><i>Melancong ke Negeri-negeri Bebas Korupsi (MkNBK)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori bantuan - sinisme 	<p>Korupsi/<i>MkNBK</i>/I/98</p> <p>Harus diakui, secara umum, kondisi Republik Badut saat ini berada dalam keadaan <i>extra ordinary situation</i>; keadaan yang luar biasa. Dibutuhkan penyikapan yang juga luar biasa. Tidak cukup hanya membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena lembaga resmi kepolisian dan kejaksaan agung tidak berdaya apa-apa. Tidak cukup hanya mempercayakan tegak lurusnya undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Tidak cukup menyerahkan jujur dan adilnya pelaksanaan peradilan kepada Mahkamah Yudisial. Semua hal, yang ada kaitannya dengan moralitas dan etika politik pemangku negeri harus dikritisi dan dicermati dari kaca mata <i>extra ordinary matters</i>.</p> <p><i>MkNBK</i>/II/98</p> <p>Kaca mata yang luar biasa pulalah yang akan dapat membuka semua tabir keagungan semu, pencitraan artifisial dan pembohongan publik itu nama kaca mata analisis itu bisa ilmu apa saja, asal luar biasa dan bukan ilmu normatif. Ilmu yang cocok dengan kondisi luar biasa tadi. Beberapa alternatif teori dari ketiga tokoh ilmuwan humor di bawah ini juga dapat menelanjangi segala kepura-puraan. Dapat menyelinap dan menginvestigasi motif-motif yang sangat rumit dan tersembunyi. Tak ada kecualian dan tipu muslihat dapat bersembunyi dari bidikan analisis mereka. Di liang semut sekalipun. Apalagi, bila semua itu terjadi di sebuah negeri yang bernama Republik Badut. Lewat analisis mereka, kita akan mendapatkan simpul-simpul pemahaman bagaimana isi perut dan organ dalam orang-orang penting di Republik Badut. Bagaimana mereka bekerja, melakukan trik, manuver, dan membuka tabir rahasia sim salabim yang ada.</p> <p><i>MkNBK</i>/III/98</p>

		<p>Melihat Republik Badut dalam satu dekade ini, kita seperti dibawa ke peradaban inklusif dalam makna yang sebenar-benarnya. Peradaban pat gulipat yang seharusnya sudah lama kita tinggalkan, dalam faktanya justru makin menggejala seiring dengan sikap politik para pemangku negeri yang mau benar sendiri dan mau menang sendiri.</p> <p><i>MkNBK/IV/98</i></p> <p>Kita dapat menyaksikan fenomena-fenomena nirlogika yang bertebaran di sekitar kita. Bagaimana akal sehat dicampakkan, tenggang rasa semakin mengeras dan membeku menjadi primordialisme individualistik; paham sektarianisme menebar terror dan ketakutan di mana-mana, kekerasan dan perilaku vandalistik merebak bagi jagoan kesiangan, hingga penegakkan hukum yang tergadaikan dan sikap melegalkan jalan pintas mencapai keberhasilan dan kekayaan dengan jalan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dianggap wajar dan bukan perilaku yang mencemarkan.</p> <p><i>MkNBK/V/100</i></p> <p>Secara fisik kita melihat gemerlapnya teknologi, sarana dan prasarana, Namun, bila dicermati sebagian besar masyarakat hanya menjadi penonton atas kerja keras yang diklaim oleh pemangku negeri tersebut sebagai “keberhasilan-keberhasilan” itu. Sejurnya, masyarakat tak merasakan keberhasilan itu sampai pada sasaran atau menyentuh peningkatan kualitas kehidupan mereka sehari-hari; beban hidup semakin berat, penghasilan stagnan, pengangguran kian meresahkan dan jurang pemisah antara kaya dan miskin makin menganga. Masyarakat hanya dapat menggantungkan hidup dari ketidakpastian-ketidakpastian. Kinerja fisik yang sering dibangga-banggakan pemangku negeri itu tak pernah dapat membuat masyarakat lupa akan fakta yang sebenarnya terjadi, bahwa Republik Badut ini sebenarnya sedang berada dalam kondisi sangat kronis.</p> <p><i>MkNBK/VI/100</i></p> <p>Sakit yang menggerogoti seluruh bangunan negeri itu bersumber dari perilaku pragmatis dan narabas para pemangku negeri; lebih spesifik lagi, para politisi dan pejabat publik yang dipercaya rakyat untuk mengelola negara Namun,</p>
--	--	---

		<p>menyalahgunakan kepercayaan itu untuk menyalurkan sahwat-sahwat personal atau komunal mereka akan kekayaan dan kekuasaan. Penjarahan kekayaan negara yang notabene adalah juga kekayaan rakyat, terjadi lewat berbagai modus yang sangat tipikal seakan memenuhi asas legalitas dan konstitusional. Di parlemen, ayat-ayat hukum yang sebenarnya punya dampak signifikan bagi masyarakat luas, diperjualbelikan demi kepentingan dan pamrih sesaat. Bayangkan bila parlemen hanya mengedepankan keberpihakan pada kapitalis jahat dan mafia siluman, akan seperti apa penderitaan yang harus ditanggung masyarakat luas? Aspirasi publik, nyaris hanya sebatas kosmetik ketika para caleg merayu-rayu calon konstituennya; ketika mereka sudah duduk nyaman di kursi legislatif, maka prioritas yang terjadi berbeda lagi kalkulasinya.</p> <p><i>MkNBK/VII/101</i></p> <p>Secara normatif - dalam berbagai literatur – disebutkan, bahwa korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p> <p><i>MkNBK/VIII/101</i></p> <p>Pertanyaannya, seberapa serius sebenarnya pemberantasan korupsi di Republik Badut? Sudahkah ia menyentuh aspek paling fundamental dan substantif sehingga hasilnya terlihat dalam perilaku budaya di seluruh lapisan masyarakat? Serangkaian pemberitaan yang gegap gempita di media tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejurnyanya belum mampu memberikan harapan konkret bagi masyarakat luas.</p> <p><i>MkNBK/IX/102</i></p>
--	--	--

		<p>Parade pemberitaan media mengenai investigasi (penyelidikan, penyidikan), pemanggilan-pemeriksaan, penetapan tersangka, penetapan terdakwa dan seterusnya oleh KPK kepada sejumlah pihak yang ditengarai sebagai pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, dikhawatirkan hanya sebatas ritual pendataan para pendosa, apalagi bila terdakwa dijatuhi hukuman di bawah lima tahun oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Hukuman yang sangat normatif. Tidak ada efek jera, bahkan dalam kalkulasi matematis para pelaku korupsi, jika pengorbanan waktu dan pikiran mereka selama menjalani hukuman dalam penjara dibandingkan dengan “keuntungan” bersih yang diperoleh setelah terpidana bebas masih sangat memadai, maka korupsi akan tetap menjadi preseden laten yang terus menggoda bagi sejumlah pejabat publik.</p> <p><i>MkNBK/X/102</i></p> <p>Keluar modal – balik modal. Takaran tentang sanksi sosial, rasa malu, terdeskriminasi di masyarakat dan hukuman moral lainnya seperti terabaikan karena alasan-alasan yang sangat personal dan normatif pula. Apakah ini pertanda telah terjadi distorsi motif yang amat fatal dalam memahami amanat yang diberikan rakyat kepadanya? Atau telah terjadi degradasi pola pikir sebagai pejabat publik? Apalagi memahami reputasi terkait dengan makna <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</p> <p><i>MkNBK/XI/102</i></p> <p>Hal-hal di masa lalu dianggap tabu, bahkan memalukan kini justru dianggap wajar. Apakah itu terjadi lantaran banyak pejabat publik lain juga melakukannya? Atau karena godaan yang begitu menggiurkan sehingga membuat iman dan benteng pertahanan melemah? Atau karena untuk mencapai jabatan yang ada saat ini ia harus mengeluarkan ongkos politik yang besar, sudah sewajarnya bila mengembalikan modal plus bunga – dan jika memungkinkan, melipatgandakan modal – adalah prioritas utamanya?</p> <p><i>MkNBK/XII/103</i></p> <p>Skeptisme pun muncul, selama putaran siklus lingkaran itu berlaku, mustahil <i>punishment</i> seberat apa pun dapat menjadi solusi bagi pemberantasan korupsi di</p>
--	--	---

		<p>Republik Badut; apalagi bila sanksi hukumannya, sedang-sedang saja (di bawah lima tahun). Mata rantai sebab – akibat – keluar modal dan mengembalikan modal – itu seperti menemukan “kebijakan”-nya sendiri sebagai sistem yang melekat, apalagi bila motif memperoleh jabatan itu dilatarbelakangi oleh kalkulasi-kalkulasi pragmatis dan matematis.</p> <p><i>MkNBK/XIII/103</i></p> <p>Ongkos politik – biaya politik – ongkos sosial. Selain ongkos politik – ditanggung peserta pemilu – ada juga biaya politik – ditanggung negara (APBD – untuk pilgub dan pilkada) yang nilainya sangat fantastis; di salah satu provinsi saja pernah menghabiskan biaya hingga satu triliun rupiah. Mengapa demokrasi meminta bayaran begitu tinggi? Belum lagi besarnya ongkos sosial yang harus dibayar bila terjadi kontroversi di penghitungan akhir. Tak adakah mekanisme yang lebih murah dan alamiah?</p> <p><i>MkNBK/XIV/103</i></p> <p>Murah dan alamiah bukan sekadar mereduksi biaya teknis dan logistik seminimum mungkin Namun, juga perlu dipikirkan model alternatif yang lebih efektif, efisien, valid dan aman, misalnya coblosan elektronik online yang terintegrasi secara regional dan terpantau nasional. Pengurangan biaya menyangkut kotak, kertas, suara, tinta, dan tenaga teknis rekapitulasi manual sangat berkemungkinan dapat menghemat biaya secara signifikan. Perangkat keras dan lunak coblosan elektronik tersebut dibuat portable sehingga dapat difungsikan berkali-kali di berbagai wilayah di Republik Badut secara berpindah-pindah.</p> <p><i>MkNBK/XV/104</i></p> <p>Pilihan untuk melakukan pemilu secara serentak dan menyeluruh juga bukan alternatif yang buruk. Inti masalahnya tetap menuju pemilu yang murah dan proporsional. Pemilu dengan biaya tinggi hanya akan menghasilkan pemimpin yang sibuk dengan hitungan untung-rugi. Upaya untuk melakukan penelitian dan uji coba dari berbagai opsi yang ada tetap perlu dilakukan agar kita terhindar dari pemborosan</p>
--	--	--

		<p>dan kekonyolan-kekonyolan.</p> <p><i>MkNBK/XVI/104</i></p> <p>Dari sisi peserta pemilu, sudah saatnya pers atau media massa sedini mungkin menyediakan ruang bagi partisipasi publik – bukan surat pembaca – untuk terus menerus mewacanakan tokoh dan berbagai latar belakang (politik, bisnis, masyarakat umum, seni budaya, pegawai negeri sipil/militer, pers, dan lain-lain) yang telah membuktikan rekam jejak positif di masyarakat untuk didiskusikan bersama. Terutama menyangkut gagasan-gagasan mereka tentang kebangsaan. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya diwacanakan untuk bursa caleg, cakada, cagub, bahkan capres. Parpol dapat mengajak mereka bergabung jika menawarkan visi-misi yang sejalan dengan haluan partai. Demikian pula masyarakat – lewat jalur independen – dapat mengusung mereka untuk maju sebagai calon peserta pemilu. Partisipasi demikian seharusnya dapat memberikan informasi lebih transparan, alami, dan obyektif.</p> <p><i>MkNBK/XVII/105</i></p> <p>Skema pemikiran di atas – yang salah satunya dapat memutus mata rantai siklus lingkar setan keluar modal-balik modal – akan terwujud bila undang-undang mengamanatkan itu. Undang-undang akan menjadi rujukan utama bila pihak-pihak yang berkompeten mau mengakomodasi dan menyesuaikan aspirasi masyarakat tersebut; dengan landasan pemikiran yang lebih maju dan visioner demi kehidupan demokrasi Republik Badut yang lebih baik dan sehat.</p> <p><i>MkNBK/XVIII/105</i></p> <p>Peran konstitusi. Perilaku korup atau tindak pidana korupsi memang tidak dapat semata dipahami sebagai penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi atau golongan. Keberadaannya juga mencerminkan produk konstitusi yang ada di atasnya. Kontroversi penerbitan undang-undang parpol, pemilu dan lain-lain yang disinyalir penuh aroma interest para pengambil pleno di parlemen masa lalu, pada akhirnya hanya membuat persoalan bangsa yang makin akut. Seharusnya ia menjadi bahan pertimbangan semua pihak agar tidak berlarut-larut. Ini artinya,</p>
--	--	---

		<p>amandemen konstitusi sudah tak bisa ditawar-tawar lagi.</p> <p><i>MkNBK/XIX/105</i></p> <p>Studi banding para anggota parlemen ke luar negeri sudah dilangsungkan berulang kali. Masyarakat sangat berharap setelah melihat mereka pulang, anggota parlemen makin bijak dan bestari. Membawa oleh-oleh ilmu dan pengetahuan baru yang berguna bagi bangsa dan negara. Andaikan salah satu oleh-olehnya berisi ilmu dan pengetahuan bagaimana memeberantas korupsi di suatu negeri, alangkah beruntungnya kita semua. Koruptor mengacak-acak, parlemen bertindak. Dengan menerbitkan konstitusi yang efek implementasinya dapat menutup semua celah dan lubang di semua sumber keuangan negara, sehingga tikus-tikus tidak dapat masuk ke sana.</p> <p><i>MkNBK/XX/106</i></p> <p>Lalu dari parlemen negeri mana saja kita bakal mendapatkan pembelajaran seperti itu? Tidak perlu mneyasar-nyasar dengan menghabiskan biaya besar tanpa hasil. Cukup ke beberapa negara berikut ini, setidaknya ini merujuk ke negeri-negeri yang oleh transparansi internasional di tahun 2001 (atau versi sesudahnya) dikategorika sebagai 12 negara paling minim korupsinya; yaitu Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, Swiss dan Israel.</p> <p><i>MkNBK/XXI/106</i></p> <p>Seharusnya bukan perkara rumit untuk menimba pengetahuan dan informasi bagaimana parlemen di negara-negara tersebut mengawal pemerintahannya sehingga menjadi negara yang minim korupsinya; negara yang bersih dan berwibawa di mata dunia. Cukup dengan copy paste konstitusi mereka dengan sedikit suntingan konten yang berkaitan dengan nilai lokal Republik Badut; selesai bukan? Seharusnya memang sangat sederhana seandainya parlemen kita juga dapat membuktikan bahwa dirinya juga bersih dan berwibawa di mata rakyatnya.</p>
--	--	---

12.	<p>Bukan Lawak Senayan (BKS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori bantuan - ironi 	<p>Pencitraan/BLS/I/107</p> <p>Bukan lawak senayan lagi mati suri, tidak laku, tidak banyak tanggapan, apalagi tampil di TV, Opera Van Java. Lawak lawak lain memang ada tampil di stasiun televisi, tapi sangat rutin, sekadar mengisi jadwal, tanpa <i>chemistry</i>. Tanpa greget. Itu artinya, mereka bisa dikatakan tidak hadir. <i>Sorry</i>, tolok ukur kualitatif memang kejam!</p> <p><i>BLS /II/107</i></p> <p>Pertunjukkan lawak yang sedang laku justru lawak dari Senayan, itu pertama. Sesudahnya lawak dari istana, Kuningan, Cikeas, Trunojoyo, dan beberapa tempat lain. Kehebatan lawak dari Senayan dan cs-nya itu tak kalah dengan perform <i>stand up comedy</i>, yang belakangan sedang digemari dan <i>booming</i>.</p> <p><i>BLS /III/107</i></p> <p>Mungkin karena alasan itu, sebagian pelawak asli bahkan sudah menyeberang dan ikut bergabung di Senayan, sehingga sudah dapat diduga, bahwa seni lawak yang sebenarnya, saat ini benar-benar sudah dalam kondisi mati suri. Anehnya, meskipun para pelawak asli memiliki perwakilan Senayan, <i>toh</i> itu bukan jaminan aspirasi mereka juga diperjuangkan di tempat terhormat tersebut.</p> <p><i>BLS /IV/108</i></p> <p>Berbeda dengan keistimewaan yang diperoleh para pelawak sebagaimana disebutkan di atas, keistimewaan yang diperoleh para pelawak asli hanyalah berupa sedikit hak untuk mengklaim bahwa lelucon atau humor boleh tidak perlu dibuktikan atau ada urusannya dengan pembuktian, apalagi pembuktian terbalik. Boleh “masa bodoh” dengan istilah benar atau salah (urusannya adalah soal: lucu atau tidak lucu), boleh menyindir seseorang atau situasi ke alam analogi atau metafora (<i>Republik BBM, Democrazy, Republik Mimpi, dll</i>), supaya tidak kena somasi atau protes oleh pihak yang merasa dirugikan olehnya. Kecuali ada lembaga peradilan di alam metafora yang melayani keperluan tuntut menuntut itu.</p> <p><i>BLS /V/108</i></p>
-----	---	--	--

		<p>Tetapi, paradoks yang kemudian terjadi adalah: bila kegatalan sejumlah politisi dan pejabat publik untuk melawak semakin tak terbendung dan pelawak asli semakin bergenit-genit dalam gaya politisi, bisa dipastikan masyarakat akan menjadi semakin bingung dan mencurigai dirinya sendiri apakah yang tak waras itu yang menonton atau yang ditonton? Apakah fakta objektif sudah tak ada yang dapat dipercaya lagi karena sudah terkena virus insomnia identitas?</p> <p><i>BLS /VI/108</i></p> <p>Itu baru satu hal. Hal lain yang ambigu dan berbuntut polemik agak “menggelikan” karena adanya silang arus interest/persepsi adalah tentang kasus yang pernah menimpa Butet Kertaradjasa setelah membawakan monolog <i>Deklarasi Pemilu Damai 2009</i> pada Rabu malam, 10 Juni 2009; catatan masa lalu yang tak boleh dilupakan.</p> <p><i>BLS /VII/109</i></p> <p>Seperti pengakuan Butet sendiri, ia mendapat banyak pujian, sekaligus caciannya karena materi monolognya itu membuat tidak berkenan salah satu peserta Pemilu Damai, yang sebelumnya pernah <i>nanggap</i> Butet dengan tema yang berbeda. Untunglah, di lain hal, ada juga semacam “Atsmosfir” yang agak membangkitkan sedikit pencerahan setelah membaca tulisan Indra Tranggono di harian ibukota, 20 Juni 2009, yang berjudul “Negeri yang Suka Tertawa”. Saya kutipkan bagian yang mungkin inspiratif buat kita semua, “Maka ketika politik macet dan hanya menjadi jagat “jual-beli” kekuasaan, seni lawak perlu tampil dengan semangat dasarnya yang kritis, cerdas, visioner dan elegan. Seni lawak mampu menjadi medium yang akan mengembalikan publik pada esensi kemanusiaan. Pada pemulihan manusia..... dst.</p> <p><i>BLS/VIII/109</i></p> <p>Kembali ke lawak Republik Badut, apa sebenarnya kini yang sedang terjadi ketika para elit juga ikut-ikutan nimbrung “melawak” sehingga membuat peran para pelawak asli makin tersingkirkan dan tersungkurkan”.</p> <p><i>BLS/IX/108</i></p> <p>Peta Lawak Republik Badut</p>
--	--	--

		<p>Quo vadis seni lawak Republik Badut? Pertanyaan ini sungguh tidak mudah menjawabnya. Setebal apa pun saya memakai kaca mata saya, saya tetap tak mampu melihat tampilan peta lawak Republik Badut dengan jernih. Gambarnya kabur, buram dan kadang kosong sama sekali. Namun, bila kita mencoba melihat lawak Republik Badut dalam konteks industri (budaya/kreatif), lagi-lagi perspektifnya bergerak menuju ibukota.</p> <p><i>BKS/X/110</i></p> <p>Jujur saja, di kota ini peta lawak berbasis industri ini terlihat agak terang. Mungkin di kota-kota lain (daerah) ada tanda-tanda munculnya pelawak tunggal atau grup CC (coba-coba), tetapi itu tak sesemarak atau seheboh munculnya grup band IB (indie banget). Mengapa bisa begitu? Ya, karena main band relatif tidak sesulit main lawak (dalam konteks CC dan IB tadi). Bahkan seorang pengamat humor Amerika bilang, “Mati itu gampang sekali, tapi melawak sulitnya minta ampun, <i>men!</i>”.</p> <p><i>BLS/XI/110</i></p> <p>Kalau Miing Bagito bilang, dalam 10 tahun bisa saja lahir 100 doktor berkualitas, tetapi untuk pelawak berkualitas paling cepat hanya satu atau dua orang. Itu kenyataan yang harus diterima bangsa ini. Asumsi Miing itu nyaris paralel dengan fakta yang terjadi pada acara penjaringan bakat bila dibandingkan antara menyanyi dan melawak. Yang menyanyi tetap saja berlangsung mulus hingga sekarang, sementara yang melawak justru di-stop karena degradasi mutu yang terjadi cukup ekstrem.</p> <p><i>BLS/XII/110</i></p> <p>Bagi saya pribadi, kasus ini tidak aneh. Dugaan kasar saja, di tiap kota, taruhlah settingkat kabupaten atau kota, bukan tak mungkin di sana ada sekolah yang mengajarkan seni suara dan seni musik; juga bukan tak mungkin ada guru les privat yang mengajar seni vokal? Pertanyaannya, adakah sekolah yang mengajarkan seni lawak? Adakah guru privat yang mengajar seni melawak? Bagaimana mungkin kita berharap dengan sekonyong-konyong daerah memiliki calon-calon pelawak berbakat?</p>
--	--	--

		<p>Secara bergurau, orang-orang akan serta merta bilang, “<i>Mimpi ‘kali, ye?</i>”. <i>BLS/XIII/111</i></p> <p>Salah satu pilihan yang mungkin masuk akal dan terukur, bila kita memulai dari sekarang menyemai bibit yang baik, menanam dan kelak memanen hasil: calon-calon pelawak berbakat. Kandidat-kandidat semacam itu tidak dapat dipercayakan dan diserahkan semata-mata kepada kelompok-kelompok lawak yang kadang ada di tiap-tiap kota. Mereka mungkin hanya sibuk di ranah sosialisasi; tetapi nyaris tak pernah peduli pada penyelenggaraan pembelajaran dan pembekalan profesional dalam arti seluas-luasnya. <i>BLS/XIV/111</i></p> <p>Mengubah Pola Pikir</p> <p>Sisi lain yang penting diagendakan adalah mengubah pola pikir. Selama ini para pelawak senior selalu menciptakan mitos bahwa melawak itu tak dapat diajarkan atau dipelajari. Pelawak hanya muncul karena bakat. Maka semua kita termakan oleh mitos tersebut. Pada tataran teknik tampil, <i>blocking</i>, jeda dan artikulasi vokal, bukanlah di ilmu teater dan ilmu akting pada umumnya sudah ada, pelawak yang mau ngintip sedikit ke sana akan mendapatkan manfaat yang tidak sedikit. Yang membedakan secara prinsip antara lawak dan teater adalah teknik improvisasi. <i>BLS/XV/111</i></p> <p>Selain persoalan teknik dan improvisasi di atas, akan menjadi bernilai lebih pula bila si pelawak juga punya keahlian khusus lain; misalnya: menyanyi, memainkan alat musik, bermain sulap, melakukan atraksi-atraksi sensasional tertentu, melafadkan logat berbagai bahasa suku atau bangsa yang popular dan <i>akrab</i> di telinga masyarakat. <i>BLS/XVI/112</i></p> <p>Ada anggapan pula, bahwa melawak itu tidak memerlukan skenario. Mungkin benar, tetapi tidak demikian pengertiannya. Secara esensi ada dua pengertian “skenario” atau konsep persiapan, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konsep tertulis sudah kita pahami</p>
--	--	---

		<p>bersama; tetapi konsep tidak tertulis, ia dikonstruksi dalam angan-angan (hapalan) dan dimunculkan pada saat pelawak manggung di pentas. Skenario juga, tapi tidak tertulis.</p> <p><i>BLS/XVII/112</i></p> <p>Sebelum tampil setiap pelawak atau grup lawak tetap membutuhkan konsep. Untuk konsep tertulis dapat berupa sinopsis (ringkasan cerita), dapat pula <i>story line</i> (atau disebut juga <i>treatment</i>). Dalam <i>story line</i> kadang ada sepenggal dua penggal dialog; bagian ini pun tidak mengikat pelawak untuk membawakan dialog secara persis apa yang tertulis; pelawak dapat menyerap isi dialog dan ia dapat membawakan dengan “bahasa”-nya sendiri. Bahasa miliknya.</p> <p><i>BLS/XVIII/112</i></p> <p>Ada pula anggapan bahwa improvisasi itu soal nanti saja yang terjadi di atas panggung. Salah besar! Improvisasi yang bernilai tidak datang tiba-tiba, ia memerlukan persiapan yang matang. Persiapannya adalah banyak membaca, menonton, menyerap situasi, mengkritisi berbagai persoalan yang miring dan kurang beres. Bernilai tidaknya improvisasi seorang pelawak ketahuan dari wawasan intrinsiknya. Kelihatan sih, refleks saja, tetapi sesungguhnya pelawak yang improvisasinya bagus, dia selalu siap konsep di dalam kepalanya. Gampangnya ngomong, kalau saldo di tabungan minim, jangan mimpi bisa narik duit di ATM dalam jumlah besar.</p> <p><i>BLS/XIX/113</i></p> <p>Untuk keperluan <i>take</i> (pengambilan gambar), di beberapa stasiun TV Indonesia pada umumnya, seorang sutradara biasanya sudah memegang sesuatu yang disebut sebagai FOD (<i>Flow of Directions</i>) berupa <i>breakdown</i> cerita dan arus masuk keluar pemain: ke/dari panggung (<i>in-out frmae</i>). FOD itulah yang digunakan untuk mentaklimat (<i>mem-brief</i>) para pelawak dan bintang tamu (tunggal/grup/maupun galatama) selama tak lebih dari 15 menit.</p> <p><i>BLS/XX/113</i></p>
--	--	--

		<p>Bayangkan, seperti yang pernah saya tulis dengan judul “Lima Belas Menit, Keajaiban Seni Lawak” di harian ibukota beberapa tahun lalu, pelawak atau bintang tamu yang tak tahu <i>ba-bi-bu</i>-nya cerita, begitu datang langsung <i>di-make-up</i>; usai make up langsung <i>di brief</i>, usai <i>briefing</i> langsung main di <i>stage</i> (panggung tempat <i>shooting</i> diselenggrakan). Semua mengalir seperti air terjun. Tidak ada latihan, tidak ada kesempatan <i>sharing</i> ide. Dan uniknya, shooting berjalan lancar, <i>stock shot</i> pun kemudian siap di tangan petugas penggulungan <i>take</i>. Bayangkan pula, bagaimana proses produksi yang terjadi di teater, berapa lama diperlukan untuk <i>reading</i>, <i>blocking</i> dan lain-lain hingga ke titik di mana setiap pemain siap pentas di atas panggung?</p> <p><i>BLS/XXI/113-114</i></p> <p>Proses selanjutnya <i>stock shot</i> itu masuk ruang post pro untuk diedit, diisi musik, diberi grafis (tulisan), di –mix (gabung) dengan iklan (<i>commercial break</i>) dan lain-lain, tiga atau lima hari kemudian langsung bisa tayang. Betapa paket-paket yang pola penggarapannya bernuansa industrial ini sangat berkejaran dengan waktu. Anda belum membayangkan kesibukan di studio kaitannya dengan pembangunan set (yang harus <i>knock down</i>), tata lampu, kamera dan yang tak kalah hebohnya soal kostum. Kalau kebetulan temanya zaman-zaman kerajaan atau zaman yang akan datang serba futuristik, kehebohan di bagian <i>wardrobe</i> (kostum) tak kalah dengan persiapan kreatif dan <i>crew</i> pengambilan gambar.</p> <p style="text-align: right;">***</p> <p><i>BLS/XXII/114</i></p> <p>Impian kita semua untuk melihat seni lawak Republik Badut dapat tampil dengan semangat dasarnya yang kritis, cerdas, visioner, dan elegan. Itu tidak mustahil jika pelawak kita juga punya komitmen yang kuat pada mutu. Mutu dalam seni lawak, jangan disalahartikan, ia tidak lalu diwujudkan lewat omongan pelawaknya dengan bahasa ilmiah yang <i>ndakik-ndakik</i> atau kritik sosial dengan mata <i>mendelik-ndelik</i>, tidak. Mutu terbangun ketika antara teman, ide, dan estetika berjalan lancar, wajar dan</p>
--	--	---

			<p>proporsional. Orang juga menyaksikan adanya kebaruan tema/ide, pilihan lelucon yang sehat dan tepat, kritik sosial yang cerdas, bernilai pendidikan, dan dapat menjadi media katarsis bagi masyarakat.</p> <p><i>BLS/XXIII/114</i></p> <p>Penampilan <i>Quartet S</i> dari Malang di <i>TVRI</i> pada tahun 1980'an awal atau Srimulat pada tahun 1982-an – 1990-an; khususnya saat almarhum Gepeng masih bergabung, dapat menjadi rujukan yang inspiratif, betapa pertunjukkan mereka sangat <i>genuine</i> dan menarik sekali untuk dinikmati. Pertunjukkan lawak yang menghibur dan memperkaya batin penontonnya.</p>
13.	<p><i>Karantina Generasi Republik Badut (KGRB)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori keganjilan - Satir 	<p>Aparatus & represif/<i>KGRB/I/148</i></p> <p>Masyarakat Republik Badut yang waras pinginnya sih yang muda mencontoh yang tua supaya mereka dapat mewarisi nilai-nilai unggul agar regenerasi kepemimpinan tetap berjalan secara <i>smooth</i> dan damai. Persoalan kemudian timbul ketika fakta yang terjadi sungguh sangat memprihatinkan dan bikin pilu hati; apanya yang bisa dicontoh dari yang tua jika setiap hari dipertontonkan di tayangan TV tentang para "tetua" yang digiring ke KPK sebagai barisan pejabat atau politisi korup yang sepak terjangnya hanya menjarah harta Negara.</p> <p><i>KGRB/II/148</i></p> <p>Itulah yang menjadi alasan Kanjeng Prabu Presiden Republik Badut agak masygul dan gundah hati. Gundah hati tak kunjung berhenti, maka beliau pun mencoba berkontemplasi, masuk ke kamar pribadi. Merenung berjam-jam dan lahirlah sebuah lagu berjudul <i>Kumau Sampai di Sana</i>. Lagu pun diuji dengan memanggil penyanyi top untuk membawakannya. Setelah melakukan revisi nada dan syair alakadar, beliau pun memerintahkan orang kepercayaan untuk memproses agar lagu itu dapat diaransemen oleh tenaga ahli dari perusahaan <i>recording</i>.</p> <p><i>KGRB/III/149</i></p> <p>Gundah hati belum juga berhenti. Beliau berkонтemplasi lagi. Lahir lagu baru lagi. Demikian berulang-ulang sampai tak terasa telah tercipta sejumlah lagu yang layak</p>

		<p>untuk diterbitkan dalam bentuk album. Setelah melewati sejumlah proses peluncuran album perdana karya Kanjeng Prabu Presiden pun terlaksana secara megah dan sukses. Beliau menyaksikan seluruh prosesi itu dari tempat khusus. Tak terasa air matanya menitik satu-satu, membasahi krah jas abu-abunya yang terbuat dari bahan sutera. Gundah hati belum juga berhenti. Bahkan tersiar kabar terbatas, sudah beberapa hari ini beliau tidak pernah tidur sama sekali sehingga kantung bawah matanya menggelembung. Ini membuat para dokter istana cemas.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p><i>KGRB/IV/149</i></p> <p>Pagi hari, tanggal 31 April, saya mendapat telepon dari Kanjeng Prabu Republik Badut. Bunyi telepon itu kurang lebih meminta waktu saya menghadap beliau pada pagi itu juga, padahal Anda tahu saya sedang enak-enaknya menyantap koran pagi dan menyeruput kopi hangat yang membuat sekujur tubuh terasa bugar dan hebat. Telepon Presiden pagi itu adalah yang kelima kalinya. Sekian lama itu pula saya selalu beralasan sedang sangat sibuk sehingga belum dapat menghadap beliau.</p> <p><i>KGRB/V/149</i></p> <p>Tampaknya Presiden tidak putus asa; pagi hari itu adalah puncak kegigihannya. Terus terang saya benar-benar tidak tega; sebagai warga negara yang baik saya merasa berkewajiban menghadap Presiden, siapa tahu Beliau memang sedang butuh teman curhat atau paling tidak teman diskusi.</p> <p><i>KGRB/VI/150</i></p> <p>Nah begitu saya sampai di ruang dalam Istana Kepresidenan, saya telah disambut hidangan di atas meja. Sarapan pagi ala istana. Bukan hanya hidangan lezat yang menyambut, Presiden sendiri juga menyambut dengan tergopoh-gopoh, mungkin beliau khawatir saya balik lagi ke rumah. Itu biasa terjadi kalau setibanya si tamu di dalam istana lalu merasa sebagai <i>Mr. Nobody</i>, dan itu juga termasuk wilayah yang sangat <i>sensitive</i> bagi saya pribadi. Maklum ruangan yang megah dengan arsitektur kuno dengan kepungan penjagaan yang cukup ketat, bisa-bisa membuat tamu jadi</p>
--	--	---

		<p>kikuk dan kurang nyaman.</p> <p><i>KGRB/VII/150</i></p> <p>“Kanjeng Prabu – demikian saya biasa memanggil beliau – ada apa sih sebenarnya kok Anda begitu bersemangat mengundang saya; padahal semua orang tahu, saya ini tidak punya apa-apa; lalu apa manfaatnya mengundang saya di tempat yang sangat terhormat ini?” Tanya saya berterus terang.</p> <p>“Itulah persoalannya. Semua rakyat Republik Badut sudah tahu bahwa negeri ini sedang berada di bibir jurang. Lengah sedikit, kita semua kecemplung di dalamnya.” Tukas Presiden sambil memperbaiki tempat duduknya.</p> <p>“Lha, apa hubungannya dengan saya?”</p> <p>“Ada. Bahkan penting sekali. Sudah begitu banyak analisis dari para pemikir dan cendikiawan yang muncul deras di kolom-kolom surat kabar dan majalah. Bahkan dalam dialog interaktif di TV, tetapi semua hanya menyentuh perkara abstrak dan agak sulit dirunut konklusinya. Terus terang perkara korupsi, yang bahkan sudah menjalar-jalar dari Sadang sampai Merak Oke, perkara profesionalisme pelayanan publik yang kedodoran, dosa birokrasi, kriminalitas, pelanggaran HAM, dan lain-lain yang membuat bangsa kita sangat rendah citranya di mata negeri-negeri lain, mana bisa diselamatkan kalau dari 10 orang ahli, 9 di antaranya hanya menjadi pengamat. Menjadi analis....”</p> <p>“Mau Anda Tuan Presiden, eh, Kanjeng Prabu?”</p> <p>“Mari berbuat. Seperti iklannya anak muda yang jadi ketua umum partai politik itu loh. Jadi, saya melihat Anda punya kans untuk berbuat dalam konteks yang berbeda dan tidak sama dengan semua analisis yang bertebaran itu.”</p> <p>“Konkretnya?”</p> <p>“Tolong saya diberi masukkan. Masukkan yang beda dan baru. Mungkin agak gila, ngaco atau semacamnya. Itu tidak masalah. Yang penting, gagasan itu dapat menciptakan perspektif baru. Yang penting lagi, Anda perlu memberikan argumen yang masuk akal di pikiran saya. Mengapa begini, mengapa begitu...”</p>
--	--	---

		<p><i>KGRB/VIII/150</i> Saya mengambil sepotong pisang goreng, mengunyahnya sesaat. Lalu menyeruput kopi panas yang rasanya, jujur hati, lebih huenak dan sedap dari pada kopi saya di rumah. Saya mencoba menebar pesona ke beliau lewat kembangan review atau semacam silat dan gerakan-gerakan intro, pra-kondisioning, begitu.</p> <p><i>KGRB/IX/152</i> “Fakta bahwa birokrasi yang bekerja tidak sesuai dengan fungsinya adalah soal kuno. Itu artinya, pejabat disumpah, bahkan dengan kitab suci, tidak ada artinya apa-apa. Hukum dan undang-undang terus ditelurkan, tidak juga ada pengaruhnya pada perilaku kita semua”.</p> <p>“Pertanyaannya, mengapa kita suka ngomong yang tinggi-tinggi tapi kelakuannya begitu rendah? Jawabannya ada pada budaya kita sendiri: budaya tidak punya rasa malu. Janji pertemuan jam 12 datang jam 13 atau 14, tidak masalah. Tidak ada sanksi moral, tidak ada sanksi sosial. Orang pun menganggap kesepakatan dan komitmen hanya penghias bibir. Janji mau jadi pemimpin yang oke punya, eh, yang terjadi justru sebaliknya. Janji tidak akan korupsi eh, malah nguras uang negara sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak? Lah wong nyuri duit milyaran dan jutaan hukumannya sama, maka lebih baik nyuri banyak sekalian.</p> <p>“Intinya, antara omongan dan kelakuan kita boleh tidak sama. Boleh tidak malu. Boleh menganggap angin lalu dan tidak lama lagi toh masyarakat segera melupakannya. Kalau anak-anak, calon generasi kita menonton kenyataan seperti itu, bagaimana mereka tidak bingung membedakan mana yang salah, mana yang benar. Saran Romo Mudji sepertinya mudah sekali, bereskan dulu birokrasi dan ganti dengan anak-anak muda yang idealis supaya keadaan segera berubah. Didik anak-anak sejak dini agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak salah. Tapi mereka akan kembali menyaksikan orang tua mereka yang tak bisa jadi teladan. Tak dapat dipercaya omongannya. Sehingga bukan mustahil bila mantan mahasiswa pun setelah jadi pejabat toh lama-lama, setelah tahu nikmatnya duit,</p>
--	--	---

		<p>kegoda juga.”</p> <p>“Lalu, apa kita harus skeptis dan membiarkan bangsa ini terperosok ke dalam jurang keterpurukan?” Tanya Presiden membuat saya tertegun. Setengah kaget. Saya pikir saya sedang ngomong sendiri. Seperti kebiasaan sehabis mandi, menemukan ide-ide baru langsung saya ngoceh untuk menata diksi dan rangkaian ide di depan cermin.</p> <p>“ Ya enggak dong, Kanjeng Prabu. Saran saya, pilih salah satu pulau dari negeri kita yang dinilai aman dan terlindung. Isi pulau itu dengan anak-anak dari usia balita hingga lulus perguruan tinggi. Tutup semua akses, terutama dari media Republik Badut. Maksudnya agar anak-anak itu tidak pernah menyaksikan berita atau tayangan orang-orang tua mereka yang di rumah alim dan berwibawa, ternyata ketangkep basah oleh komisi anti korupsi lalu digelandang seperti penjahat jalanan.”</p> <p><i>KGRB/X/153</i></p> <p>Presiden nampak memasang telinga lebih serius. Menatap duduknya lebih sungguh-sungguh. Saya pun melanjutkan.</p> <p>“Harus dilakukan sebuah revolusi, anak-anak tidak boleh berhubungan dengan orang tua atau saudaranya. Semua. Mereka berangkat dari nol kilometer menyongsong lahirnya era Republik Badut yang sama sekali terpisah dari generasi sebelumnya. Generasi yang tidak sanggup menyelematkan bangsanya. Bekali mereka dengan moral, tata nilai dan pengetahuan sesuai yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini sehingga mereka dapat tampil sebagai manusia Republik Badut yang seutuhnya, bangsa yang seutuhnya. Kalau perlu dapat mengantar bangsa ini menjadi bangsa yang tingkat martabat dan kebudayaannya paling oke di seluruh dunia. Ingat Anda pasti pernah mendengar atau membaca buku berjudul “Arus Balik” kan? Di suatu masa nanti, arus balik itu akan terjadi bahwa bangsa besar di zaman dulu, zaman peradaban para Atlantis dan Lemurian pernah berjaya di wilayah yang sekarang disebut Republik Badut ini, bukan isapan jempol belaka. Semua kejayaan itu akan kembali ke bangsa kita. Tidak akan ada lagi istilah Amerika polisi dunia. China raksasa ekonomi dunia dan sebagainya. Yang ada Republik Badut pemimpin bangsa-</p>
--	--	---

		<p>bangsa di dunia.</p> <p>“Edan! Itu namanya pemusnahan peradaban...” Pekik Presiden. Saya tidak kaget. “Lho katanya, mau yang gila?” Tanya saya agak <i>ngeyel</i>, sudah capek berbusa-busa malah tak ada apresiasi sama sekali.</p> <p>“Iya, begitu sih begitu, tapi ya jangan begitu...” kata Presiden.</p> <p>“Oke, kalau itu kurang berkenan, situasinya dibalik saja: anak-anak biar tinggal dan belajar di Republik Badut sampai mereka besar dan dapat memimpin negeri ini, sedangkan semua rakyat yang bukan anak-anak, dikarantina di sebuah pulau atau tempat khusus yang seluruh aksesnya ditutup. Gimana?”</p> <p>“Apa? Sama saja. Anda tahu kan, membunuh seekor nyamuk saja saya berpikir seribu kali. Memisahkan anak-anak dan orangtuanya, sungguh kekejaman yang sulit diterima akal sehat. Apakah itu hanya satu-satunya cara untuk menyelematkan generasi penerus bangsa ini?” tanya Presiden dengan penuh harap.</p> <p>“Bukan satu-satunya cara, tapi dua cara yang dapat dipilih salah satunya!” kata saya dengan nada pelan Namun, tandas.</p> <p><i>KGRB/XI/155</i></p> <p>Saya pulang sore hari dengan perasaan ringan. Saya dengar kabar gundah hati Presiden kambuh lagi. Beliau hanya termangu-mangu di kamar pribadinya. Tidak mau makan, minum, atau tidur. Tidak mau ditemui tamu siapa pun dan dari mana pun.</p> <p><i>KGRB/XII/155</i></p> <p>Saya mencoba menghubungi beberapa teman dan meminta saran mereka via SMS. Sebagai besar SMS yang masuk inti sarannya sama. Kurang lebih seperti ini, “Rumit amat sih. Kamu bilang aja ke dia, salah satu cara untuk menyelematkan bangsa ini cukup gampang dan tidak perlu melakukan pemusnahan peradaban; yaitu: suruh dia mundur, secepatnya. Makin cepat makin baik. Cuma itu. Karena jurang yang dia maksud itu adalah dirinya sendiri. Proyeksi dari ketakutan-ketakutannya. Suer!!!”</p> <p><i>KGRB/XIII/156</i></p>
--	--	---

		<p>Kini, saya yang ketularan gundah hati. Masygul dan ngilu. <i>KGRB/XIV/156</i></p> <p>Adakah satu atau sebagian di antara Anda yang sanggup menyampaikan itu kepada beliau? Saya sungguh berterima kasih kalau Anda mau membantu saya. Sebagai pihak yang tahu artinya profesi, saya sungguh tidak mau terjebak dalam permainan emosi dan perasaan yang agak sensitif ini. Mau, kan? Okelah kalau begitu! Terima kasih atas jawabannya.</p> <p><i>KGRB/XV/156</i></p> <p>Maka saya segera mengirim SMS balik ke beberapa teman yang memberi saran itu, “Akan lebih bagus dan adil cerita ini kalau kalian sendiri yang menyampaikan saran itu kepada Presiden. Itu SMS dari semua pembaca ke saya setelah mereka mencermati isinya. Kalian tahu berapa jumlah SMS itu? Hampir sekian puluh ribu kali lipat dari kalian. Jadi secara voting, kalian harus mengakui fakta ini. Sekian, salam sukses buat kalian semua!”</p> <p><i>KGRB/XVI/156</i></p> <p>Saya makin gundah hati. Bukan hanya risau galau, tetapi makin kacau-balau. Persoalannya adalah pertemuan dengan Presiden itu memang tidak pernah ada dan tak pernah terjadi. Itulah!</p>
14.	<i>Andai Gue Jadi Gubernur DKI (AGJGDKI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori bantan - Satir <p>Aparatus & represif/<i>AGJGDKI/I/157</i></p> <p>Sejak zaman <i>baheula</i> hingga kini, sama saja, orang yang menjagokan selalu lebih gelisah ketimbang orang yang dijagokan. Buktinya itu terjadi waktu itu. Setidaknya itu yang saya alami ketika seseorang dari daerah tiba-tiba maju untuk ikut pilgub DKI 2012. Wah enak saja saya nulis <i>cas-cis-cus</i> begina-begitu, maksudnya memberi semangat dari balik layar. Tapi dalam praktiknya, hati saya berdebar kencang. Antara harapan dan kecemasan campur aduk jadi satu. Pedih dan gembira menyergap bersama-sama. Bayangkan sendiri bagaimana rasanya.</p> <p><i>AGJGDKI/II/157-158</i></p> <p>Maka saya tulis sebuah artikel yang judulnya seperti di atas dan isinya seperti di</p>

		<p>bawah ini, bukan apa-apa, mulanya memang saya maksudkan untuk memberi semacam masukan pada jago saya itu, salah seorang putra bangsa Republik Badut yang dengan gigih dan berani maju mencalonkan diri jadi gubernur DKI. Siapa tahu tulisan sederhana yang saya buat dapat membuat beliau makin berkeyakinan bahwa tidak di daerah tidak di ibukota, yang namanya manajemen manusia dan wilayah, sama saja. Yang membedakan hanya kasusnya. Jadi kenapa harus ragu dan surut langkah oleh berbagai “terror” yang dialamatkan kepadanya.</p> <p><i>AGJGDKI/III/158</i></p> <p>Untunglah, orang yang saya maksud itu, dengan <i>style</i>-nya yang khas dan tanpa beban itu ternyata justru menjadi “terror” bagi calon-calon lain, apalagi bagi sang petahana. Dan ketika hasil perhitungan suara putaran pertama dianggap belum shahih, maka perlu dilakukan putaran kedua untuk memastikan aspirasi penduduk DKI. Dengan ringan dan santai orang yang saya maksudkan itu melewati semua proses sampai akhirnya petahana mengakui dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Jantung saya nyaris mau copot karena gembira melihat tampilan akhir angka versi hitung cepat.</p> <p><i>AGJGDKI/IV/158</i></p> <p>Itulah seninya kalau kita menjagokan seseorang. Kita lebih sibuk, lebih gelisah, lebih panik. Lebih uring-uringan, lebih nyut-nyut dari orang-orang yang kita jagokan. Tapi ketika semua kecemasan itu berakhir, mungkin saja kita lebih bahagia dari yang kita jagokan. Siapa tahu, lho begitu. Atau jangan-jangan itu hanya terjadi pada diri saya sendiri. Ah, biarlah, yang sudah ya sudah.</p> <p><i>AGJGDKI/V/158</i></p> <p>Sebagai salah satu kenangan, inilah artikel yang saya tulis dua minggu sebelum pilgub DKI berlangsung. Mari kita simak kisahnya.</p> <p><i>AGJGDKI/VI/158</i></p> <p>“<i>Bener nih gue kagak bo’ong,</i>” begitu kata Bang Odi mengawali pembicaranya ketika kami bertemu. Selama ini dia dikenal suka ngelantur kalau bicara; tetapi ketika</p>
--	--	---

		<p>wacananya masuk ke topik yang lagi anget, yakni soal pemilihan gubernur, si abang yang nyentrik ini langsung aja bersemangat. Intinya dia juga punya cita-cita soal Jakarta yang menurutnya saat ini jauh dari harapan masyarakat. Apa harapan masyarakat itu?</p> <p><i>AGJGDKI/VII/158-159</i></p> <p>Sebagai putra Betawai asli, Bang Odi mengaku juga punya impian; setidaknya impian bagi warga Betawi umumnya. Saya sih percaya saja, apakah dia hanya sekadar mengklaim atau memang benar-benar menjadi “Penyambung lidah” warga Betawi, tak penting lagi untuk diperdebatkan. Yang menarik dan terpenting adalah impian apa saja yang akan dia lakukan seandainya dia menjadi Gubernur DKI.</p> <p><i>AGJGDKI/VIII/159</i></p> <p>“Santai aja, Bang. Sebenarnya apa saja sih gagasan yang ada di kepala Abang soal Gubernur DKI, itu? Tanya saya.</p> <p>“Andai gue jadi Gubernur DKI?” seperti mengulang pertanyaan saya. Bang Odi lalu membuka-buka catatan-catatannya yang terpisah-pisah. Ada yang dicatat di kertas bekas bungkus rokok, ada pula di kertas yang sudah agak kumal. Tapi sepenuhnya saya, semua itu terkumpul rapi dan komplet di dompet jadul miliknya yang dulu suka buat tempat tembakau dan kertas sigaret.</p> <p><i>AGJGDKI/IX/159</i></p> <p>Setelah menjelaskan satu per satu impiannya itu, akhirnya saya susun di bawah ini sesuai urutan prioritas.</p> <p>Pertama, andai benar-benar dia jadi Gubernur, maka pertama-tama yang akan dilakukannya pada hari pertama dia masuk kerja, mengundang rapat orang-orang bawahannya. Seperti wakil Gubernur, Sekretaris, staf ahli, pejabat eselon sesuai jenjang, kepala kantor wilayah, kepala dinas, kepala sub dinas yang orang sering bilang sudan sudin itu, hingga kepala dewan-dewan yang ada, Intinya dia mau supaya berapa besar APBD dan peruntukannya (tentu saja sudah disetujui DPRD, artinya ya mengacu anggaran tahun sebelumnya) diumumkan secara terang benderang kepada</p>
--	--	--

		<p>media massa dan publik. Lalu... dia mau dibuka lagi <i>file</i>: apa saja program dan proyeksi tahun-tahun sebelumnya dan bagaimana hasil nyata yang bisa dilihat saat ini. Lemparkan semua itu ke masyarakat. Biarkan masyarakat menilai dan mengevaluasi, sesuaikan antara rencana dan pelaksanaannya.</p> <p><i>AGJGDKI/X/160</i></p> <p>Kedua, memulai awal gebrakannya, Bang Odi mau bikin agenda: mengundang orang-orang “gila” baik dari dalam negeri maupun dari luar. Mereka adalah orang-orang kreatif yang selalu berpikir beda. Mereka bisa saja dari kalangan arsitek, ekonom, pengusaha, seniman, rakyat kecil sekali, tak terkecuali pelawak dan kartunis. Nah dari orang-orang seperti ini, Gubernur pingin sekali mendengar langsung apa impian mereka tentang Jakarta.</p> <p><i>AGJGDKI/XI/160</i></p> <p>Ketiga, solusi soal kemacetan Gubernur sudah punya platform, yaitu mereaktualisasikan lalu lintas air. Semua kali yang di zaman Olanda (Belanda) berfungsi sebagai lalu lintas air, harus dikembalikan lagi. Caranya bagaimana itu soal nanti. Sebelum itu dilaksanakan, pengerukan kali, perbaikan irigasi, pemulihan kualitas air harus juga diberesи lebih dulu, berapa pun biayanya, kalau perlu nombok.</p> <p><i>AGJGDKI/XII/161</i></p> <p>Keempat, soal solusi banjir, Gubernur juga sudah punya resep. Secara fitrah alamiyah air selalu menuju ke daerah atau permukaan yang rendah, maka jalan keluar yang paling logis adalah menguruk Jakarta sehebat-hebatnya supaya posisi geografis Jakarta lebih tinggi dari Bogor dan Puncak. Selanjutnya <i>kagak</i> ada lagi keluhan kiriman banjir dari Bogor, dari Puncak!</p> <p><i>AGJGDKI/XIII/161</i></p> <p>Kelima, warga miskin kota harus diberdayakan. Tidak usah malu meniru negeri tetangga. Caranya dengan menerbitkan Perda Regulasi: bagi warga yang sudah maju atau lumayan maju harus berhenti dulu. Berhenti untuk menunggu warga miskin kota mendapatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan mencapai titik di mana warga</p>
--	--	---

		<p>maju berada. Setelah semuanya berada dalam kilometer yang sama, maka deregulasi diberlakukan. Mereka boleh bersaing secara <i>fair</i> dan bebas.</p> <p><i>AGJGDKI/XIV/161</i></p> <p>Keenam, sektor pariwisata tak perlu khawatir. Semua hiruk pikuk kegiatan memberesinya Jakarta yang disebutkan di atas itu pasti heboh dan layak dijual sebagai paket wisata. Selain itu meniru Singapura juga tak perlu malu, yaitu memberi ruang gerak dan ekspresi berbagai upacara keagamaan. Kalau Singapura punya tak kurang dari 33 hari besar keagamaan dalam setahun, maka Jakarta harus dua kali lipatnya. Semua bisa menarik minat warga dari luar Jakarta atau luar negeri untuk datang dan menonton itu sebagai acara <i>tour</i> keagamaan. Bayangkan hotel, mal, dan pusat-pusat kerajinan, kesenian akan juga ikut makmur.</p> <p><i>AGJGDKI/XV/162</i></p> <p>Ketujuh, ratanya kemakmuran otomatis akan mereduksi kecemburuhan sosial, kriminalitas dan diskriminasi etnik. Kemakmuran yang merata juga akan otomatis mengantarkan warga cinta ibadah, kesenian, dan perilaku adab lainnya.</p> <p><i>AGJGDKI/XVI/162</i></p> <p>Kedelapan, kalau Jakarta sudah benar-benar makmur, adil, dan sejahtera copot saja predikat sebagai ibukota negara. Suruh wakil rakyat bikin poling ke kota mana sebaiknya ibukota negara akan dipindahkan. Kalau di Amerika bisa memindahkan New York City ke Washington DC, mengapa Indonesia tidak bisa melakukan itu; memindahkan dari Jakarta ke Kaliwungu, misalnya. Atau ke Semarang atau ke Makassar, Malang, Surabaya atau Palangkaraya sekalipun. Pada akhirnya Jakarta tetap akan menjadi kota besar, dan ibu kota yang baru juga pasti menjadi kota yang tak mungkin semakin mengecil.</p> <p><i>AGJGDKI/XVII/162</i></p> <p>Bang Odi tampak seperti ngomong pada dirinya sendiri. “Mengapa ana perlu mewacanakan Jakarta? Padahal ia hanya salah satu saja dari kota di Republik Badut?” Ia jawab sendiri pertanyaan itu, “Sejelek-jeleknya Jakarta, ia miniatur Republik</p>
--	--	---

			<p>Badut, <i>Cing! Ape</i> yang bagus <i>ape</i> yang buruk dari itu kota Jakarta, akan jadi ukuran dan model kota-kota lain di negeri ini. Nah <i>liat</i>. Jakarta lagi ribut soal MRT, Surabaya tanpa banyak <i>cingcong</i> udah mulai dan kagak lama lagi masyarakat udah bisa menikmatinya. Itulah <i>gunanye</i> Jakarta, jadi pemicu semangat kota-kota lain di daerah!"</p> <p><i>AGJGDKI/XVIII/162</i></p> <p>Itulah platform Bang Odi. Orisinal. Jadi kesimpulannya, kalau sekadar mau bikin perubahan di Jakarta itu mah soal kecil, tapi bikin perubahan yang isi perubahannya itu bikin warga tambah maju, sejahtera, adil, dan makmur, itu yang <i>kagak</i> gampang, <i>coy!</i> Begitu katanya mengakhiri percakapan.</p>
15	<i>Menunggu Godot yang Datang Codot (MGyDC)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori keganjilan - Satir 	<p><i>Republik Badut adalah satu kasus, Republik Indonesia adalah kasus lain; tetapi negeri dengan nama dan lagu kebangsaan Hedonesia Raya, sungguh tak terpikir ada!</i></p> <p>Aparatus & represif/<i>MGyDC/I/178</i></p> <p>Hedonisme adalah salah satu paham atau ideologi yang dalam bahasa gaulnya kurang lebih berbunyi seperti ini, "Kecil dimanja, muda foya-foya, dewasa kaya raya, mati masuk surga!. Itulah yang dilukiskan dalam buku wasiat yang saya temukan di literatur kuno, bertahun antara 2004-2014 ditulis oleh seorang mantan polisi sebuah negeri yang bernama Republik Badut. Jangan lupa, saat Anda membaca tulisan ini, penanggalan menunjukkan angka Tahun 2050.</p> <p><i>MGyDC/II/178</i></p> <p>Buku yang berjudul "Menunggu Godot yang datang Codot" ini tidak tebal-tebal amat. Halaman pertama, di bawah judul dalam, saya mendapati kaimat pendek yang dimaksudkan sebagai <i>oneliner</i>. Bunyinya, "<i>Kacian deh, lo!</i>". Hanya itu. Hah! Apa maksudnya? Daripada direbitkan dengan berbagai pertanyaan, saya mulai saja langsung ke isi. Tulisan dimulai dengan kalimat-kalimat sebagaimana Anda lihat di bawah ini. Saya memulai dari bab Pengantar dari Penulis.</p> <p><i>MGyDC/III/179</i></p>

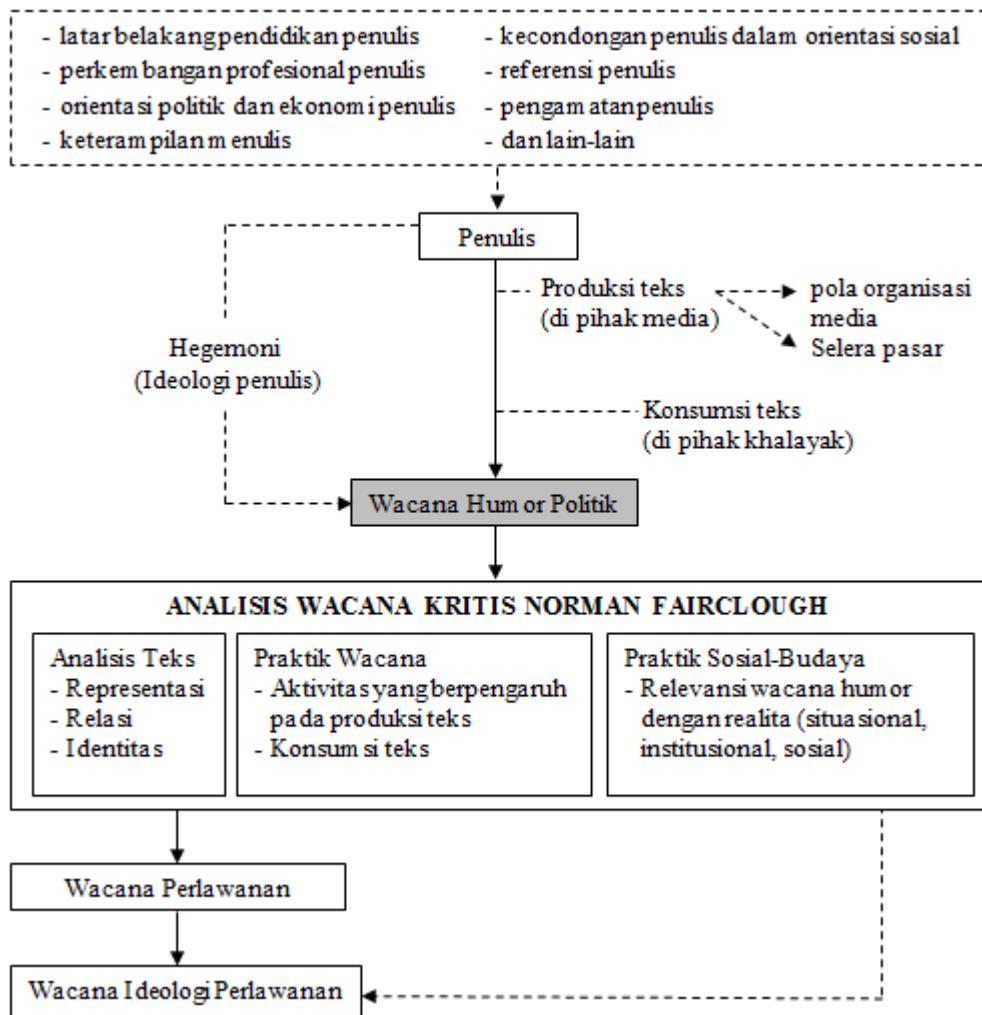
		<p>Hallo pembaca, bagaimana kabar Anda? O ya, sebelum ke mana-mana perkenalkan nama saya Adygank Adigoonk Adygoenha! Orang sering menyebut saya A3, Mr. A3! Pekerjaan saya politikus; iya, ini sejurnya. Bodo amat orang bilang politikus itu bukan pekerjaan melainkan hanya media aktualisasi diri, tapi menurutku tetap saja pekerjaan.</p> <p><i>MGyDC/IV/179</i></p> <p>Yang jelas saya masuk ke partai politik, pake modal. Mencalonkan diri jadi anggota parlemen juga pake modal; jadi bila dikorelasikan dengan hukum ekonomi, pas toh? Barangsiapa berkegiatan di suatu bidang tertentu di dalamnya memerlukan modal uang, maka di situlah kaidah bisnis berlaku. Bahkan kalau perlu, dengan modal sekecil-kecilnya bisa mendapatkan untung sebesar-besarnya.</p> <p><i>MGyDC/V/179</i></p> <p>Bukannya menyombong, sebagai anggota parlemen yang bertugas di komisi X (baca: eks; bukan sepuluh), saya berhak mendapatkan <i>advantage</i> sebagai warga kelas terhormat; itulah makanya saya lebih suka pakai istilah parlemen bukan wakil rakyat, karena <i>de facto</i>, kerja saya memang tidak harus berkaitan dengan kepentingan rakyat. Itu fakta konkret yang harus dipahami dulu, soal terminologi ini perlu dituntaskan dulu sebelum menuju perdebatan yang bertele-tele, <i>okay</i>?</p> <p><i>MGyDC/VI/179</i></p> <p>Ada memang suara-suara berisik yang selalu memojokkan kami, eh saya, bunyinya begini: wakil rakyat kok nggak pernah nyambung sama aspirasi rakyat. Gimana, sih? Ya, jelas dong mereka kan tidak pernah tahu apa yang ada di kepala dan hati saya; apalagi mengenai visi, misi, dan motivasi saya bergerak di bisnis ini. Ya, parpol dan politikus ini saya sebut sebagai bidang bisnis. Jelas?</p> <p><i>MGyDC/VII/180</i></p> <p>Di Republik Hedonesia Raya – negeri ini kalau dilihat dari satelit atau foto udara selalu samar karena tertutup kabut putih yang berasal dari asap cerutu para bandar, cukong, dan sekutunya dan cerutu itu simbol etabilisme abadi soal <i>positioning</i>,</p>
--	--	---

		<p>segmentasi, dan kelas mereka – saya merasa hidup nyaman; karena filosofinya jelas; siapa kuat dia yang dapat. Di negara ini kita semua berpacu untuk terus berkompetisi. Para pemenang, tak peduli gimana trik dan etika, dipuja dan diapresiasi tinggi sekali; sementara para pecundang, harus tahu diri, menyingkir ke pinggir. Atau kalau masih punya kehormatan, bunuh diri!</p> <p><i>MGyDC/VIII/180</i></p> <p>Kompetisi itu bagi saya seperti ladang karusetra, tempat para satria dan musuh bertarung. Seperti halnya di ruang sidang, kami, saya khusunya, tak beda pengacara yang harus membela klien sehebat-hebatnya. Tak penting apakah klien itu benar atau salah, pengacara yang tahu artinya profesi di kepalanya hanya ada kata: menang, menang, dan menang! Kompetisi itu juga persis ideologi bisnis yang paling primitif sekalipun, targetnya hanya satu: profit! Kalau ingat ini semua, saya sering sedih melihat orang-orang romantis, mereka yang sering menyebut kaum idealis, yang menjustifikasi kami, khusunya saya, sebagai makhluk yang tidak tahu artinya idealisme. Bagaimana bisa? Semua langkah dan sepak terjang saya di posisi saya adalah karena idelisme. Masalahnya saja, idelisme kita yang berbeda!</p> <p><i>MGyDC/IX/181</i></p> <p>Itu soal kemanusiaan, empati, solidaritas sosial, keberpihakan pada kaum lemah, apa urusannya dengan saya? Bagaimana saya harus memberi peluang pada itu, sementara di posisi saya adanya hanya perang. Perang adalah di mana kalau kita tidak membunuh akan terbunuh. <i>To be or not to be</i>. Untuk <i>survive</i>, saya harus menyingkirkan semua potensi musuh yang setiap saat bakal menumbangkan saya. Jadi terus terang saja pintu tutup rapat-rapat untuk urusan melankolia di atas. Saya harus <i>kekeuh</i> pegang prinsip, dengan menjadi pemenang, maka saya mendapatkan kehormatan. Dengan mendapatkan kehormatan maka saya akan mendapatkan keistimewaan; dengan keistimewaan sata layak mendapatkan gelar warga teladan dari warga. Dengan demikian segala fasilitas kemudahan dan kemewahan melekat secara otomatis ke dalam diri saya.</p>
--	--	--

		<p><i>MGyDC/X/181</i></p> <p>Hedonisme sebagai <i>way of life</i>. Itu suci bagi kami, khususnya bagi saya; sama saja dengan pandangan hidup negeri tetangga, kalau tidak salah sebut Pancasila, bagi Indonesia. Untuk bisa hidup hedonisme secara murni dan konsekuensi, kami harus berjuang mati-matian. Maksudnya, harus tampil secara <i>high profile</i>, tak punya malu, membunuh hati nurani sendiri, egois – baik individu maupun kelompok (partai) – piawai berbohong (sampai mesin <i>lie detector</i> takhluk), pandai berakting (hingga rakyat ikut menitikkan air mata saat kita curhat), suka berderma (orang-orang sinis mengatakan kami <i>money politic</i>), lihai dalam persekongkolan alias konspirasi dan masih banyak lagi strategi dan teknik yang orang-orang iri sering menyebutnya: busuk dan jahat.</p> <p><i>MGyDC/XI/182</i></p> <p>Tetapi kami (saya dan teman-teman yang sepaham) sadar betul bahwa posisi di parlemen ini memang sangat istimewa. Kewenangan untuk melegislasi atau tidak melegislasi suatu RUU menjadi UU ternyata kini berharga sangat mahal. Kalau novelis kondang Ernest Hemmingway pernah bangga satu kata dari novelnya dihargai sekian dollar AS oleh penerbit, kami hanya ketawa. Karena satu kalimat bahkan dua kata yang masuk atau harus dihilangkan di alinea atau pasal rancangan undang-undang saja, orang mau bayar hingga milliaran rupiah. Di muka lagi. Belum lagi gaji dalam bentuk THP, <i>take home pay</i>, dan kejutan-kejutan lain yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya.</p> <p><i>MGyDC/XII/182</i></p> <p>Mengapa ini nyaman bagi kami, saya khususnya, keran institusi atau lembaga lain yang ada seperti eksekutif, yudikatif, bahkan pers, sudah satu nada dan irama dengan filosofi kami semua. Kalu toh ada kasus-kasus mencolok yang terkait di lembaga kami atau lembaga setingkat di eksekutif yudikatif, pers sudah tahu apa yang harus mereka lakukan; ya, mereka segera menyajikan berita-berita kecil seperti orang mencuri buah cokelat, sandal jepit, kapuk, dan sebagainya menjadi berita besar dan</p>
--	--	---

		<p>dramatis sehingga orang berpaling ke sana. Bagaimana tidak? Pencuri sandal jepit dituntut jaksa dengan hukuman 5 tahun penjara, kan itu langsung membuat orang bergunjing penuh semangat. Beda dengan negeri tetangga Indonesia; negeri hebat itu lewat lembaga yang disebut KPK, sekarang sedang konsen memburu penjahat di balik kasus-kasus besar yang merugikan negara.</p> <p><i>MGyDC/XIII/183</i></p> <p>Indonesia, biarlah berjaya dengan komitmen dan supremasi hukumnya; negara saya, Hedonesia raya, biarlah tetap sebagai negara saya. <i>The right or wrong is my country. Hidup Hedonesia!!!***</i></p> <p><i>MGyDC/XIV/183</i></p> <p>Pengantar dari penulis itu selesai saya baca. Terus terang saya tak kuat untuk langsung melanjutkan halaman-halaman berikutnya. Saya butuh waktu untuk itu. Saat ini saja keringat dingin mengucur keluar dari kening dan kedua lengan saya. Saya benar-benar gemetar ketakutan.</p>
--	--	--

Lampiran 5. Skema Analisis



Penjelasan:

Wacana humor politik merupakan salah satu jenis media massa yang dapat digunakan sebagai perantara untuk mengungkap ideologi penulisnya. Thompson (2003: 60-61) menyatakan ideologi tidak hanya didapatkan dalam wacana tentang ideologi. Ideologi sebagai praktik yang beroperasi dalam proses pemproduksian makna dalam kehidupan sehari-hari, sebaliknya, makna dimobilisasikan agar bisa mempertahankan hubungan-hubungan kekuasaan. Ideologi dapat menipu hubungan dominasi dan dapat memberikan isyarat legitimasi terhadap sesuatu yang disembunyikan, salah satunya penyembunyian ideologi perlawanan dalam bahasa wacana humor politik.

Penulis menuangkan idenya melalui bahasa humornya yang kurang lebih dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan penulis, perkembangan profesional penulis, orientasi politik dan ekonomi penulis, keterampilan menulis, kecondongan penulis dalam orientasi sosial, referensi penulis, pengamatan penulis, dan lain-lain yang semacamnya (Eriyanto, 2001: 317-318). Seperti sebuah berita, buku humor juga melalui perjalanan panjang sebelum akhirnya dicetak dan dibaca oleh khalayak. Wacana humor yang telah diwarnai oleh ideologi penulis akan mengalami penyesuaian dengan ideologi editor, pola organisasi media, dan selera pasar (wacana yang diminati khalayak pembaca). Namun, faktor utama dari pembentukan wacana adalah individu penulis itu sendiri.

Wacana humor politik yang telah dicetak dan dipasarkan, dikonsumsi oleh khalayak. Untuk dapat mengupas ideologi yang terkandung di dalamnya, digunakan pisau analisis wacana kritis Norman Fairclough yang memiliki tiga dimensi, yakni analisis pada dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan praktik sosial budaya, karena wacana humor politik yang berada di tangan khalayak sesungguhnya merupakan konstruksi realitas dan telah melewati serangkaian proses panjang. Melalui analisis wacana kritis Norman Fairclough ditemukan wacana perlawanan yang di dalamnya mengandung wacana ideologi perlawanan itu sendiri. Wacana ideologi perlawanan yang tersebunyi dalam wacana humor politik berjudul "*Republik Badut*" karya Darminto M. Sudarmo.